



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan...

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2024).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

11. Badan ...

11. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Daerah.
12. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD oleh Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan rencana strategis oleh Perangkat Daerah;
- c. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Uraian sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :
 - a. bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. bab II yang memuat gambaran umum Daerah;
 - c. bab III yang memuat visi, misi tujuan dan sasaran;
 - d. bab IV yang memuat program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. bab V yang memuat penutup
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala BAPPELITBANGDA melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025



ROBBY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,

LYNDA DEISYE WATANIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah daerah. Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional. Untuk mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain sebagai dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 5 tahun.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam peraturan daerah ini, menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah terpilih, serta menjabarkan program-program pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun.

PJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan memperhatikan RPJM Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan.

Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 memedomani pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJN) Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sulawesi utara 2025-2029, dalam hal penyusunannya dilakukan secara simultan terkoordinasi. Serta memedomani dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Sulawesi utara, maupun Kabupaten Minahasa, demikianpun dengan memperhatikan dokumen RPPLH/KLHS Provinsi Sulawesi Utara juga Kabupaten Minahasa serta dokumen sektoral lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
MINAHASA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

URAIAN RPJMD TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya sistematis dan terencana untuk mengubah kondisi bangsa menjadi keadaan yang makin lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat pada umumnya dan berkelanjutan. Pembangunan perlu direncanakan agar terarah, terpadu, dan terkordinasi ditingkat pusat sampai di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah tergambarkan dalam satu dokumen yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dalam rangka memberikan arah dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, maka penyusunan RPJMD menjadi sangat penting.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur tata ruang yaitu RTRW kurun waktu 20 tahun.

Bupati (ROBBY DONDOKAMBEY) dan Wakil Bupati (VANDA SARUNDAJANG) terpilih untuk masa jabatan Tahun 2025-2030 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Sehubungan dengan itu maka pemerintah Kabupaten Minahasa berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyusunan didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah, kebutuhan Masyarakat dan prioritas Pembangunan untuk mengatur arah Pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik.

Dalam RPJMD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Minahasa tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029, maka RPJMD ini memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2025 hingga tahun 2029 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Minahasa menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2025-2029 telah merumuskan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dengan mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Pelaksanaan pengintegrasian melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai alat untuk menjamin kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

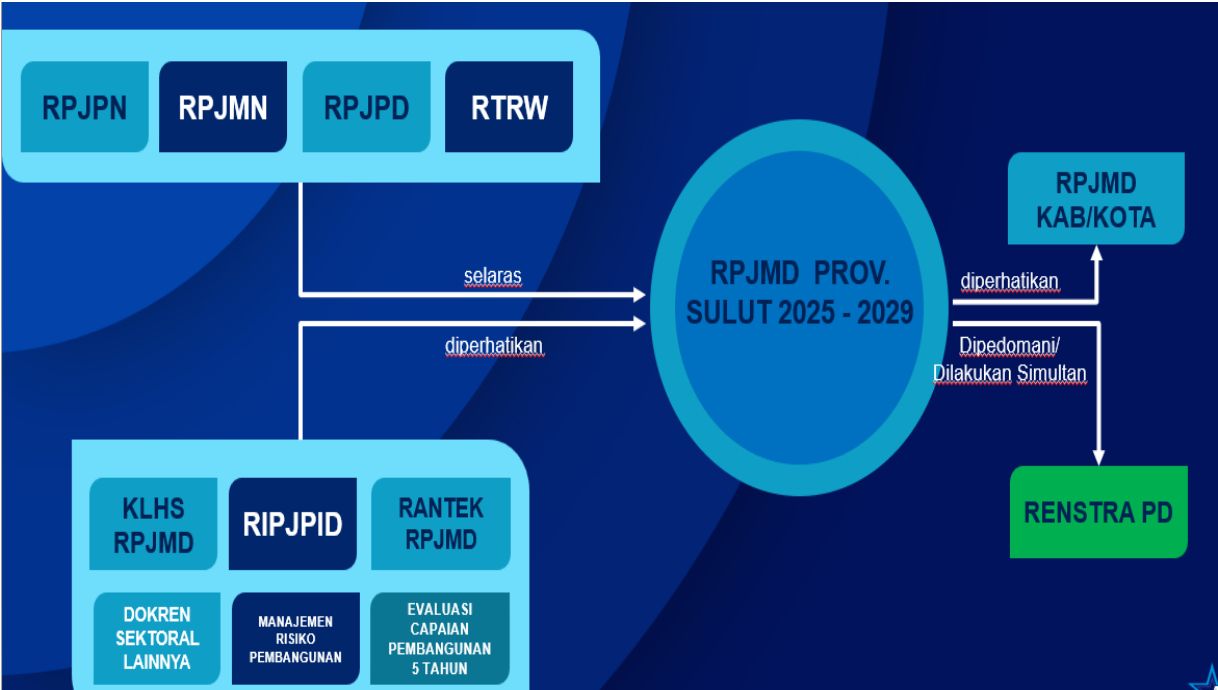
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2024).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumense Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 sebagai bagian yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJM Nasional Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029, dan RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2045. Telaah terhadap dokumen-dokumen tersebut dimaksudkan agar RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 selaras dengan kebijakan Pembangunan nasional dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Penyelarasan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain terutama yang berbatasan dengan Kabupaten Minahasa.

Telaahan dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan sehingga Pembangunan antar daerah menjadi selaras dan bersinergi, serta dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan Pembangunan lainnya seperti pada Gambar 1.1. berikut ini :

Gambar 1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan



RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 disusun untuk menyelaraskan arah kebijakan, dan prioritas pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi. Sesuai dengan amanat pada pasal 160 Permendagri 86 Tahun 2017, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 juga mempedomani Ranperda RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034 melalui penyelarasan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah. Dalam penyusunan dokumen RPJMD ini juga mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana termuat dalam dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025- 2029.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa pada periode Tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman bagi seluruh *stakeholders* baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Bupati (ROBBY DONDOKAMBEY) dan Wakil Bupati (VANDA SARUNDAJANG) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 secara berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Minahasa Tahun 2025-2029 adalah:

- 1. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah, melalui

sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan Pembangunan di Kabupaten Minahasa;

2. Menjadi tolak ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

1.5. Sistematika penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Umum Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Serta Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis.

Bab III. Visi, Misi Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah yang selanjutnya misi dijabarkan kedalam program Prioritas Pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab IV. Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun, mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan serta Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi daerah masing-masing karenanya pembangunan perlu menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah yang tertuang dalam gambaran umum kondisi daerah untuk memberikan potret pada aspek fisik (geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi dan Demografi

1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

a) Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibu Kota Tondano yang dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat Dua di Sulawesi. Secara astronomis letak Kabupaten Minahasa berada pada garis koordinat $124^{\circ} 33' 32,207''$ - $125^{\circ} 4' 16,982''$ BT dan $1^{\circ} 0' 45,81''$ - $10^{\circ} 28' 23,554''$ LU. Luas wilayah Kabupaten Minahasa sesuai beberapa Permendagri tentang batas wilayah Kabupaten/Kota adalah 112.849 ha. Secara Administrasi Kabupaten Minahasa terdiri dari 25 kecamatan, dan 270 desa/kelurahan.

Posisi Kabupaten Minahasa berbatasan dengan beberapa Kabupaten dan Kota yang ada di Wilayah Sulawesi Utara, yaitu :

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi, Kota Manado dan Kota Tomohon;
- Sebelah Selatan : Laut Maluku dan Kota Tomohon;
- Sebelah Barat : Minahasa Selatan dan Kota Tomohon;
- Sebelah Timur : Laut Maluku, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon,

Sebagai salah satu Kabupaten tertua di Sulawesi, Kabupaten Minahasa telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah menjadi beberapa kabupaten dan kota (termasuk Kota Tomohon, Minahasa Utara, dan Minahasa Selatan). Hal ini menunjukkan dinamika perkembangan wilayah ini dan potensi ekonominya.

Dengan batas-batas geografis tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa memiliki posisi yang strategis karena terletak di tengah-tengah Sulawesi Utara, berbatasan dengan kota penting, yaitu Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dan Tomohon, serta memiliki akses ke jalur laut dan darat. Letaknya yang berada di utara Pulau Sulawesi menjadikannya titik perlintasan/transit dan

pusat kegiatan di kawasan tersebut, termasuk jalur lintas ke Minahasa Utara dan Kota Bitung yang merupakan daerah industri dan pelabuhan yang memberikan keuntungan dalam hal aksesibilitas dan distribusi barang dan jasa. Minahasa juga menjadi jalur lintas yang menghubungkan bagian selatan Sulawesi Utara, seperti dari Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow Raya. Jalur Trans Sulawesi yang melintasi Minahasa menghubungkan wilayah ini dengan daerah lain di Sulawesi Utara dan sekitarnya, memudahkan mobilitas penduduk dan barang.

Keunikan lainnya dari posisi Kabupaten Minahasa yaitu memiliki dua garis pantai yang berbeda arah yaitu garis pantai yang menghadap Laut Sulawesi dan Laut Maluku. Hal ini membuatnya menjadi daerah strategis untuk pengembangan sektor perikanan dan perdagangan laut serta pariwisata. Topografi Kabupaten Minahasa pada umumnya berbukit, bergunung, dan dataran yang agak luas, hanya sekitar Danau Tondano, Dataran tersebut dijumpai dalam wilayah Tondano, Remboken, Tompaso, Langowan, dan Kakas, Lereng beragam dari datar hingga sangat curam, Lereng-lereng yang sangat curam dijumpai di dalam wilayah Kecamatan Kombi, Kecamatan Kakas, dan Kecamatan Langowan Selatan. Meskipun sebagian besar wilayahnya berbukit dan bergunung, terdapat dataran rendah yang cukup luas di sekitar Danau Tondano, yang mendukung kegiatan pertanian peternakan dan pemukiman. Potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, menjadikan Minahasa sebagai salah satu daerah pengungkit pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Keberadaan Danau Tondano, gunung-gunung berapi, dan potensi wisata alam pantai maupun pegunungan lainnya menjadikan Minahasa sebagai daerah tujuan wisata yang menarik yang tentunya memberi dampak dalam perekonomian masyarakat. Potensi Ekonomi tersebut nampak dalam pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa yang selang beberapa tahun terakhir berada di atas capaian provinsi Sulawesi Utara, meskipun cenderung melambat setiap tahun.

Dari aspek fisik lingkungan yang mempunyai keterkaitan antar/lintas kabupaten/kota terdiri atas air permukaan, air tanah, geologi, jenis tanah, dan curah hujan. Selanjutnya air permukaan mempunyai pengaruh penting dibandingkan dengan aspek fisik lainnya. Berdasarkan sistem aliran air permukaan, Kabupaten Minahasa berada dalam sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas kabupaten/kota dan DAS utuh satu kabupaten. DAS lintas kabupaten/kota berupa DAS Tondano, sedangkan DAS utuh satu kabupaten terdiri atas DAS Bulu, DAS Buraran, dan DAS Kaweruan. Dari hal tersebut, terdapat kaitan antara aliran permukaan antara Kabupaten Minahasa dengan kabupaten tetangganya.

Selain sistem DAS, Kabupaten Minahasa termasuk dalam dua wilayah sungai terdiri atas Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas yang merupakan wilayah sungai kewenangan pemerintah pusat dan Wilayah Sungai Poigar-Ranopayo yang merupakan wilayah sungai kewenangan pemerintah provinsi. Di dalam Wilayah Sungai ini terdapat beberapa DAS. Hal ini berarti, penurunan kualitas lingkungan DAS/Wilayah Sungai yang ada di Kabupaten Minahasa akan sangat mempengaruhi wilayah sekitar, terutama resiko terjadinya bencana banjir di daerah hilir.

Ketersediaan infrastruktur terutama jaringan konektivitas menjadikan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penghubung kota dan Kabupaten di sekitarnya. Jaringan konektivitas lintas kabupaten/kota dapat ditinjau dari jaringan transportasi, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Jaringan transportasi terdiri atas jaringan transportasi darat dan jaringan transportasi laut. Untuk jaringan jalan terdiri dari jaringan jalan nasional (jalan arteri primer dan jalan kolektor primer satu) dan jaringan jalan provinsi yang merupakan jalan kolektor primer, serta didukung jaringan transportasi laut (pelabuhan pengumpan lokal). Selain itu didukung pula oleh beberapa jaringan telekomunikasi (serat optik).

Dengan posisi dan peran strategis ini, Kabupaten Minahasa memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi pada pembangunan Sulawesi Utara dan Nasional dimana Kabupaten Minahasa menjadi bagian dalam Pengembangan Kawasan Perkotaan Metropolitan BIMINDO, KEK Bitung dan Daerah Pariwisata Prioritas Manado Likupang, juga terdapat Kawasan Afirmasi yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Mapalus di Langowan Barat.

2) Potensi Sumber Daya Alam

a) Potensi Sumber daya Alam dan Energi

Hasil produksi pertambangan di Kabupaten Minahasa didominasi oleh 5 (lima) jenis bahan tambang dalam bentuk galian yaitu pasir, kerikil, tanah urug, kaolin dan batuan. Di samping pengelolaannya dilakukan oleh pengusaha, masih ada pengelolaan galian C yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Saat ini proses perijinan untuk usaha galian C sudah sangat selektif untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Berikut ini tabel produksi galian C (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Potensi dan Energi Kabupaten Minahasa

No	Komoditas	Tahun		
		Lokasi	Desa/ Kelurahan	Potensi
A	MINERAL LOGAM			MINERAL LOGAM
1	Pasir Besi	Kec. Langowan Selatan		Pasir Besi
		Kec. Kakas Barat		
		Kec. Tombariri	Bukit Tinggi	4,000,000 Ton
			Poopo	1,000,000 Ton
			Tanawangko	4,131,374 Ton
			Teling	
B	MINERAL NON LOGAM DAN BANTUAN			MINERAL NON LOGAM DAN BANTUAN
1	Belerang	Kec. Sonder		Belerang
		Kec. Langowan Barat	Toraget	81,000 Ton
		Kec. Kawangkoan	Kanonang	
2	Kaolin	Kec. Langowan Utara	Tempang	Kaolin
		Kec. Kawangkoan Barat	Kanonang	500,000 Ton
3	Tras	Kec. Kawangkoan Barat		Tras
			Talikuran	600,000 m3
		Kec. Tombulu	Tombasian Atas	10,000 M3
		Kec. Tondano Utara	Sawangan	10,00 M3
			Tonsea Lama	7,500 M3
		Kec. Tondano Timur	Makalonsow	7,500 M3
			Papakelan	10,000 M3
		Kec. Pineleng	Pineleng	106,500,000 M3
4	Obsidian	Kec. Tondano Selatan		Obsidian
			Kasuang	600,000 M3
		Kec. Tondano Barat	Watulambot	5,000 M3
			Wewelen	7,500 M3
5	Batu	Kec. Pineleng		Batu
			Tateli	79,743,700 M3
			Sea	10,000,000 M3
		Kec. Tombulu	Sawangan	5,000,000 M3
		Kec. Tondano Barat	Wewelen	3,000,000 M3
			Watulambot	2,500,000 M3

No	Komoditas	Tahun		
		Lokasi	Desa/ Kelurahan	Potensi
		Kec. Langowan	Noongan I, II	133,750,000 M3
6	Pasir Vulkanis	Kec. Langowan Selatan		Pasir Vulkanis
7	Lempung	Kec. Remboken	Parepey	Lempung
		Kec. Tombariri	Lemoh Lolah	9,000 M3
		Kec. Eris	Touliang Oki	3,000 M3
		Kec. Langowan selatan	Noongan	4,000 M3
8	Batu lapis	Kec. Sonder		Batu lapis
9	Pasir	Kec. Tombariri		Pasir
		Kec. Langowan Barat		2,000 M3
		Kec. Tompaso		3,000 M3
10	Basah	Kec. Langowan		Basah
11	Batu Apung	Kec. Tombariri	Ranotongkor Lolah	Batu Apung
		Kec.Eris	Touliang Oki	100,000 M3
		Kec. Tompaso	Tompaso	4,000 M3
12	Energi Listrik Tenaga Panas Bumi	Kec. Tompaso		Energi Listrik Tenaga Panas Bumi
		Kec. Remboken	Kasuratan	40 M
		Kec. Kawangkoan	Kanonang	20 x 2 MW
		Kec. Sonder	Leilem	40 MW
13	Energi Listrik Tenaga Mikro	Kec. Kawangkoan Barat		Energi Listrik Tenaga Mikro
		Kec. kawangkoan Utara	Sungai Tincep	4,5 M w
		Kec. Sonder	Sungai maasim	2 mw
		Kec. Tompaso	Sungai Ranowangko	2x2 mw
		Kec. Tombariri	Sungai Kolongan	12 Kw
		Kec. Kombi (PNPM)	Sungai Lalumpe	14 Kw
			Sungai Bulu	2 Mw
			Sungai Kombi	2 Mw
			Sungai Ranowangko	2 Mw
		Kec. Tombulu	Sungai Tombulu	2 Mw
		Kec. Langowan	Sungai Tombingon	2 Mw

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa, Tahun 2024

b) Gunung

Kabupaten Minahasa memiliki 8 gunung di mana kawasan lindung yang terluas terdapat di Gunung Soputan yaitu 1.540,00 ha,

Adapun hutan bakau yang terluas terdapat di Tanjung Kelapa seluas 250 ha (Tabel 2.2).

Tabel 2.2. Gunung-Gunung di Kabupaten Minahasa

NO	GUNUNG/KELOMPOK HUTAN	KECAMATAN	LINDUNG (HA)
1	Gunung Mahawu	Pineleng/Tombulu	438,00
2	Gunung Masarang	Tondano Barat	16,00
3	Gunung Tampusu	Tondano Selatan	13,00
		Remboken	8,00
4	Gunung Soputan	Langowan Barat	1,540,00
		Tompaso	510,00
		Kawangkoan Barat	900,00
5	Gunung Lengkoan	Remboken	20,00
		Kawangkoan	25,00
		Sonder	11,00
6	Gunung Kawatak	Langowan	330,00
7	Gunung Kaweng	Kakas	417,86
8	Gunung Lembean	Tondano Timur	493,00
		Kombi	1,500,00
9	Hutan Bakau Tanjung Kelapa	Tombariri	250,00
10	Hutan Bakau Tanjung Tambala	Tombariri	50,00
T O T A L			6,521,86

Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa, Tahun 2014-2034

c) Geologi

Dari batuan geologi menunjukkan dataran sekitar Danau Tondano adalah endapan lakustrin maupun sungai, Wilayah berbukit sampai bergunung bagian timur Danau Tondano terdiri atas batuan vulkanis berupa lava basalt dan tufa basalt,

Wilayah Kecamatan Langowan Barat, Tompaso, dan Kawangkoan terdiri atas Abu Vulkan dan Tufa Tondano, Wilayah Lengkoan, Tampusu (Kecamatan Remboken), Masarang, Mahawu sampai lahan wilayah Kecamatan Tombulu berupa batuan Vulkanis Muda (abu, bom, lapilli, lawa), Di daerah ini tanah- tanah yang berkembang dari batuan basalt membentuk ordo Alfisolts, Tufa Tondano ordo Andisols, Tanah di

wilayah dataran sekitar Danau Tondano umumnya Aquepts, Wilayah Kecamatan Tondano yang merupakan ibukota kabupaten berbatasan dengan Gunung Mahawu yang masih aktif.

d) Hidrologi

Danau Tondano merupakan danau terbesar dengan satu sungai (Sungai Tondano) dan merupakan bagian dari kawasan strategis nasional (KSN) DAS Tondano yang berfungsi untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik (PLTA Tonsea Lama-Tanggari), dan untuk diolah sebagai air minum oleh PDAM Kota Manado, Fungsi lain dari sungai-sungai tersebut adalah sebagai pengairan dan budidaya ikan air tawar. Adapun sungai sungai yang terdapat di Kabupaten Minahasa seperti pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Daftar Sungai yang ditetapkan memiliki Kawasan Sempadan Sungai

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	S. Nimanga (Sebagian wilayah masuk Minsel dan Tomohon)	-	Sonder	34,00
			Kawangkoan, TomohonTompaso	
		Masarinsin	Sonder	1,50
		Naa	Sonder	2,50
		Sapa	Sonder, Tomohon	17,00
		Titiwoon	Sonder, Tomohon	4,00
		Ranoesem	Sonder, Tomohon	10,00
		Ranoinsandang	Sonder, Tomohon	10,00
		Loar	Sonder, Tomohon	2,50
		Nikoropit	Sonder, Tomohon	2,00
		Leilem	Sonder, Tomohon	4,50
		Munte	Sonder	7,00
		Keris	Sonder	5,50
		Coklat	Sonder	6,00
		Ranowangko	Kawangkoan	14,50
		Ranoesem	Kawangkoan	7,50
		Toang	Kawangkoan	7,00
		Tempak	Kawangkoan	7,50
		Maasem	Kawangkoan, Tompaso	13,00
		Ranoan	Kawangkoan	5,00
2	S. Maroondor	-		4,50
		Tuel	Kombi	5,00
3	S. Rariang	-	Kombi	4,00

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
4	S. Bulu	-	Kombi	9,00
		Uuan	Kombi	6,00
5	S. Rerer	-	Kombi	4,00
6	S. Sapaana	-	Kombi	3,00
7	S. Saluwangko		Langowan	20,00
8	S. Tombingon	-	Langowan	14,00
		Panasen	Kakas, Langowan	14,50
		Ranomperet	Langowan	10,00
		Walewangko	Langowan	5,50
		Ranolesi	Langowan	6,00
		Wuliling	Langowan	8,50
9	S. Tolour Oki	-	Tondano	5,00
		Pakawa	Tondano	2,50
10	S. Tonsaru	-	Tondano	2,50
11	S. Tougela			6,00
12	S. Toubeke			7,50
13	S. Manembo			20,50
14	S. Ranowangko			19,50
15	S. Sindoran Besar		Kakas	16,50
16	S. Sindoran Kecil		Kakas	10,50
17	S. Kaliakel		Kakas	7,50
18	S. Pinisin		Kakas	18,00
		Kakeretan	Kakas	7,50
		Kaweruan	Kakas	19,00
		Pinorutanresek	Kakas	10,00
19	S. Kayuwatu Oki		Kakas	12,50
		Silungan	Kakas	8,50
20	S. Kayuwatu Wangko		Kakas	18,50
		Katon	Kakas	10,50
21	S. Kinamang		Kakas	5,50
22	S. Tarandi		Kakas, Eris	21,50
		Karor	Kakas	16,00
23	S. Atep Oki		Eris	13,50
24	S. Raker		Eris	17,00
		Panungean	Eris	18,00
		Watuliney	Eris	7,50
25	S. Pakaretan		Eris	17,50
26	S. Kamenti		Eris, Kombi	16,50
		Tulap	Kombi	8,50
27	S. Kora-kora			9,50
28	S. Kanis			18,50

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
				5,50
29	S. Toulour			15,00
30	S. Awioki			6,00
31	S. Awiwangko			7,00
		Kaliawua		6,50
32	S. Kombi			18,00
33	S. Raker			13,50
34	S. Tulap			14,50
35	S. Buraran			6,00
				10,50
				10,50
				6,00
36	S. Mawalelong		Remboken	6,00

Sumber: RTRW Kabupaten Minahasa, Tahun 2014-2034

e) **Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Minahasa dengan luas wilayah sebesar 121.043,31 ha, sebagian besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya, Adapun luas lahan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Minahasa

PENGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)
Arena Olahraga	3,23
Danau/Situ	4.727,98
Empang	55,55
Gedung/Bangunan	6,66
Hutan Bakau/Mangrove	326,52
Hutan Lahan Rendah	16.028,62
Hutan Lahan Tinggi	9.490,01
Hutan Rakyat/Tanaman Campur	4,60
Hutan Rimba	2.926,10
Kantor Bupati	0,76
Kantor Pemerintah Lainnya	0,43
Kolam	0,81
Padang Rumput	34,07
Pariwisata/Rekreasi Pantai	0,25
Pasir/Bukit Pasir	1,09
Pasir/Bukit Pasir Darat	0,30
Pasir/Bukit Pasir Laut	0,00
Pelabuhan Nelayan	1,04
Pemukaman	9,00
Pemukaman Khusus	1,74

PENGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)
Pendidikan Dasar	1,65
Pendidikan Menengah Pertama	2,31
Pendidikan Menengah Umum	0,33
Pendidikan/Penelitian Lainnya	0,66
Peribadatan/Sosial Lainnya	0,46
Perkebunan/Kebun	51.797,54
Permukiman dan Tempat Kegiatan	4.822,46
Rawa	28,63
Resort	3,63
Sawah	6.526,56
Sawah Tadah Hujan	26,80
Semak Belukar	7.968,55
Sungai	121,70
Tanah Kosong/Gundul	1.096,18
Tegalan/Ladang	6.853,16
Terminal	2,05
Waduk	2,48
Wilayah Pesisir	0,01
Total	112.873,99

Sumber: RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2034

Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah untuk perkebunan (27,26%) dan untuk kebun campuran (23,04%), sedangkan untuk permukiman hanya mencapai 4,6%.

3) Daya Tampung Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

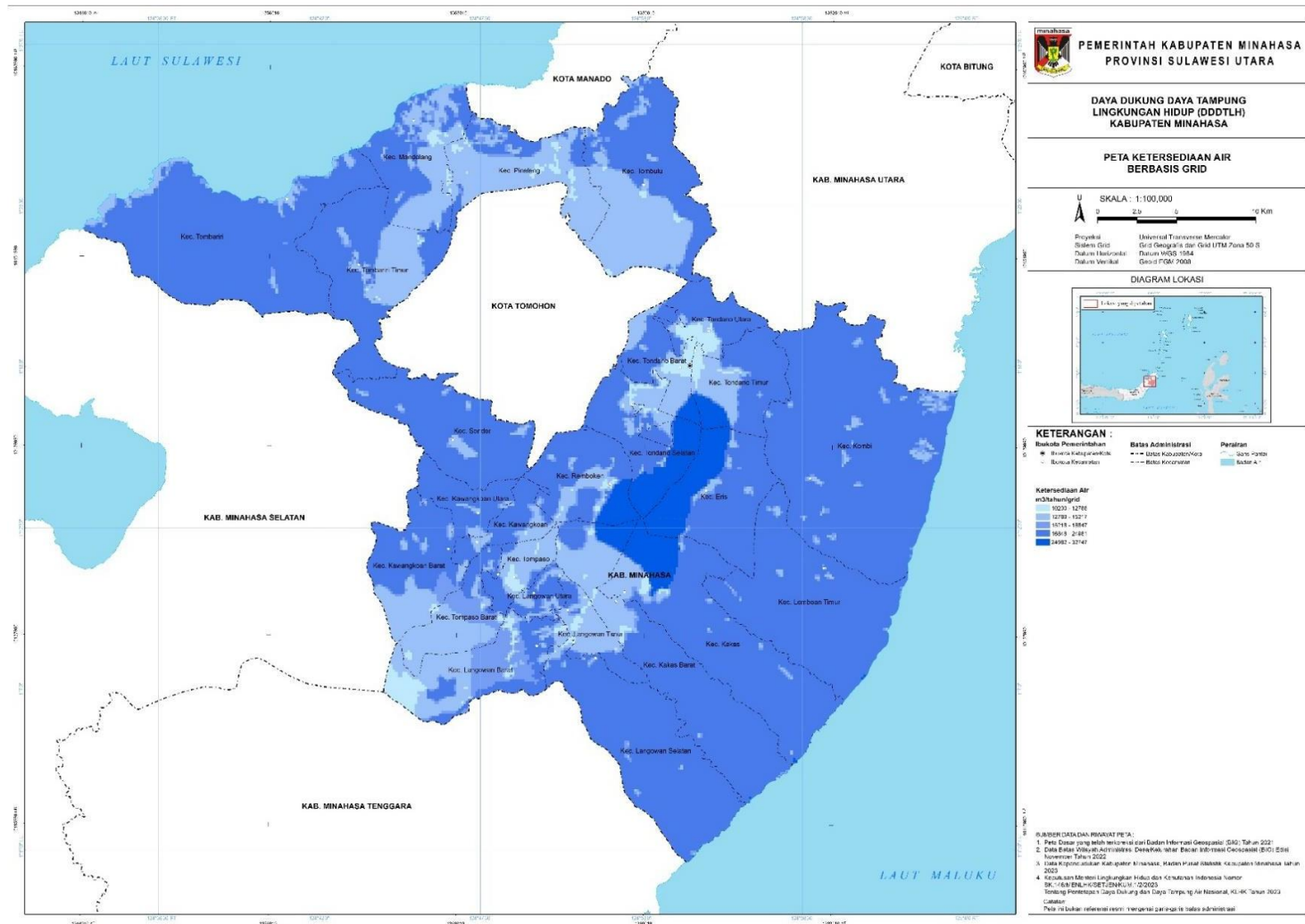
Daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara menghitung kapasitas lingkungan dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang memanfaatkan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya Tampung Lingkungan Hidup dapat dilihat dari beberapa jasa lingkungan. Besarnya kapasitas suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang dihamparkan ruang tersebut. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Minahasa diuraikan seperti penjelasan berikut ini.

1. Daya Dukung air

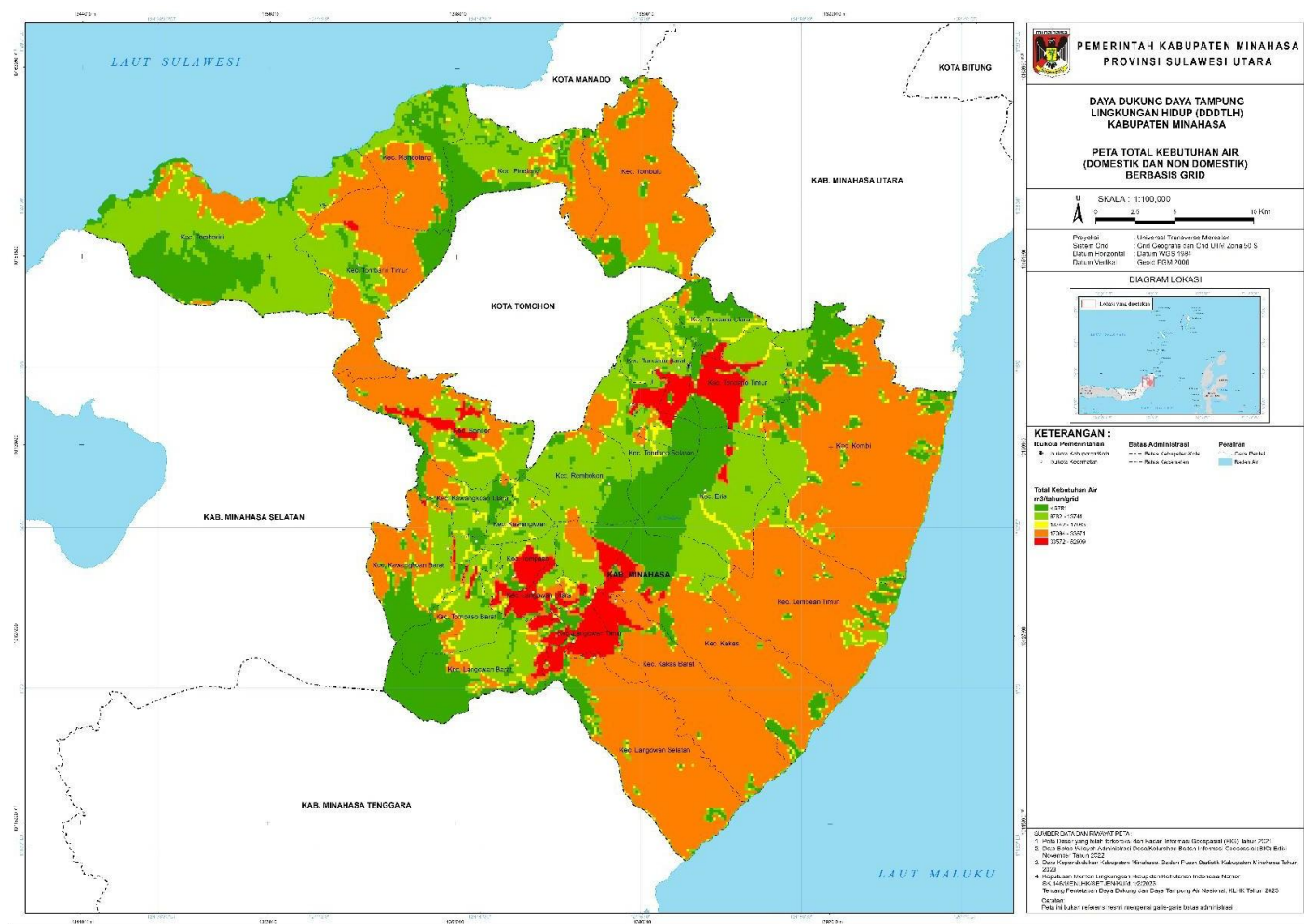
Secara umum status Daya Dukung dan Daya Tanpung Air di Kabupaten Minahasa belum terlampaui lebih dari setengah luas Kabupaten Minahasa untuk itu di perlukan, telah terlampaui sehingga permasalahan-permasalahan seperti bencana banjir, longsor, penurunan muka tanah serta intruksi air

laut di wilayah pesisir. Selain itu, kemacetan lalu lintas menjadi isu yang tidak dapat dihindari kemungkinan akan terjadinya hal ini akan diakibatkan oleh hal-hal tersebut diatas oleh karena itu di perlukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar supaya lingkungan tetap terjaga.



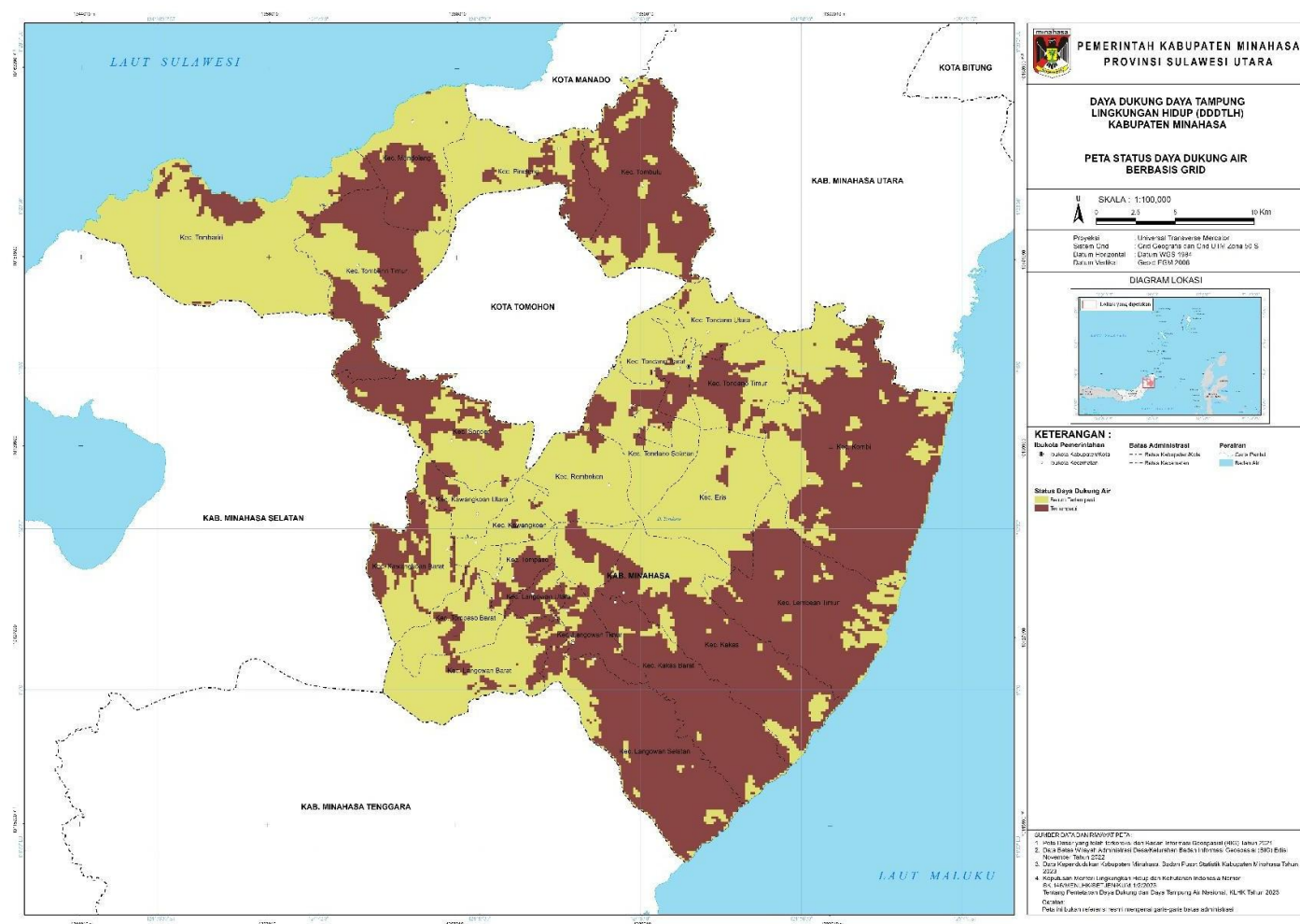
Gambar 2. 1 Peta Ketersediaan Air Kabupaten Minahasa

Sumber : Hasil Analisis 2023



Gambar 2. 2 Peta Kebutuhan Air Kabupaten Minahasa

Sumber : Hasil Analisis 2023



Gambar 2. 3 Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Air Kabupaten Minahasa

Sumber : Hasil Analisis 2023

Tabel 2. 5 Perhitungan Air Untuk Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Minahasa

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air Non Domestik (Lahan)	Total Kebutuhan Air	Selisih air	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Eris	12215	40565748,5	1055376	16056333,94	17111709,94	23454038,55	50595	38344
Belum Terlampaui	10869	38115967	939096	12650071	13589167	24526800	47549	36642
Terlampaui	1346	2449782	116280	3406263	3522543	-1072761	3046	1702
Kakas	12716	61483932	1098662	49448114	50546777	10937156	76572	63089
Belum Terlampaui	3350	24058000	289477	5928723	6218201	17839799	30021	26571
Terlampaui	9366	37425932	809185	43519391	44328576	-6902643	46551	36518
Kakas Barat	11035	50578638	953424	54182055	55135479	-4556842	63056	52947
Belum Terlampaui	2301	11247513	198771	4581081	4779853	6467661	14092	11908
Terlampaui	8734	39331124	754653	49600974	50355627	-11024502	48964	41039
Kawangkoan	10517	9621912	908669	6510212	7418881	2203031	11989	1507
Belum Terlampaui	9996	9094512	863657	5838432	6702089	2392423	11331	1370

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air Non Domestik (Lahan)	Total Kebutuhan Air	Selisih air	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Terlampau	521	527400	45012	671781	716792	-189392	658	137
Kawangkoan Barat	8735	25582755	754704	18237335	18992039	6590716	31907	23573
Belum Terlampau	5372	15307803	464172	7204661	7668833	7638970	19131	13937
Terlampau	3363	10274951	290532	11032673	11323205	-1048254	12776	9636
Kawangkoan Utara	9051	12010230	782006	6903420	7685426	4324804	14924	5927
Belum Terlampau	7367	9252139	636511	4010329	4646840	4605299	11498	4171
Terlampau	1684	2758091	145496	2893091	3038586	-280495	3426	1756
Kombi	11583	102476957	1000771	87838627	88839398	13637559	127324	115529
Belum Terlampau	3348	31821240	289268	13285226	13574494	18246745	39564	36203
Terlampau	8235	70655717	711503	74553400	75264904	-4609187	87760	79326
Langowan Barat	16657	27228380	1439165	16127427	17566591	9661789	34101	17672
Belum Terlampau	11227	22342186	970032	6791485	7761517	14580669	27992	16963

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air Non Domestik (Lahan)	Total Kebutuhan Air	Selisih air	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Terlampau	5430	4886194	469133	9335941	9805074	-4918880	6109	709
Langowan Selatan	8099	52784126	699754	51639180	52338934	445192	65566	56458
Belum Terlampau	1162	8198021	100359	2528541	2628900	5569121	10185	8973
Terlampau	6937	44586105	599395	49110639	49710034	-5123929	55381	47485
Langowan Timur	13639	9343620	1178410	17833169	19011579	-9667959	11695	-1879
Belum Terlampau	5784	1618175	499722	540223	1039946	578229	2020	-3773
Terlampau	7855	7725445	678687	17292946	17971633	-10246188	9675	1894
Langowan Utara	8775	5405210	758160	10063796	10821956	-5416747	6746	-2002
Belum Terlampau	3480	1419049	300665	670360	971025	448024	1769	-1717
Terlampau	5295	3986160	457495	9393436	9850931	-5864771	4977	-285
Lembean Timur	8522	57281455	736301	54338529	55074830	2206626	71152	63574
Belum Terlampau	1936	11046526	167237	6193380	6360618	4685909	13732	11911

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air Non Domestik (Lahan)	Total Kebutuhan Air	Selisih air	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Terlampau	6586	46234929	569063	48145149	48714212	-2479283	57420	51663
Mandolang	21925	27558154	1894320	19979000	21873320	5684834	34437	12161
Belum Terlampau	15440	15170990	1333996	5861128	7195124	7975866	18938	3395
Terlampau	6485	12387163	560324	14117871	14678196	-2291032	15499	8766
Pineleng	30680	27071960	2650752	17581042	20231794	6840166	34032	3313
Belum Terlampau	23449	18656054	2026005	7361206	9387211	9268843	23421	-22
Terlampau	7231	8415906	624747	10219836	10844583	-2428677	10611	3335
Remboken	12946	25134658	1118534	13239818	14358352	10776305	31341	18710
Belum Terlampau	12308	23798026	1063436	11855904	12919340	10878687	29681	17662
Terlampau	638	1336631	55099	1383914	1439013	-102382	1660	1048
Sonder	19656	35696397	1698278	31664334	33362612	2333784	44345	24541
Belum Terlampau	12461	20285472	1076598	11620910	12697508	7587964	25205	12663

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air Non Domestik (Lahan)	Total Kebutuhan Air	Selisih air	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Terlampau	7195	15410924	621680	20043424	20665104	-5254180	19140	11878
Tombariri	18306	79496666	1581638	42546125	44127764	35368903	98765	81259
Belum Terlampau	16084	70427354	1389680	33127979	34517659	35909695	87501	72083
Terlampau	2222	9069312	191958	9418147	9610105	-540793	11264	9176
Tombariri Timur	10465	41801107	904176	36678168	37582344	4218764	52158	41313
Belum Terlampau	4385	16229127	378872	7997996	8376868	7852259	20249	15758
Terlampau	6080	25571980	525304	28680171	29205475	-3633495	31909	25555
Tombulu	19964	50099868	1724890	47713372	49438262	661606	62660	42705
Belum Terlampau	7790	12251565	673046	5168551	5841597	6409968	15358	7585
Terlampau	12174	37848303	1051844	42544821	43596665	-5748362	47302	35120
Tompaso	7475	8083422	645840	13084208	13730048	-5646626	10147	2689
Belum Terlampau	4023	4455487	347612	3099203	3446815	1008672	5591	1589

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air Non Domestik (Lahan)	Total Kebutuhan Air	Selisih air	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Terlampau	3452	3627935	298228	9985005	10283233	-6655298	4556	1100
Tompaso Barat	9311	14872389	804470	9339379	10143850	4728539	18665	9172
Belum Terlampau	7605	12635215	657111	6177701	6834812	5800403	15846	8084
Terlampau	1706	2237174	147359	3161679	3309038	-1071864	2819	1088
Tondano Barat	21787	16390042	1882397	14218182	16100578	289463	20522	-1427
Belum Terlampau	17194	13395531	1485543	5976132	7461675	5933856	16747	-569
Terlampau	4593	2994511	396854	8242050	8638904	-5644393	3775	-858
Tondano Selatan	17918	32448773	1548115	15575731	17123846	15324927	40529	22879
Belum Terlampau	12853	27353203	1110520	6691503	7802023	19551180	34164	21482
Terlampau	5065	5095570	437595	8884229	9321823	-4226253	6365	1397
Tondano Timur	15129	23007813	1307146	27267714	28574860	-5567046	28734	13744
Belum Terlampau	8220	15618068	710195	7616606	8326801	7291267	19458	11396

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air Non Domestik (Lahan)	Total Kebutuhan Air	Selisih air	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Terlampau	6909	7389745	596951	19651108	20248059	-12858314	9276	2348
Tondano Utara	13211	13018489	1141430	6207409	7348839	5669650	16227	3048
Belum Terlampau	12240	12091518	1057540	4423942	5481483	6610035	15069	2856
Terlampau	971	926970	83890	1783466	1867356	-940386	1158	192
Grand Total	350317	849042700	30267389	684272680	714540069	134502631	1058189	708846

Tabel 2. 6 Proyeksi Kebutuhan Air

KECAMATAN	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR (dalam liter)				
	2025	2026	2027	2028	2029
LANGOWAN TIMUR	1.999.021	1.975.742	1.952.463	1.929.184	1.905.905
LANGOWAN BARAT	2.800.246	2.955.391	3.110.537	3.265.683	3.420.829
LANGOWAN SELATAN	1.277.744	1.309.587	1.341.431	1.373.274	1.405.118

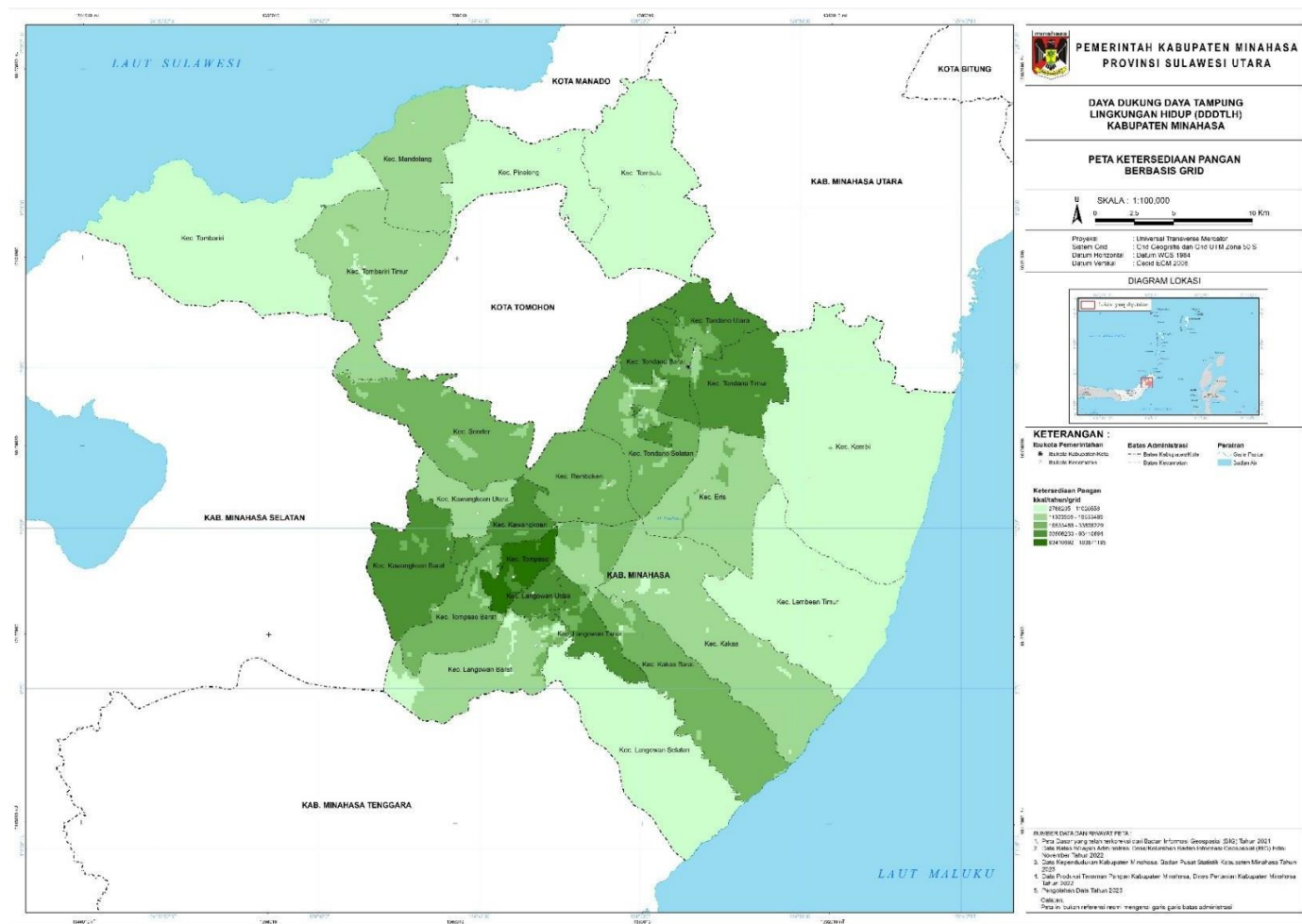
KECAMATAN	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR				
	(dalam liter)				
LANGOWAN UTARA	1.358.280	1.379.461	1.400.641	1.421.821	1.443.001
TOMPASO	1.147.198	1.160.247	1.173.295	1.186.344	1.199.392
TOMPASO BARAT	1.430.148	1.446.997	1.463.845	1.480.694	1.497.542
KAWANGKOAN	1.587.466	1.592.431	1.597.397	1.602.362	1.607.328
KAWANGKOAN BARAT	1.369.375	1.375.250	1.381.126	1.387.001	1.392.876
KAWANGKOAN UTARA	1.414.235	1.467.220	1.520.205	1.573.190	1.626.176
SONDER	3.053.419	3.106.388	3.159.357	3.212.325	3.265.294
TOMBARIRI	2.812.297	2.845.693	2.879.090	2.912.486	2.945.883
TOMBARIRI TIMUR	1.695.783	1.760.016	1.824.249	1.888.482	1.952.715
PINELENG	3.981.274	3.682.149	3.383.023	3.083.897	2.784.771
TOMBULU	2.466.949	2.215.897	1.964.846	1.713.794	1.462.743
MANDOLANG	3.029.472	2.902.494	2.775.517	2.648.539	2.521.561
TONDANO BARAT	2.838.571	2.631.393	2.424.214	2.217.035	2.009.857
TONDANO SELATAN	2.448.761	2.332.071	2.215.382	2.098.692	1.982.003
REMBOKEN	1.928.722	1.922.145	1.915.567	1.908.990	1.902.412
KAKAS	1.895.120	1.888.990	1.882.859	1.876.729	1.870.599
KAKAS BARAT	1.745.549	1.791.298	1.837.047	1.882.796	1.928.545
LEMBEAN TIMUR	1.301.807	1.313.614	1.325.421	1.337.228	1.349.035

KECAMATAN	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR				
	(dalam liter)				
ERIS	1.731.378	1.681.656	1.631.934	1.582.212	1.532.490
KOMBI	1.645.986	1.600.873	1.555.759	1.510.646	1.465.532
TONDANO TIMUR	2.427.410	2.507.771	2.588.131	2.668.491	2.748.852
TONDANO UTARA	1.955.040	1.941.780	1.928.520	1.915.260	1.902.000
JUMLAH	51.341.252	50.786.554	50.231.856	49.677.157	49.122.459

SNI 03-6981-2004 menyebutkan kapasitas minimum untuk melayani kebutuhan perumahan adalah 150 liter per orang per hari.

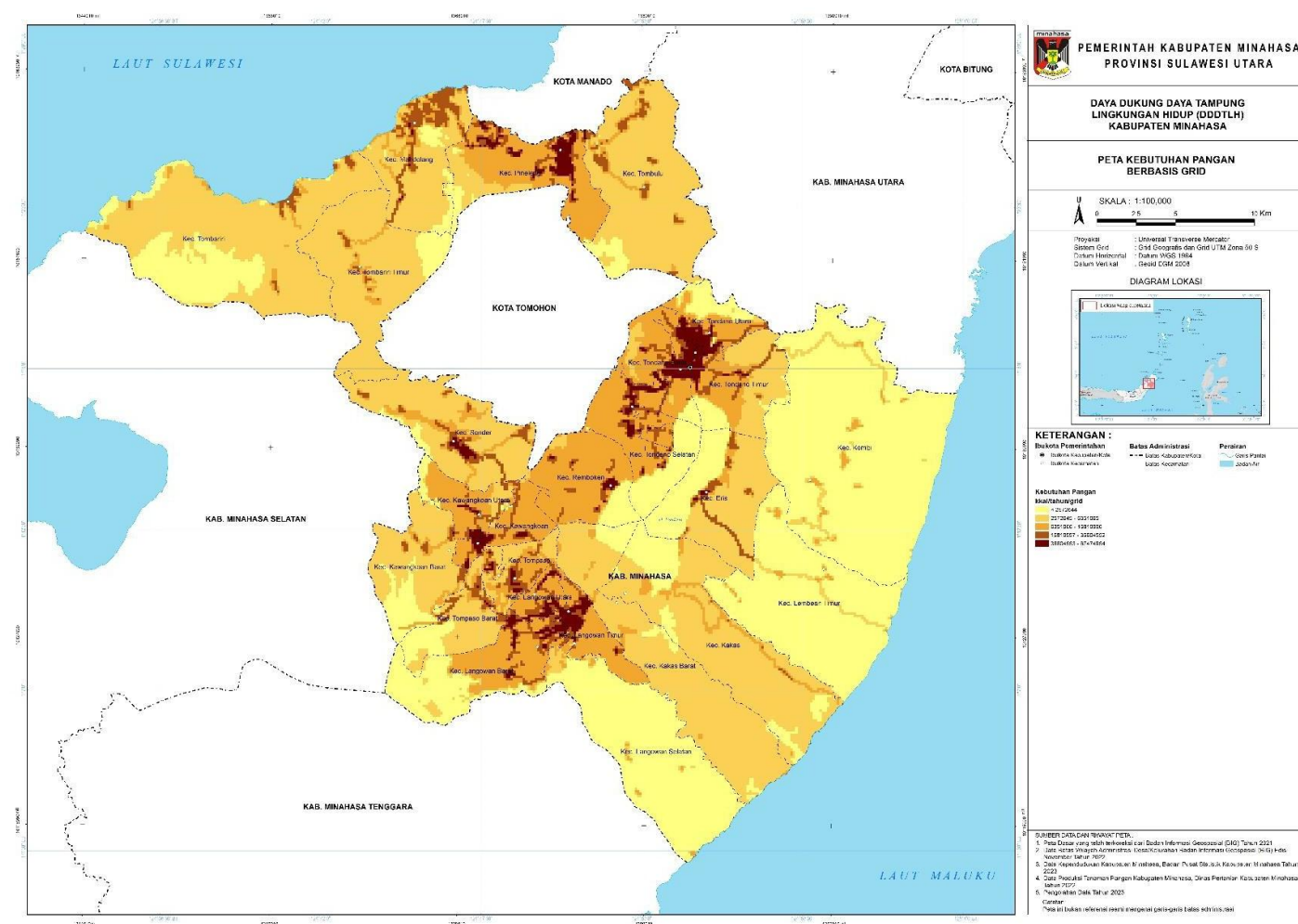
2. Daya Dukung Pangan

Secara umum status Daya Dukung dan Daya Tanpung Pangan di Kabupaten Minahasa sudah melampaui lebih dari setengah luas Kabupaten Minahasa untuk itu di perlukan, telah terlampaui sehingga permasalahan-permasalahan seperti bencana banjir, longsor, penurunan muka tanah serta intruksi air laut di wilayah pesisir. Selain itu, kemacetan lalu lintas menjadi isu yang tidak dapat dihindari kemungkinan akan terjadinya hal ini akan diakibatkan oleh hal-hal tersebut diatas oleh karena itu di perlukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar supaya lingkungan tetap terjaga



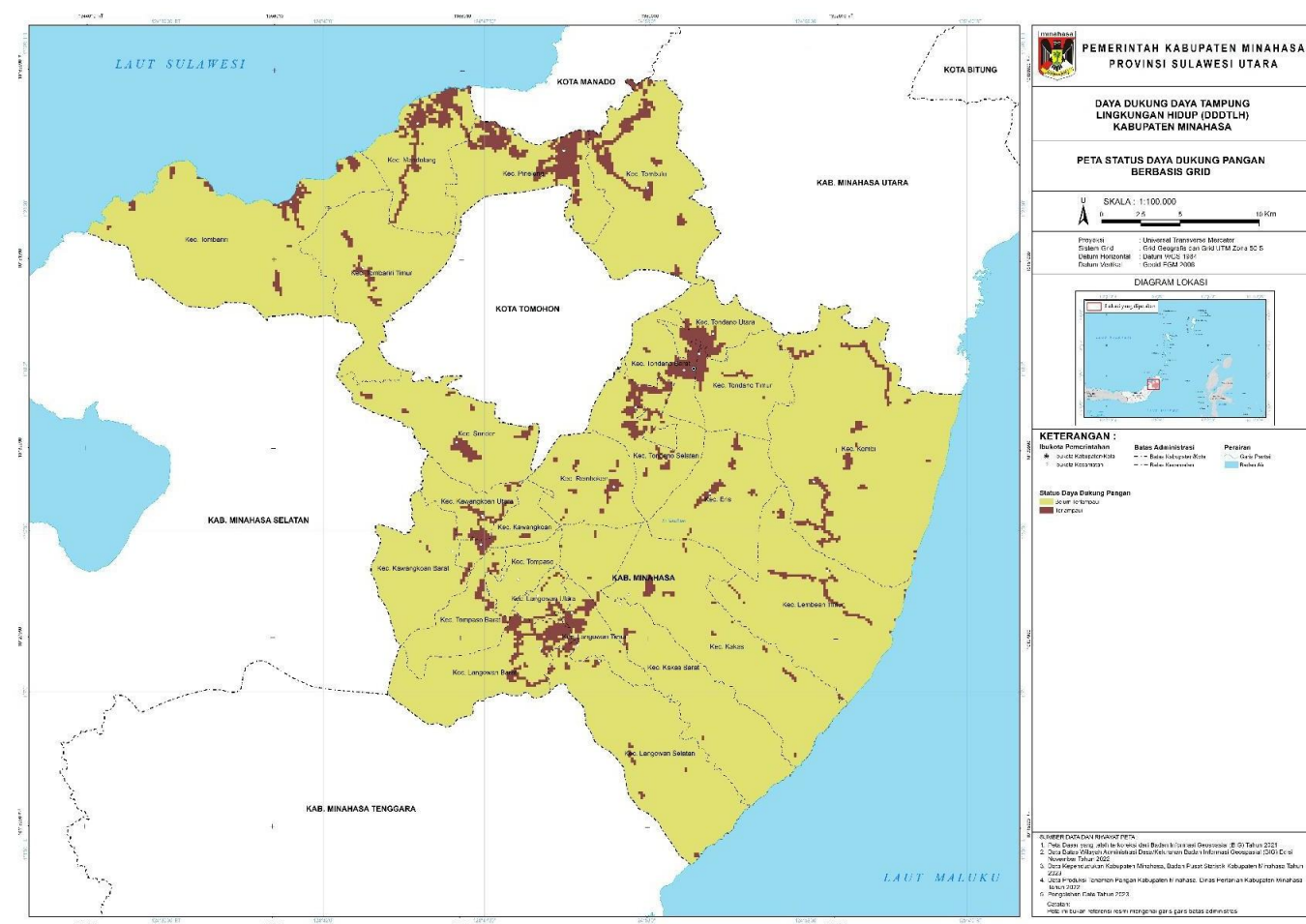
Gambar 2. 4 Ketersediaan Pangan Kabupaten Minahasa

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 2. 5 Kebutuhan Pangan Kabupaten Minahasa

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 2. 6 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Minahasa

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 2. 7 Perhitungan Pangan Untuk Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Lingkungan Kabupaten Minahasa

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Selisih Pangan	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Eris	12215	33620072400	9585721250	24034351150	43183	30932
Belum Terlampau	9475	32556538707	7435469894	25121068813	41829	32318
Terlampau	2740	1063533693	2150251356	-1086717663	1354	-1386
Kakas	12716	42469856400	9978881000	32490975400	53579	40096
Belum Terlampau	11510	41916204892	9032748384	32883456508	52867	40595
Terlampau	1206	553651508	946132616	-392481108	712	-499
Kakas Barat	11035	57044053200	8659716250	48384336950	72655	62546
Belum Terlampau	10419	56663656390	8176407611	48487248779	72176	62686
Terlampau	616	380396810	483308639	-102911829	479	-140
Kawangkoan	10517	23880593400	8253215750	15627377650	30371	19889

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Selisih Pangan	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Belum Terlampaui	7533	22460615441	5911612386	16549003056	28569	21073
Terlampaui	2984	1419977958	2341603364	-921625406	1802	-1184
Kawangkoan Barat	8735	56208294000	6854791250	49353502750	71674	63340
Belum Terlampaui	8059	55728083898	6324056453	49404027445	71064	63409
Terlampaui	676	480210102	530734797	-50524695	610	-69
Kawangkoan Utara	9051	11898721200	7102772250	4795948950	15068	6071
Belum Terlampaui	5036	10364281349	3951743670	6412537679	13127	8149
Terlampaui	4015	1534439851	3151028580	-1616588729	1941	-2078
Kombi	11583	26007109200	9089759250	16917349950	32063	20268
Belum	9713	25068092019	7622365557	17445726462	30872	20893

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Selisih Pangan	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Terlampau						
Terlampau	1870	939017181	1467393693	-528376512	1191	-625
Langowan Barat	16657	27740869800	13071580750	14669289050	35552	19123
Belum Terlampau	7223	24519323740	5667991364	18851332376	31456	24467
Terlampau	9434	3221546060	7403589386	-4182043326	4096	-5344
Langowan Selatan	8099	18448639600	6355690250	12092949350	23997	14889
Belum Terlampau	7314	18113350741	5739841623	12373509118	23571	15251
Terlampau	785	335288859	615848627	-280559768	426	-362
Langowan Timur	13639	32545355400	10703205250	21842150150	41515	27941
Belum Terlampau	7979	29763208983	6261353516	23501855466	37969	30064
Terlampau	5660	2782146417	4441851734	-1659705316	3546	-2123
Langowan Utara	8775	18853462200	6886181250	11967280950	24044	15296

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Selisih Pangan	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Belum Terlampau	5707	17072289394	4478626369	12593663025	21779	16101
Terlampau	3068	1781172806	2407554881	-626382075	2265	-805
Lembea Timur	8522	19752946800	6687639500	13065307300	25840	18262
Belum Terlampau	7545	19172089800	5921137194	13250952606	25084	18492
Terlampau	977	580857000	766502306	-185645306	756	-230
Mandolang	21925	29849386200	17205643750	12643742450	38251	15975
Belum Terlampau	10282	25385384294	8068530892	17316853402	32506	21847
Terlampau	11643	4464001906	9137112858	-4673110952	5745	-5872
Pineleng	30680	16163201400	24076130000	-7912928600	20859	-9860
Belum Terlampau	11747	12904741133	9218845425	3685895708	16683	4877
Terlampau	18933	3258460266	14857284575	-11598824308	4176	-14737

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Selisih Pangan	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Remboken	12946	39128008600	10159373500	28968635100	50001	37370
Belum Terlampaui	9877	37798819860	7750911341	30047908520	48310	38748
Terlampaui	3069	1329188740	2408462159	-1079273420	1691	-1378
Sonder	19656	44394599000	15425046000	28969553000	56748	36944
Belum Terlampaui	15197	42709874906	11925598723	30784276183	54615	39270
Terlampaui	4459	1684724094	3499447277	-1814723183	2133	-2326
Tombariri	18306	34483657600	14365633500	20118024100	44491	26985
Belum Terlampaui	14457	33349727153	11344993229	22004733924	43065	29387
Terlampaui	3849	1133930447	3020640271	-1886709824	1426	-2402
Tombariri Timur	10465	35600118600	8212408750	27387709850	45707	34862
Belum Terlampaui	9132	34913530770	7166485139	27747045631	44834	35327

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Selisih Pangan	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Terlampau	1333	686587830	1045923611	-359335781	873	-465
Tombulu	19964	24421553200	15666749000	8754804200	30620	10665
Belum Terlampau	13546	22566355182	10630420900	11935934282	28247	14702
Terlampau	6418	1855198018	5036328100	-3181130082	2373	-4037
Tompaso	7475	72279025000	5866006250	66413018750	92188	84730
Belum Terlampau	7475	72279025000	5866006250	66413018750	92188	84730
Tompaso Barat	9311	25955717800	7306807250	18648910550	33126	23633
Belum Terlampau	6769	24829923764	5311618525	19518305239	31699	24747
Terlampau	2542	1125794036	1995188725	-869394689	1427	-1114
Tondano Barat	21787	39590239800	17097348250	22492891550	50375	28426
Belum Terlampau	11453	36401576754	8987981593	27413595162	46290	34676

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Selisih Pangan	Ambang Batas Penduduk	Ambang Batas Penduduk setelah dikurangi jumlah penduduk eksisting
Terlampaui	10334	3188663046	8109366657	-4920703612	4085	-6250
Tondano Selatan	17918	30827459400	14061150500	16766308900	39010	21360
Belum Terlampaui	8322	27361888638	6530925586	20830963052	34606	26540
Terlampaui	9596	3465570762	7530224914	-4064654152	4404	-5180
Tondano Timur	15129	50618953200	11872482750	38746470450	64773	49783
Belum Terlampaui	11165	49036651163	8761577868	40275073295	62769	51738
Terlampaui	3964	1582302037	3110904882	-1528602845	2004	-1955
Tondano Utara	13211	33022440000	10367332250	22655107750	42059	28880
Belum Terlampaui	5490	29956253013	4308570920	25647682094	38159	32726
Terlampaui	7721	3066186986	6058761330	-2992574344	3900	-3846
Grand Total	350317	844804333400	274911265750	569893067650	1077749	728406

Tabel 2. 8 Proyeksi Kebutuhan Pangan

KECAMATAN	PROYEKSI KEBUTUHAN PANGAN (dalam KiloKalori)				
	2025	2026	2027	2028	2029
LANGOWAN TIMUR	27.986.295	27.660.390	27.334.486	27.008.581	26.682.676
LANGOWAN BARAT	39.203.440	41.375.481	43.547.521	47.896.684	47.891.602
LANGOWAN SELATAN	17.888.410	18.334.221	18.780.031	20.141.358	19.671.652
LANGOWAN UTARA	19.015.924	19.312.448	19.608.971	20.853.376	20.202.019
TOMPASO	16.060.778	16.243.456	16.426.133	17.399.707	16.791.489
TOMPASO BARAT	20.022.079	20.257.958	20.493.837	21.716.845	20.965.594
KAWANGKOAN	22.224.517	22.294.035	22.363.552	23.501.311	22.502.587
KAWANGKOAN BARAT	19.171.253	19.253.506	19.335.759	20.342.679	19.500.265
KAWANGKOAN UTARA	19.799.292	20.541.083	21.282.875	23.073.460	22.766.458
SONDER	42.747.864	43.489.428	44.230.993	47.114.107	45.714.121
TOMBARIRI	39.372.152	39.839.705	40.307.257	42.716.467	41.242.361
TOMBARIRI TIMUR	23.740.962	24.640.225	25.539.487	27.697.737	27.338.012
PINELENG	55.737.840	51.550.079	47.362.319	45.230.490	38.986.798
TOMBULU	34.537.279	31.022.558	27.507.837	25.135.646	20.478.396
MANDOLANG	42.412.610	40.634.921	38.857.231	38.845.234	35.301.852
TONDANO BARAT	39.739.999	36.839.497	33.938.996	32.516.519	28.137.994
TONDANO SELATAN	34.282.648	32.648.995	31.015.343	30.780.818	27.748.038

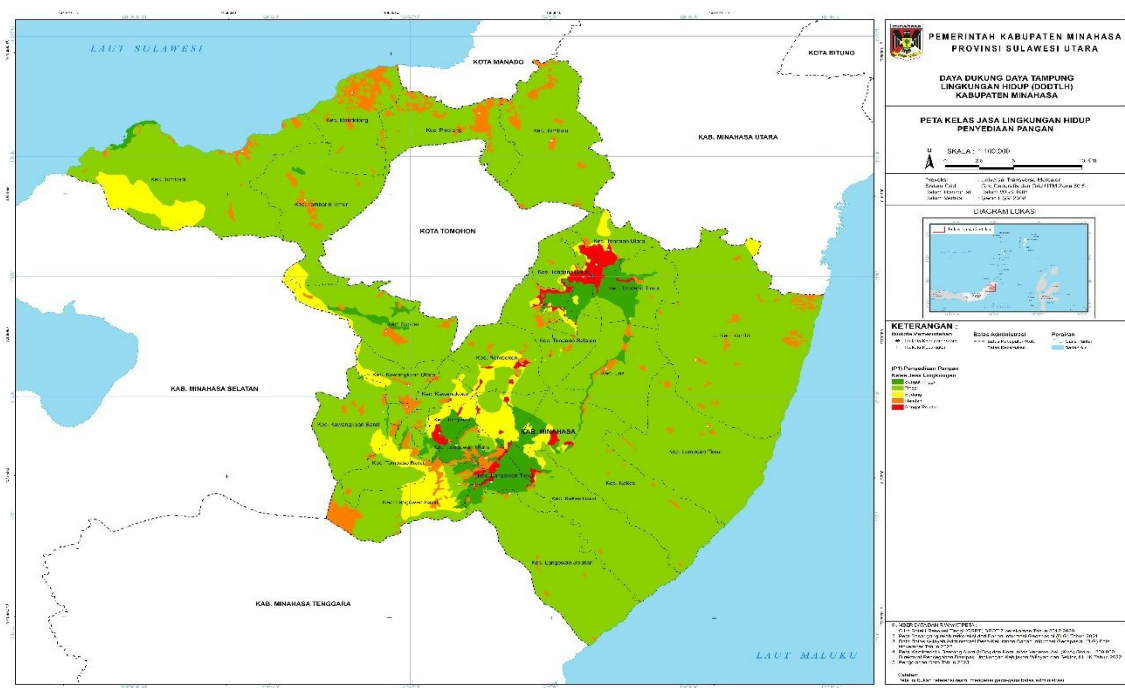
KECAMATAN	PROYEKSI KEBUTUHAN PANGAN (dalam KiloKalori)				
REMBOKEN	27.002.114	26.910.028	26.817.942	27.998.516	26.633.770
KAKAS	26.531.678	26.445.855	26.360.033	27.525.363	26.188.388
KAKAS BARAT	24.437.686	25.078.173	25.718.659	27.614.343	26.999.632
LEMBEAN TIMUR	18.225.299	18.390.598	18.555.898	19.612.682	18.886.496
ERIS	24.239.291	23.543.182	22.847.073	23.205.772	21.454.855
KOMBI	23.043.811	22.412.221	21.780.632	22.156.140	20.517.454
TONDANO TIMUR	33.983.745	35.108.790	36.233.835	39.137.875	38.483.925
TONDANO UTARA	27.370.559	27.184.918	26.999.277	28.090.476	26.627.996
JUMLAH	718.777.526	711.011.752	703.245.978	727.312.186	687.714.430
Standar kalori per orang per hari di Indonesia menurut PMK No. 28 Tahun 2019 adalah 2100 kkal (kilokalori).					

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosisistem

a) Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Dari hasil analisa, Jasa lingkungan penyedia pangan secara keseluruhan di Kabupaten Minahasa masih sangat baik. Hanya sebesar 1.173,4 Ha wilayah berada dalam kelas sangat rendah dalam menyediakan kebutuhan pangan. Sedangkan yang mendominasi adalah kelas Tinggi seluas 66,866.95 Ha. Luas dan persentase jasa Lingkungan penyedia pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.9 dan sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.7

Gambar 2.7 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan



Tabel 2.9 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	GRAND TOTAL
ERIS	92.86	0.78	146.38	34.05	4,041.53	4,315.60
KAKAS	31.21	103.29	56.75	3,920.47	3,612.07	7,723.80
KAKAS BARAT	22.94	135.41	70.37	3,707.61	3,173.98	7,110.31
KAWANGKOAN	125.69	7.93	149.58	924.79	319.11	1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	100.13		5.97	1,536.05	999.26	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	118.50	2.57	7.40	657.46	834.29	1,620.23
KOMBI	101.18			7,868.13	4,634.32	12,603.64
LANGOWAN BARAT	764.42	29.05	188.17	1,243.26	1,644.69	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	62.00	19.40	88.18	5,050.30	1,800.00	7,019.87

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	GRAND TOTAL
LANGOWAN TIMUR	126.10	75.41	102.43	39.34	932.14	1,275.42
LANGOWAN UTARA	150.33	4.63	223.04	236.08	319.82	933.89
LEMBEAN TIMUR	62.75			6,691.66	786.01	7,540.43
MANDOLANG	382.90		79.20	2.24	3,380.01	3,844.34
PINELENG	437.66		17.68		5,522.68	5,978.03
REMBOKEN	143.61	72.36	105.57	1,159.34	1,460.97	2,941.85
SONDER	233.86	7.85	247.47	1,679.72	2,817.83	4,986.73
TOMBARIRI	198.43		3.78	2,082.24	7,959.99	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	120.21		50.24	49.32	5,293.32	5,513.10
TOMBULU	267.60		20.90	12.92	8,173.19	8,474.61
TOMPASO	9.37	99.83	222.15	162.98	638.03	1,132.36
TOMPASO BARAT	167.98	2.68	157.45	631.53	1,128.06	2,087.70
TONDANO BARAT	19.47	196.44	0.10	201.44	517.67	935.13
TONDANO SELATAN	131.68	102.62	56.16	1,127.25	2,623.08	4,040.80
TONDANO TIMUR	22.37	156.74	100.13	15.72	2,347.94	2,642.91
TONDANO UTARA	49.15	156.93	22.14	511.95	1,906.95	2,647.13
Grand Total	3,942.42	1,173.94	2,121.25	39,545.86	66,866.95	113,650.41

b) Jasa Lingkungan Penyediaan Air

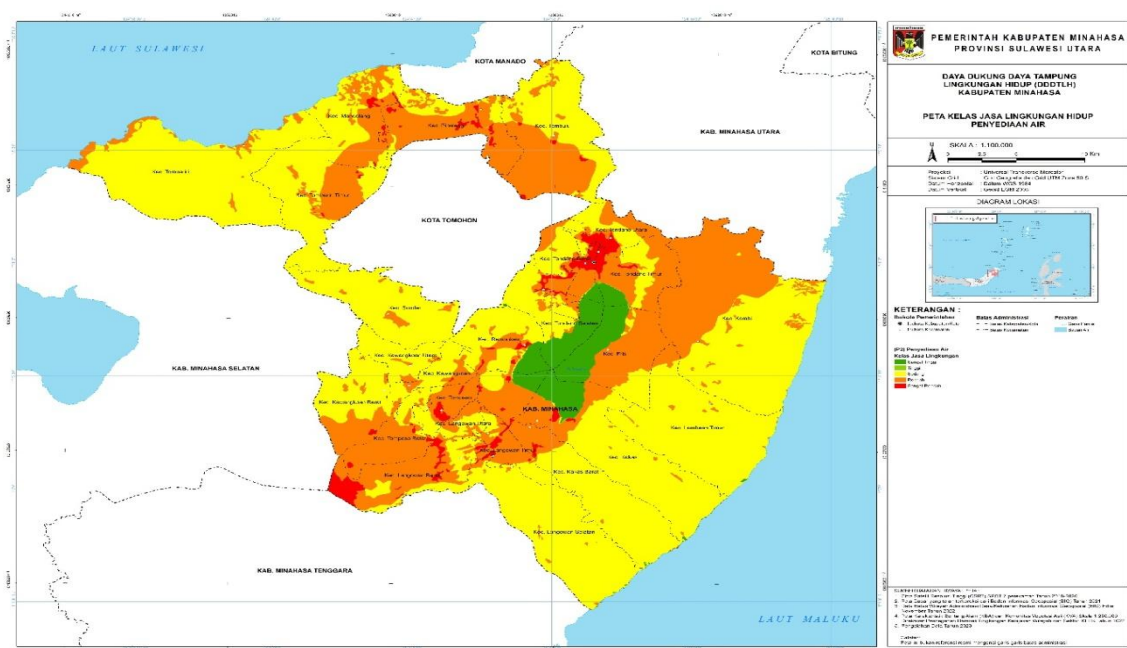
Selain bahan pangan hal lain yang juga merupakan kebutuhan utama bagi manusia adalah ketersediaan air bersih. Air bersih juga merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah.

Bentang Lahan yang terdapat di Kabupaten Minahasa ada yang dapat memberikan manfaat berupa penyediaan air bersih dengan baik maupun tidak. Secara umum di Kabupaten Minahasa lahan yang mampu menyediakan air bersih dapat dibagi menjadi lahan berpotensi Sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dalam menyediakan air bersih di Kabupaten Minahasa memiliki luasan sebesar 4,625.04 Ha atau dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Minahasa sedangkan lahan yang masuk dalam kategori sangat rendah dalam penyediaan air bersih memiliki luasan yang paling tinggi sebesar 79,602.09 Ha. rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan sebarannya pada Gambar. 2.8.

Tabel 2.10 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	GRAND TOTAL
ERIS	2,408.14	493.49	1,252.53	159.54	1.90	4,315.60
KAKAS	6,488.68	183.25	1,013.26	30.14	8.46	7,723.80
KAKAS BARAT	6,182.78	275.57	569.61	72.96	9.40	7,110.31
KAWANGKOAN	1,316.87	48.88		160.98	0.39	1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	961.27	503.32		1,176.82		2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	1,029.21			591.02		1,620.23
KOMBI	11,846.32	756.82			0.50	12,603.64
LANGOWAN BARAT	942.99	1,713.34	1.57	1,211.69		3,869.59
LANGOWAN SELATAN	6,963.04	54.36			2.47	7,019.87
LANGOWAN TIMUR	1,166.21	75.41		33.81		1,275.42
LANGOWAN UTARA	704.40	4.73	3.91	220.86		933.89
LEMBEAN TIMUR	7,535.94				4.49	7,540.43
MANDOLANG	2,299.48	1,057.85	0.49	486.52		3,844.34
PINELENG	2,446.95	1,747.65	3.74	1,775.01	4.68	5,978.03
REMBOKEN	1,811.27	192.54	459.18	477.62	1.25	2,941.85
SONDER	3,596.95		19.22	1,370.56		4,986.73
TOMBARIRI	5,991.07		24.43	4,228.94		10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	3,544.99	1,172.38	8.86	786.86		5,513.10
TOMBULU	5,579.39	1,880.92	23.60	988.00	2.70	8,474.61
TOMPASO	980.37	151.99				1,132.36
TOMPASO BARAT	597.94	907.86		581.91		2,087.70
TONDANO BARAT	488.22	252.84	22.13	169.36	2.58	935.13
TONDANO SELATAN	1,580.28	171.12	1,107.79	1,180.40	1.21	4,040.80
TONDANO TIMUR	1,589.20	483.33	114.72	447.57	8.08	2,642.91
TONDANO UTARA	1,550.15	331.01		763.60	2.37	2,647.13
Grand Total	79,602.09	12,458.65	4,625.04	16,914.16	50.48	113,650.41

Gambar 2.8 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air



c) Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara

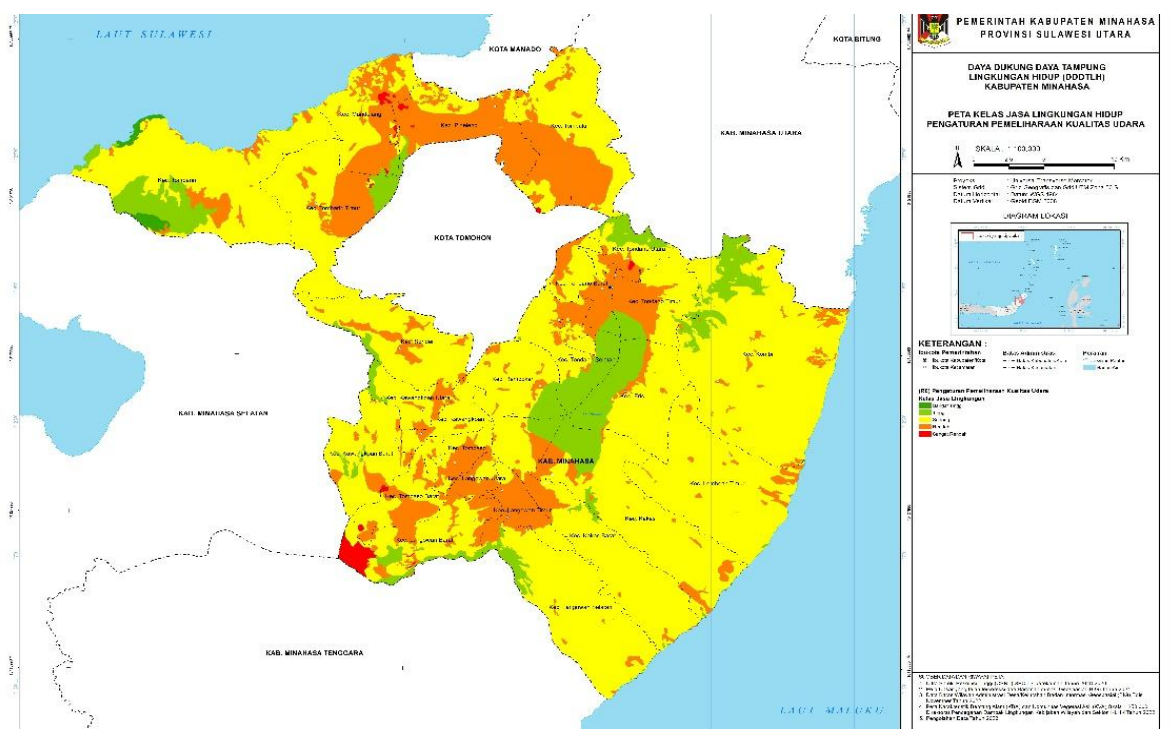
Area berhutan pada daerah pegunungan merupakan sumber pengatur kualitas udara yang sangat baik, berdasarkan hasil analisa kinerja jasa Lingkungan pada kelas sangat tinggi memiliki luasan sebesar 3,774.86 Ha sedangkan peringkat kinerja pengaturan kualitas udara sangat rendah yaitu seluas 767.73 Ha. Sedangkan wilayah yang menyediakan jasa ekosistem pengatur kualitas udara paling besar terdapat pada kategori sedang dengan luasan sebesar 59,641.48 Ha atau 31,78%. Luas dan persentase jasa Lingkungan pengaturan kualitas udara selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.11 dan peta sebarannya dapat dilihat pada gambar 3.9.

Tabel 2.11 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	1,512.47	0.48		1,548.23	1,254.43	4,315.60
KAKAS	1,746.77	0.61		4,961.50	1,014.91	7,723.80
KAKAS BARAT	3,131.11			3,409.59	569.61	7,110.31
KAWANGKOAN	724.08			803.03		1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	485.45		668.44	1,004.54	482.97	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	552.49		376.23	691.51		1,620.23
KOMBI	3,877.00			8,726.63		12,603.64

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
LANGOWAN BARAT	868.32	532.15		1,255.86	1,213.26	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	1,305.05	0.21		5,714.61		7,019.87
LANGOWAN TIMUR	1,168.21		29.99	75.16	2.05	1,275.42
LANGOWAN UTARA	599.48		111.31	212.57	10.53	933.89
LEMBEAN TIMUR	2,975.85			4,564.58		7,540.43
MANDOLANG	1,785.35	27.36		1,932.99	98.64	3,844.34
PINELENG	3,136.58	123.21		1,056.94	1,661.29	5,978.03
REMBOKEN	1,126.11	10.70		1,345.68	459.36	2,941.85
SONDER	1,710.35		97.44	3,159.72	19.22	4,986.73
TOMBARIRI	1,155.84		2,466.54	6,597.63	24.43	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	1,787.25	3.13		3,268.22	454.49	5,513.10
TOMBULU	3,355.10	21.24	24.92	4,622.42	450.94	8,474.61
TOMPASO	972.15	0.13		160.08		1,132.36
TOMPASO BARAT	895.29	14.28		596.22	581.91	2,087.70
TONDANO BARAT	666.11	8.34		219.30	41.38	935.13
TONDANO SELATAN	1,626.79	18.32		1,289.96	1,105.72	4,040.80
TONDANO TIMUR	1,282.52	1.95		1,235.63	122.81	2,642.91
TONDANO UTARA	1,404.53	5.62		1,188.87	48.12	2,647.13
Grand Total	39,850.28	767.73	3,774.86	59,641.48	9,616.06	113,650.41

Gambar 2. 9 Peta Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara



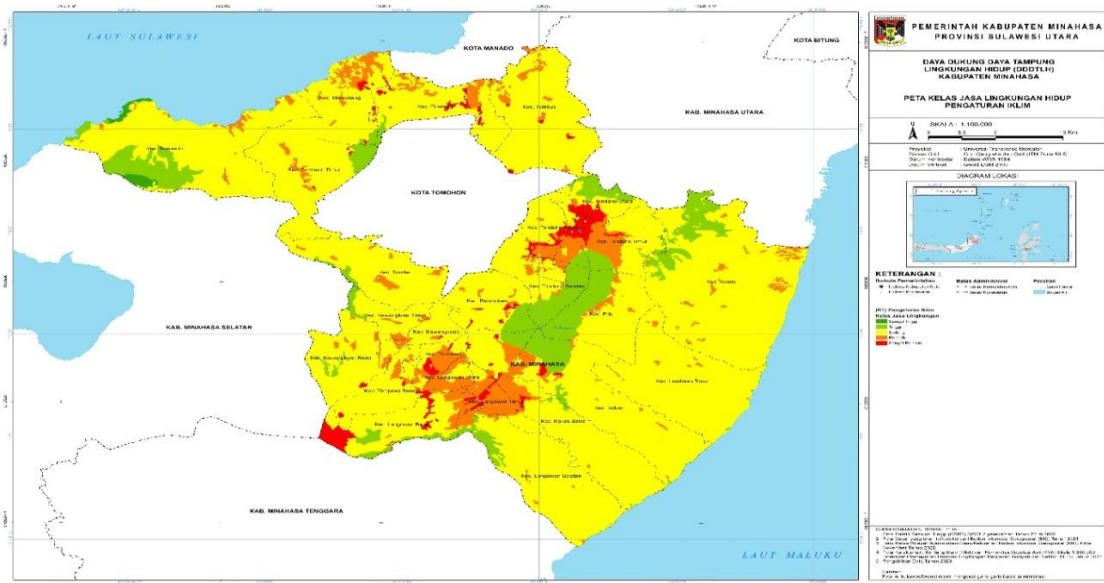
d) Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembapan dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas Ekoregion yang terdapat di Kabupaten Minahasa ada yang dapat memberikan manfaat berupa pengaturan iklim maupun tidak. Lahan yang paling besar berpotensi dalam pengaturan iklim di Kabupaten Minahasa berada dalam kategori sedang dengan luasan sebesar 88,256.53 Ha dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Minahasa. Luas dan persentase jasa Lingkungan pengatur iklim selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.12 dan peta sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.10

Tabel 2.12 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	GRAND TOTAL
ERIS	193.34	4.50		2,865.24	1,252.5 ₃	4,315.60
KAKAS	604.25	96.41		6,003.07	1,020.0 ₈	7,723.80
KAKAS BARAT	1,310.93	135.41		5,087.24	576.73	7,110.31
KAWANGKOA N	470.39	7.93		1,048.79		1,527.11
KAWANGKOA N BARAT	102.13	4.14	657.37	1,383.73	494.04	2,641.40
KAWANGKOA N UTARA	126.11	2.57	279.07	1,115.32	97.16	1,620.23
KOMBI	101.18			12,501.9 ₆	0.50	12,603.6 ₄
LANGOWAN BARAT	350.53	691.18		1,614.62	1,213.2 ₆	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	235.68	19.61		6,762.12	2.47	7,019.87
LANGOWAN TIMUR	809.15	75.41	29.99	358.82	2.05	1,275.42
LANGOWAN UTARA	480.13	4.63	111.31	327.29	10.53	933.89
LEMBEAN TIMUR	62.75			7,473.19	4.49	7,540.43
MANDOLANG	361.26	28.24		3,356.21	98.64	3,844.34
PINELENG	246.78	205.93		3,864.02	1,661.2 ₉	5,978.03
REMBOKEN	519.04	84.83		1,877.74	460.25	2,941.85
SONDER	258.47	9.48	97.44	4,614.29	7.05	4,986.73
TOMBARIRI	199.17		1,101.14	7,554.30	1,389.8 ₃	10,244.4 ₄
TOMBARIRI TIMUR	123.23	7.87		4,928.90	453.10	5,513.10
TOMBULU	214.26	62.71	24.92	7,721.51	451.23	8,474.61
TOMPASO	869.42	99.96		162.98		1,132.36
TOMPASO BARAT	316.81	32.92		1,156.06	581.91	2,087.70
TONDANO BARAT	217.55	204.78		472.08	40.71	935.13
TONDANO SELATAN	781.09	130.84		2,020.90	1,107.9 ₆	4,040.80
TONDANO TIMUR	739.74	156.74		1,631.70	114.72	2,642.91
TONDANO UTARA	88.98	157.94		2,354.46	45.74	2,647.13
Grand Total	9,782.35	2,224.05	2,301.24	88,256.5 ₃	11,086.26	113,650.4 ₁

Gambar 2.10 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim



e) Jasa Lingkungan Pengaturan Tanah Longsor

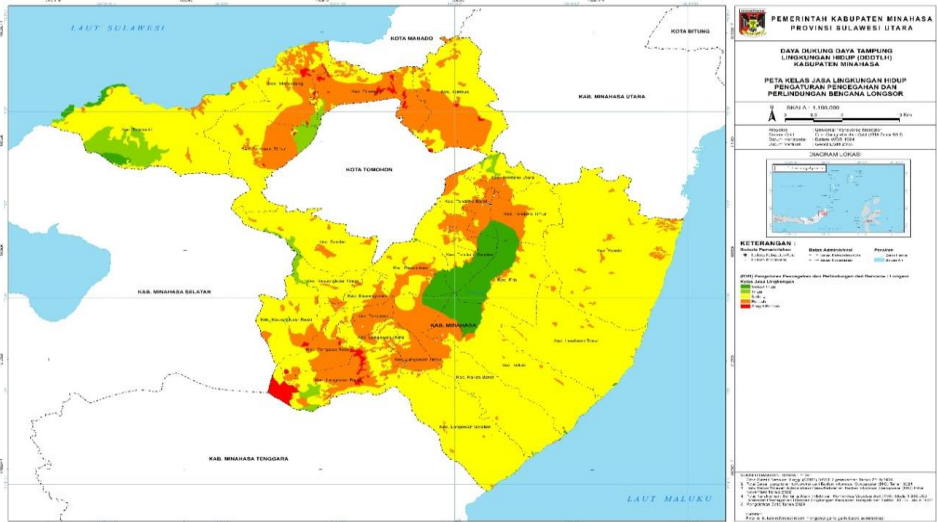
Kondisi tanah dari bentang lahan dan keadaan penutupan lahan merupakan faktor utama pengatur tanah longsor. Kinerja jasa Lingkungan pengatur tanah longsor di Kabupaten Minahasa secara umum didominasi dengan kriteria sedang yaitu seluas 71,655.09 Ha dari luas total luas wilayah dan hanya 1,040.33 Ha pada kriteria sangat rendah. Luas dan persentase jasa Lingkungan pengatur tanah logsor selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.13 dan peta sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.12

Tabel 2.13 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Tanah Longsor

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	GRAND TOTAL
ERIS	1,274.84	5.28	32.81	1,781.06	1,221.62	4,315.60
KAKAS	1,082.36	6.88	25.49	5,612.83	996.23	7,723.80
KAKAS BARAT	1,695.87			4,835.44	579.00	7,110.31
KAWANGKOAN	398.75			1,127.97	0.39	1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	639.23	4.14	199.47	846.63	951.94	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	121.07		279.07	1,122.93	97.16	1,620.23
KOMBI	1,841.00			10,762.14	0.50	12,603.64
LANGOWAN BARAT	1,576.60	662.13	1.57	417.60	1,211.69	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	625.98			6,391.42	2.47	7,019.87
LANGOWAN TIMUR	783.13		11.48	460.25	20.56	1,275.42
LANGOWAN UTARA	297.81		82.31	514.25	39.53	933.89

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	GRAND TOTAL
LEMBEAN TIMUR	62.75			7,473.19	4.49	7,540.43
MANDOLANG	1,607.30	28.24	0.49	2,103.56	104.75	3,844.34
PINELENG	2,976.89	201.80	3.74	1,127.90	1,667.70	5,978.03
REMBOKEN	1,038.80	17.72	0.83	1,424.90	459.60	2,941.85
SONDER	241.71		116.66	4,617.48	10.89	4,986.73
TOMBARIRI	198.43		1,125.57	7,555.04	1,365.40	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	1,482.11	7.55	8.86	3,558.94	455.64	5,513.10
TOMBULU	2,921.92	60.86	48.80	5,011.74	431.29	8,474.61
TOMPASO	803.18			329.18		1,132.36
TOMPASO BARAT	1,042.24	30.24		433.31	581.91	2,087.70
TONDANO BARAT	598.21	0.51	2.56	293.12	40.73	935.13
TONDANO SELATAN	1,455.00	14.96	1.55	1,461.83	1,107.45	4,040.80
TONDANO TIMUR	1,808.86		8.08	711.25	114.72	2,642.91
TONDANO UTARA	917.86		2.37	1,681.16	45.74	2,647.13
GRAND TOTAL	27,491.88	1,040.33	1,951.71	71,655.09	11,511.40	113,650.41

Gambar 2.11 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tanah Longsor



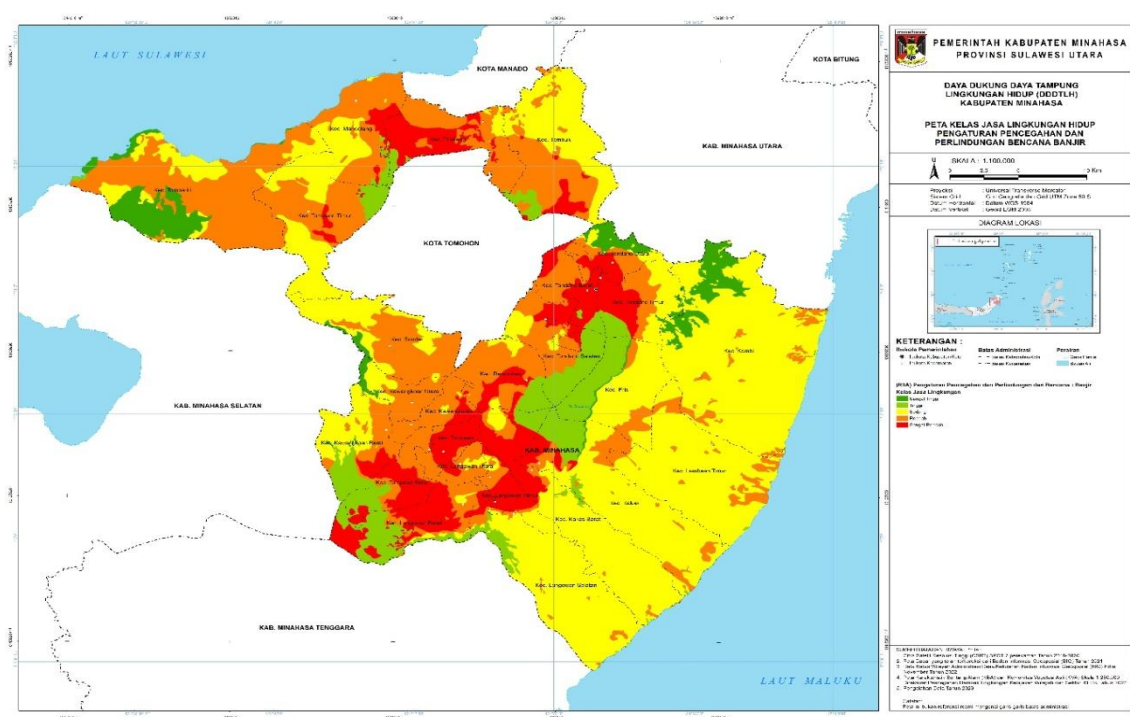
f) Jasa Lingkungan Pengaturan Banjir

Untuk jasa Lingkungan pengaturan banjir, arel yang paling kecil merupakan area dengan kriteria sangat tinggi untuk pengaturan banjir yaitu sebesar 3,991.67 Ha dari total luas wilayah, tersebar dari punggung gunung hingga puncak gunung. Daerah berhutan merupakan faktor pendukung tingginya tingkat kriteria pengatur banjir, untuk wilayah dengan kriteria sangat rendah sebesar 11,133.00 Ha. Luas dan persentase jasa Lingkungan pengaturan banjir selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.14 dan peta sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.13

Tabel 2.14 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Banjir

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	2,500.01	20.43	30.91	540.74	1,223.51	4,315.60
KAKAS	2,811.23	639.10	23.85	3,258.56	991.06	7,723.80
KAKAS BARAT	2,243.68	1,444.58		2,852.44	569.61	7,110.31
KAWANGKOAN	573.44	229.77		723.90		1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	708.57	48.19	668.44	733.23	482.97	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	561.98		376.23	682.02		1,620.23
KOMBI	6,013.09			6,590.55		12,603.6 4
LANGOWAN BARAT	1,388.28	1,014.45	89.99	253.60	1,123.27	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	1,454.33	141.06		5,424.48		7,019.87
LANGOWAN TIMUR	511.19	657.03	29.99	75.16	2.05	1,275.42
LANGOWAN UTARA	531.58	147.38	115.22	133.09	6.62	933.89
LEMBEAN TIMUR	3,937.99			3,602.44		7,540.43
MANDOLANG	1,779.24	251.28		1,715.19	98.64	3,844.34
PINELENG	1,900.49	1,405.24	3.74	1,006.32	1,662.24	5,978.03
REMBOKEN	1,062.19	459.44	0.65	960.86	458.71	2,941.85
SONDER	1,819.58		104.48	3,050.50	12.17	4,986.73
TOMBARIRI	2,015.54		2,490.94	5,737.93	0.03	10,244.4 4
TOMBARIRI TIMUR	1,637.72	212.81	7.47	3,208.08	447.02	5,513.10
TOMBULU	2,562.83	959.67	48.52	4,473.84	429.75	8,474.61
TOMPASO	322.23	741.91		68.22		1,132.36
TOMPASO BARAT	1,264.21	59.81		181.78	581.91	2,087.70
TONDANO BARAT	213.48	540.58		139.69	41.38	935.13
TONDANO SELATAN	1,807.76	823.59	1.25	303.73	1,104.47	4,040.80
TONDANO TIMUR	1,602.91	872.79		44.41	122.81	2,642.91
TONDANO UTARA	1,418.13	463.91		716.97	48.12	2,647.13
GRAND TOTAL	42,641.6 8	11,133.0 0	3,991.67	46,477.7 1	9,406.34	113,650. 41

Gambar 2.12 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Banjir



g) Jasa Lingkungan Pengaturan Kebakaran

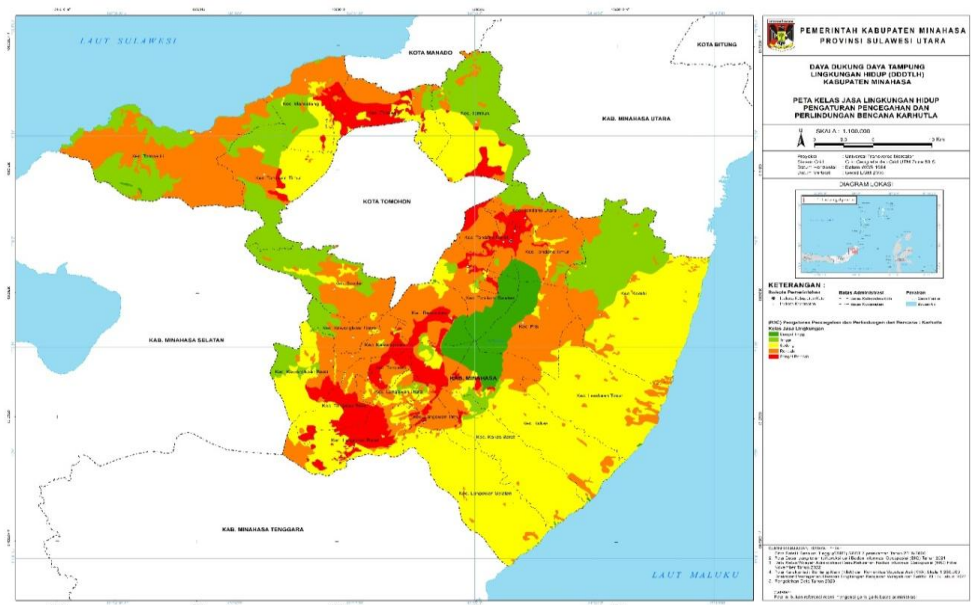
Kinerja jasa Lingkungan pengaturan kebakaran untuk kelas kriteria sangat tinggi hanya sebesar 4,607.38 Ha dari total luas wilayah, kriteria pengaturan kebakaran didominasi oleh kelas rendah yaitu sebesar 77,278.83 Ha. Hanya sebesar 4,019.85 Ha area dengan kinerja jasa Lingkungan pengaturan kebakaran pada kelas kriteria tinggi. Luas dan persentase jasa Lingkungan pengaturan kebakaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.15 dan peta sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.14

Tabel 2.15 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Kebakaran

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	GRAND TOTAL
ERIS	1,775.87	1,157.14	1,252.53	128.17	1.90	4,315.60
KAKAS	6,153.43	515.17	1,013.26	33.48	8.46	7,723.80
KAKAS BARAT	6,057.19	403.59	569.61	72.80	7.12	7,110.31
KAWANGKO AN	1,324.26	52.87		149.97		1,527.11
KAWANGKO AN BARAT	928.84	555.18		479.20	678.18	2,641.40
KAWANGKO AN UTARA	1,165.03	71.57		7.40	376.23	1,620.23
KOMBI	10,860.29	1,739.82		3.03	0.50	12,603.64
LANGOWAN	1,099.13	1,456.38	1.57	1,207.8	104.71	3,869.59

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	GRAND TOTAL
BARAT				0		
LANGOWAN SELATAN	6,443.88	478.08		95.23	2.68	7,019.87
LANGOWAN TIMUR	1,063.27	75.41		104.70	32.05	1,275.42
LANGOWAN UTARA	575.20	13.81	3.91	223.04	117.93	933.89
LEMBEAN TIMUR	7,535.88			0.06	4.49	7,540.43
MANDOLAN G	2,317.97	1,253.52	0.49	265.76	6.60	3,844.34
PINELENG	1,465.62	2,818.29	3.74	1,680.23	10.14	5,978.03
REMBOKEN	1,801.12	541.70	459.18	139.50	0.35	2,941.85
SONDER	3,508.18	1,080.23	7.05	269.15	122.12	4,986.73
TOMBARIRI	7,605.06	137.04	24.43	11.37	2,466.54	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	3,578.75	1,422.95	7.47	492.53	11.40	5,513.10
TOMBULU	5,189.73	2,751.25	23.60	480.87	29.16	8,474.61
TOMPASO	754.04	155.91		222.27	0.13	1,132.36
TOMPASO BARAT	422.13	898.75		765.39	1.42	2,087.70
TONDANO BARAT	502.42	380.65	20.24	21.43	10.38	935.13
TONDANO SELATAN	2,179.54	679.36	1,105.59	60.41	15.89	4,040.80
TONDANO TIMUR	1,345.31	1,077.63	114.72	97.16	8.08	2,642.91
TONDANO UTARA	1,626.67	943.82		73.26	3.38	2,647.13
GRAND TOTAL	77,278.83	20,660.11	4,607.38	7,084.24	4,019.85	113,650.41

Gambar 2.13 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Kebakaran



h) Jasa Lingkungan Pengaturan Air

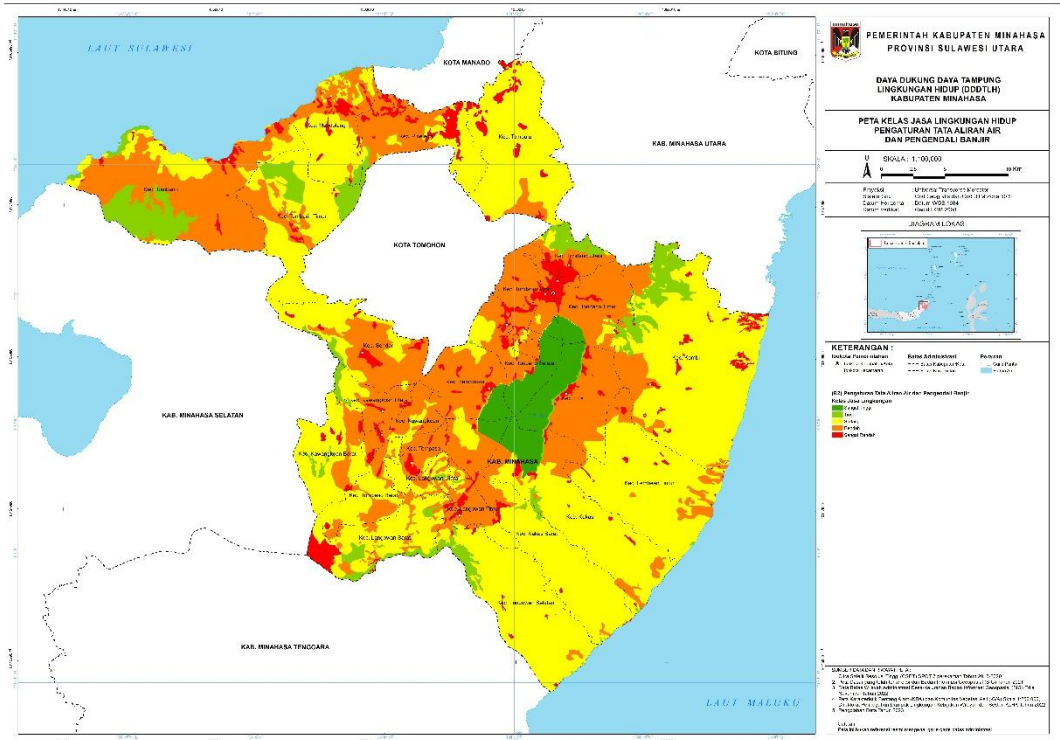
Kinerja jasa Lingkungan pengaturan air di wilayah Kabupaten Minahasa didominasi oleh kelas kriteria rendah dengan sebaran luas sebesar 90,635.04 Ha. Sebesar 3,996.64 Ha pada kriteria sangat rendah dan 4,548.12 Ha pada kriteria sangat tinggi. Luas dan persentase jasa Lingkungan pengatur air selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.16 dan peta sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.15

Tabel 2.16 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Air

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	2,954.23	92.86	1,221.62	14.09	32.81	4,315.60
KAKAS	6,544.32	127.62	989.42	36.95	25.49	7,723.80
KAKAS BARAT	6,349.93	158.35	569.61	32.42		7,110.31
KAWANGKOAN	1,303.58	63.29		160.25		1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	964.61	88.59	9.74	436.80	1,141.67	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	1,148.03	89.49		6.49	376.23	1,620.23
KOMBI	12,501.96	101.18		0.50		12,603.64
LANGOWAN BARAT	702.19	553.56	17.85	1,400.57	1,195.40	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	6,763.20	70.35		186.32		7,019.87
LANGOWAN TIMUR	1,070.23	88.33	16.16	84.81	15.89	1,275.42
LANGOWAN UTARA	418.79	10.96	23.96	382.31	97.88	933.89
LEMBEAN TIMUR	7,473.19	62.75		4.49		7,540.43
MANDOLANG	2,956.13	146.10	0.49	643.48	98.15	3,844.34
PINELENG	3,874.39	437.66			1,665.98	5,978.03
REMBOKEN	2,255.40	213.35	458.53	13.74	0.83	2,941.85
SONDER	4,628.36	241.71			116.66	4,986.73
TOMBARIRI	7,430.57	196.08	0.03	126.81	2,490.94	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	3,959.90	42.80		1,055.91	454.49	5,513.10
TOMBULU	7,728.45	267.60		0.28	478.27	8,474.61
TOMPASO	703.48	99.83		329.05		1,132.36
TOMPASO BARAT	814.69	39.89	1.42	651.21	580.48	2,087.70
TONDANO BARAT	672.58	211.51	20.24	7.77	23.03	935.13
TONDANO SELATAN	2,660.95	233.13	1,104.34	38.79	3.58	4,040.80

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
TONDANO TIMUR	2,337.40	179.12	114.72	3.58	8.08	2,642.91
TONDANO UTARA	2,418.50	180.52			48.12	2,647.13
Grand Total	90,635.04	3,996.64	4,548.12	5,616.62	8,853.99	113,650.41

Gambar 2.14 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Air



i) Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air

Luas wilayah untuk kinerja jasa Lingkungan pengaturan pemurnian air pada kelas kategori sangat rendah hanya seluas 9,168.70 Ha dari total luas wilayah yang tersebar di 7 Kecamatan dari 26 Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Hanya 6,088.57 Ha wilayah yang menempati kelas kategori tinggi dan 76,635.72 Ha wilayah merupakan areal pada kategori rendah yang merupakan arel paling dominan. Luas dan persentase jasa Lingkungan pengaturan pemurnian air selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.17 dan peta sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.16.

Tabel 2.17 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	978.54	20.43	2,064.11	1,252.53	4,315.60
KAKAS	4,138.63	604.42	1,967.48	1,013.26	7,723.80
KAKAS BARAT	3,774.01	1,527.40	1,239.29	569.61	7,110.31
KAWANGKOAN	1,258.18	268.93			1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	1,229.57	262.18	1,138.58	11.07	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	1,172.23		350.84	97.16	1,620.23
KOMBI	8,904.11		3,699.53		12,603.64
LANGOWAN BARAT	1,423.29	1,196.63	1,249.66		3,869.59
LANGOWAN SELATAN	5,127.73	159.54	1,732.60		7,019.87
LANGOWAN TIMUR	201.81	657.02	416.59		1,275.42
LANGOWAN UTARA	678.83	139.84	115.22		933.89
LEMBEAN TIMUR	6,751.64		788.79		7,540.43
MANDOLANG	3,745.71		98.64		3,844.34
PINLENG	4,312.05		1,662.24	3.74	5,978.03
REMBOKEN	1,927.45	539.74	15.48	459.18	2,941.85
SONDER	3,787.70		1,179.81	19.22	4,986.73
TOMBARIRI	7,616.43		1,238.21	1,389.80	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	5,009.29		494.95	8.86	5,513.10
TOMBULU	7,995.76		455.25	23.60	8,474.61
TOMPASO	338.93	793.43			1,132.36
TOMPASO BARAT	1,113.17	394.05	580.48		2,087.70
TONDANO BARAT	447.36	436.74	30.78	20.24	935.13
TONDANO SELATAN	1,976.18	917.81	41.21	1,105.59	4,040.80
TONDANO TIMUR	1,084.83	872.79	570.56	114.72	2,642.91
TONDANO UTARA	1,642.29	377.75	627.09		2,647.13
Grand Total	76,635.72	9,168.70	21,757.41	6,088.57	113,650.41

Dari hasil analisa, kinerja jasa Lingkungan pengaturan pengendalian hama, sebesar 83,907.38 Ha dari total luas wilayah merupakan kelas kriteria rendah dan merupakan yang paling luas dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam pengaturan pengendalian hama. Untuk kelas kriteria Sedang dengan sangat tinggi yaitu seluas 8,753.10 Ha dan 8,753.10 Ha. Luas dan persentase jasa Lingkungan pengaturan pengendalian hama selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.18 dan peta sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.17

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	GRAND TOTAL
ERIS	3,054.80		1,260.81	4,315.60
KAKAS	6,670.25		1,053.55	7,723.80
KAKAS BARAT	5,467.87		1,642.44	7,110.31
KAWANGKOAN	1,306.03		221.08	1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	1,367.28	1,151.41	122.71	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	820.18	376.23	423.82	1,620.23
KOMBI	8,827.32		3,776.32	12,603.64
LANGOWAN BARAT	2,542.64	1,211.69	115.25	3,869.59

k) Jasa Lingkungan Pendukung Keanekaragaman Hayati

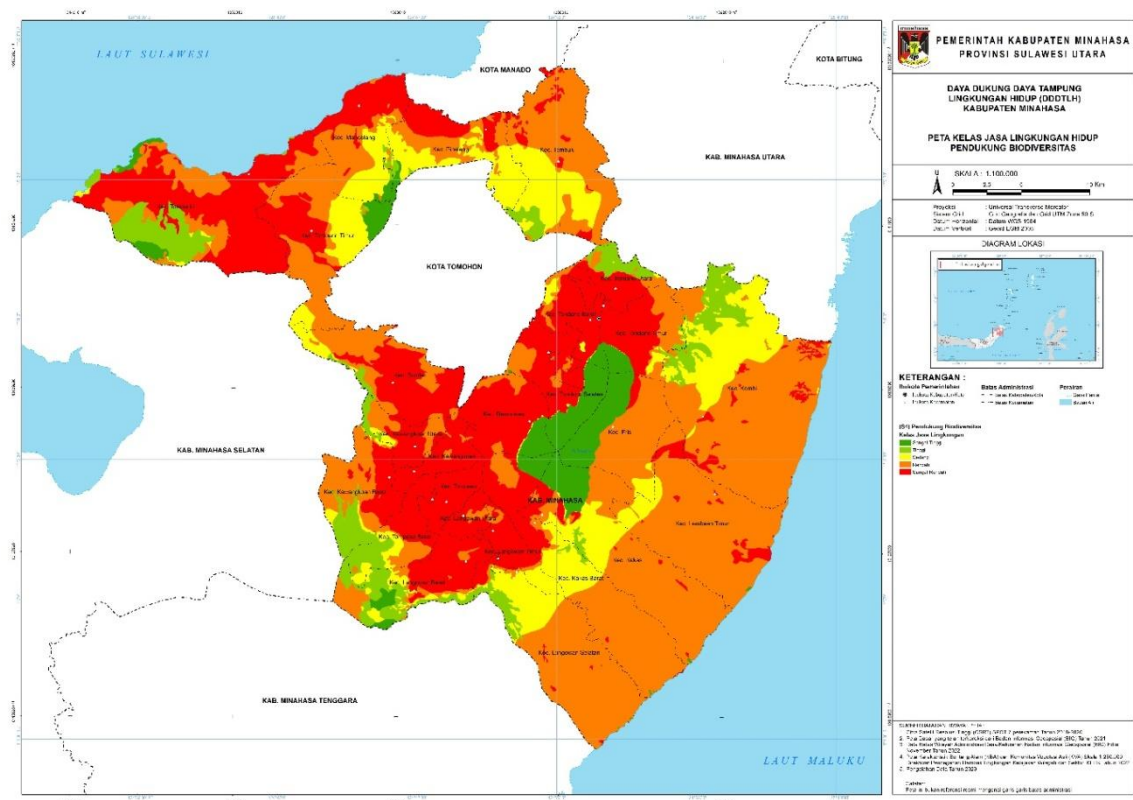
Seiring semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan sumberdaya alam hayati yang berakibat pada menurunnya sumberdaya alam hayati tersebut apabila tidak dikelola secara lestari atau dikenal dengan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap pengelolaan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan menjadi prioritas. Mengingat, kebutuhan akan sumber daya alam hayati sangat tergantung pada kondisi suatu wilayah, maka dalam pelaksanaan pengelolaannya diperlukan pemahaman terhadap nilai keanekaragaman hayati sebagai sumberdaya alam hayati sesuai dengan wilayahnya. Nilai keanekaragaman hayati mencakup tingkat keragaman dan kelimpahan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang ada di dalam wilayah kelola suatu unit pengelolaan atau unit usaha. Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan. Di Kabupaten Minahasa luasan jasa pendukung keankaragaman hayati yang paling besar berada pada kelas dengan kriteria Rendah dengan luasan sebesar 74,140.83 Ha dari total luas wilayah. Luas dan persentase jasa Lingkungan pendukung keanekaragaman hayati selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.19 dan peta sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.18

Tabel 2.19 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pendukung Keanekaragaman Hayati

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	GRAND TOTAL
ERIS	843.36		1,254.43	2,217.82		4,315.60
KAKAS	5,184.99		1,014.91	1,523.90		7,723.80
KAKAS BARAT	5,373.50	0.85	569.61	1,166.36		7,110.31
KAWANGKOAN	1,379.74	147.37				1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	1,200.53	16.17	1,141.67	273.29	9.74	2,641.40
KAWANGKOAN	1,145.28	31.59	376.23	67.14		1,620.23

UTARA						
KOMBI	8,427.24			4,176.40		12,603.64
LANGOWAN BARAT	1,777.02	569.20	1,195.40	310.11	17.85	3,869.59
LANGOWAN SELATAN	5,268.58	93.47		1,657.82		7,019.87
LANGOWAN TIMUR	725.11	179.22	15.89	339.04	16.16	1,275.42
LANGOWAN UTARA	452.07	359.98	97.88		23.96	933.89
LEMBEAN TIMUR	6,908.08			632.35		7,540.43
MANDOLANG	2,026.64	468.77	98.15	1,250.29	0.49	3,844.34
PINELENG	1,600.82		1,665.98	2,711.23		5,978.03
REMBOKEN	2,477.51		459.36	4.99		2,941.85
SONDER	3,797.70		116.66	1,072.37		4,986.73
TOMBARIRI	7,632.37	8.95	2,490.94	112.15	0.03	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	3,525.31	155.28	454.49	1,378.02		5,513.10
TOMBULU	5,388.70		478.27	2,607.64		8,474.61
TOMPASO	864.55	267.81				1,132.36
TOMPASO BARAT	693.48	286.36	580.48	525.95	1.42	2,087.70
TONDANO BARAT	828.14		41.38	65.61		935.13
TONDANO SELATAN	2,919.99		1,105.72	15.08		4,040.80
TONDANO TIMUR	1,847.89		122.81	672.22		2,642.91
TONDANO UTARA	1,852.24		48.12	746.77		2,647.13
GRAND TOTAL	74,140.83	2,585.02	13,328.36	23,526.55	69.65	113,650.41

Gambar 2.17 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Keanekaragaman Hayati



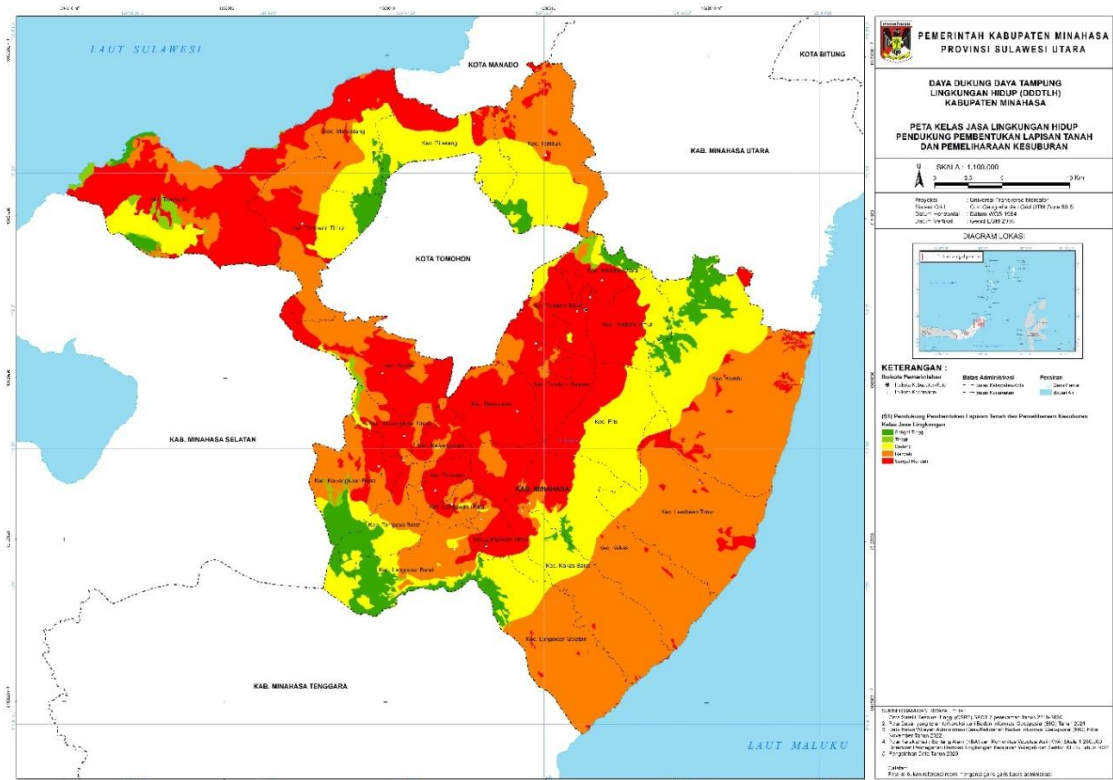
1) Jasa Lingkungan Pendukung Regenerasi Tanah

Bentang lahan yang terdapat di Kabupaten Minahasa ada yang dapat memberikan manfaat berupa regenerasi tanah. Secara umum di Kabupaten Minahasa lahan yang dapat mendukung regenarasi tanah dapat dibagi menjadi lahan berpotensi Sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi sangat tinggi mendukung regenerasi tanah di Kabupaten Minahasa memiliki luasan sebesar 7.272,66 Ha dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Minahasa., sedangkan yang mendominasi adalah kriteria kelas rendah sebesar 85.516,61 Ha dari luas keseluruhan. Luas dan persentase jasa Lingkungan pendukung regenerasi tanah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.20 dan peta sebarannya dapat dilihat pada gambar 2.19

Tabel 2.20 Luas dan Persentase Jasa Lingkungan Pendukung Regenerasi Tanah

KECAMATAN	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	Grand Total
ERIS	1,841.97	1,258.81		1,214.83		4,315.60
KAKAS	5,630.48	1,632.50		460.81		7,723.80
KAKAS BARAT	4,072.51	2,120.52		917.28		7,110.31
KAWANGKOAN	1,240.17	269.44		17.50		1,527.11
KAWANGKOAN BARAT	1,481.57	7.56	1,140.34	0.86	11.07	2,641.40
KAWANGKOAN UTARA	1,223.88	14.70	279.07	5.42	97.16	1,620.23
KOMBI	11,241.75			1,361.89		12,603.64
LANGOWAN BARAT	2,477.94	95.58	1,211.69	84.38		3,869.59
LANGOWAN SELATAN	6,192.77	136.63		690.47		7,019.87
LANGOWAN TIMUR	303.70	657.02	29.99	282.65	2.05	1,275.42
LANGOWAN UTARA	613.97	139.74	116.17	62.25	1.76	933.89
LEMBEAN TIMUR	7,327.83			212.60		7,540.43
MANDOLANG	3,746.20		98.15			3,844.34
PINELENG	4,320.47		1,657.56			5,978.03
REMBOKEN	1,828.72	1,113.13				2,941.85
SONDER	4,086.45	802.84	97.44			4,986.73
TOMBARIRI	7,640.87	137.04	1,101.14		1,365.40	10,244.44
TOMBARIRI TIMUR	5,026.06	41.40	445.63			5,513.10
TOMBULU	8,022.36		452.26			8,474.61
TOMPASO	336.53	793.43		2.39		1,132.36
TOMPASO BARAT	1,472.57	25.78	581.91	7.44		2,087.70
TONDANO BARAT	442.94	473.61	18.58			935.13
TONDANO SELATAN	1,921.33	2,119.47				4,040.80
TONDANO TIMUR	1,342.44	999.18		301.29		2,642.91
TONDANO UTARA	1,681.15	476.33	45.74	443.91		2,647.13
Grand Total	85,516.61	13,314.71	7,275.66	6,065.99	1,477.44	113,650.41

Gambar 2.18 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Regenerasi Tanah



4) Berketahanan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan

a) Ketahanan Energi

Seluruh desa dan kecamatan di kabupaten Minahasa telah mendapat sambungan listrik, Ketersediaan dan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Minahasa cenderung meningkat, Hal ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kemampuan rumah tangga dan industri mengkonsumsi listrik.

Ketersediaan di Kabupaten Minahasa energi listrik sangat besar baik yang sudah memproduksi maupun dalam tahapan eksplorasi yang terdapat di:

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Tonsea Lama Tondano Utara dengan sumber air dari Danau Tondano;
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong V dan VI di Sonder (2x20 MW) dan Tompasso (2x20 MW);
- Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) Tincep I, II, III, IV dengan kapasitas kurang lebih 3,6 MW, PLTM Kiawa, Kayuwi, Sungai Sawangan, dan Sungai Tuloun; dan
- Pengembangan potensi PLTP di Remboken, Kawangkoan Barat dan Tompasso.

Jumlah Pelanggan yang menggunakan listrik PLN

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan listrik pada masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil, indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, jumlah pelanggan yang menggunakan listrik PLN Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.21

Tabel 2.21 Jumlah Pelanggan yang Menggunakan Listrik PLN Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelanggan	93.279	97.198	72.020	75.080	79.139

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka, Tahun 2025

Jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Minahasa tercatat pada dua rayon, yaitu Rayon Tondano dan Rayon Kawangkoan, yang melayani seluruh wilayah kecamatan, Pada tahun 2021, jumlah pelanggan listrik tercatat sebanyak 72.020 rumah tangga, meningkat dari tahun sebelumnya hingga di tahun 2022 sebesar 100,830 namun terjadi penurunan di Tahun 2023 menjadi sebesar 80,245.

Tabel 2.22 Pemanfaatan Listrik di Kabupaten Minahasa tahun 2024

Kecamatan Subdistrict	Daya Terpasang Installed Electricity Power (VA)	Produksi Listrik Electricity Production (KWh)	Listrik Terjual Electricity Sold (KWh)	Dipakai Sendiri Own Used (KWh)	Susut/ Hilang Shrinkage/ Lost (KWh)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Langowan Timur	16.962.750	672.278	11.609.148.240	...	...
Langowan Barat	12.482.250	518.021	8.917.412.100	...	...
Langowan Selatan	5.802.750	229.469	3.229.238.940	...	...
Langowan Utara	7.589.750	302.085	4.954.941.180	...	...
Tompaso	3.682.250	111.659	5.624.755.740	...	...
Tompaso Barat	4.983.500	453.921	1.742.517.720	...	...
Kawangkoan	9.439.000	229.670	5.187.644.220	...	...
Kawangkoan Barat	5.805.250	244.951	3.088.321.320	...	...
Kawangkoan Utara	9.926.750	364.201	8.268.693.780	...	...
Sonder	14.080.000	293.943	6.334.733.340	...	...
Tombariri	28.788.500	1.354.763	23.650.331.760	...	...
Tombariri Timur	12.747.500	516.341	7.831.624.080	...	...
Pineleng	62.978.500	1.767.995	38.850.312.360	...	...
Tombulu	44.464.750	1.065.081	18.289.906.080	...	...
Mandolang	67.654.500	3.530.035	74.847.470.400	...	...
Tondano Barat	35.786.750	1.386.653	25.048.598.160	...	...
Tondano Selatan	35.417.250	1.417.500	31.259.566.620	...	...
Remboken	15.776.250	600.380	9.457.473.180	...	...
Kakas	3.729.500	57.789	2.399.694.420	...	...
Kakas Barat	9.989.500	495.486	6.967.022.400	...	...
Lembean Timur	19.556.250	1.433.622	29.562.382.860	...	...
Eris	12.712.500	546.906	8.014.885.260	...	...
Kombi	14.770.250	753.677	11.304.611.220	...	...
Tondano Timur	27.342.500	1.122.859	22.624.910.700	...	...
Tondano Utara	24.170.000	897.521	27.944.215.560	...	...
Minahasa	506.638.750	20.366.806	397.010.411.640	1.288.232	17.254.863,13

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka, Tahun 2025

b) Ketahanan Air

Sumberdaya air merupakan salah satu elemen vital dalam menunjang kelangsungan hidup di bumi ini. Hal itu menjadikan ketahanan air memegang peranan vital dalam konsep keberlanjutan. Ketahanan air (water resilience) merujuk pada kemampuan suatu sistem, baik itu lingkungan, komunitas, atau individu, untuk mengatasi dampak perubahan ketersediaan air, baik akibat fluktuasi alami maupun aktivitas manusia. Ini mencakup ketersediaan air yang berkelanjutan termasuk ketersediaan air baku, akses yang adil, dan kemampuan untuk mengelola risiko yang terkait dengan air, seperti kekeringan atau banjir.

Air baku adalah air yang belum diolah dan siap digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai keperluan, termasuk air minum, industri, pertanian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sumber air baku bisa berasal dari berbagai sumber alami seperti :

- Air permukaan: Sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya yang

berada di permukaan bumi.

- Air tanah: Air yang terdapat dalam lapisan tanah di bawah permukaan bumi.
- Mata air: Air yang muncul secara alami ke permukaan bumi.
- Air hujan: Air yang berasal dari curahan hujan

Air baku harus memenuhi standar baku mutu tertentu sebelum dapat diolah menjadi air bersih atau air minum. Air baku merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia dan berbagai kegiatan lainnya. Di Kabupaten Minahasa sumber air baku cukup besar dengan adanya Danau Tondano, embung dan sungai sungai yang ada. Air baku tersebut kemudian diolah dalm instalasi pengolahan air untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dan air minum.

Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Menurut data BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Minahasa pada tahun 2024 mencapai angka 91,50 % meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 91,12%, Hal ini berarti walaupun capainnya meningkat tetapi masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan akses air minum layak.

Beberapa sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Minahasa antara lain melalui jaringan perpipaan/leding, pompa, air minum kemasan, sumur terlindung, sumur tak terlindung, Mata Air terlindung, Mata air tidak terlindung serta sumber lainnya, Persentasi distribusinya dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23 Distribusi Persentase Rumah Tangga (RT) di Kabupaten Minahasa dengan sumber air utama yang digunakan untuk Air minum Tahun 2023-2024

No.	Sumber Air Minum	Persentase	
		2023	2024
1	Leding(Perpipaan)	11,58	14,20
2	Pompa	10,18	24.31
3	Air Dalam Kemasan	31,16	0,74
4	Sumur terlindung/ tak terlindung	28,62	25,80
5	Mata Air terlindung/ tak terlindung	17,03	33.03

6	Lainnya	1,43	1,92
	Jumlah	100	100

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka, 2024 & 2025

Dari data tersebut nampak bahwa pemanfaatan air kemasan termasuk air minum isi ulang sebagai sumber air minum utama semakin tinggi seiring dengan semakin pesatnya perkembangan masyarakat, Selanjutnya diikuti oleh sumur terlindungi/tak terlindung, mata air terlindungi/tak terlindung, leding (perpipaan) dan pompa,

Pemerintah berupaya menyelenggarakan layanan SPAM di seluruh wilayah baik yang dikelola oleh desa maupun BUMD yaitu PDAM, layanan tersebut melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan, untuk layanan PDAM terdapat 20 SPAM yang berfungsi dan melayani 353.540 penduduk di Kabupaten Minahasa,

Tabel 2.24 Rata-rata Pelanggan dan Jumlah Air yang Disalurkan di Kabupaten Minahasa Tahun 2024

Wilayah Region	Rata-rata Pelanggan Average of Customers	Jumlah Air Disalurkan Number of Distributed Water (m³)	Nilai Value (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sonder	374	49.146	258.577.000
Kawangkoan	216	18.372	100.320.800
Langowan	805	107.723	576.329.600
Kakas	533	77.251	405.857.900
Pineleng	320	42.527	257.270.000
Tondano Selatan 2	579	85.633	552.764.900
Tondano Selatan 1	538	70.616	406.254.100
Paniki	644	105.373	706.466.700
Tondano Utara	357	50.098	254.922.000
Tondano Barat	1.840	276.037	1.467.711.600
Tondano Timur	854	113.588	594.730.500
Remboken	507	78.124	392.167.200
Tombariri	921	143.127	800.925.300
Pemerintah	28	45.678	174.330.000
Minahasa	8.516	1.263.293	6.948.627.600

Sumber : Kabupaten Minahasa Dalam Angka tahun 2025

Ketahanan air penting untuk dapat dicapai karena memiliki implikasi terhadap pencapaian ketahanan sektor-sektor lainnya, seperti energi dan pangan, secara nasional.

c) Kemandirian Pangan

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Lahan Pertanian

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Tabel 2.25 Sebaran Rasio Luas Baku Lahan Sawah terhadap Total Lahan Berdasarkan Prioritas

PRIORITAS	RASIO LAHAN SAWAH	JUMLAH DESA	PERSENTASE
1	<= 0.0284	31	11,48
2	> 0.0284 - < 0,0648	38	14,07
3	> 0,0648 - < 0,1146	59	21,85
4	> 0,11146 - < 0,1793	54	20,00
5	> 0,1793 - < 0,2820	47	17,41
6	> 0,2820	41	15,19

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa 2024

Dari 270 desa/kelurahan di Kabupaten Minahasa, ada 31 desa (11,48 %) prioritas 1, 38 desa (14,07 %)prioritas 2,59 desa prioritas 3 (21,85 %). Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1-3 tersebar di beberapa kecamatan.

Produksi Pangan

Tabel 2.26 Produksi Serealiala Pokok dan Umbi-umbian Tahun 2020-2024 (Ton)

KOMODITI	2020	2021	2022	2023	2024
Padi Sawah	78.911	81.684	70.161	64.705	32.261
Padi Ladang	259	855	-	-	-
Jagung	184.506	139.921	158.424	54.588	20.382
Ubi Kayu	1.760	1.806	1.064	1.070	346
Ubi Jalar	2.034	2.403	5.928	5.538	3.432

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa

Pada tabel diatas nampak bahwa produksi komoditas padi sawah ada kecenderungan menurun sejak tahun 2018. Demikian juga produksi pada ladang terus menurun.

Tabel 2.27 Produksi Padi Sawah per Kecamatan
Tahun 2020 - 2024 (Ton)

No.	KECAMATAN	TAHUN / PRODUKSI				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tondano Utara	1.955	2.284	1.578,9	1.430,0	1125
2	Tondano Barat	7.560	7.846	4.845,0	3.877,5	825
3	Tondano Timur	11.438	8.967	5.386,5	5.980,8	4180
4	Tondano Selatan	5.498	4.489	2.331,3	2.975,5	600
5	Remboken	2.911	3.136	2.696,1	2.568,5	1380
6	Eris	2.311	3.155	2.707,5	1.425,0	755
7	Kombi	90	314	34,2	0,0	0
8	Lembean Timur	0	0	0,0	0,0	0
9	Kakas	8.202	5.566	7.096,5	3.239,5	567
10	Kakas Barat	9.201	9.015	7.888,8	13.090,0	3245
11	Langowan Barat	3.884	5.785	4.719,6	4.835,0	1725
12	Langowan Timur	6.773	6.625	7.877,4	10.202,5	6520
13	Langowan Selatan	1.408	1.376	2.217,3	1.379,4	1092
14	Langowan Utara	3.209	3.819	2.568,2	2.244,0	1826
15	Tompaso	5.578	7.958	8.726,7	4.845,0	3020
16	Tompaso Barat	1.227	2.194	1.596,0	1.599,6	1499,9
17	Kawangkoan	473	787	370,5	264,0	187
18	Kawangkoan Utara	489	510	421,8	495,0	275
19	Kawangkoan Barat	2.077	2.465	1.345,2	1.188,0	828
20	Sonder	3.857	3.969	3.705,0	2.706,0	2864,4
21	Tombariri	0	0	0,0	0,0	0
22	Tombariri Timur	771	1.424	1.048,8	359,6	301,6
Kabupaten Minahasa		80.932	83.705	71.183	76.728	32.816

Sumber : Dinas Pertanian Kab Minahasa

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran yang menunjukkan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP merupakan gabungan dari beberapa indikator yang terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Tabel 2.28 Indek Ketahanan pangan Kabupaten Minahasa
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilia Indeks	Kategori
1.	2020	86.64	6
2.	2021	85.46	6
3.	2022	83.30	6
4.	2023	84.69	6
5.	2024	79.61	6

Sumber : <https://satudata.badanpangan.go.id>

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah (kabupaten/kota) dikelompokkan ke dalam enam kelompok, yaitu prioritas 1 (sangat rentan), prioritas 2 (rentan), prioritas 3 (agak rentan), prioritas 4 (agak tahan), prioritas 5 (lahan), prioritas 6 (sangat tahan).

- Kelompok IKP 1: nilai $\leq 41,52$
- Kelompok IKP 2: nilai $41,52 - 51,42$
- Kelompok IKP 3: nilai $51,42 - 59,58$
- Kelompok IKP 4: nilai $59,58 - 67,75$
- Kelompok IKP 5: nilai $67,75 - 75,68$
- Kelompok IKP 6: nilai $\geq 75,68$

Pada tabel di atas nilai indeks ketahanan pangan Kabupaten Minahasa terus berfluktuatif walau masih dalm kategori 6.

5) Lingkungan Hidup berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan gabungan dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

IKLH digunakan sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan untuk:

- Mendukung proses pengambilan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup

Tabel 2.29 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,82	62,89	62,46	63,39	66,16
Indeks Kualitas Air	78,34	50,71	48,00	47,27	57,06
Indeks Kualitas Udara	90,56	89,38	90,98	93,48	91,03
Indeks Kualitas Tutupan Lahan/ Tanah	30,82	34,83	34,83	35,43	35,78

Sumber: BPS Kab Minahasa, Kab Minahasa Dalam Angka Tahun 2025

Keterangan:

Skor: 90 – 100 Sangat Baik
Skor: 70 – 90 Baik
Skor: 50 – 70 Sedang
Skor: 25 – 50 Kurang
Skor: 0 – 25 Sangat Kurang

Dari data capaian IKLH tersebut menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Minahasa pada empat tahun terakhir berada pada kualifikasi sedang, sedangkan pada tahun 2020 masih berada pada kategori Baik, Nilainya pun pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 cenderung menurun dan pada tahun 2024 capaiannya kembali meningkat. Hal ini berarti kualitas lingkungan di Kabupaten Minahasa perlu diseriusi. Dilihat dari faktor pembentuknya, maka indeks kualitas tutupan lahan mendapatkan capaian yang paling rendah diikuti oleh kualitas air dan kualitas udara dengan nilai yang sangat baik.

Rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Minahasa dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pembangunan yang meningkatkan kebutuhan akan lahan permukiman, pertanian, infrastruktur yang seringkali mengorbankan tutupan lahan alami seperti hutan. Disamping itu faktor sosial ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat berkontribusi pada perubahan penggunaan lahan.

Untuk capaian indeks kualitas air, berada pada kategori sedang. Capaian ini sangat dipengaruhi oleh kualitas air di Danau Tondano yang merupakan salah satu lokasi pengambilan sampel kualitas air. Penyebab utamanya adalah pencemaran air baik dari limbah rumah tangga, industri, aktivitas pertanian dan perikanan serta faktor lingkungan lainnya seperti deforestasi dan masih minimnya infrastruktur pengelolaan air.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan maka salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kondisi sanitasi di suatu daerah. Sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan menjaga kondisi lingkungan yang sehat melalui berbagai tindakan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat. Dalam konteks lingkungan yang baik, terutama berhubungan dengan pengelolaan air limbah terutama air limbah rumah tangga, kebersihan lingkungan dan pengendalian faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Sanitasi sangat penting untuk menjaga kesehatan

masyarakat karena sanitasi yang buruk dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, kolera, dan penyakit kulit, serta dapat berdampak negatif pada aspek sosial dan ekonomi. Kemampuan individu atau rumah tangga untuk menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, seperti toilet dengan sistem pembuangan yang baik, serta memastikan pemisahan kotoran manusia dari lingkungan sekitar untuk mencegah penyebaran penyakit disebut akses sanitasi. Akses sanitasi layak juga mencakup pengelolaan air limbah dan sampah yang benar. Sedangkan akses sanitasi aman merujuk pada kondisi ketika fasilitas sanitasi yang digunakan oleh rumah tangga memenuhi syarat kesehatan dan dikelola dengan baik dimana sistem pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik yang disedot secara berkala atau terhubung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Di Kabupaten Minahasa capaian akses sanitasi aman sampai dengan Tahun 2024 masih 0 %, karena sekalipun sudah terdapat IPLT tetapi belum beroperasi yang berarti belum ada limbah tinja yang diolah. Sedangkan capaian akses sanitasi layak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Minahasa

Indikator (%)	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	88,03	81,09	90,18	90,24	89,37

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka, 2025

Tabel tersebut menjelaskan bahwa capaian akses sanitasi layak di Kabupaten Minahasa selang lima tahun terakhir berfluktuatif, dimana capaian tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2021, namun pada tahun 2021 sampai tahun 2023 capaiannya cenderung meningkat di setiap tahun, walaupun pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 89,37, yang berarti masih terdapat 10,63 % masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi layak.

Persampahan

Lingkungan hidup berkualitas juga dapat diukur dari Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. Kinerja Pengelolaan adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk mendukung pencapaian kinerja persampahan di kabupaten Minahasa, didukung oleh adanya fasilitas TPA Kulo dan Sarana dan Prasarana pengangkutan Sampah. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31 Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	62.700,43	NA	63.632,82	63.922,63	63.922,63
Pengurangan Sampah Tahunan	6.978,80	NA	17.144,28	17.596,88	17.596,88
% Pengurangan Sampah	11,13	NA	26,94	27,53	27,53
Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	31.390,00	NA	41.245,00	41.763,30	41.763,30
Persentase Penanganan Sampah	50,06	NA	64,82	65,33	65,33
Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)	38.368,80	NA	58.389,28	59.360,18	59.360,18
Persentase Sampah terkelola	61,19	NA	91,76	92,86	92,86

(Sumber : <https://sipsn.kemenlh.go.id>), Juli 2025

6) Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Dalam konteks bencana, resiliensi diartikan sebagai kemampuan individu, komunitas, unit sosial atau organisasi yang mampu untuk mengadopsi, melakukan perbaikan terhadap kondisi bencana. Resiliensi bencana adalah kemampuan untuk bertahan dan pulih dari dampak bencana. Resiliensi dapat diterapkan oleh individu, komunitas, organisasi, atau bisnis.

Karakteristik resiliensi bencana:

- Mampu beradaptasi terhadap kondisi bencana

- Mampu melakukan perbaikan setelah bencana
- Mampu bangkit kembali dari situasi traumatis
- Mampu mengatasi perubahan hidup
- Mampu menjaga kesehatan di bawah tekanan
- Mampu mengatasi kemalangan
- Mampu mengubah cara hidup
- Mampu menghadapi permasalahan tanpa kekerasan

Resiliensi terhadap perubahan iklim adalah kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi dampak perubahan iklim. Resiliensi berkelanjutan adalah kemampuan mengatasi masalah kompleks dan mendasar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim:

- **Perkuat budaya siaga bencana:** Tingkatkan kesiapsiagaan, tanggap, dan adaptasi dalam menghadapi bencana.
- **Investasi teknologi dan inovasi:** Kembangkan teknologi yang dapat meningkatkan resiliensi terhadap dampak negatif perubahan iklim.
- **Bangun infrastruktur tangguh:** Bangun infrastruktur yang dapat bertahan terhadap bencana dan perubahan iklim.
- **Diversifikasi mata pencaharian:** Kurangi ketergantungan pada satu mata pencaharian saja.
- **Mitigasi emisi gas rumah kaca:** Kurangi emisi gas rumah kaca dengan meningkatkan kemampuan alami hutan dan lautan untuk menyerap karbon.
- **Berpartisipasi dalam kegiatan ramah lingkungan:** Ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, kampanyekan gaya hidup ramah lingkungan.
- **Mendukung kebijakan ramah lingkungan:** Pilih pemimpin yang peduli lingkungan, ajukan usulan kebijakan ramah lingkungan.

Tabel 2.32 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa, 2020–2024

Kecamatan	Banjir		
	2020	2021	2024
Langowan Timur	–	–	1
Langowan Barat	–	–	–
Langowan Selatan	–	–	–
Langowan Utara	–	–	–
Tompaso	–	–	–
Tompaso Barat	–	–	–
Kawangkoan	–	–	–
Kawangkoan Barat	–	–	–
Kawangkoan Utara	–	–	–
Sonder	–	–	–
Tombariri	–	–	–
Tombariri Timur	–	–	–
Pineleng	1	2	3
Tombulu	–	2	–
Mandolang	–	–	1
Tondano Barat	–	–	–
Tondano Selatan	1	4	–
Remboken	2	1	1
Kakas	2	1	1
Kakas Barat	–	–	–
Lembean Timur	–	–	–
Eris	–	1	–
Kombi	–	–	–
Tondano Timur	1	3	1
Tondano Utara	–	–	–
Minahasa	7	14	8

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.33 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Gempa Bumi Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa, Tahun 2020–2024

Kecamatan	Tahun		
	2020	2021	2024
Langowan Timur	–	–	–
Langowan Barat	–	–	–
Langowan Selatan	–	–	–
Langowan Utara	–	–	–
Tompaso	10	–	–
Tompaso Barat	3	–	–
Kawangkoan	–	1	–
Kawangkoan Barat	10	6	–
Kawangkoan Utara	–	–	–
Sonder	–	–	–
Tombariri	–	–	–

Kecamatan	Tahun		
	2020	2021	2024
Tombariri Timur	–	6	–
Pineleng	–	–	–
Tombulu	11	11	–
Mandolang	3	–	–
Tondano Barat	8	4	2
Tondano Selatan	1	1	–
Remboken	–	–	–
Kakas	13	–	–
Kakas Barat	–	–	–
Lembean Timur	–	–	–
Eris	8	8	–
Kombi	–	11	–
Tondano Timur	11	8	2
Tondano Utara	7	6	2
Minahasa	85	62	6

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.34 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Tanah Longsor Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa, Tahun 2020–2024

Kecamatan	Tanah Longsor		
	2020	2021	2024
Langowan Timur	–	–	2
Langowan Barat	–	–	–
Langowan Selatan	2	2	–
Langowan Utara	–	–	1
Tompaso	–	–	–
Tompaso Barat	–	–	–
Kawangkoan	1	1	–
Kawangkoan Barat	1	3	1
Kawangkoan Utara	–	1	–
Sonder	1	3	–
Tombariri	–	1	1
Tombariri Timur	–	–	–
Pineleng	1	6	1
Tombulu	–	1	–
Mandolang	2	–	–
Tondano Barat	–	1	–
Tondano Selatan	1	2	–
Remboken	–	–	–
Kakas	2	2	1
Kakas Barat	–	–	–
Lembean Timur	–	1	3
Eris	3	1	–
Kombi	–	–	–
Tondano Timur	–	–	–
Tondano Utara	2	–	–

Minahasa	16	25	10

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.35 Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KELAS RISIKO 2023
1	MINAHASA	212.40	212.40	212.40	205.50	205.50	205.50	199.40	193.85	193.85	TINGGI
2	MINAHASA TENGGARA	195.20	195.20	195.20	195.20	195.20	195.20	185.08	174.78	174.78	TINGGI
3	BOLAANG MONGONDOW UTARA	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	SEDANG
4	KEPULAUAN SANGIHE	154.40	154.40	145.78	146.47	132.74	132.74	137.34	142.46	142.46	SEDANG
5	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	141.82	141.82	SEDANG
6	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	179.20	179.20	179.20	179.20	179.20	179.20	155.86	137.95	137.95	SEDANG
7	MINAHASA SELATAN	173.60	173.60	164.47	143.59	143.59	143.59	134.80	137.22	137.22	SEDANG
8	BOLAANG MONGONDOW	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	121.75	136.96	136.96	SEDANG
9	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	157.60	157.60	157.60	157.60	157.60	157.60	148.45	135.19	124.21	SEDANG
10	MINAHASA UTARA	158.40	158.40	138.99	119.84	119.84	119.84	125.31	122.58	121.37	SEDANG
11	KOTA TOMOHON	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	111.55	111.55	SEDANG
12	KOTA BITUNG	163.20	163.20	144.37	125.28	109.23	109.23	100.69	104.87	104.87	SEDANG
13	KEPULAUAN TALAUD	102.80	102.80	102.80	102.80	102.80	102.80	102.80	100.15	100.15	SEDANG
14	KOTA MANADO	130.40	130.40	113.67	107.89	107.89	107.89	100.26	90.96	83.38	SEDANG
15	KOTA KOTAMOBAGU	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	74.83	69.91	65.51	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Sumber: Buku IRBI Tahun 2023, Volume 2 Januari 2024. BPN

Kabupaten Minahasa merupakan potensi resiko bencana kategori tinggi. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dari distribusi pola cuaca Bumi, yang terjadi dalam beberapa dekade hingga abad. Biasanya ditandai dengan perubahan suhu rata-rata global, pola hujan, cuaca ekstrem, serta perubahan dalam sistem iklim global. Perubahan ini disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4) ke atmosfer. Dampak dari perubahan iklim ini yaitu peningkatan suhu global, pencairan es di kutub, kenaikan permukaan laut, kekeringan, banjir, dan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Perubahan iklim menjadi tantangan yang serius dan memerlukan tindakan nyata untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (mitigasi) dan mengadaptasi diri terhadap dampak yang sudah ada atau yang akan datang (adaptasi).

Ada beberapa upaya mitigasi dan adaptasi yang penting:

1. Upaya Mitigasi

Bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan beralih ke

energi terbarukan, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, dan melestarikan hutan. Berikut beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

Beralih ke Energi Terbarukan:

seperti tenaga surya, angin, dan hidro untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari pembangkit listrik.

Efisiensi Energi :

Meningkatkan efisiensi energi di rumah, industri, dan penggunaan transportasi berkelanjutan juga dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi CO₂.

Penghijauan dan Konservasi Hutan:

Melindungi hutan dan melakukan reboisasi sangat penting karena hutan dapat menyerap karbon alami.

Pertanian Berkelanjutan:

Praktik pertanian yang berkelanjutan seperti manajemen limbah ternak dan pengurangan penggunaan pupuk juga dapat membantu mengurangi emisi metana dan nitrogen oksida.

Pendidikan dan Kesadaran Iklim:

Meningkatkan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mengurangi emisi dan mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan.

Adapun target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca di Kabupaten Minahasa masih disesuaikan dengan target nasional dan provinsi karena belum ada data perhitungan indeks penurunan emisi GRK untuk tingkat kabupaten Minahasa.

2. Upaya Adaptasi

Melibatkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi kerentanannya terhadap dampak perubahan iklim yang sudah ada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya adaptasi dampak perubahan iklim, sebagai berikut;

Perencanaan Tata Kota Berbasis Iklim:

Kota-kota perlu merancang infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, termasuk tanggul banjir, taman kota yang dapat menyerap air, dan gedung yang dirancang untuk menghadapi suhu yang lebih tinggi.

Praktik Pertanian Adaptif:

Petani perlu mengadaptasi praktik pertanian dengan menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap suhu ekstrem dan kekeringan.

Perlindungan Terhadap Bencana Alam:

Perbaikan sistem peringatan dini dan perencanaan darurat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari bencana alam yang semakin sering terjadi.

Pengembangan Infrastruktur Tahan Cuaca:

Infrastruktur seperti jaringan listrik, air bersih, dan transportasi harus dibangun dengan mempertimbangkan perubahan cuaca ekstrem.

Kunci untuk mengatasi perubahan iklim adalah tindakan kolaboratif dari tingkat individu hingga tingkat pemerintah dan tingkat global. Mitigasi dan adaptasi harus berjalan bersama-sama untuk melindungi planet ini dan memitigasi dampak negatif perubahan iklim. Dengan adanya mitigasi dan adaptasi akan meningkatkan resiliensi perubahan iklim.

Resiliensi terhadap perubahan iklim adalah kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi dampak perubahan iklim. Resiliensi berkelanjutan adalah kemampuan mengatasi masalah kompleks dan mendasar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim:

- Perkuat budaya siaga bencana: Tingkatkan kesiapsiagaan, tanggap, dan adaptasi dalam menghadapi bencana.
- Investasi teknologi dan inovasi: Kembangkan teknologi yang dapat meningkatkan resiliensi terhadap dampak negatif perubahan iklim.
- Bangun infrastruktur tangguh: Bangun infrastruktur yang dapat bertahan terhadap bencana dan perubahan iklim.
- Diversifikasi mata pencaharian: Kurangi ketergantungan pada satu mata pencaharian saja.
- Mitigasi emisi gas rumah kaca: Kurangi emisi gas rumah kaca dengan meningkatkan kemampuan alami hutan dan lautan untuk menyerap karbon. Target Nasional menurut RPJMN penurunan intensitas Emisi GRK adalah 45,17 %.
- Berpartisipasi dalam kegiatan ramah lingkungan: Ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, kampanyekan gaya hidup ramah lingkungan.
- Mendukung kebijakan ramah lingkungan: Pilih pemimpin yang peduli lingkungan, ajukan usulan kebijakan ramah lingkungan.

Tingkat kerentanan dan kapasitas terhadap perubahan iklim

Umumnya, peruntukan ruang Kabupaten Minahasa memiliki tingkat kerentanan dan kapasitas terhadap perubahan iklim sedang, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Tabel 2.36 Tinjauan muatan KLHS terhadap Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

POLA RUANG KABUPATEN MINAHASA	RENDAH	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SEDANG	TINGGI	TOTAL (HA)
Kawasan Peruntukan Budidaya	9.431.50	1.542.89	1.523.75	80.155.06	1.967.65	94.620.85
Kawasan Hortikultura	83.78	4.17	-	14.351.21	108.83	14.547.99
Kawasan Hutan Produksi	-	1.95	-	1.991.31	531.01	2.524.26
Kawasan Pariwisata	579.74	22.90	-	3.242.60	64.70	3.909.94
Kawasan Perikanan	2.80	0.16	-	14.46	0.05	17.47
Kawasan Perkebunan	64.75	41.80	1.468.73	48.220.41	1.235.92	51.031.62
Kawasan Permukiman	3.035.37	1.410.27	30.07	8.428.13	2.98	12.906.82
Kawasan Pertambangan dan Energi	87.86	16.85	-	204.63	9.37	318.71
Kawasan Pertanian	5.576.66	44.79	24.94	2.044.76	14.80	7.705.96
Kawasan Peruntukan Industri	0.55	-	-	1.657.54		1.658.09
Kawasan Peruntukan Lindung	150.20	570.84	1.145.18	5.177.70	3.512.25	10.556.18
Kawasan Imbuhan Air Tanah	-	-	38.36	63.32	60.05	161.73
Kawasan Konservasi	0.05	-	1.099.88	848.59	1.486.11	3.434.62
Kawasan Perlindungan Setempat	147.93	36.07	6.94	1.194.41	17.81	1.403.16
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan dibawahnya	2.22	534.78	-	3.071.38	1.948.29	5.556.66
TOTAL (HA)	9.597.35	2.114.81	2.668.93	85.392.85	5.547.75	105.321.69

7) Demografi

Jumlah penduduk kabupaten Minahasa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus meningkat dari 348,673 jiwa tahun 2021 meningkat menjadi 351,920 jiwa tahun 2023 dan menurun menjadi 330,843 jiwa tahun 2024, Pertumbuhan penduduk Kabupaten Minahasa tahun 2023-2024 sebesar negatif 3,70 persen, penduduk terbanyak tahun 2024 berada di Kecamatan Pinekang dengan jumlah 27,295 jiwa, dan Kecamatan Kombi merupakan penurunan penduduk tertinggi tahun 2024 sebesar -10,16 persen,

Tabel 2.37 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan
Tahun 2021-2024

Kecamatan	Jumlah				Laju Pertumbu han 2023- 2024 (%)
	2021	2022	2023	2024	
Langowan Timur	13,600	13,639	13,482	12,874	-5,16
Langowan Barat	16,629	16,657	17,634	16,843	-0,34
Langowan Selatan	8,094	8,099	8,306	7,979	-1,86
Langowan Utara	8,761	8,775	8,914	8,532	-2,94
Tompaso	7,458	7,475	7,561	7,271	-2,53
Tompaso Barat	9,290	9,311	9,422	9,038	-0,63
Kawangkoan	10,504	10,517	10,550	10,112	-2,24
Kawangkoan Barat	9,041	9,051	9,090	8,732	-0,89
Kawangkoan Utara	8,725	8,735	9,075	8,658	-2,60
Sonder	19,590	19,656	20,003	19,077	-3,60
Tombariri	18,247	18,306	18,526	17,674	-4,19
Tombariri Timur	10,431	10,465	10,877	10,279	-2,15
Pineleng	30,480	30,680	28,536	27,295	-3,09
Tombulu	19,627	19,964	18,120	17,151	-3,77
Mandolang	21,783	21,925	21,043	20,148	-3,34
Tondano Barat	21,665	21,787	20,305	19,542	-8,70
Tondano Selatan	17,906	17,918	17,103	16,544	-4,26
Remboken	12,853	12,946	12,902	12,355	-1,71
Kakas	12,677	12,716	12,675	12,166	-4,36
Kakas Barat	11,001	11,035	11,332	10,874	-0,73
Lembean Timur	8,487	8,522	8,600	8,183	-4,70
Eris	12,085	12,215	11,874	11,270	-8,01

Kecamatan	Jumlah				Laju Pertumbu han 2023- 2024 (%)
	2021	2022	2023	2024	
Kombi	11,518	11,583	11,274	10,493	-10,16
Tondano Timur	15,105	15,129	15,647	15,044	-3,50
Tondano Utara	13,116	13,211	13,122	12,709	-1,93
Minahasa	348,673	350,317	351,920	330,843	-3,70

Sumber: BPS Kabupaten Minahasa; Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2025

Kepadatan penduduk di Kabupaten Minahasa tahun 2024 mencapai 289,80 jiwa/km2, kepadatan penduduk di 25 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Langowan Timur dengan kepadatan sebesar 1.778,2 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Kombi sebesar 94,15 jiwa/Km2.

Tabel 2.38 Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tahun 2024

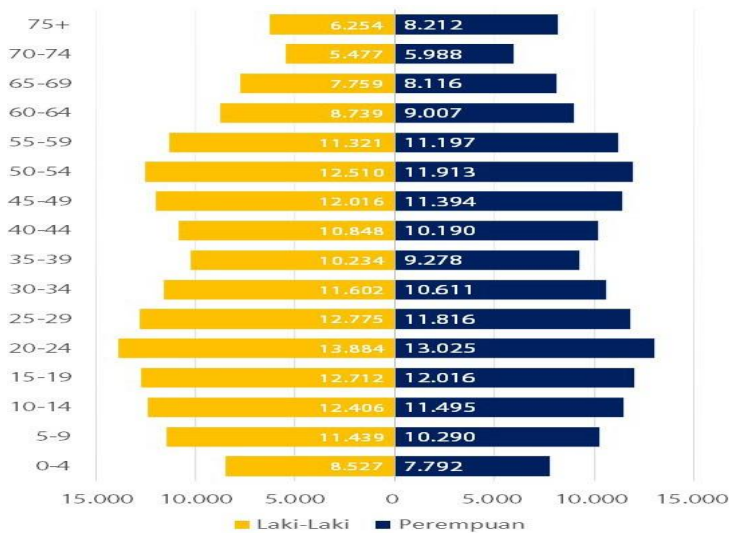
No	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan per km²
1	Langowan Timur	7,24	12,874	1,778,2
2	Langowan Barat	42,69	16,843	394,5
3	Langowan Selatan	69,65	7,979	114,6
4	Langowan Utara	8,27	8,532	1,031,7
5	Tompaso	17,32	7,271	419,8
6	Tompaso Barat	14,61	9,038	618,6
7	Kawangkoan	35,99	10,112	281,0
8	Kawangkoan Barat	19,27	8,732	453,1
9	Kawangkoan Utara	13,09	8,658	661,4
10	Sonder	52,52	19,077	363,2
11	Tombariri	56,43	17,674	313,2
12	Tombariri Timur	101,57	10,279	101,2
13	Pineleng	49,30	27,295	553,7
14	Tombulu	73,43	17,151	233,6
15	Mandolang	47,05	20,148	428,2

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan per km ²
16	Tondano Barat	22,66	19,542	862,4
17	Tondano Selatan	25,34	16,544	652,9
18	Remboken	24,07	12,355	513,3
19	Kakas	88,85	12,166	136,9
20	Kakas Barat	45,16	10,874	240,8
21	Lembean Timur	76,94	8,183	106,4
22	Eris	33,25	11,270	338,9
23	Kombi	119,74	10,493	87,6
24	Tondano Timur	33,71	15,044	446,3
25	Tondano Utara	63,49	12,709	200,2
TOTAL		1141,64	330,843	289,8

Sumber: *BPS Kabupaten Minahasa; Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2025*

Angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Minahasa tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,80, rasio jenis kelamin per kecamatan cukup beragam dengan rasio jenis kelamin tertinggi pada Kecamatan Langowan Selatan sebesar 109,20 dan terendah pada Kecamatan Langowan Timur sebesar 101,09. Hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah laki-laki masih lebih banyak dari perempuan. Artinya, dalam setiap komunitas 100 perempuan, terdapat 109,20 sampai 101,09 orang laki-laki.

Grafik 2.1: Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Minahasa Tahun 2024



Sumber : *Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2025*

Jika dilihat komposisi penduduk Kabupaten Minahasa seperti dijelaskan diatas, kelompok umur 15 – 64 tahun sebagai kelompok

umur produktif terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2024 dibandingkan dengan kelompok umur lainnya (non produktif).

Selain itu juga terjadi peningkatan pada jumlah penduduk usia lanjut (65+), dan dikenal dengan istilah proses penuaaan (*aging process*) atau proses transisi penduduk dari penduduk muda ke penduduk tua selang tahun 2020-2023, dan terjadi penurunan pada jumlah penduduk usia muda 0-14 tahun selang tahun 2020-2023, sebagaimana pada Tabel 2.39, Angka dalam tabel dibawah ini, tampak bahwa Rasio ketergantungan di Kabupaten Minahasa dari tahun 2020 sampai 2023 cenderung ada kenaikan, tahun 2020 sebesar 46,53, tahun 2021 sebesar 46,73, tahun 2022 sebesar 47 dan tahun 2023 mencapai angka 47,45 dan pada tahun 2024 di angka 45,69.

Tabel 2.39 Rasio Ketergantungan Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0 – 14	72,337	71,694	71,153	72,450	61,949
15 – 64	237,013	237,625	238,310	238,670	227,088
65 +	37,940	39,354	40,854	40,800	41,806
Rasio Ketergantungan	46,53	46,73	47,00	47,45	45,69

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2024; Data diolah

Secara umum gambaran indikator kependudukan Kabupaten Minahasa tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel 2.40

Tabel 2.40 Indikator Kependudukan Kabupaten Minahasa

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (Jiwa)	343,564	343,800	350,317	351,920	330,843
Luas Wilayah (Km ²)	1,141,64	1,141,64	1,141,64	1,141,64	1,141,64
Pertumbuhan (%)	1,09	0,80	0,47	0,40	-3,70
Sex Ratio (%)	104,5	104,3	104,3	104,37	103,80
Kelompok Umur					
0 – 14 (%)	21,88	20,56	20,31	20,58	18,72
15 – 64 (%)	68,27	68,15	68,23	67,82	68,64
65 + (%)	9,85	11,29	11,66	11,59	12,64
Rasio ketergantungan	46,53	46,73	47,00	47,45	45,69

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2024, Data diolah

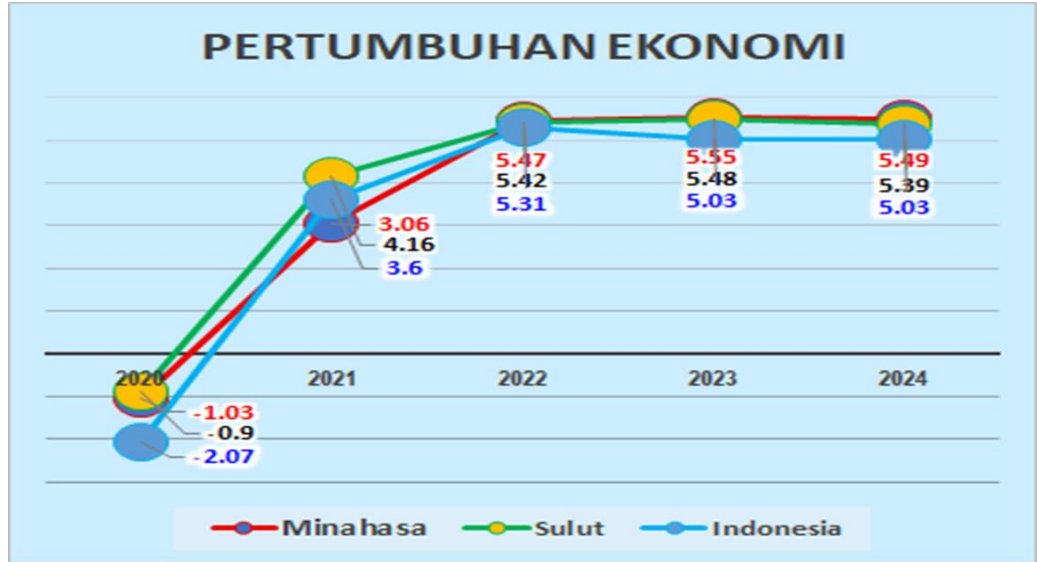
b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Kesejahteran Ekonomi

a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 diangka 3,96 dan terus naik hingga ditahun 2023 diangka 5,55 Persen. Hal ini tentunya dampak dari peningkatan beberapa lapangan usaha yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa adalah meningkatnya pertumbuhan lapangan Jasa Keuangan dan asuransi dari -4,83 menjadi 1,56 ditahun 2023, Jasa Perusahaan dari 5,28 di tahun 2023 naik menjadi 10,06 dan Pertambangan dan Penggalian dari 0,97 ditahun 2023 naik menjadi 4,24 dan diikuti dengan lapangan usaha lainnya, Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional sebagaimana Grafik 2.2 di bawah ini.

Grafik 2.2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Dan Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Sulut, Tahun 2024; Data diolah

Pada grafik 2.2 nampak bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa sejak tahun 2022 berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara maupun Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa terus tumbuh positif sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, namun sedikit melambat pada tahun 2024.

b) PDRB dan Struktur ekonomi

Posisi strategis Kabupaten Minahasa yang berada pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano dan KSN Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Manado-Bitung, serta kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, Namun ketidakstabilan ekonomi global juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Minahasa.

Kapasitas ekonomi yang tergambar dari nilai keseluruhan produk barang dan jasa yang dihasilkan di daerah ini yang tergambar pada data PDRB-nya menunjukkan bahwa perputaran roda ekonomi dalam kurun waktu 5 tahun ini semakin meningkat.

Tahun 2018 PDRB ADHB sebesar lebih dari 15,745 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar lebih dari 11,159 triliun rupiah, Semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi yang terjadi di daerah ini sehingga pada tahun 2023 PDRB ADHB sebesar lebih dari 22,127,99 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar 13,523,80 Triliun rupiah.

Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih merupakan primadona dalam perekonomian Kabupaten Minahasa, Sektor ini dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini memiliki kontribusi besar dalam Peningkatan Perekonomian Kabupaten Minahasa, Tahun 2023 Lapangan usaha ini memiliki kontribusi sebesar 26,52 % terhadap total PDRB ADHB dan 4,97% terhadap total PDRB ADHK. Selain itu di Tahun 2023 Konstruksi juga menjadi faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Minahasa yang awalnya pada tahun 2022 sebesar 12,71 persen terhadap total PDRB ADHB pada tahun 2023 menjadi 12,63 persen terhadap total PDRB ADHB sebagaimana dapat dilihat pada Table 2.40 dibawah ini :

Tabel 2.41 PDRB Kabupaten Minahasa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Dan Distribusi PDRB (%)Tahun 2020-2024 (Jutaan Rupiah)

Kategori	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.725,08	5.023,87	5.471,90	5.867,93	6.413,90
	27,11	26,95	26,86	26,52	26,67
Pertambangan dan Penggalian	1.083,39	1.150,25	1.223,54	1.317,95	1.372,20
	6,22	6,17	6,01	5,96	5,71
Industri Pengolahan	1.251,64	1.369,58	1.533,03	1.694,93	1.844,94
	7,18	7,35	7,53	7,66	7,67

Kategori	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan Listrik dan Gas	21,27	22,92	26,24	28,37	30,96
	4,35	3,13	0,17	0,16	2,51
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,70	23,80	23,87	24,29	26,31
	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11
Konstruksi	2.197,12	2.380,13	2.589,80	2.793,94	2.897,67
	12,61	12,73	12,71	12,63	12,05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.097,28	2.220,93	2.490,63	2.766,30	3.079,30
	12,03	11,95	12,23	12,5	12,81
Transportasi dan Pergudangan	981,96	1.061,76	1.293,47	1.523,98	1.652,79
	5,63	5,51	6,35	6,89	6,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	142,91	168,15	187,27	212,30	235,16
	0,82	0,9	0,92	0,96	0,98
Informasi dan Komunikasi	434,99	465,99	512,99	558,89	626,47
	2,5	2,5	2,52	2,53	2,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	425,20	469,54	482,26	499,48	527,14
	2,44	2,5	2,37	2,26	2,19
Real Estate	717,07	729,05	747,90	797,99	883,61
	4,11	3,81	3,67	3,61	3,67
Jasa Perusahaan	12,51	13,31	14,83	16,98	18,53
	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.651,97	1.731,10	1.827,18	1.910,00	2.057,95
	9,48	9,29	8,97	8,63	8,56
Jasa Pendidikan	570,36	608,86	661,84	728,66	829,56
	3,27	3,27	3,25	3,29	3,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	751,30	817,30	838,69	876,66	967,28
	3,27	3,27	3,25	3,29	3,45
Jasa lainnya	340,39	386,59	443,66	509,33	582,73
	1,95	2,05	2,18	2,3	2,42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	17.427,13	18.643,14	20.369,10	22.127,99	24.046,51
	100	100	100	100	100

Sumber BPS Minahasa Tahun 2025

Tabel 2.42 PDRB Kabupaten Minahasa menurut Lapangan Usaha ADHK (Jutaan Rupiah) Dan Pertumbuhan PDRB (%) Tahun 2020-2024

Kategori	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.951,07	3.070,97	3.291,53	3.458,76	3.633,06
	2,15	4,06	7,18	5,08	5,04
Pertambangan dan Penggalian	785,63	815,19	821,13	855,98	883,01
	(1,76)	3,76	0,73	4,24	3,16
Industri Pengolahan	933,85	990,11	1.062,38	1.149,05	1.198,10
	1,63	6,03	7,30	8,16	4,27

Kategori	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan Listrik dan Gas	18,53	20,04	22,22	23,43	24,67
	7,07	8,14	10,92	5,45	5,28
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,96	16,46	16,49	16,52	16,93
	4,35	3,13	0,17	0,16	2,51
Konstruksi	1.755,27	1.812,27	1.897,92	2.012,79	2.085,71
	(6,05)	3,25	4,73	6,05	3,62
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.413,27	1.466,27	1.577,24	1.673,83	1.783,14
	(1,05)	3,75	7,57	6,12	6,53
Transportasi dan Pergudangan	559,78	581,88	649,06	704,73	740,76
	(13,05)	3,95	11,55	8,58	5,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99,02	112,52	123,61	137,52	147,37
	(20,04)	13,63	9,86	11,26	7,16
Informasi dan Komunikasi	301,63	316,53	342,92	366,43	400,24
	11,87	4,94	8,34	6,86	9,23
Jasa Keuangan dan Asuransi	303,01	317,95	297,60	302,25	314,93
	10,36	4,93	(6,40)	1,56	4,20
Real Estate	560,38	559,98	570,26	593,10	629,51
	(0,16)	(0,07)	1,84	4,01	6,14
Jasa Perusahaan	7,62	7,92	8,34	9,17	9,72
	(4,87)	3,94	5,28	10,06	5,95
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	922,13	952,13	973,86	999,03	1.080,15
	(2,15)	3,25	2,28	2,58	8,12
Jasa Pendidikan	340,60	352,50	370,32	391,52	418,94
	2,10	3,49	5,05	5,73	7,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	512,50	545,20	553,71	565,37	604,78
	6,22	6,38	1,56	2,11	6,97
Jasa lainnya	205,13	210,13	234,29	264,30	294,60
	(10,57)	2,44	11,50	12,81	11,46
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.685,36	12.148,04	12.812,87	13.523,80	14.265,62
	(1,02)	3,96	5,47	5,55	5,49

Sumber BPS Minahasa Tahun 2025

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Minahasa selang tahun 2020-2024 berfluktuasi, dimana pada tahun 2020 kontrakasi sebesar -1,02. Hal ini disebabkan terjadi bencana Pandemi Covid 19, tetapi pada tahun 2021-2023 terjadi kenaikan masing-masing sebesar 3,96, 5,47, 5,55 dan tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 5,49 persen. Sektor Jasa lainnya paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 11,46 persen, diikuti sektor Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 9,23 dan sektor usaha

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan pertumbuhan sebesar Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan sebesar 8,12.

c) PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk sehingga hasilnya menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau per satu orang penduduk dengan pendekatan menggunakan data PDRB atas dasar harga berlaku. Data ini bermanfaat sebagai pendekatan tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah tertentu, PDRB per kapita penduduk yang ada di Kabupaten Minahasa berdasarkan Tabel 2.43 pada tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Minahasa sebesar 50,22 juta dan terus mengalami kenaikan di tahun 2021 hingga Tahun 2023 masing-masing sebesar 53,40 juta dan 62,88 juta dan pada tahun 2024 meningkat di angka 68,01.

Tabel 2.43 PDRB Perkapita Kabupaten Minahasa 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Per Kapita (Rp)	50,227,622	53,401,847	58,144,777	62,877,532	68,016,377**

Sumber: BPS Sulut Tahun 2023

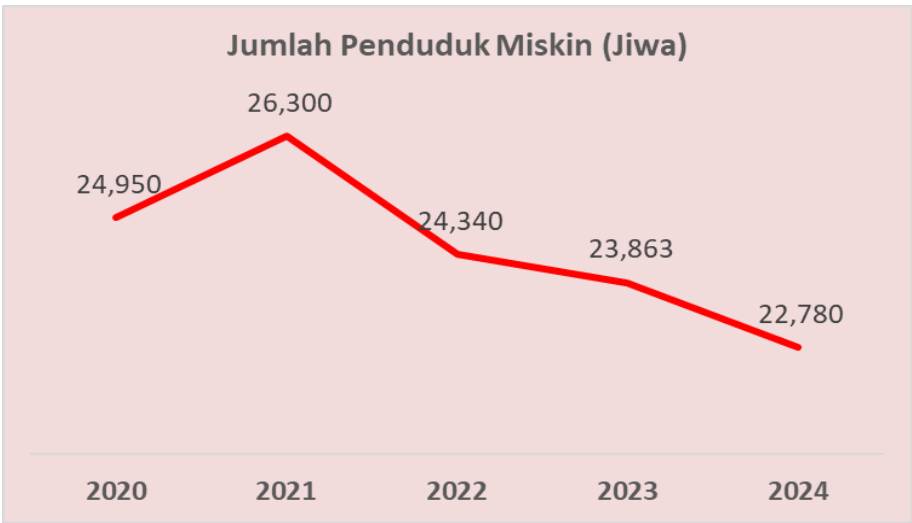
**Angka sementara*

d) Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu Negara.

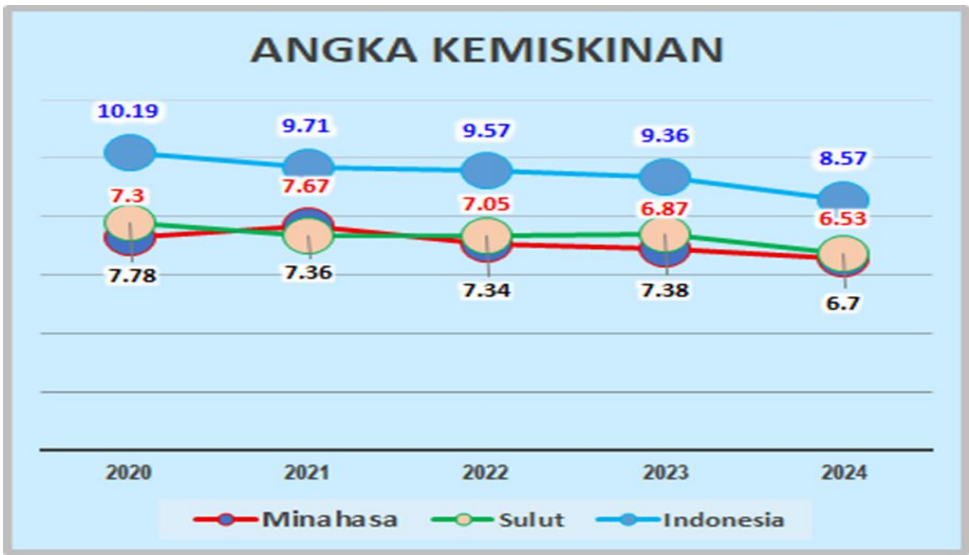
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren penurunan, dimana pada Tahun 2020 sebanyak 24,950 jiwa, tahun 2021 naik menjadi 26,300 jiwa, tahun 2022 turun menjadi 24,340 jiwa, tahun 2023 turun lagi menajdi 23,863 jiwa, dan tahun 2024 turun lagi menjadi 22,780. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa dari tahun 2020-2024 nampak pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.3 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) di Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2025 ; Data Diolah

Grafik 2.4 Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dan Nasional 2020-2024



Sumber : BPS Sulut Tahun 2024; BPS RI Tahun 2025; Data Diolah,

Pada gambar diatas nampak bahwa perkembangan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa yang berfluktuatif. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa tahun 2020 sebesar 7.30 persen naik di tahun 2021 menjadi 7.67 persen, dan mulai tahun 2022 terus menurun menjadi 7.05 persen tahun 2022 dan turun menjadi 6.87 persen tahun 2023 turun lagi menjadi 6.53 persen di tahun 2024. Sejak Tahun 2022 Angka Kemiskinan Kabupaten

Minahasa berada di bawah rata-rata Provinsi maupun Nasional.

**Tabel 2.44 Indikator Kemiskinan Kabupaten Minahasa
Tahun 2020-2024**

Kemiskinan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	24,950	26,300	24,340	23,863	22,780
Garis Kemiskinan (Rupiah)	285,596	299,072	308,634	338,802	352,693
Penduduk Miskin (%)	7.30	7.67	7.05	6.87	6.53
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.82	1.31	0.91	1.51	1.38
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.17	0.32	0.22	0.48	0.41

Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Tahun 2025

Tabel 2.44 menunjukkan perkembangan berbagai indikator kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Minahasa menunjukkan tren yang fluktuatif, Tahun 2020 pada angka 0,17 dan pada tahun 2024 capaiannya sebesar 0,41.

Begitu juga dengan indikator indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Minahasa kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif yaitu pada tahun 2020 pada angka 0,82 dan tahun 2021 naik menjadi sebesar 1,31 lalu turun pada tahun 2022 menjadi 0,91, dan tahun 2023 naik menjadi 1,51 dan tahun 2024 turun menjadi 1,38. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan kurun waktu 2020-2024 menunjukkan kecenderungan rata-rata pengeluaran penduduk miskin perlu diwaspadai agar semakin dapat diatur mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil. Kondisi ini menggambarkan tentu masih perlunya penanganan melalui program pembangunan yang terintegrasi dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Minahasa.

e) Rasio Gini

Gini Ratio menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi, Rentang skor 0 - 1, Indeks 0 menunjukkan pemerataan total, sedangkan 1 terjadi

ketidakmerataan atau sangat timpang, Rasio Gini di Kabupaten Minahasa sejak Tahun 2020-2024 terus berfluktuasi pada Tahun 2020 dari angka 0.320 naik di tahun 2021 menjadi 0.387, tahun 2022 turun menjadi 0.308 naik lagi di tahun 2023 menjadi 0.327 dan Kembali naik di tahun 2024 menjadi 0.341. namun angka Gini Ratio Kabupaten Minahasa berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Utara maupun Nasional, atau lebih kecil dari angka Gini Rasio Provinsi Sulawesi Utara maupun Nasional, Perbandingan Angka Gini Ratio Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi utara dan Nasional dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2.5 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024



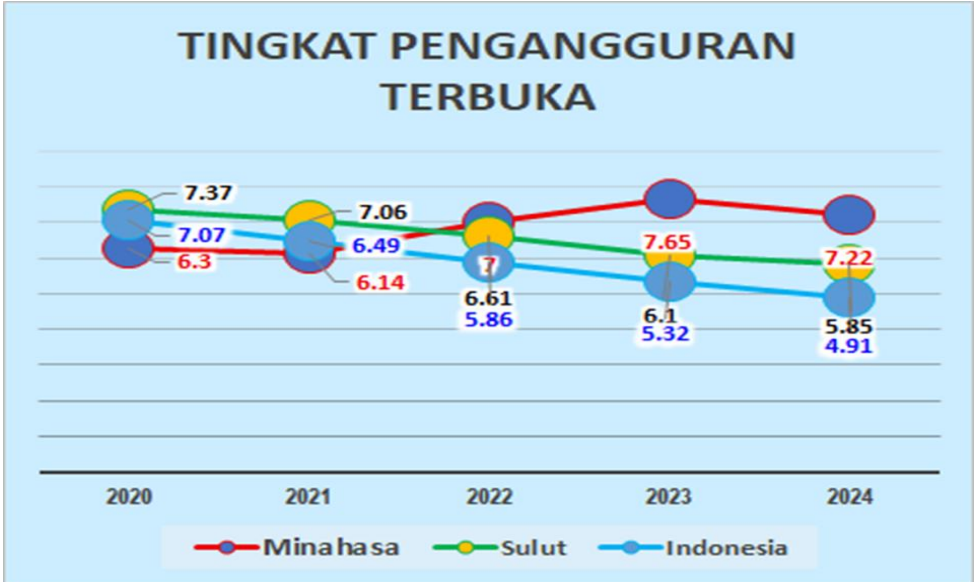
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025;

f) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai ekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Grafik 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024



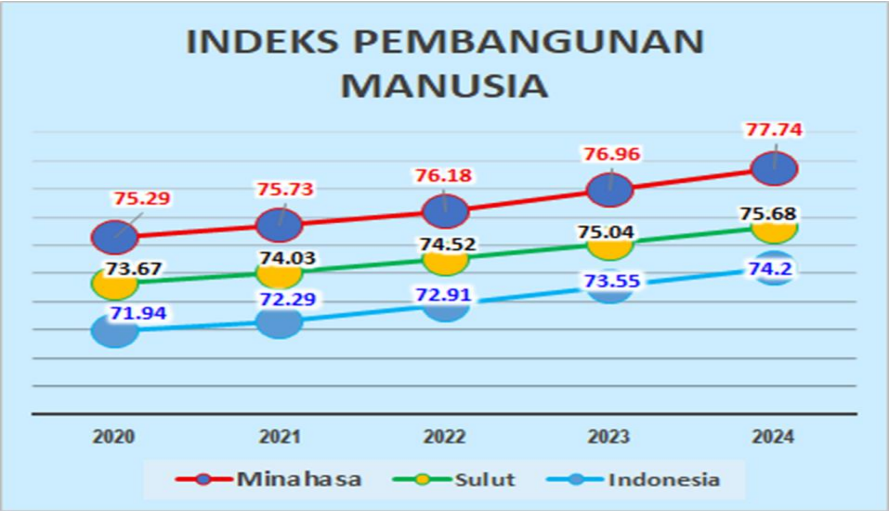
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 ; Data diolah

Berdasarkan grafik diatas, apat dilihat TPT kabupaten Minahasa dari tahun 2020 hingga 2024 terus berfluktuasi, dan dari data terlihat di bandingkan tahun 2024 7.65 %, TPT Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 7.22 %. Sejak Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Minahasa, selalu berada di atas rata-rata Nilai Provinsi atau Nasional.

g) Indeks Pembangunan Manusia

Indikator ukuran keberhasilan pembangunan dalam menyejahterahkan masyarakat dapat dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia setiap tahunnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak, Pembangunan Manusia.

Grafik 2.7 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024



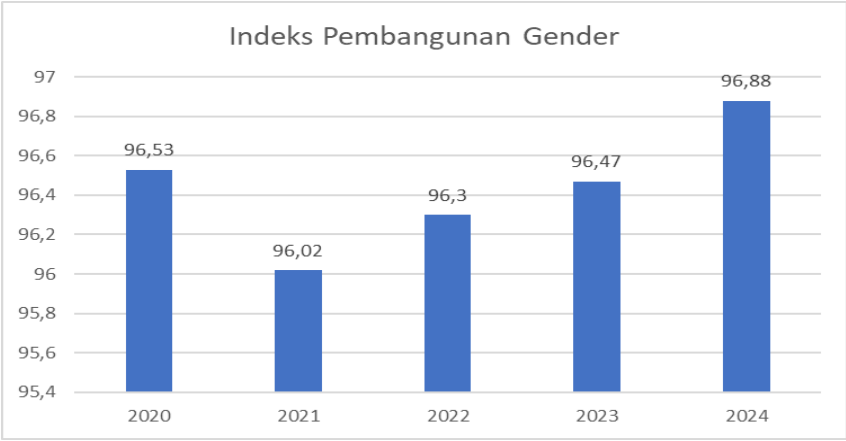
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025; Data diolah

Berdasarkan grafik diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Minahasa tahun 2020 berada pada angka 76.85, Tahun 2021 naik menjadi 77.29, naik lagi tahun 2022 menjadi 77.72, tahun 2023 naik lagi menjadi 78.48, tahun tahun 2024 naik menjadi 79.26. Hal ini menunjukkan IPM Kabupaten Minahasa selang tahun 2020–2024 terus naik. Angka IPM Minahasa berada pada kategori Tinggi dibanding kabupaten lainnya di tingkat Provinsi Sulawesi Utara, berada pada urutan ke 3 (Tiga), juga melampaui rata-rata Angka IPM Provinsi Sulawesi Utara maupun rata-rata Angka IPM Nasional.

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan perbandingan antara indeks pembangunan manusia (IPM) Laki-laki dan IPM Perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Grafik 2.8 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Minahasa dengan Provinsi Sulawesi Utara



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 (SP2010)

Grafik diatas menunjukkan perkembangan IPG Kabupaten Minahasa Tahun 2020 terus berfluktuasi, dari Tahun 2020 sebesar 96,53 menurun di tahun 2021 sebesar 96,02 dan ditahun 2022 kembali naik hingga tahun 2024 sebesar 96,88. Dibandingkan Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa nilai IPG selalu berada di atas nilai IPG Provinsi Sulawesi Utara. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki.

2) Kesehatan Untuk Semua

a) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja Kesehatan oleh Pemerintah. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat Kesehatan pada Khususnya, Pada tahun 2019 usia harapan hidup penduduk Kabupaten Minahasa sebesar 70,98 terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 71,08, tahun 2021sebesar 71,16, tahun 2022 sebesar 71,49 dan tahun 2023 sebesar 71,82, hingga tahun 2024 meningkat di 75,22 seperti yang tersaji pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.9. Angka harapan hidup di Kabupaten Minahasa



Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Tahun 2025

Grafik diatas menunjukkan trend meningkat dari tahun ketahun. Hal ini berarti pelayanan kesehatan kepada lanjut usia dilaksanakan secara baik oleh Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lainnya yang mencakup Posyandu lansia maupun pelayanan skrining sesuai kebutuhan.

b) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) tahun 2019 sebesar 6,97 mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 6,80 dan tahun 2021 turun drastis mencapai angka 2,19. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan hingga angka sebesar 7,71 dan dapat turun pada tahun 2023. Pada umumnya yang menjadi penyebab utama kematian bayi adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dibawah 2,5 kg, Biasanya terjadi pada bayi yang lahir secara prematur atau mengalami gangguan perkembangan dalam kandungan.

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun, Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1,000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Minahasa pada tahun 2019 mencapai 993,03 per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2019 masing-masing sebesar 993,20 dan 997,81, lalu kembali menurun ditahun 2022 menjadi 992,29, naik lagi mencapai angka 993,31 di tahun 2023,

seperti pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2018-2023 Kabupaten Minahasa

Tahun	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB	AKHB
2019	34	4,875	6,97	993,03
2020	16	2,352	6,80	993,20
2021	10	4562	2,19	997,81
2022	33	4582	7,71	992,29
2023	27	4030	6,69	993,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Tahun 2024

c) Persentase Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO (1999) mengelompokkan status gizi ke dalam 4 kelompok, yaitu: rendah = di bawah 10%, sedang = 10-19%, tinggi = 20-29%, sangat tinggi = 30%, Status gizi buruk balita di Kabupaten Minahasa selang tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46 Status Gizi Buruk di Kabupaten Minahasa

Tahun	Sasaran Balita	Gizi Buruk	Per-10,000
2019	22,880	3	1,31
2020	20,976	0	0
2021	16,312	0	0
2022	20976	2	0,95
2023	17,397	12	0,68

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, 2024

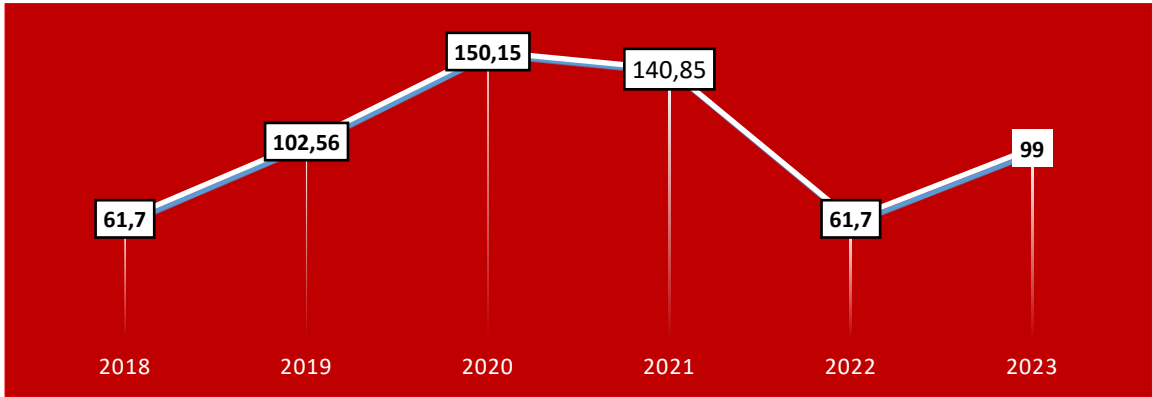
Terdapat penurunan pada kondisi gizi buruk balita di Kabupaten Minahasa, ini berarti kepedulian terhadap konsumsi makanan pada balita semakin meningkat, dilihat dari penggolongannya menunjukkan bahwa gizi buruk di Kabupaten Minahasa masuk pada kelompok rendah.

d) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (*Mother Mortality Rate*) tahun 2018 sebesar 61,7/100,000 KH, pada tahun 2019 adalah 102,56/100,000 KH

dan naik pada tahun 2020 mencapai angka 150,15/100,000 KH. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 140,85/100,000 dan pada tahun 2022 Angka Kematian Ibu melahirkan mengalami penurunan drastis menjadi 61,7/100,000 KH. Namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan mencapai angka 99/100,000 KH, Seperti tampak pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.10 Angka Kematian Ibu /100,000 KH Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

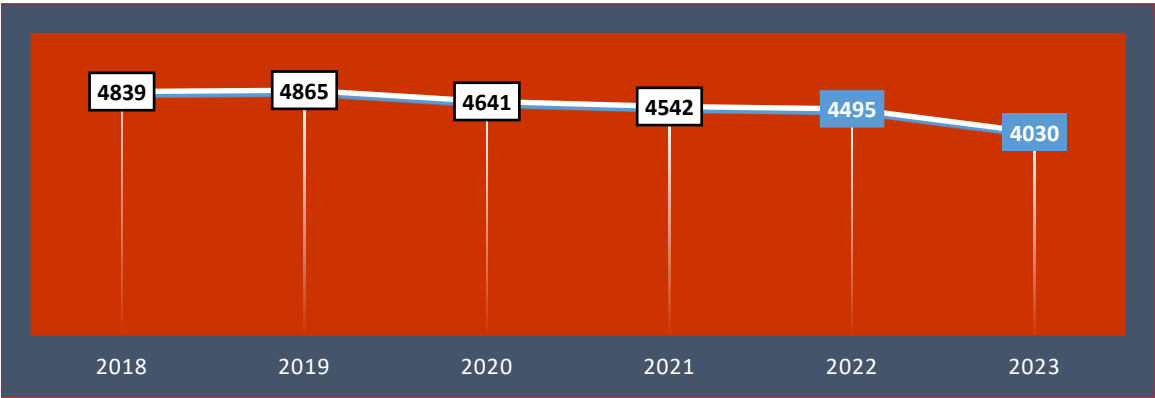


Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa 2024

e) Persalinan Ibu Hamil

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Minahasa pada Tahun 2018 sebanyak 94,79% (4,839 ibu hamil dari 5,105 target sasaran), dan tahun 2019 terjadi peningkatan 1,57% yaitu sebesar 96,36%, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu 92,89%. Tahun 2021 tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 92,6% (4,542 dari 4,923 ibu). Sedangkan data tahun 2022 menunjukkan bahwa 96% pertolongan persalinan oleh nakes. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat untuk pertolongan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, walaupun masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun beranak atau mama biang (biang kampung), Mengalami penurunan di tahun 2023, tercatat dari 4,477 target sasaran ibu bersalin, yang mendapatkan pelayanan nakes sebesar 4,030 (90,02%), hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.11 Cakupan Persalinan di Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

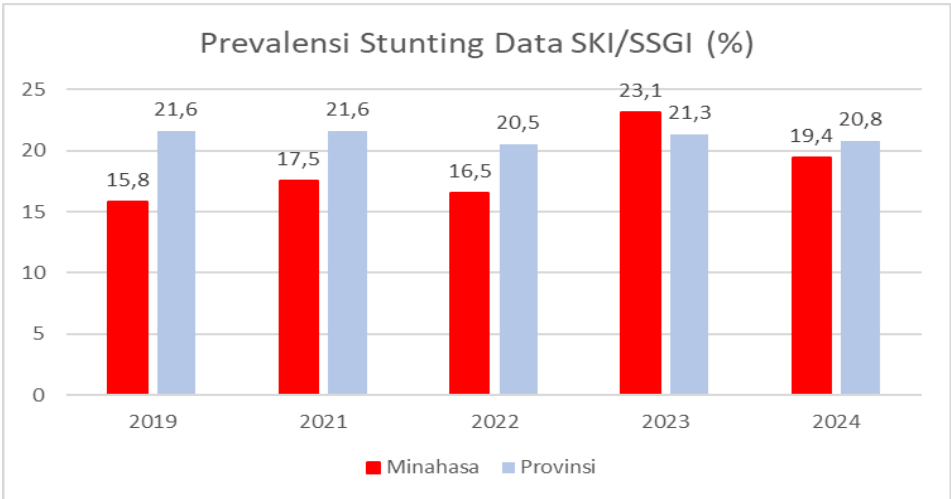


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, 2024

h) **Prevalensi Stunting**

Berdasarkan data SSGI pada Tahun 2019 Prevalensi Stunting di Kabupaten Minahasa sebesar 15,8 %, lalu meningkat ditahun 2021 menjadi 17,5% dan di tahun 2022 turun menjadi 16,5 % , tahun 2023 naik menjadi 23,1 seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.12 Prevalensi Stunting Kabupaten Minahasa Tahun 2019 - 2024 Data SKI/SSGI (%)



Sumber : Survei Status Gizi Indonesia/Survei Kesehatan Indonesia (Kementerian Kesehatan RI)

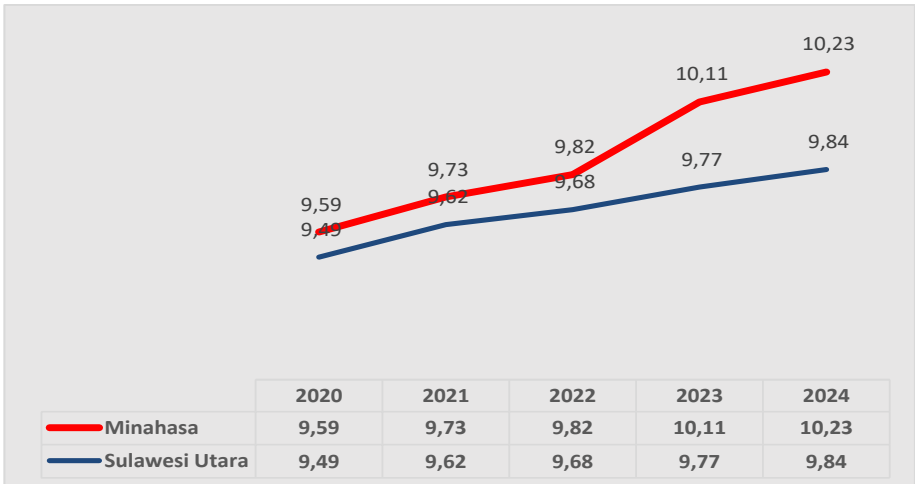
3) **Pendidikan Berkualitas yang Merata**

a) **Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan selang tahun

2020 hingga tahun 2024, dimana pada tahun 2020 berada pada angka 9,59 dan pada tahun 2022 menjadi 9,82 ditahun 2023 sebesar 10,11, dan tahun 2024 menjadi 10,23. yang berarti rata-rata telah menyelesaikan Pendidikan lanjutan pertama dan sudah tepatnya mencapai kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), Rata-Rata Lama Sekolah tersaji pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.13 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024

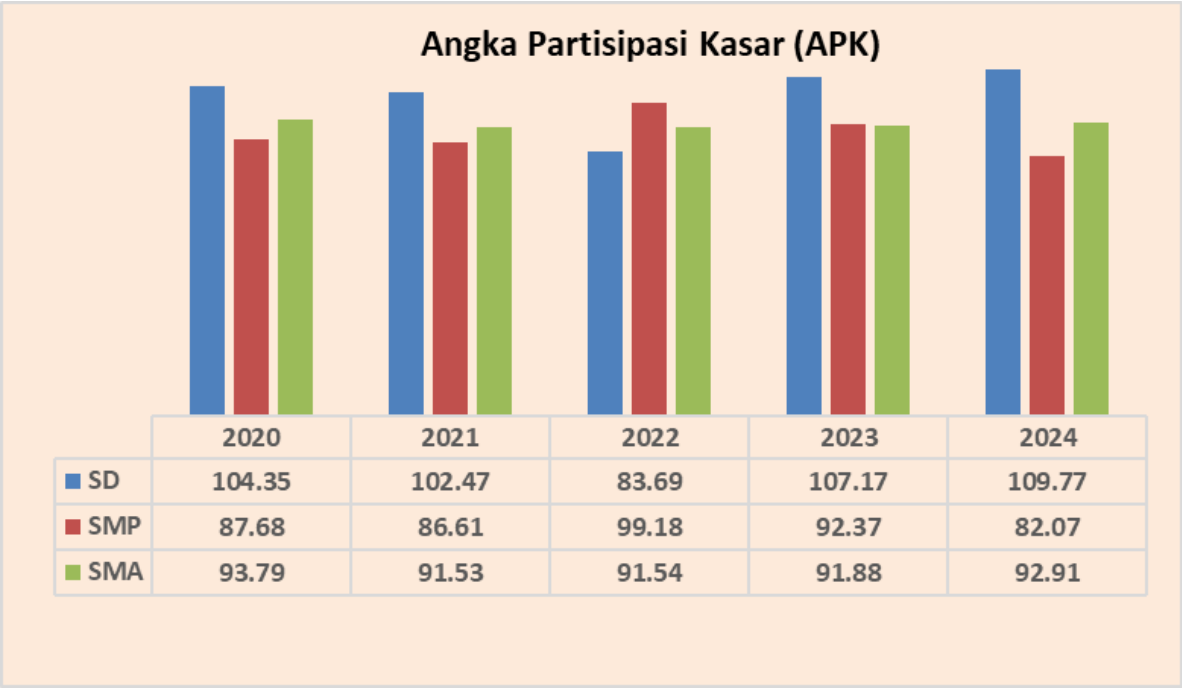


Sumber : BPS Kabupaten Minahasa, Tahun 2024

b) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Grafik dibawah ini menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Minahasa pada jenjang Pendidikan SD, dimana Rasio APK berfluktuasi selang tahun 2020– 2024, pada tahun 2020 APK Sekolah Dasar berada pada angka 104,35 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 102,47 persen, dan di tahun 2022 turun menjadi turun menjadi 83,69 pada tahun 2023 naik menjadi 107,17 dan naik lagi di tahun 2024 menjadi 109,77. APK SMP tahun 2020 sebesar 87,68 persen 87.68 86,6199.1892,3782.07, tahun 2021 turun menjadi 86,61 persen, tahun 2022 naik menjadi 99,18, tahun 2023 turun menjadi 92,37 dan tahun 2024 turun menjadi 82,07. Penurunan yang terjadi kemungkinan karena usia masuk sudah makin ketat harus sesuai ketentuan yakni usia sekolah di SD harus 7 tahun. APK SD, SMP dan SMA dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik 2.14 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP dan SMA Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Minahasa, Tahun 2025

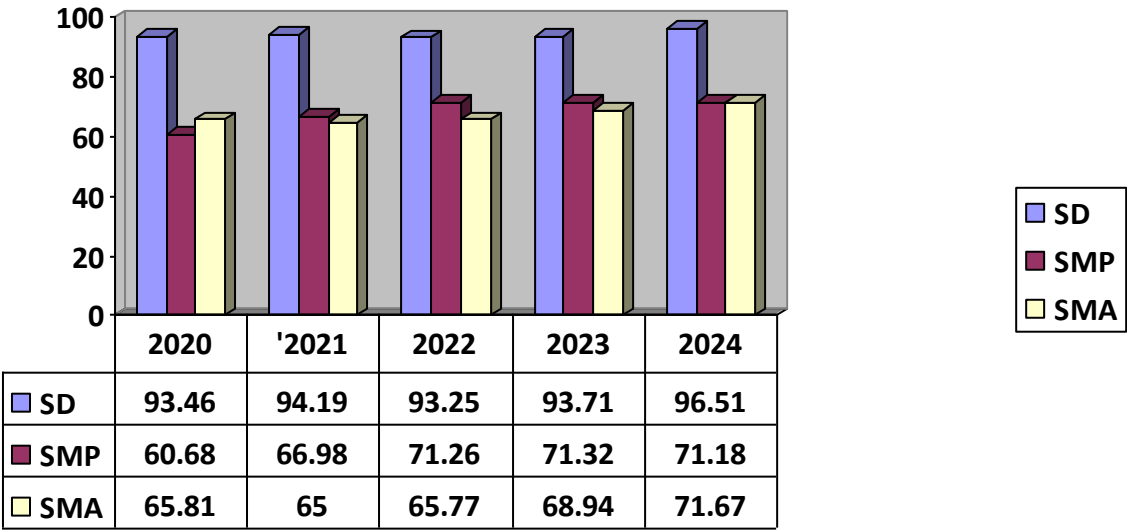
c) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan tepat waktu dan pada rentang umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh, untuk setiap jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat capaian APM belum mencapai 100 persen, artinya masih terdapat masyarakat pada usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu belum mendapatkan layanan pendidikan.

Perkembangan APM SD/MI Tahun 2018-2024 Kabupaten Minahasa

Dikabupaten Minahasa Angka Partisipasi Murni mengalami penurunan pada tahun 2018 dimana Rasio APM SD/MI berada pada angka 89,5 kemudian menunjukan tren menurun di tahun 2019 menjadi 78,9 Namun di Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 92,22, lalu kembali naik ditahun 2021 menjadi 95,41 dan terus naik hingga angka 97,22 di tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 96,1 Seperti yang tersaji pada grafik dibawah ini.

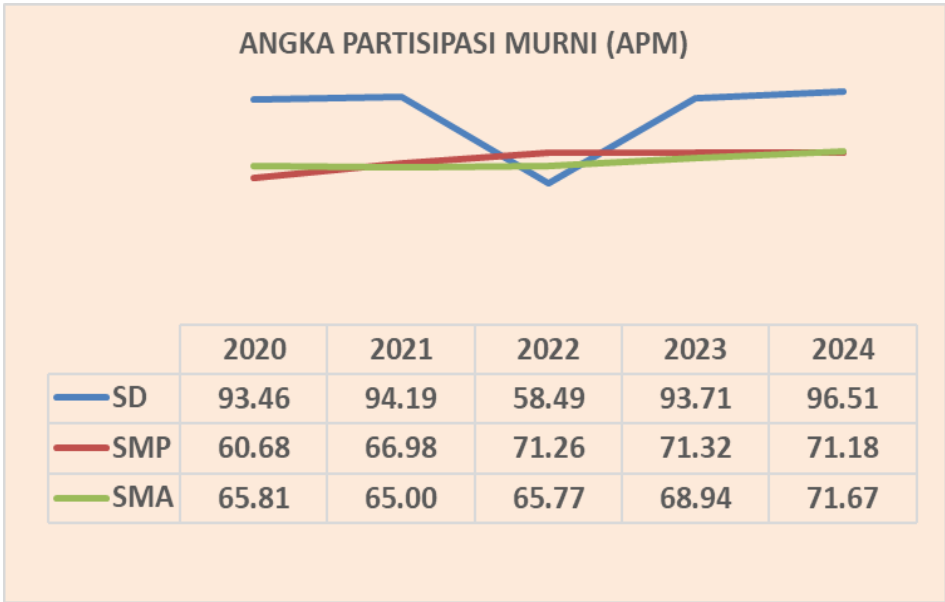
Grafik 2.15 Angka Partisipasi Murni (APM) (%) Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Minahasa pada tahun 2020 berada pada angka 93,46 untuk SD/MI, 60,68 untuk SMP, dan 65,81 untuk SMA. Pada Tahun 2021 Angka Partisipasi Murni SD dan SMP kembali menunjukkan perbaikan dengan tren yang kembali naik menjadi 94,19 untuk SD/MI persen dan 66,98 untuk SMP, sementara APM SMA mengalami penurunan menjadi 65 persen. Sementara itu terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 93,25 persen untuk SD/MI dan kenaikan sebesar 4,28 persen pada APM SMP sehingga menjadi 71,26 persen sementara itu untuk APM SMA mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan yaitu 65,77. Pada Tahun 2023 menunjukkan kenaikan pada 3 jenjang pendidikan SD menjadi 93,71 persen, SMP menjadi 71,32 persen dan SMA menjadi 68,94 persen. Berdasarkan tabel yang tersaji diatas, pada tahun 2024 APM SD dan SMA mengalami kenaikan secara drastis menjadi 96,51 persen untuk SD dan 71,67 persen untuk SMA namun tidak dengan APM SMP yang mengalami penurunan menjadi 71,18. Pencapaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs belum mencapai 100% disebabkan oleh Jumlah Siswa SMP di tahun 2020 sampai 2024 lebih kecil dibandingkan dengan Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun, hal ini dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP DAN SMA Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab Minahasa Tahun 2025

d) Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

APT ditentukan dari banyaknya pelajar yang menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah, APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah, Perkembangan APT di Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47 Perkembangan Angka Pendidikan yang di Tamatkan (APT) % Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa

No	APT	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tidak Berijazah	16,36	15,03	20,09	20,15	20,19
2	SD/Mi	15,71	21,03	20,51	20,56	21,05
3	SMP/MTs	19,79	18,42	10,15	10,16	10,17
4	SMA/SMK	30,61	35,67	40,06	40,07	40,08
5	Perguruan Tinggi	9,88	9,86	9,19	9,21	9,35

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Tahun 2024

Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Minahasa berusia 10 tahun ke atas berdasarkan kepemilikan ijazah sampai pada tahun 2023 menunjukan sebagian besar memiliki ijazah SMA yaitu sebesar 40,08 persen (Tabel 2.48), Dengan tingkat kelulusan mencapai 99,87% untuk SD/MI dan 99,96% untuk SMP/MTs.

Tabel 2.48 Tingkat Kelulusan Siswa SD dan SMP
Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2023

No,	Tingkat Sekolah	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI				
	Peserta Ujian (Siswa)	4,518	4486	4495	4799
	Lulus Ujian (Siswa)	4,518	4484	4489	4799
	Prosentasi	100	99,95	99,96	100
	Nilai Rata-Rata	100	99,95	99,87	99,97
2	SMP/MT				
	Peserta Ujian (Siswa)	4,455	4526	4535	4612
	Lulus Ujian (Siswa)	4,455	4523	4533	4612
	Prosentasi	100	99,93	99,95	100
	Nilai Rata-Rata	100	99,93	99,96	99,96

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Tahun 2024

e) Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan. APS merupakan indikator keberhasilan program pembangunan pendidika. Angka Partisipasi Sekolah umur 7-12 tahun (usia sekolah SD) dan umur 13-15 tahun (usia sekolah SMP) di Kabupaten Minahasa secara umum hampir mencapai 100 persen. Hal ini memberi indikasi bahwa pada usia sekolah ini hampir tidak ada yang tidak bersekolah apa lagi usia sekolah SD. Hanya sedikit saja usia sekolah 13-15 tahun atau usia sekolah SMP yang tidak bersekolah.

Grafik 2.17. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Minahasa (%) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Minahasa, Tahun 2025

4) Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial adaptif merupakan program yang membantu masyarakat menghadapi berbagai krisis, seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan perubahan iklim. Program ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan, dukungan, dan

pemberdayaan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Program PKH sebagai upaya memberi perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin, Pada Jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perilaku peserta dalam perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas, Kemudian dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat menuntaskan rantai kemiskinan antar Generasi. Adapun Jumlah penerima PKH Kabupaten Minahasa pada Tahun 2019 sebanyak 13,096. Keluarga terus menurun sejak tahun 2020 pada angka 11,979 Keluarga, tahun 2021 sebanyak 11,797 Keluarga tahun 2022 sebanyak 9,498 Keluarga dan tahun 2023 lebih menurun lagi menjadi 8,062 keluarga, Terlihat pada Tabel 2.49 berikut ini :

**Tabel 2.49 Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan
Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023**

NO	KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Eris	558	511	426	458	393
2	Kakas	716	732	575	567	463
3	Kakas Barat	863	826	570	560	460
4	Kawangkoan	222	210	213	213	190
5	Kawangkoan Barat	259	263	194	192	163
6	Kawangkoan Utara	193	186	226	219	192
7	Kombi	413	379	383	375	316
8	Langowan Barat	803	780	690	670	602
9	Langowan Selatan	420	385	265	264	225
10	Langowan Timur	261	252	260	239	214
11	Langowan Utara	376	354	309	289	216
12	Lembean Timur	444	461	446	443	370
13	Mandolang	798	813	522	522	429
14	Pineleng	365	426	313	312	261
15	Remboken	649	754	481	472	395
16	Sonder	555	573	539	514	442
17	Tombariri	704	696	593	582	504
18	Tombariri Timur	684	657	494	472	406
19	Tombulu	362	371	354	371	325
20	Tompaso	248	217	203	195	166
21	Tompaso Barat	377	356	298	295	249
22	Tondano Barat	427	402	272	271	222
23	Tondano Selatan	402	375	271	278	242
24	Tondano Timur	559	533	470	460	394
25	Tondano Utara	321	285	266	265	223
TOTAL		13.096	11.979	11.797	9.498	8.062

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, Tahun 2024

Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera

pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

Korban bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2.50 dibawah ini:

Tabel 2.50 Realisasi Bantuan Bencana Alam Dan Sosial Tahun 2018-2023

NO	TAHUN	BENCANA SOSIAL	BENCANA ALAM
1	2018	45 KK	150 KK
2	2019	75 KK	150 KK
3	2020	25 KK	75 KK
4	2021	20 Orang	1464 Orang
5	2022	46 KK	338 KK
6	2023	48 KK	641 KK

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, Tahun 2024

Tabel 2.51 Jumlah Penyaluran Bantuan Bencana Alam (Keluarga) Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Minahasa Tahun 2021- 2024

Jenis Bencana	2021	2022	2023	2024
Kebakaran	6	43	48	106
Tanah Longsor	9	52	16	127
Banjir	1.428	422	173	299
Angin Kencang	43	23	452	40
Minahasa	1.486	543	689	572

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2025

5) Beragama Maslahat dan Berbudaya Maju

Kabupaten Minahasa terkenal dengan besarnya toleransi kehidupan antar umat beragama, hal ini terjadi berkat dukungan organisasi yang sangat aktif berperan didalamnya yaitu BKSAU, FKUB, dan BAMAG yang didukung dengan pola kehidupan

masyarakat yang religius sehingga seperti yang ada pada Tabel 2.52 dapat dilihat banyaknya tempat ibadah di Kabupaten Minahasa serta rasio yang terus meningkat.

Tabel 2.52 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa, Tahun 2024

Kecamatan	Masjid	Musho la	Gereja Protest an	Gereja Katholik	Pura	Vihar a
Langowan Timur	1	1	27	1	–	–
Langowan Barat	3	–	52	2	–	–
Langowan Selatan	–	–	32	2	–	–
Langowan Utara	–	–	46	–	–	–
Tompaso	–	1	49	–	–	–
Tompaso Barat	–	–	32	2	–	–
Kawangkoan	1	–	45	1	1	–
Kawangkoan Barat	–	–	50	–	–	–
Kawangkoan Utara	–	–	67	4	–	–
Sonder	–	–	64	5	–	–
Tombariri	4	–	26	9	–	–
Tombariri Timur	–	–	58	–	–	–
Pineleng	6	1	29	12	–	–
Tombulu	–	–	43	7	1	–
Mandolang	3	1	28	4	–	–
Tondano Barat	3	–	35	1	–	–
Tondano Selatan	–	–	30	4	–	–
Remboken	3	–	25	3	1	–
Kakas	2	–	25	3	–	–
Kakas Barat	–	–	37	1	–	–
Lembean Timur	2	–	63	1	–	–
Eris	–	–	32	1	–	–
Kombi	1	–	32	3	–	–
Tondano Timur	–	–	22	–	2	–
Tondano Utara	4	–	49	1	–	–
Minahasa	33	4	998	69	5	–

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.53 Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Realisasi Pembayaran PKH Menurut Tahun di Kabupaten Minahasa 2021-2024

Tahun	Pendamping	Kecamatan	Realisasi Pembayaran (Rupiah)
2021	65	25	27.794.550.000
2022	63	25	26.800.400.000
2023	61	25	23.893.276.531

2024	61	25	28.128.078.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, Tahun 2024

Pendamping PKH di atas untuk memastikan bantuan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan, oleh karena itu disetiap kecamatan terdapat pendamping PKH, dimana sesuai dengan yang tersaji pada tabel diatas Pendamping PKH terus mengalami pengurangan jumlah, yang berarti semakin sedikit jumlah penerima manfaat program PKH.

6) Keluarga Berkualitas, Kesejahteraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri,memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus mempunyai kesempatan, sumber daya, dan pengetahuan yang seimbang serta menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas manusia yang bersifat kodrati. Isu ini adalah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan di segala bidang kehidupan di dalam masyarakat.

Tabel 2.54 Banyaknya Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kasus di Minahasa 2023-2024

Jenis Perkara	Laki-Laki		Perempuan		Anak	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Persetubuhan	–	3	3	5	36	19
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	–	–	9	8	8	–
Perdagangan Manusia	–	–	–	4	–	–
Kekerasan Fisik/Psikis	–	–	9	8	7	3
Penelantaran Anak dan Penelantaran Rumah Tangga	–	–	–	8	4	3
Perbuatan Tidak Menyenangkan	–	–	2	1	14	–
Konsultasi Hak Anak	–	–	–	–	3	3
Perundungan	–	–	–	–	1	8
Kekerasan Terhadap Anak	–	–	–	–	73	36
Korban Penganiayaan	–	–	9	8	36	19

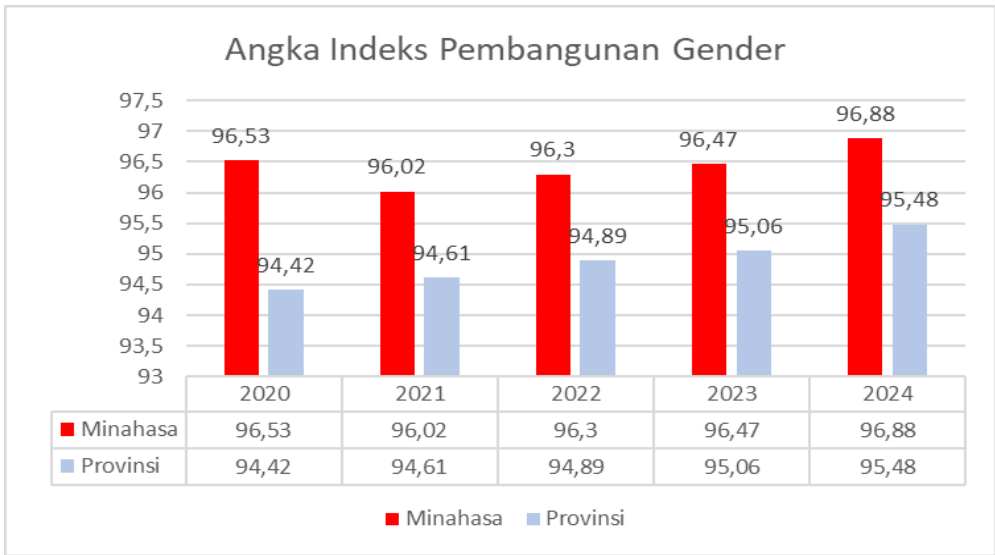
Perkelahian	–	–	–	–	4	–
Anak Berhadapan Hukum	–	–	–	–	2	–
Pembunuhan	–	–	–	–	–	1
LGBT	–	–	–	–	–	–
Jumlah	–	–	32	42	188	92

Sumber: Kabupaten Minahasa Dalam Angka Tahun 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara indeks pembangunan manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Gambar 2.19 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Minahasa dengan Provinsi Sulawesi Utara



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Grafik diatas menunjukkan perkembangan IPG Kabupaten Minahasa tahun 2018 sebesar 96.48 mengalami peningkatan tahun 2019 sebesar 96.76 namun kembali mengalami penurunan ditahun 2020 sampai 2021 yaitu 96.53 dan 96.02. Kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 sampai 2023 dengan nilai 96.3 dan 96.47. Dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa berada diurutan ke 5 (Lima) juga melampaui realisasi angka IPG Provinsi Sulawesi Utara. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki.

c. Aspek Daya Saing Daerah

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan dan kinerja SDM suatu negara dalam berkompetisi di pasar global. Daya saing SDM juga memengaruhi daya saing ekonomi suatu negara atau

suatu daerah. Negara atau daerah dengan daya saing SDM yang tinggi akan lebih menarik bagi investor asing. Hal ini karena negara tersebut berpotensi memberikan keuntungan bisnis yang lebih besar.

Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1 S2 dan S3. Adapun rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2019-2023 Kabupaten Minahasa mengalami penurunan sejak tahun 2019 pada angka 99,54 hingga tahun 2021 sebesar 90,74. Pada Tahun 2020 rasio lulusan mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu pada angka rasio 60,53 diakibatkan oleh dampak pandemic yang melanda dunia, dan kembali naik ditahun 2021 setelah keadaan berangsur pulih.

**Tabel 2.55 Ratio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2018-2023
Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Lulusan S1	3242	1979	2985	2476	2736
2	Jumlah Lulusan S2	144	108	173	164	315
3	Jumlah Lulusan S3	10	15	6	10	15
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	3396	2102	3164	2650	3066
5	Jumlah Penduduk	341.176	343.564	343.800	350.317	351.920
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5 x10,000)	99,54	60,53	90,74	75,65	87,12

Sumber: Universitas Negeri Manado, Tahun 2024
Tingkat ketergantungan

Dari data terlihat bahwa penduduk non produktif (berusia 0-14 tahun dan 65 +) mencapai angka 31,97 % dan penduduk usia produktif berada pada angka 68,03 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa kelompok usia produktif lebih banyak jumlahnya dari pada kelompok usia non produktif, dengan rasio ketergantungan sebesar 47,00 pada tahun 2022.

Angka beban ketergantungan Kabupaten Minahasa selama lima tahun terakhir mengalami penurunan, Ini berarti jumlah penduduk non produktif semakin kecil atau jumlah penduduk produktif semakin besar.

Jika dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Minahasa seperti Tabel 2.56, maka pada usia kelompok umur 15 – 64 tahun terus mengalami peningkatan lebih cepat dibanding kelompok umur non produktif baik pada tahun 2020 maupun pada tahun tahun selanjutnya. Sehingga rasio

ketergantungan berfluktuasi dari tahun 2020 dan 2021 pada angka 46,53 dan 46,73 naik pada tahun 2022 dan 2023, namun turun pada tahun 2024 menjadi 45,69.

**Tabel 2.56 Rasio Ketergantungan Tahun
Kabupaten Minahasa 2020 - 2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	72,337	71,694	71,153	72.450	61.949
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	37,940	39,354	40,854	238.670	227.088
3	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	237,013	237,625	238,310	40.800	41.806
4	Rasio Ketergantungan (1+2)/(3)	46,53	46,73	47,00	47,45	45,69

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa, Tahun 2025 (data diolah)

Semakin tingginya *persentase dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan *dependencyratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2) Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi

a) Informasi Teknologi Tepat Guna (TTG)

Penggunaan teknologi tepat guna (TTG) di Kabupaten Minahasa telah dilakukan di 11 kecamatan dan pada 31 desa, Adapun jenis kegiatannya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.57 berikut :

**Tabel 2.57 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Desa
Kabupaten Minahasa Tahun 2023**

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
1.	Pompa Air	Untuk Sirkulasi Air Dan Oksigen Budidaya Ikan	Paslaten	Kakas
2.	Mesin Cacah	Mencacah Eceng Gondok Dijadikan Pupuk Organik		
3.	Mesin Cacah	Mencacah tanah	Kaweng	

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
		pertanian		
4.	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi	Tountimomor	Kakas Barat
5.	Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras		
6.	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi	Kalawiran	
7.	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi	Touliang	
8.	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi	Passo	
9.	Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras	Panasen	
10.	Alat Peras	Mempermudah dan Efektif Memeras Santan		
11.	Alat destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh	Karor	Lembean Timur
12.	Meja putar	Membentuk Gerabah/Keramik	Pulutan	Remboken
13.	Mesin aduk	Mencampur Tanah Liat Dan Bahan Campuran Keramik		
14.	Irigasi pipa PVC	Menyiram Tanaman Budidaya Di Lahan Luas Terintegrasi	Tember	Tompaso
15.	Mesin Cacah	Mencacah Sampah	Tonsea lama	Tondano Utara
16.	Alat Destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh	Noongan	Langowan Barat
17.	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Kamangta	Tombulu
18.	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Lemoh Barat	Tombariri Timur
19.	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Lemoh Timur	
20.	Alat Pengolahan Bio Gas	Biogas Utk Listrik (Kompas Gas & Listrik		
21.	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Ranotongkor Timur	
22.	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi	Lemoh	
23.	Mesin Pengolahan VCO	Pengolahan VCO		
24.	Mesin Pengolahan Pupuk Organik	Pengolahan Pupuk Organik		
25.	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi	Lemoh Uner	
26.	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung	Lemoh Satu	
27.	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung	Lemoh Tiga	
28.	Mesin Giling Jagung	Menghancurkan Jagung/Memecah Biji Jagung	Lemoh Dua	
29.	Crown Cms-036 Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan	Timbukar	Sonder
30.	Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan	Kauneran Satu	
31.	Alat Parut Kelapa	Parut Kelapa	Talikuran Satu	
32.	Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah		
33.	Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas		

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
34.	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Talikuran	
35.	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Sendangan	
36.	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Tincep	
37.	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya		
38.	Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah		
39.	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya	Tounelet	
40.	Alat Penanam Padi	Mempermudah Dlm Menanam Padi/Lebih Cepat		
41.	Alat Giling Daging	Menggiling Daging Menjadi Bahan Makanan Olahan		
42.	Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas		
43.	Mesin Penanam Jagung	Mempermudah dalam Menanam Jagung/ Lebih Cepat		
44.	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya	Kiawa Satu	Kawangkoan Utara
45.	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tongkolnya	Kiawa Satu Barat	
46.	Alat Penyulingan Asap Cair	Membuat Asap Cair	Kembuan	Tondano Utara
47.	Mesin Cukur & Peras Kelapa	Mencukur dan memeras kelapa	Tandengan Satu	Eris

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, Tahun 2024

Tabel 2.58. Ratio Industri Pengolahan Dan Ratio Penyediaan Akomodasi/Makan Minum Kabupaten Minahasa Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	17,427.13	18,643.14	20,369.10	22,127.99	24,046.51
1. Industri Pengolahan	1,251.64	1,369.58	1,533.03	1,694.93	1,844.94
2. Peny. Akomodasi dan Makan Minum	142.91	168.15	187.27	212.30	235.16
Ratio Industri Pengolahan	7.18	7.35	7.53	7.66	7.67

Ratio Peny. Akomodasi dan Makan Minum	0.82	0.90	0.92	0.96	0.98

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa, Tahun 2025 (data diolah)

3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Indonesia dilakukan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Konsep ini memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Beberapa contoh penerapan ekonomi hijau di Indonesia adalah: Pengembangan energi terbarukan, seperti energi matahari, energi angin, dan energi panas bumi, Pengelolaan hutan yang berkelanjutan, Pengembangan ekowisata, Perhutanan sosial, Pertanian organik dan desa wisata. Manfaat penerapan ekonomi hijau di Indonesia adalah: Menstabilkan pertumbuhan ekonomi, Mengurangi emisi gas rumah kaca, Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan inovasi dan investasi untuk pembangunan berkelanjutan.

4) Transformasi Digital

Transformasi digital, atau pengalih bentukan digital, adalah bagian dari proses teknologi yang lebih besar. Transformasi digital merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Transformasi digital merupakan proses yang diterapkan organisasi atau pemerintahan untuk mengintegrasikan teknologi digital di semua program dan kegiatan. Proses ini secara mendasar mengubah cara organisasi memberikan nilai kepada masyarakat.

5) Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global

Tabel 2.59 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) Dan Distribusi

Pengeluaran PDRB	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	6,995.14	7,510.29	8,299.69	9,173.41	10,066.46
	40.14	40.28	40.74	41.46	41.86
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	866.16	927.04	1,014.54	1,195.21	1,390.47
	4.97	4.97	4.89	5.4	5.78
Pengeluaran	1,440.19	1,464.77	1,473.52	1,557.91	1,719.45

Konsumsi Pemerintah	8.26	7.86	7.34	7.04	7.15
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	7,533.79	7,910.05	8,408.05	9,084.04	9,661.55
	43.23	42.43	41.26	41.05	40.18
Perubahan Inventori	0.15	0.16	0.17	0.19	0.23
	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	5,520.82	5,922.40	5,965.00	6,557.60	6,983.27
	31.68	31.77	29.28	29.63	29.04
Impor Barang dan Jasa	4,929.12	5,091.57	4,791.86	5,440.38	5,774.92
	28.28	27.31	23.53	24.59	24.02
PRODUK DOMESTIK BRUTO	17,427.13	18,643.14	20,369.10	22,127.99	24,046.51
	100	100	100	100	100
Pengeluaran PDRB	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5,019.39	5,273.11	5,605.95	5,962.10	6,297.09
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	519.84	542.95	562.93	637.08	702.97
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,319.71	1,361.82	1,350.88	1,375.97	1,477.24
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,280.28	4,412.00	4,622.64	4,770.27	5,006.24
Perubahan Inventori	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14
Ekspor Barang dan Jasa	3,992.50	4,066.89	4,095.16	4,453.73	4,458.27
Impor Barang dan Jasa	3,446.47	3,508.83	3,424.82	3,675.49	3,676.34
PRODUK DOMESTIK BRUTO	11,685.36	12,148.04	12,812.87	13,523.80	14,265.62

6) Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan sering kali menjadi pusat ekonomi dengan infrastruktur yang lebih maju, menciptakan peluang kerja dan layanan publik yang lebih baik dibandingkan perdesaan. Namun, pesatnya urbanisasi sering menyebabkan tekanan terhadap ketersediaan hunian layak, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Permintaan yang tinggi terhadap perumahan di kota kota besar mendorong kenaikan harga properti dan penyebaran kawasan permukiman informal, yang sering kali memiliki akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan fasilitas dasar lainnya. Sebaliknya, di perdesaan, meskipun tekanan

terhadap harga lahan lebih rendah, akses terhadap infrastruktur perumahan dan layanan dasar sering kali masih terbatas, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Capaian Indeks kualitas layanan infrastruktur di Kabupaten Minahasa sebelum tahun 2024 belum terdapat data, sehingga untuk kebutuhan perencanaan maka indeks kualitas layanan infrastruktur dapat dilihat pada tabel 2.60 Dari data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pengguna terhadap layanan infrastruktur masih relatif sedang yaitu pada angka 64. Hal ini dapat berarti infrastruktur yang terbangun belum sepenuhnya memberikan kepuasan bagi masyarakat, yang mungkin disebabkan karena infrastrukturnya masih kurang, dalam kondisi yang rusak atau bahkan mungkin belum tersedia. Indeks kualitas layanan infrastruktur tersebut terutama terkait layanan infrastruktur transportasi yaitu jalan/jembatan, air minum, sanitasi, drainase.

Tabel 2.60 Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Minahasa.

Uraian Indikator	Capaian Tahun	
	2023	2024
Indeks Kualitas layanan Infrastruktur	NA	64

Sumber : Dinas PUPR Kab. Minahasa, 2025

Integrasi antara perkotaan dan perdesaan sangat penting untuk menciptakan pemerataan akses terhadap hunian layak dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Peningkatan konektivitas antara kedua wilayah melalui infrastruktur transportasi dan digital dapat mempercepat distribusi sumber daya, membuka peluang ekonomi baru, serta mengurangi kesenjangan hunian antara perkotaan dan perdesaan. Hubungan yang seimbang antara perkotaan dan perdesaan tidak hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki tempat tinggal yang layak dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Rumah tangga dengan akses hunian layak merujuk pada keluarga atau individu yang tinggal di rumah dengan kondisi yang memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan akses terhadap fasilitas dasar. Hunian layak mencakup aspek fisik seperti struktur bangunan yang

kokoh, ventilasi yang baik, serta ukuran rumah yang memadai sesuai jumlah penghuni. Selain itu, hunian layak harus memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, listrik, serta fasilitas lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan penghuninya. Keberadaan infrastruktur sosial seperti sekolah, pusat kesehatan, transportasi, dan ruang terbuka hijau juga menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan suatu hunian.

Rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Minahasa selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2024 sebesar 91,91%. Peningkatan ini terjadi karena telah dilakukan perbaikan dan pembangunan Rumah Layak Huni yang dilaksanakan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten bahkan juga dilakukan oleh organisasi seperti organisasi keagamaan.

Tabel 2.61 Rumah tangga dengan akses Hunian Layak Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	82,762	87,652	87,965	88,804	86.641
2	Jumlah Rumah Layak Huni	65,793	69,830	72,237	73,723	79.630
3	Rumah tangga dengan akses hunian layak	79,50	79,67	82,12	83,02	91,91

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa, 2025.

Upaya untuk meningkatkan rumah tangga dengan akses hunian layak memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah dapat mendorong pembangunan perumahan terjangkau melalui kebijakan subsidi, kredit perumahan berbunga rendah, serta regulasi tata ruang yang mendukung pemanfaatan lahan secara efisien. Sektor swasta juga dapat berperan dalam menyediakan hunian dengan harga terjangkau melalui kemitraan publik swasta. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk edukasi tentang kepemilikan rumah, renovasi mandiri, serta program gotong royong dalam pembangunan hunian juga dapat meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak dan berkelanjutan.

a) Aksesibilitas daerah

Gambaran tingkat aksesiblitas di Kabupaten Minahasa dapat

dilihat pada uraian berikut ini.

1) *Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan,*

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan yang dapat memberi akses tiap kendaraan, panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2018 s,d 2023 Kabupaten Minahasa ditunjukkan pada Tabel 2.62,

**Tabel 2.62 Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2019 s.d Tahun 2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan (km)	681,15	681,15	681,15	681,15	880,42
2	Jumlah Kendaraan	59,244	62,250	95,691	107,40 9	114,48 8
3	Rasio (km/unit kendaran)	87,0	91,39	140,48	157,69	133,06

SumSumber : Bappelitbangda Kab, Minahasa (diolah dari Dinas PUPR dan Dishub), 2024

Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan meningkat dari tahun 2019 sebesar 86,98 hingga pada tahun 2023 menjadi 157,69, hal ini berarti peningkatan jumlah kendaraan tidak sebanding panjang jalan yang tersedia, sehingga dapat berdampak pada kelancaran arus lalu lintas. Untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan ketersediaan jalan di Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya dapat dilihat informasi tentang jarak dan waktu tempuh kendaraan dari Kota Tondano ibu kota Kabupaten Minahasa ke kota besar atau layanan di sekitarnya (Tabel 2.63), waktu tempuh yang semakin singkat menandakan adanya peningkatan dalam layanan transportasi,

Tabel 2.63 Jarak dan Waktu Tempuh

No	Aksesibilitas	Jarak	Waktu
1	Tondano – Bandara Sam Ratulangi	45 Km	1 Jam 30 Menit
2	Tondano – Manado	30 Km	1 Jam
3	Tondano – Pelabuhan Bitung	62 Km	1 Jam 30 Menit

Sumber : Bappelitbangda Minahasa (diolah)

Tingkat kemudahan dalam melakukan perjalanan dari tempat tinggal ke lokasi layanan yang dibutuhkan di Kabupaten Minahasa relatif baik

b) Rasio rumah layak huni

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan Pembangunan. Jumlah rumah layak huni tahun 2022 sebesar 72,237 terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 69,830. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk (Tabel 2.64), Dari tabel tersebut terlihat bahwa Rasio Rumah layak huni Kabupaten Minahasa masih berkisar pada angka 0,20-0,21 selang tahun 2019 hingga tahun 2023, Semakin tinggi rasio rumah layak huni menunjukkan semakin berhasil pemerintah/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak. Jika rasio rumah layak huni bernilai 0,2 artinya untuk setiap 5 (lima) orang penduduk, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni, Jika rasio rumah layak huni bernilai 0,25 artinya untuk setiap 4 (empat) orang penduduk, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni.

Meskipun rasio rumah layak huni relatif baik, namun perlu tetap dilakukan penyediaan rumah yang layak karena masih terdapat 15,081 rumah yang tidak layak huni.

Tabel 2.64 Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020-2023 Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Rumah	82,862	87,652	87,965	88,804
2.	Jumlah Rumah Layak Huni	68,793	69,830	72,237	73,723
3.	Jumlah Penduduk	343,564	348,673	351,126	351,920
4.	Rasio Rumah Layak Huni thd Jumlah penduduk	0,21	0,20	0,21	0,2095

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Minahasa, 2024

7) Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro adalah kondisi tidak adanya fluktuasi berlebihan dalam perekonomian. Stabilitas ekonomi makro penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Stabilitas ekonomi makro mengacu pada kondisi dimana berbagai indikator ekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan nilai tukar mata uang, tetap stabil dan terkendali dalam jangka waktu yang panjang.

Tabel 2.65 Rasio PAD Terhadap PDRB Kabupaten Minahasa Tahun 2021-2024

URAIAN	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	1,252,881,034,300	1,250,387,719,645	1,264,520,671,363	1,332,891,813,901
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	94,336,838,566	94,887,781,440	107,035,294,000	115,045,834,372
Pendapatan Pajak Daerah	40,533,856,603	46.135.915.674,28	48.814.919.992,82	51,928,385,442
Pendapatan Retribusi Daerah	2,571,025,620	2.322.306.000,00	2.821.350.600,00	3,752,772,600
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,766,190,145	3.257.266.182,00	4.828.041.413,00	4,360,138,683
Lain-lain PAD yang Sah	47,465,766,198	43.172.293.583,96	50.570.981.994,52	55,004,537,647
PDRB HB Kabupaten Minahasa (juta)	18,602,310	20,320,370	22,078,640	23,992,780
Ratio PAD Terhadap PDRB (%)	0.51	0.47	0.48	0.48

Sumber : *BPKAD Kabupaten Minahasa, Tahun 2025 (data diolah)*

d. **Aspek Pelayanan Umum**

1) **Regulasi Dan Tata Kelola**

Regulasi adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku, sedangkan tata kelola adalah cara mengelola sesuatu.

Regulasi

- Regulasi bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, seperti keamanan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan.
- Regulasi dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mencegah tindakan yang merugikan.
- Regulasi perusahaan sering kali dikenal juga sebagai kebijakan perusahaan atau kode etik yang harus dipatuhi oleh karyawan.

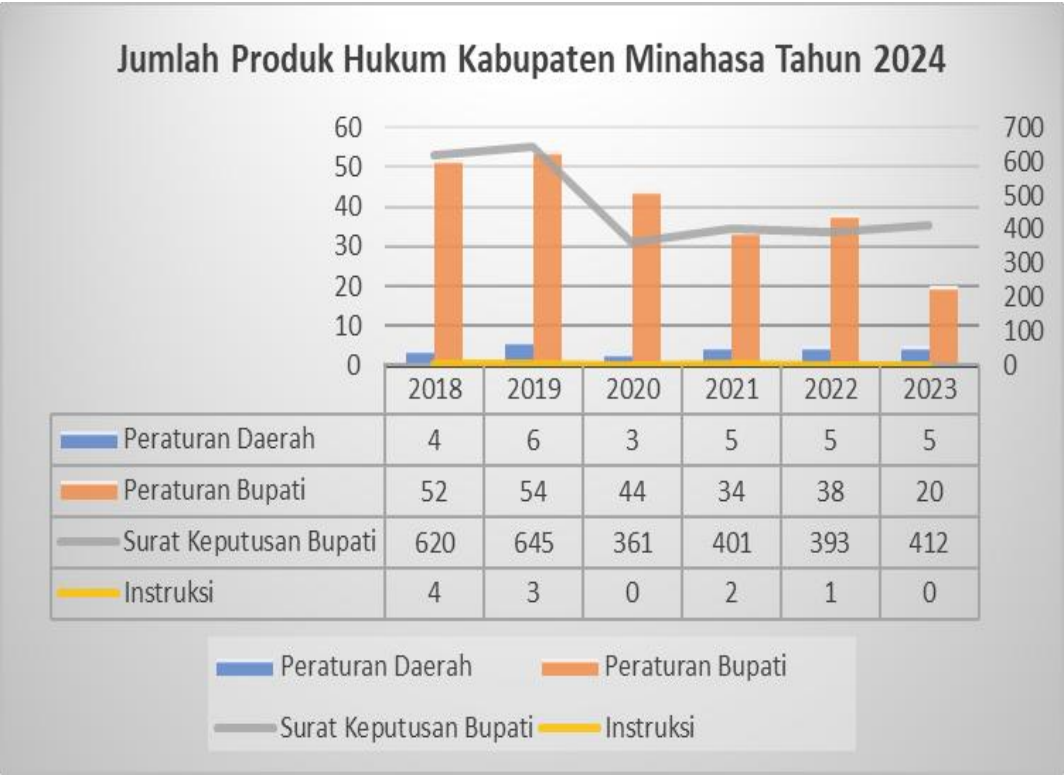
Tata kelola

- Tata kelola adalah tata cara mengelola sesuatu.
- Tata kelola dapat mengambil banyak bentuk, didorong oleh banyak motivasi yang berbeda dan dengan hasil yang berbeda.
- Tata kelola berfokus pada penetapan kebijakan.

- Dalam konteks pemerintahan, tata kelola dapat diartikan sebagai proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama

Aspek Ketatalaksanaan yaitu melakukan inventarisasi dan penajaman tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yakni hukum dan keamanan, Pada Tahun 2018 Jumlah Perda sebanyak 4 buah, Perbup 52 buah, SK Bupati 620 buah dan instruksi bupati 4 buah, Di tahun 2022 terdapat produk hukum daerah yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 5 buah peraturan daerah (Perda), 38 buah Peraturan Bupati, 393 surat keputusan Bupati, dan 1 buah instruksi Bupati.

Grafik 2.18 Jumlah Produk Hukum Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023



Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Minahasa, Tahun 2024

Indeks Layanan Publik Kabupaten Minahasa pernah tercatat sebesar 5,97 pada tahun 2011. Dari hasil Kabupaten Minahasa tahun 2022 masuk dalam kategori cukup terhadap Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah salah satu instrumen untuk menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Kabupaten Minahasa Tahun 2023, Indeks RB: CC, Indeks SAKIP: 58.21, Indeks SPBE: 2.19 dan Indeks Pelayanan Publik (PP) dengan nilai 3.6.

Kebijakan desentralisasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Maka keberadaan DOB memiliki implikasi strategis baik dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, maupun tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam RPJMD Kabupaten Minahasa ini merancang DOB yang akan terbentuk dan diharapkan mampu tumbuh menjadi daerah yang mandiri secara fiskal, berdaya saing, dan berkontribusi pada pembangunan regional maupun nasional.

2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional, yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Indeks demokrasi adalah penilaian kuantitatif dan komparatif mengenai kondisi demokrasi di berbagai negara berdasarkan definisi demokrasi yang berbeda-beda. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas di Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Pada tahun 2023 Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Utara menempati urutan ke 25 di Indonesia yakni dengan nilai IDI 76,27. Dibandingkan dengan nilai IDI tahun 2022, tahun 2023 mengalami penurunan. Di tahun 2022, Provinsi Sulawesi Utara mendapat nilai sebesar 78,22 dengan berada pada urutan ke 22 di Indonesia dan masuk pada kategori “sedang” (nilai indeks 60 – 80), dan untuk tahun 2023 ini masih tetap berada pada kategori “sedang”.

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Daya saing Kabupaten Minahasa berada pada level sedang ditunjukkan oleh skor DSDB yang berkisar antara 42,32–72,96. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat ukur daya saing suatu daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. IDSD dapat menggambarkan tingkat produktivitas daerah. Daya saing

adalah perbandingan kemampuan dan kinerja suatu entitas untuk menjual dan memasok barang dan jasa di pasar.

Indikator daya saing suatu negara meliputi: Daya saing teknologi, Daya saing kapasitas, Daya saing biaya, dan Daya saing permintaan. Indikator daya saing suatu daerah, antara lain: PDRB, Pendapatan per kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor tersier. Skor IDSD (Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 sebesar 3,22, sementara IDSD rata-rata kabupaten/kota Di Sulawesi Utara tahun 2023 adalah 3,06.

4) Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Capaian kinerja RPD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026, dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja pada tahun awal dengan tahun akhir periode, namun karena periode RPD berakhir pada tahun 2026 sehingga belum tersedia dapat untuk capaian tahun 2023-2024.

Indikator Kinerja

Tabel 2.66
Target Dan Capaian Kinerja Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026

No	Indikator	Capaian			Target Capaian tahun ke -	
		2022	2023	2024	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	76.18	76.96	77.74	77.16	77.53

2	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	74.68	74.96	75.22	71.83	72
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,17	14,18	14,19	14.41	14.58
4	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,82	10,11	10,23	9.99	10.08
5	Pengeluaran Per Kapita (ribu Rp)	12,690	13,026	13,681	12.829	12.970
6	Pertumbuhan Ekonomi	5,47	5.55	5.49	6.1-6.2	5.7-6.3
7	Angka Kemiskinan	7,05	6,87	6,53	6,0-5,7	5,4-4,75
8	Indeks Gini	0,308	0.327	0.34	0.306	0.304
9	Tingkat Pengangguran	7,00	7.65	7,22	6,0-5,6	5,6-5,0
10	Indeks Reformasi Birokrasi	C	B	B	C	B
11	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	B	A	B	BB	A
12	Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,73	63.39	66.16	62,89	63,35
14	Indeks Kualitas Air	61,73	47.27	57.06	48,17	48,29
15	Indeks Kualitas Udara	89,41	93.48	91.03	90,99	91,13
16	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	30,21	35.43	35.78	34,97	35,11
17	Indeks Infrastruktur	51,48	53,090	51.13	53,445	53,805
18	Indeks Risiko Bencana	193,85	193.85	-	188.5	186.5
19	Jumlah Kasus SARA	0	0	0	0	0
20	Persentase Penanganan Konflik (%)	100	100	100	100%	100%
21	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pilpres, Pemilu dan Pilkada (%)	0	98	90	98%	0

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat

untuk seluruh stakeholder. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) no. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun dasar hukum pemerintah Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66).;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya pasal 156 juga telah dinyatakan bahwa: (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Gambaran kondisi keuangan daerah di Kabupaten Minahasa, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2021 - 2026, dibagi menjadi 3 (tiga) pembahasan, yaitu: (i) Kinerja Masa Lalu, (ii) Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu, dan (iii) Kerangka Pendanaan. Penjelasan dari masing-masing bagian, akan dijelaskan secara terperinci pada bagian berikut.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang, maka diperlukan analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, akan diketahui informasi penting seperti rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah; belanja daerah; dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan target keuangan daerah. Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Sedangkan neraca daerah menjelaskan

tentang perkembangan necara daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio aktifitas.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah selama kurun waktu 2020- 2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan atau dana transfer dari pusat berupa Dana Alokasi Umum merupakan sumber utama Pendapatan Daerah, di mana selama selang 5 tahun, dari tahun 2020 – 2024 dana transfer pemerintah pusat memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah Kabupaten Minahasa. Kontribusi terus meningkat mulai tahun 2020 sebesar 89.90%, Tahun 2021 sebesar 89.21%, Tahun 2022 meningkat menjadi 91.22%, Tahun 2023 sebesar 90.10% dan pada APBD 2024 meningkat menjadi 91.21% dari pendapatan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara tetap berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah.
2. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan yang bersifat objektif, efektif dan efisien, dan tetap memperhatikan target pemenuhan indikator tiap program dan kegiatan yang direncanakan, termasuk mandatoris seperti belanja Pendidikan, Kesehatan, transfer ke desa (alokasi dana desa), dan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional untuk dapat dicapai bagi setiap sumber pendapatan dan juga berdasarkan data riil sehingga diketahui potensi sepenuhnya, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin menghambat terpenuhinya target pendapatan tersebut, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja sesuai peraturan yang berlaku.
4. Penganggaran pengeluaran harus disertai adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD / Perubahan APBD.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjabarkan RPJMD tahun berkenan yang ditambahkan dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis yang diperoleh dari mekanisme musrenbang & konsultasi publik.

6. RKPD merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sudah direncanakan sebelumnya dalam dokumen RKPD.
7. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara.

Secara umum, kinerja APBD Kabupaten Minahasa selang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel yang menggambarkan di mana dapat dihitung rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Selang tahun 2020 hingga 2024, Pertumbuhan APBD Kabupaten Minahasa menunjukkan trend meningkat walaupun pada tahun 2022 APBD menurun 0.199 persen dan mulai tahun 2023 meningkat 1.124 persen bahkan tahun 2024 terjadi peningkatan 5.41persen. secara umum sejak tahun 2020-2024 pertumbuhan pendapatan daerah dikabupaten Minahasa sebesar 2,15 persen. Sementara itu peningkatan PAD tahun 2021 sebesar negatif 1.34 atau terjadi penurunan, dan tahun 2022 ada peningkatan PAD sebesar 0.58 persen, dan tahun 2023 meningkat laig sebesar 12.80 persn dan tahun 2024 meningkat lagi sebesar 7.48 persen. Secara umum peningkatan PAD dari tahun 2000 sampai 2024 sebesar 5,08 persen. Perkembangan realisasi APBD tahun 2020-2024 seperti ditunjukkan pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67 Realisasi APBD 2020-2024

URAIAN	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	1,227,192,314,256	1,252,881,034,300	1,250,387,719,645	1,264,520,671,363	1,332,891,813,901
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95,615,427,961	94,336,838,566	94,887,781,440	107.035.294.000	115,045,834,372
Pendapatan Pajak Daerah	32,182,464,625	40,533,856,603	46,135,915,674	48.814.919.992	51,928,385,442

Pendapatan Retribusi Daerah	3,789,649,633	2,571,025,620	2,322,306,000	2.821.350.600	3,752,772,600
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,271,046,997	3,766,190,145	3,257,266,182	4.828.041.413	4,360,138,683
Lain-lain PAD yang Sah	56,372,266,706	47,465,766,198	43,172,293,583	50.570.981.994	55,004,537,647
PENDAPATAN TRANSFER	1,103,293,279,189	1,117,756,470,170	1,140,677,530,558	1,139,263,468,984	1,200,726,121,582
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28,283,607,106	40,787,725,564	14,822,407,647	18.221.908.379	17,119,857,947
BELANJA DAERAH	1,250,817,378,785	1,251,476,918,127	1,320,280,411,402	1.254.911.730.914	1,305,633,393,512
BELANJA OPERASI	1,070,464,635,595	853,191,712,266	862,810,157,869	869.704.881.715,00	939,260,550,124
Belanja Pegawai	501,208,600,775	502,625,429,650	493,986,479,604	475.266.182.897,00	508,416,010,823
Belanja Barang dan Jasa	293,817,058,170	308,611,823,555	333,833,341,428	329.844.403.632,00	324,957,333,037
Belanja Bunga	-	808,010,971	3,672,686,902	9.866.174.181	7,064,049,830
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	23,500,395,000	27,654,546,900	28,762,979,060	52.293.932.555	98,600,676,434
Belanja Bantuan Sosial	10,279,750,000	13,491,901,190	2,554,670,875	2.434.188.450	222,480,000
Belanja Bantuan Keuangan	241,658,831,650				
				-	
BELANJA MODAL	128,243,547,520	146,280,469,042	212.878.264.451	124.895.223.592	109,387,926,587
Belanja Modal Tanah	-	-	249.967.112,00	222.918.080	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32,825,073,279	43,863,960,684	28.470.545.430	28.058.650.183	17,908,905,174
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20,575,936,516	65,667,434,735	66.826.229.436	76.568.647.360	54,482,851,530
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71,772,536,188	34,725,134,565	114.849.733.024	18.212.204.494	34,255,747,783
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,070,001,537	2,023,939,058	2.481.789.449	1.832.803.475	2,669,022,100
Belanja Modal Aset Lainnya	-	404,700,000	-	-	71,400,000
BELANJA TIDAK TERDUGA	48,508,804,232	3,291,868,430	4,939,005,550	4.767.000.000	3,954,500,000
BELANJA TRANSFER	3,600,391,438	248,712,868,389	239.652.983532	255,544,625,607	253,030,416,800
SURPLUS / DEFISIT	(23,625,064,529)	1,404,116,173	(69,892,691,757)	9,608,940,449	27,258,420,389
PEMBIAYAAN DAERAH (PEMBIAYAAN NETTO)	65,894,360,941	78,563,486,130	204,330,120,966	110.340.261.074,90	47,879,526,259
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65,894,360,941	78,563,486,130	216,667,529,232	167.905.770.287,90	119,861,134,808
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	12,337,408,266	57.565.509.213,00	71,981,608,549
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	42,269,296,412	79,967,602,302	134,437,429,208	119.949.201.524,24	75,137,946,648

Sumber: BKAD Kabupaten Minahasa 2024

Penerimaan pajak daerah selang tahun 2020 hingga 2024 di Kabupaten Minahasaa menunjukkan angka yang terus naik. Tahun 2021 meningkat sebesar 26 persen, tahun 2022 meningkat sebesar 14 persen dan tahun 2023 meningkat lagi sebesar 6 dan tahun 2024 juga meningkat sebesar 6 persen. Secara umum peningkatan pajak daerah sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sebesar 15,34 persen.

2.2.2. Neraca Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar). Neraca Kabupaten Minahasa tahun 2023 - 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.68 Neraca Daerah Kabupaten Minahasa 2023-2024

Kode Rek.	Uraian	2023	2024
1	ASET	2.328.165.883.560,82	2.268.012.300.260,12
1.1	ASET LANCAR	212.760.255.910,18	160.529.522.667,25
1.1.01	Kas dan Setara Kas	120.799.085.417,44	77.259.746.278,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	16.398.783.674,60	20.168.332.154,64
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	585.689.917,00	585.689.917,00
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.360.138.683,00	0,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.843.544.770,00	14.459.643.924,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	28.120.189.117,00	33.274.981.176,00
1.1.09	Piutang Lainnya	1.849.450.828,46	1.849.450.828,46
1.1.10	Penyisihan Piutang	(8.350.523.107,32)	(10.363.011.643,39)
1.1.12	Persediaan	37.153.896.610,00	23.294.690.032,54
	JUMLAH ASET LANCAR	212.760.255.910,18	160.529.522.667,25

Kode Rek.	Uraian	2023	2024
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	35.255.776.455,38	31.512.418.276,59
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	35.255.776.455,38	31.512.418.276,59
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	35.255.776.455,38	31.512.418.276,59
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	35.255.776.455,38	31.512.418.276,59
1.3	ASET TETAP	1.843.063.355.810,63	1.848.232.785.631,12
1.3.01	Tanah	300.026.899.074,42	301.151.423.074,42
1.3.02	Peralatan dan Mesin	425.655.130.779,52	443.377.411.756,62
1.3.03	Gedung dan Bangunan	670.688.142.390,14	708.266.002.545,23
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.486.828.303.564,61	1.521.367.390.055,61
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	22.314.404.849,00	22.437.926.727,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.390.266.555,00	26.259.938.287,41
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.070.839.791.402,06)	(1.174.627.306.815,17)
	JUMLAH ASET TETAP	1.843.063.355.810,63	1.848.232.785.631,12
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	237.086.495.384,63	227.212.523.195,64
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	42.980.632,00	1.500.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	5.044.075.128,00	5.139.975.128,00
1.5.04	Aset Lain-lain	226.848.612.996,50	234.409.331.355,50
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.543.501.724,80)	(3.044.171.640,79)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(9.889.241.647,07)	(9.889.241.647,07)
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	17.583.570.000,00	595.130.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	237.086.495.384,63	227.212.523.195,64
1.6	PROPERTI INVESTASI	0,00	525.050.489,52
1.6.01	Properti Investasi Tanah	0,00	380.810.632,00
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	154.314.000,00
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	(10.074.142,48)
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	525.050.489,52
	JUMLAH ASET	2.328.165.883.560,82	2.268.012.300.260,12

Kode Rek.	Uraian	2023	2024
2	KEWAJIBAN	155.602.697.686,70	94.109.108.099,35
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	91.284.232.486,70	41.664.819.443,35
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	937.950.609,20	543.157.704,13
2.1.02	Utang Bunga	406.127.945,00	342.835.286,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	71.981.608.549,66	11.874.176.544,00
2.1.06	Utang Belanja	17.958.545.382,84	28.904.649.909,22
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	91.284.232.486,70	41.664.819.443,35
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	64.318.465.200,00	52.444.288.656,00
2.2.03	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	64.318.465.200,00	52.444.288.656,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	64.318.465.200,00	52.444.288.656,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	155.602.697.686,70	94.109.108.099,35
3	EKUITAS	2.172.563.185.874,12	2.173.903.192.160,77
3.1	EKUITAS	2.172.563.185.874,12	2.173.903.192.160,77
3.1.01	Ekuitas	2.172.563.185.874,12	2.173.903.192.160,77
	JUMLAH EKUITAS	2.172.563.185.874,12	2.173.903.192.160,77
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.328.165.883.560,82	2.268.012.300.260,12

Sumber: BKAD Kabupaten Minahasa 2024

Berdasarkan Tabel 2.68 diatas ternyata Total Aset Tahun 2023 dan tahun 2024 masing masing sebesar Rp 2,328,165,883,560.82 dan Rp 2,268,012,300,260.12 atau turun sebesar 2,58%. Jumlah kewajiban Tahun 2023 sebesar Rp 155.602.697.686,70 dan tahun 2024 sebsar Rp 94.109.108.099,35 atau turun sebesar 39.52 persen.

Tabel 2.69
Analisa Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa
Tahun 2023-2024

No.	Uraian	2023	2024

	Ratio Likuiditas		
1.	Ratio Lancar (Current Ratio)	2,33	3,85
2.	Rasio Quick (Quick Ratio)	1.92	3,29
	Ratio Solvabilitas		
3.	Ratio Hutang Terhadap Total Aset	0.07	0.01

Current ratio merupakan cara menghitung rasio likuiditas untuk mengetahui tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva likuid yang dimiliki pada saat ini atau aktiva lancar (current asset). Berdasarkan data pada table 3.50 diketahui bahwa Current Ratio selalu menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 sebesar 2,33 dan tahun 2024 sebsar 3,85, nilai Current Ratio sebesar 2,23 yang artinya bahwa setiap Rp1,- hutang Pemerintah Kabupaten Minahasa dapat jamin oleh Rp.2,33 dari harta lancar yang dimiliki atau kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek adalah 2,33 : 1. Nilai tahun 2024 sebsar 3,85 artinya bahwa setiap Rp1,- hutang Pemerintah Kabupaten Minahasa dapat jamin oleh Rp.3,85 dari harta lancar yang dimiliki atau kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek. Nilai current ratio tahun 2024 naik dibanding dengan tahun 2023.

Quick Ratio lebih likuit dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena Quick Ratio telah mengeluarkan persediaan dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Minahasa tahun 2023 setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan 1,92 di tahun 2023 dan 3,29 di tahun 2024 berbanding 1 untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio total hutang terhadap total aset sangat rendah dimana tahun 2023 sebesar 0.07 dan tahun 2024 sebesar 0.0.1. Ratio hutang ini menunjukkan kemampuan untuk membayar utang.

2.2.3. Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Minahasa

bergantung pada anggaran selama tiga tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histor pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah. Perkiraan Pendapatan Daerah disajikan secara indikator dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam atas data pendapatan daerah 2026-2030 serta sejumlah regulasi terkini dari Pemerintah Pusat terkait Kebijakan Transfer ke Daerah. Gambaran tentang proyeksi pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa 2026-2030 dapat dilihat pada tabel 2.70 berikut:

Tabel 2.70 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Kode Rekening	URAIAN	Realisasi	Proyeksi Tahun				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115,456,584,688	123,099,042,000	128,023,004,000	133,143,924,000	138,469,681,000	144,008,468,000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,200,726,121,582	1,248,755,166,000	1,273,730,269,000	1,299,204,875,000	1,325,188,972,000	1,351,692,752,000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17,119,857,947	17,804,652,000	18,160,745,000	18,523,960,000	18,894,439,000	19,272,328,000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,332,891,813,901	1,389,658,860,000	1,419,914,018,000	1,450,872,759,000	1,482,553,092,000	1,514,973,548,000
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	939,260,550,124	986,223,577,000	1,005,948,000,000	1,026,067,010,000	1,046,588,350,000	1,067,520,117,000
5.2	BELANJA MODAL	109,387,926,587	114,857,322,000	118,303,042,000	121,852,133,000	125,507,697,000	129,272,928,000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,954,500,000	4,033,590,000	4,073,925,000	4,114,665,000	4,155,811,000	4,197,369,000
5.4	BELANJA TRANSFER	253,030,416,800	258,091,025,000	260,671,935,000	263,278,654,000	265,911,441,000	268,570,555,000
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1,305,633,393,512	1,363,205,514,000	1,388,996,902,000	1,415,312,462,000	1,442,163,299,000	1,469,560,969,000
	SURPLUS / DEFISIT	27,258,420,389	26,453,346,000	30,917,116,000	35,560,297,000	40,389,793,000	45,412,579,000

Kode Rekening	URAIAN	Realisasi	Proyeksi Tahun				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	119,861,134,808	31,112,163,000	26,648,393,000	22,005,212,000	17,175,716,000	12,152,930,000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	71,981,608,549	57,565,509,000	57,565,509,000	57,565,509,000	57,565,509,000	57,565,509,000
	PEMBIAYAAN NETTO	47,879,526,259	-	-	-	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Minahasa 2025

Proyeksi pendapatan yang disajikan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Minahasa tahun 2026-2030 mengasumsikan bahwa ekonomi Indonesia pada waktu itu sudah makin membaik begitu juga dengan perekonomian di Kabupaten Minahasa. Selain itu pemerintah akan terus memacu potensi BLUD dan BUMD Kabupaten Minahasa untuk makin bisa menambah pendapatan daerah. Walau demikian secara teknis dalam penyajiannya telah mempertimbangkan aspek-aspek yang sangat berpengaruh sehingga diharapkan proyeksi ini memiliki tingkat bias yang rendah dan dapat dijadikan acuan yang baik dalam rancangan kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Minahasa Periode 2026– 2030. Proyeksi pendapatan diasumsikan bertumbuh sebesar 2 persen, PAD bertumbuh sebesar 4 persen dan pendapatan transfer tumbuh sebesar 2 persen.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban Pemerintah Daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit ataupun surplus yang terjadi dalam APBD. Dalam Proyeksi pembiayaan daerah tahun 2026-2030, Pemerintah Kabupaten Minahasa menetapkan anggaran surplus; untuk itu perlu mengupayakan optimalisasi penerimaan anggaran pendapatan dan efisiensi belanja. Pemerintah Kabupaten Minahasa berupaya untuk memaksimalkan pendapatan dengan menganggarkan penerimaan dari sumber penerimaan dari BLUD dan BUMD.

Pengalokasian belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Minahasa menyesuaikan dengan pendapatan daerah. Belanja daerah diproyeksikan terus meningkat dari sebesar Rp 1,363,205,514,000 menjadi Rp 1,469,560,969,000 pada tahun 2030. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Minahasa sebagai berikut.

- 1) Anggaran pendapatan daerah yang ditetapkan dalam periode 2026 - 2030 lebih daripada anggaran belanja daerah. Anggaran selama

periode berjalan cenderung mengalami surplus setiap tahunnya.

- 2) Belanja diprioritaskan pada belanja yang bersifat mengikat, yang dalam hal ini belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- 3) Selebihnya dari saldo anggaran yang ada, akan digunakan untuk membiayai belanja wajib. Menurut Permendagri No. 64 tahun 2020 yang dimaksud belanja wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok. Komponen belanja modal dikategorikan dalam belanja wajib ini.
- 4) Belanja modal dianggarkan semakin meningkat seturut dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 sedangkan belanja pegawai semakin menurun. Akselerasi pertumbuhan belanja modal ini dianggarkan lebih besar daripada belanja-belanja lain. Peningkatan belanja ini ditujukan untuk pemenuhan barang-barang publik (public goods), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari layanan publik yang disediakan.

Secara umum proyeksi ruang fiskal Kabupaten Minahasa Tahun 2026 – 2030 telah memperhitungkan kapasitas kemampuan keuangan riil dengan memasukan proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Proyeksi ruang fiskal daerah juga telah memperhitungkan belanja pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama berupa belanja pegawai yang diroyeksi tetap mengalami pertumbuhan dan pada tahun 2026 menurun karena proyeksi ASN akan banyak yang pensiun.

Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 akan dikembangkan melalui :

- 1) Pajak Daerah. Potensi pajak daerah akan dilakukan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengukur besarnya

pendapatan pajak yang sebenarnya dapat dipungut dengan potensi sebenarnya yang belum tercapai. Pajak daerah dapat dilakukan terhadap objek pajak PBB sudah lama tidak pernah berubah. Realitas antara Nilai Jual Objek Pajak dengan harga pasar sudah jauh kesenjangannya. Ini akan dikaji untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian akan dianalisis Pajak Kendaraan Bermotor antara jumlah kendaraan yang membayar pajak dengan realitas jumlah kendaraan yang sudah sangat berbeda. Demikian untuk objek pajak daerah lainnya akan diidentifikasi dan memanfaatkan pajak daerah potensi baru.

- 2) Peningkatan kinerja keuangan BLUD yakni Rumah Sakit Daerah. Untuk meningkatkan pendapatan BLUD ini akan makin meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kuantitas kamar serta infrastruktur pelayanan lainnya termasuk peningkatan pelayanan Puskesmas.
- 3) Akan membentuk BUMD yang akan meningkatkan Ekonomi Daerah khususnya untuk meningkatkan PAD. Pembentukan BUMD ini akan sangat signifikan terhadap peningkatan PAD melalui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- 4) Untuk mengoptimalkan PAD, akan dibuat Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk menerapkan strategi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak/retribusi.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Signifikansi Bab IV terletak pada refleksi yang terukur terhadap batasan dan masalah yang masih dihadapi Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan pembangunan daerah. Disebut “terukur” karena bab ini menganalisis apa yang telah dideskripsikan dalam Bab II dokumen ini yang menguak tentang kondisi umum Kabupaten Minahasa. *Output* dari bab ini tak lain adalah identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Minahasa. Subbab pertama mengasumsi bagian tentang permasalahan yang dihadapi dalam proses, *output* dan *outcome* pembangunan yang telah dilaksanakan. Subbab permasalahan mengidentifikasi pencapaian yang telah dirumuskan dalam Bab II. Rumusan permasalahan mengacu pada pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia dan yang telah menjadi target. Dari proses data-data yang terhampar dalam Bab II, pengidentifikasian permasalahan hanyalah mencakup kesenjangan yang bersifat dominan/signifikan. Permasalahan yang dirumuskan dalam bab ini tidak lagi memuat data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan dalam Bab II.

Subbab kedua berisi isu strategis daerah. Tugas utama bagian ini tak lain mengidentifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, regional, dan provinsi) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dirumuskan dari berbagai sumber, antara lain: RPJPN 2025-2045, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2025-2045, RPJPD Kabupaten Minahasa, Laporan KLHS RPJPD, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD dan evaluasi kinerja dokumen perencanaan pembangunan menengah sebelumnya. Merumuskan isu strategis daerah disimpulkan dari permasalahan, isu strategis sesuai konteks (global, nasional, regional, dan provinsi) yang relevan, dan potensi Kabupaten Minahasa.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa periode 2025-2029. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal sedangkan analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa 2025-2029.

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dimasa mendatang. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa.

2.3.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan yang disajikan menjadi gambaran kondisi pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja daerah dan permasalahan-permasalahan yang melingkupi urusan-urusan pemerintahan daerah yang relevan. Permasalahan pembangunan berikut merupakan permasalahan pokok yang meliputi beberapa urusan pemerintahan Kabupaten Minahasa yang relevan, dan menjadi pijakan dalam perumusan isu strategis. Permasalahan pembangunan dan isu strategis akan mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kriteria berikut:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diuraikan berikut ini.

2.3.1.1. Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terkait Urusan Wajib

1. Bidang Pendidikan

Permasalahan pokok bidang pendidikan yaitu: (1) belum optimalnya kualitas pencapaian pendidikan, (2) belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, (3) masih ada masyarakat yang rendah kepeduliannya untuk

menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (4) masih ada masyarakat yang belum memiliki akses yang baik terhadap pendidikan. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Rata-rata lama sekolah yang belum optimal;
- 2) Angka partisipasi sekolah belum optimal;
- 3) Angka Putus Sekolah masih tinggi;
- 4) Nilai IKM Literasi dan Numerasi belum baik.

2. Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk mencapai masyarakat berkemampuan hidup sehat serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus diimbangi dengan penyediaan sarana kesehatan sebagai tempat rujukan bila-mana masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Sarana kesehatan tersebut berupa penyediaan sarana Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu dan lain-lain.

Permasalahan pokok bidang kesehatan yaitu: (1) Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan belum merata dan (2) Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Jumlah dan sebaran tenaga medis belum optimal.
- 2) Makin banyak lansia yang mengalami gangguan pendengaran, katarak, kelainan refraksi, nyeri pada punggung dan leher serta osteoarthritis, penyakit paru obstruktif kronis, diabetes, demensia hingga depresi.
- 3) Masih terdapat anak stunting.
- 4) Masih ditemui Ibu belum peduli memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan
- 5) Belum memadainya pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir seperti IMD (Inisiasi Menyusui Dini), ASI Eksklusif serta perawatan tali pusat.
- 6) Masih ada ibu yang tidak mengetahui tanda-tanda bahaya masa hamil, persalinan serta masih ada ibu hamil dan bersalin yang belum mengetahui program pemerintah.
- 7) Belum maksimalnya pelayanan kesehatan bagi anak sekolah seperti skrining penyakit, pemberian tablet tambah darah belum dijalankan secara menyeluruh.

- 8) Daya tampung di RS membeludak karena BPJS menghimbau untuk menangani seluruh pasien dan terlayani walupun pun jumlah BOR tidak sesuai dengan tipe RS.
- 9) Faktor internal ibu masih dominan mempengaruhi kematian seperti penyakit bawaan, perdarahan serta faktor penanganan rujukan ke fasilitas lebih memadai.
- 10) Status keluarga (kegagalan) dalam menjaga harmonisasi hubungan keluarga (berpisah) sehingga anak tidak diasuh oleh orang tua.
- 11) Ada 1 (satu) Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) belum Akreditasi, yaitu Puskesmas Tompas Barat dan 2 (dua) Puskesmas sementara dalam penyelesaian pembangunan gedung, yaitu Puskesmas Tondano Barat dan Puskesmas Kawangkoan.
- 12) Kurang optimalnya kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait.
- 13) Faktor ekonomi keluarga dan faktor internal anak balita dan ibu yang menyebabkan secara teknis masalah gizi buruk yaitu makanan anak (pola makan), penyakit menular, ketahanan pangan keluarga, pola pengasuhan anak, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan dan termasuk kurangnya pengetahuan orang tua untuk mengenali tanda-tanda balita pragizi kurang, stunting, gizi buruk.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Minahasa sudah banyak dilakukan sehingga ketersediaanya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun dari segi pemenuhan kebutuhan peningkatannya masih jauh dari yang dibutuhkan yang tentunya dipengaruhi oleh luas dan jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa. Untuk itu pembangunan infrastruktur perlu terus didorong terutama untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan daya saing ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar.

Seiring dengan semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur khususnya infrastruktur transportasi dan pemanfaatan ruang maka penting bagi pemerintah untuk melayani dan mengantisipasi pengadaannya. Pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional jalan provinsi dan kabupaten maka penting untuk selalu ditingkatkan pengadaannya, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan region dan nasional dapat berjalan lancar.

Permasalahan pokok bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

(1) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur termasuk infrastruktur pelayanan dasar; (2) Pembangunan yang tidak sesuai Tata Ruang. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- 1) Masih banyak jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat serta layanannya belum optimal;
- 2) Akses layanan air bersih dan sanitasi layak dan aman serta berkelanjutan belum optimal
- 3) Kurangnya sumber air baku untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dan air minum
- 4) Belum berfungsinya IPLT yang perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai
- 5) Layanan sistem irigasi yang belum optimal terutama disebabkan oleh kondisi jaringan Irigasi yang kurang baik
- 6) Belum tertatanya sistem drainase terutama drainase pemukiman
- 7) Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan sehingga belum dapat melayani seluruh wilayah di Kabupaten Minahasa
- 8) Banyaknya bangunan yang belum ber-IMB
- 9) Adanya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukkan dan terjadinya alih fungsi lahan yang perlu diatur dengan regulasi/kebijakan tata ruang serta didukung dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang
- 10) Masih kurang memadainya sarana dan prasarana serta sumber daya sehingga Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan secara terbatas, belum sesuai Permen ATR/KBPN nomor 21 tahun 2021 tentang Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang
- 11) Terjadi pergantian SK Jalan Kabupaten dari SK yang lama yaitu Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 249 Tahun 2017 Tentang Penetapan Ruas - Ruas Jalan Kabupaten Minahasa ke SK yang baru yaitu Keputusan Bupati Minahasa Nomor 260 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ruas - Ruas Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Minahasa sehingga terjadi perubahan panjang Kondisi Kemantapan Jalan
- 12) Belum adanya perencanaan sistem drainase kabupaten. Terdapat beberapa sistem drainase yang tidak dapat menampung air jika hujan lebat. Pemeliharaan dan perawatan. sistem drainase terbangun belum maksimal. Untuk persampahan, TPA yang berfungsi hanya di TPA Kulo Tondano, TPA/TPST/TPS3R lainnya belum terbangun. Armada dan peralatan kurang dibanding jumlah pelayanan.

- 13) Masih kurang memadainya sarana penunjang operasional, seperti alat ukur (jarak, debit, kuat tekan, dll), alat survey, dan peralatan keteknikan lainnya.
- 14) Kurangnya Kesadaran Petani untuk memelihara Jaringan Irigasi yang sudah ada.
- 15) Adanya pendangkalan karena pengendapan lumpur dan sering terjadi penyumbatan karena penumpukan sampah yg dibuang masyarakat.
- 16) Wilayah Permukiman penduduk di perdesaan sulit dijangkau dengan satu sistem pengelolaan terpusat.
- 17) Pola permukiman penduduk di perdesaan yang menyebar serta diatas perbukitan dan kondisi perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah.
- 18) Kondisi topografi yg banyak perbukitan dan pada daerah tertentu sulit mendapatkan sumber air.
- 19) Masih kurang memadainya fasilitas prasarana IPLT yg ada saat ini, sehingga belum bisa gunakan.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan merupakan lahan yang digunakan sebagai upaya pemenuhan rumah layak huni. Sedangkan permukiman, merupakan lingkungan tempat hunian dan kegiatan yang mendukung kehidupan serta penghidupan masyarakat umum. Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakikatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (*livible*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Permasalahan pokok bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yaitu: Belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. serta (1) Masih banyak rumah tangga (RT) yang menempati rumah tidak layak huni, (2) drainase yang kurang bagus karena topografi, (3) legalitas bangunan. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- 1) Peningkatan kebutuhan rumah kurang diimbangi dengan penambahan jumlah rumah sehingga angka kebutuhan rumah (backlog) semakin bertambah tinggi.
- 2) Masih banyaknya masyarakat/rumah tangga yang mendiami Rumah Tidak Layak huni terutama di kawasan kumuh.
- 3) Masih tingginya luasan permukiman kumuh dan belum optimalnya upaya pencegahan dan pengentasan permukiman kumuh.

- 4) Masih terbatasnya Prasarana, Sarana Utilitas Umum di lingkungan Permukiman.
- 5) Masih adanya perumahan/permukiman yang terbangun di lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang.
- 6) Rendahnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap lahan/perumahan yang murah/terjangkau.
- 7) Belum optimalnya layanan drainase lingkungan permukiman.
- 8) Kondisi jalan lingkungan belum optimal.
- 9) Adanya rumah-rumah yang berada di lahan ilegal.
- 10) Kondisi topografis yang menyulitkan pengaturan saluran drainase.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pokok bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu: (1) Masih tingginya pelanggaran Perda; dan (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masih rendah. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- 1) Adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan.
- 2) Masih adanya Ormas dan LSM yang belum mendaftar karena belum paham akan aturan.
- 3) Tingkat pembinaan karakter, budaya tumbuhnya jiwa patriotisme belum maksimal.
- 4) Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) penanggulangan kebakaran rata-rata masih di atas 22 menit.
- 5) Belum optimalnya upaya mitigasi bencana.
- 6) Sistem pengawasan perijinan belum berjalan optimal.
- 7) Belum ada Perda ketertiban Umum.
- 8) Kurang beraninya masyarakat dalam menegakkan hukum (menegur).
- 9) Belum adanya kegiatan untuk meningkatkan nilai-nilai dan karakter kebangsaan.

6. Bidang Sosial

Majunya suatu daerah bukan berarti masalah sosial sudah tidak ada, justru semakin maju suatu daerah akan makin banyak dan akan semakin kompleks masalah sosial terjadi. Masalah sosial merujuk pada aspek-aspek kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Ini melibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup, nilai-nilai, norma, kebiasaan, tradisi,

institusi, dan interaksi sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Permasalahan pokok bidang sosial yaitu: (1) Rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; (2) Belum memadainya sarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; (3) Meningkatnya permasalahan sosial. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Masalah penanganan PMKS anak terlantar.
- 2) Aksesibilitas penandang disabilitas terhadap sarana dan prasarana masih rendah/sulit.
- 3) Makin banyaknya kasus tuna susila.
- 4) Persentase penduduk miskin di Minahasa masih tinggi.

7. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan pokok bidang tenaga kerja yaitu: (1) Penyerapan tenaga kerja Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, (2) tingkat pengangguran masih tinggi, (3) mutu atau kualitas tenaga kerja masih rendah. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Menurunnya daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN.
- 2) Adanya mismatch tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.
- 3) Rendahnya entrepreneurship masyarakat khususnya generasi muda.
- 4) Balai latihan kerja yang belum cukup.

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Permasalahan pokok bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: (1) Tingginya kasus KDRT dan human trafficking, (2) masih ada anak-anak terlantar. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Belum optimalnya pelaporan kekerasan.

- 2) Banyak penyalur tenaga kerja tidak resmi.
- 3) Belum optimalnya pelaporan terhadap anak terlantar dan anak yang mengalami perlakuan jahat.

9. Bidang Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketahanan pangan untuk meningkatkan persentase ketersediaan dan konsumsi pangan serta jumlah desa rawan pangan yang tertangani. Permasalahan pokok bidang pangan yaitu: (1) Belum memasyarakatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang; (2) Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan. Adapun beberapa masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Masih rendahnya pengembangan dan konsumsi sumber protein hewani.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sesuai potensi daerah.
- 3) Penggunaan pestisida, formalin, dan boraks pada kelompok pangan segar masih tinggi.
- 4) Masih ada desa rawan pangan atau rawan daya beli.

10. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan melaksanakan berhubungungan dengan penyiapan bahan yang berhubungan dengan tanah perumahan maupun kawasan permukiman yang didalamnya terkandung dengan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, pengkajian, pengendalian, pengawasan. Permasalahan pokok bidang pertanahan yaitu: (1) Belum optimalnya pengelolaan pertanahan. Adapun beberapa masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Terdapat kendala dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.
- 2) Belum semua kegiatan memiliki dokumen perencanaan pengadaan tanah yang memadai.

11. Bidang Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu

tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia menjadi salah satu persoalan penting untuk diatasi. Ketika lingkungan mengalami kerusakan, maka yang akan terjadi adalah, lingkungan akan kehilangan kualitasnya dan memengaruhi kualitas hidup manusia di masa yang akan datang. Penyebab dari permasalahan lingkungan yaitu karena faktor alam dan ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan.

Permasalahan pokok bidang lingkungan hidup yaitu: (1) Adanya degradasi lingkungan/penurunan kualitas lingkungan hidup karena belum optimalnya upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup; (2) Fenomena Perubahan Iklim; dan (3) Pengelolaan Sampah belum optimal. Belum termanfaatkannya limbah sebagai EBT secara maksimal. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- 1) Semakin menurunnya kualitas air di beberapa sungai/Danau di Kabupaten Minahasa, terutama di Danau Tondano.
- 2) Eutrofikasi, pendangkalan dan keberlanjutan Danau dan DAS Tondano.
- 3) Menurunnya kualitas udara terutama oleh kendaraan bermotor.
- 4) Semakin berkurangnya tutupan lahan akibat alih fungsi yang mempengaruhi ekosistem dan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan.
- 5) Belum optimalnya pengolahan limbah dan Pengendalian terhadap Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).
- 6) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup sehingga pencemaran dan perusakan lingkungan sering terjadi.
- 7) Sarana dan Prasarana persampahan yang masih terbatas.
- 8) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah (Metode 3R) dan memanfaatkan kembali termasuk menjadi EBT.
- 9) Pengolahan limbah belum optimal.
- 10) Instalasi pengolahan limbah di rumah tangga dan industri masih rendah.
- 11) Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan energi baru terbarukan.
- 12) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan limbah menjadi EBT.

12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Permasalahan pokok bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu: (1) Rendahnya kesadaran untuk tertib administrasi; dan (2) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat tertib administrasi
- 2) Masih sulitnya akses bagi masyarakat di wilayah terpencil
- 3) Meningkatkan penduduk berKTP per satuan penduduk
- 4) Belum maksimal data kependudukan yang terintegrasi
- 5) Meningkatkan pertumbuhan inovasi layanan kependudukan

13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Permasalahan pokok bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu: (1) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan; (2) Belum optimalnya kemandirian desa. Masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Kurangnya pengembangan teknologi tepat guna di pedesaan.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- 3) Kurangnya pengembangan usaha ekonomi perdesaan.
- 4) Rendahnya kualitas perencanaan pada tingkat desa.

14. Bidang Perhubungan

Permasalahan pokok bidang perhubungan yaitu: (1) Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja jaringan pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan

standar keselamatan dan keamanan transportasi. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Masih adanya pusat kegiatan yang belum terlayani jaringan transportasi sehingga mempengaruhi tingkat konektivitas.
- 2) Luas jalan yang cenderung lambat bertambah, tidak seimbang dengan penambahan jumlah kendaraan.
- 3) Kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas jalan.
- 4) Meningkatnya transportasi online yang menyebabkan layanan angkutan umum tidak diminati.
- 5) Rendahnya kualitas dan terbatasnya layanan angkutan umum termasuk tidak tersedianya terminal tipe C di Kabupaten Minahasa.
- 6) Tingkat kesadaran dari masyarakat pengguna jalan dalam berlalu lintas masih rendah.
- 7) Belum adanya layanan ASDP dan sarana prasarana pendukungnya terutama di Danau Tondano.
- 8) Kurangnya ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- 9) Indeks aksesibilitas rendah.
- 10) Makin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.
- 11) Kurangnya ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- 12) Makin berkurang pemanfaatan operasional terminal.

Permasalahan pokok lainnya adalah (1) Tingkat pelayanan jalan cukup rendah (LoS); (2) makin menurun penggunaan kendaraan umum; dan (3) Belum optimalnya sarpras lalu lintas dan kendaraan bermotor. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Luas jalan dari tahun lambat bertambah.
- 2) Indeks aksesibilitas rendah.
- 3) Makin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.
- 4) Rendahnya kualitas layanan angkutan umum.
- 5) Kurangnya ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- 6) Makin berkurang pemanfaatan operasional terminal.

15. Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Informasi dan Komunikasi melaksanakan tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi. Informasi dan Komunikasi Publik selanjutnya

berfungsi perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik.

Permasalahan pokok bidang komunikasi dan informatika yaitu: (1) Belum optimalnya peran TIK dalam mendukung pelayanan publik; (2) Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah :

- 1) Belum memadainya integrasi aplikasi penunjang pelayanan pemerintah
- 2) Terdapat beberapa kecamatan/desa yang belum terjangkau jaringan internet

16. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pokok bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yaitu: (1) Belum optimalnya peran koperasi sebagai lembaga ekonomi produktif; (2) Rendahnya kapasitas UKM sebagai penggerak ekonomi kemasyarakatan, (3) Belum maksimalnya digitalisasi usaha UMKM. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Dinas Koperasi dan UKM selaku Pembina Koperasi mengadakan kunjungan untuk memberikan bimbingan dan motivasi bagi Koperasi tetapi belum ada tindak lanjut dari Pengurus Koperasi.
- 2) PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha berbasis Resiko masih dalam tahapan sosialisasi kepada Koperasi.
- 3) Kurangnya permodalan dan kemampuan manage usaha dengan maksimal.
- 4) Kurangnya Akses Pasar.
- 5) Kurangnya inovasi dan kreativitas.
- 6) Kurangnya penguasaan teknologi, informasi dan jaringan bagi pelaku usaha sehingga tidak menghasilkan produk unggulan seperti kemasan produk yang masih kalah bersaing.
- 7) Kualitas SDM yang belum memadai.
- 8) Kurangnya inovasi dan kreatifitas.
- 9) Belum akuratnya data usaha mikro dan kecil yang ada.
- 10) Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk yang dihasilkan.
- 11) Masih minimnya produk-produk yang terstandarisasi.
- 12) Kecilnya cakupan pemasaran produk.

17. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan rencana kerja dan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penanaman modal. Permasalahan pokok bidang penanaman modal yaitu: (1) Belum optimalnya daya tarik investasi. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Regulasi yang sering berubah-ubah.
- 2) Belum optimalnya ketersediaan Sarana dan Prasarana serta SDM yang dibutuhkan bagi perluasan usaha penanaman modal.
- 3) Peluang investasi yang ada belum bisa dikonversi menjadi investasi sektor riil secara optimal.
- 4) Belum optimalnya proses Pelayanan Perizinan terkait penanaman modal.
- 5) Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha dalam Memberikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

18. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas pendidikan di bidang pembinaan pemuda serta kegiatan keolahragaan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Permasalahan pokok bidang kepemudaan dan olahraga yaitu: (1) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk berolahraga; dan (2) Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Belum meratanya fasilitas olah raga.
- 2) Belum optimalnya peran organisasi olah raga
- 3) Belum optimalnya peran organisasi dan wadah kepemudaan.

Permasalahan pokok bidang kebudayaan yaitu Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Masih Rendahnya partisipasi pemerintah dan masyarakat terhadap pelestarian dan pengelolaan kebudayaan.
- 2) Sanggar dan grup kesenian banyak yang tidak aktif lagi, pelaku seni tidak bisa mengembangkan kreatifitas, kesenian tradisional tidak lagi diminati

oleh masyarakat, khususnya generasi muda, generasi lebih tertarik dengan seni budaya luar.

- 3) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaku seni (sanggar dan grup kesenian) tidak berjalan dengan baik, tidak adanya pelatihan untuk pelaku seni tradisional.
- 4) Belum meratanya kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Penunjang Kawasan Objek Cagar Budaya.
- 5) Belum adanya Tim Ahli Cagar Budaya/Tim Penilai Cagar Budaya sehingga belum dapat melakukan Penetapan Cagar Budaya.

19. Bidang Kelautan dan Perikanan

Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas ini antara lain: merumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan. Permasalahan pokok bidang kelautan dan perikanan yaitu: (1) Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan belum optimal; dan (2) Nilai tambah produksi perikanan belum maksimal. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Belum terampilnya SDM di bidang perikanan.
- 2) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang budidaya, Perikanan Tangkap dan Pengolahan hasil perikanan.
- 3) Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk hasil perikanan.

20. Bidang Pariwisata

Kabupaten Minahasa kaya dengan potensi Pariwisata. Permasalahan pokok bidang pariwisata yaitu: (1) Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal; dan (2) Kualitas SDM di sektor pariwisata masih rendah. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Masih terbatasnya aksesibilitas ke daerah tujuan wisata dan akomodasi penunjang pariwisata.
- 2) Masih terbatasnya amenities yang tersedia di daerah tujuan wisata.
- 3) Kurangnya atraksi yang menunjang.
- 4) Terbatasnya promosi pariwisata.

- 5) Masih rendahnya kemampuan pelaku industri pariwisata dalam pengelolaan pariwisata serta kurangnya koordinasi dan integrasi antar pengelola/stakeholder pariwisata.
- 6) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal karena belum didukung fasilitas, kebijakan, pembinaan, teknologi dan pembiayaan yang memadai serta perlindungan hak cipta.
- 7) Masih terbatasnya SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan.
- 8) Masih minimnya aksesibilitas dan akomodasi penunjang pariwisata.
- 9) Belum optimalnya pemasaran pariwisata dan budaya secara terpadu.
- 10) Lama tinggal wisatawan masih cukup rendah.
- 11) Kurangnya koordinasi dan integrasi pengelola pariwisata oleh berbagai *stakeholder*.
- 12) Kurangnya SDM lokal dengan keahlian di bidang pariwisata.

2.3.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terkait Urusan Pilihan

Urusan pilihan, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Terdapat 8 bidang/sektor yang menjadi urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian

Permasalahan pokok bidang pertanian yaitu: (1) Produktivitas pertanian masih rendah; (2) Masih rendahnya kualitas produksi pertanian; dan (3) Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Berkurangnya tenaga kerja sektor pertanian
- 2) Harga komoditas pertanian khususnya cengkeh dan kelapa kurang baik
- 3) Penurunan guna lahan pertanian
- 4) Belum memadainya infrastruktur penunjang pertanian
- 5) Pemenuhan bibit/benih pertanian unggul belum merata
- 6) Rantai pemasaran produk hasil pertanian masih panjang

2. Bidang Perdagangan Dan Perindustrian

Permasalahan pokok bidang perdagangan yaitu: (1) Adanya penurunan jumlah nilai ekspor barang dan jasa, (2) Rendahnya daya saing produk industri kecil dan mikro, (3) Rendahnya kontribusi sector industri pengolahan terhadap PDRB, (4) Digitalisasi usaha. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) Minimnya pengetahuan tentang prosedur ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
- 2) Belum adanya perluasan negara tujuan pemasaran produk ekspor
- 3) Adanya keterbatasan dalam memenuhi permintaan pasar global
- 4) Akses pemasaran produk UKM masih terpaku pada pemasaran domestik
- 5) Kurangnya pasokan bahan baku
- 6) Belum menerapkan standarisasi produk, pendaftaran HKI, dan sistem mutu
- 7) Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja di bidang industri

3. Bidang Perencanaan

Perencanaan pembangunan pada suatu wilayah didokumentasikan melalui dokumen perencanaan yang disusun secara bertahap. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Setelah disusun dan disetujui oleh para pemangku kepentingan, buku rencana ini kemudian ditetapkan (dilegalisasi) menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Peraturan ini menjadi sarana publikasi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah sehingga masyarakat mengetahui dan dapat berpartisipasi mengimplementasikan rencana pembangunan daerah tersebut.

Permasalahan pokok bidang perencanaan yaitu: (1) perencanaan di SKPD kurang maksimal sehingga berpengaruh pada perencanaan di Tingkat Badan Perencanaan. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- 1) SDM perencanaan di SKPD lemah.
- 2) Kebutuhan data untuk perencanaan yang kurang baik.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Luasan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Minahasa memiliki potensi masih cukup besar seperti pertambangan, energi dan sebagainya. Pertambangan tanpa ijin ini biasanya memberi dampak negatif bagi lingkungan, masyarakat dan ekonomi suatu daerah. Untuk meminimalisasi dampak negatif ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa harus bertindak tegas

pada pihak-pihak yang menambang tambang tanpa izin. Dengan demikian, lingkungan Kabupaten Minahasa dapat terjaga, masyarakat tidak dirugikan serta keberadaan sektor energi dan sektor mineral akan dapat menambah devisa daerah.

Permasalahan pokok bidang energi dan sumber daya mineral merujuk pada mahalannya investasi di sektor energi.

5. Bidang Pendapatan Dan Keuangan Daerah

Permasalahan pokok bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan yaitu: (1) perencanaan di SKPD kurang maksimal sehingga berpengaruh pada perencanaan di Tingkat Badan Perencanaan. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah: (1) Kesadaran Wajib Pajak Yang Masih Rendah

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dapat juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah di Kabupaten Minahasa dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Penetapan isu strategis jangka panjang Kabupaten Minahasa diidentifikasi dari berbagai sumber di antaranya:

- 1) Permasalahan pembangunan Kabupaten Minahasa.
- 2) Isu strategis dari dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Minahasa.
- 3) Isu strategis kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Minahasa.
- 4) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri atas:
 - a. Kebijakan pembangunan di Kabupaten Minahasa yang antara lain bersumber dari RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Minahasa.
 - b. Isu strategis yang diangkat dari hasil fakta dan analisis terhadap gambaran umum dan kondisi daerah Kabupaten Minahasa untuk kondisi geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.
 - c. Hasil evaluasi kinerja pembangunan yang belum dipenuhi dalam RPJMD sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal sebelumnya serta mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, isu strategis yang mempengaruhi pembangunan jangka panjang Kabupaten Minahasa, sebagai berikut:

2.3.2.1. Megatren Global

RPJPN 2025-2045 mengidentifikasi sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Megatren yang dimaksud meliputi: a) perkembangan demografi global; b) geopolitik dan geoekonomi; c) disrupsi teknologi; d) peningkatan urbanisasi dunia; d) peningkatan peran perdagangan internasional; e) perubahan keuangan internasional; f) peningkatan penduduk kelas menengah (*middle class*); g) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam; h) perubahan iklim; i) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).

Pertama, **demografi global**. Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dunia dan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi dan air semakin meningkat seiring tingginya pertumbuhan penduduk.

Kedua, **geopolitik dan geoekonomi**. Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di Kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi

serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik Kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Dari perspektif geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju.

Ketiga, **disrupsi teknologi**. Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik.

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri. Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis artificial intelligence (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu.

Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Disrupsi teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi.

Keempat, **urbanisasi**. Proses urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (compact) melalui efisiensi layanan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

Kelima, **perdagangan internasional**. Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan

internasional berpusat di Kawasan Asia-Afrika. Kolaborasi produksi bersama internasional (*global production networks/GPN*) dan rantai pasok global (*global value chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang.

Keenam, **keuangan internasional**. Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupti dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan.

Ketujuh, **kelas menengah**. Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Kedelapan, **persaingan sumber daya alam**. Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Kesembilan, **perubahan iklim**. Isu perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global-*The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung

terus dan tidak dapat dihindari. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika Pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060.

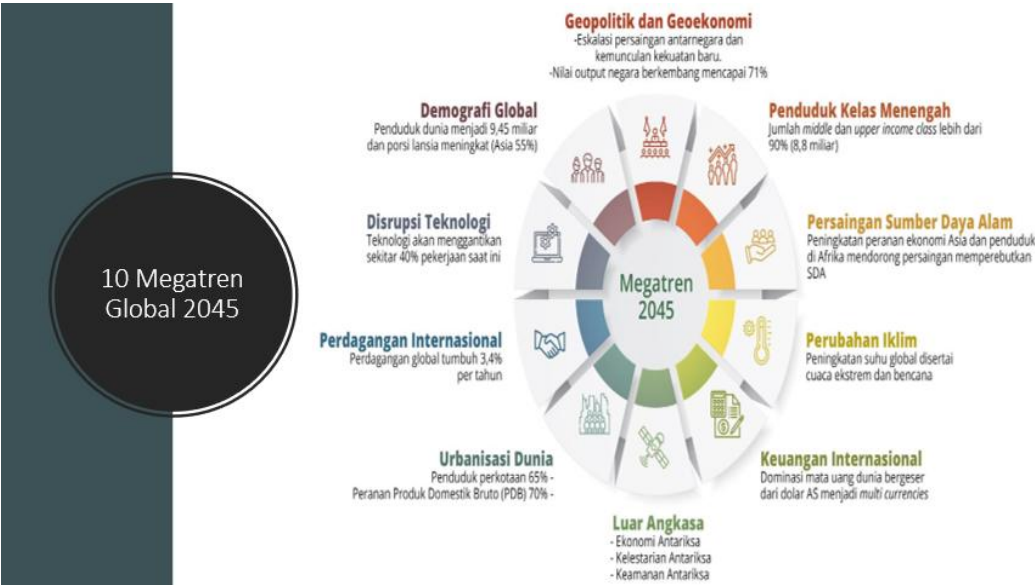
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan Innovative Designs termasuk skala lebih kecil atau *Small Modular Reactor* (SMR). Teknologi elektrolisis *Green Hydrogen* (GH2) dan *fuel cell* menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai feedstock industri petrokimia dan green ammonia untuk pupuk.

Kesepuluh, **pemanfaatan luar angkasa**. Tren eksplorasi Antariksa semakin meningkat selama satu decade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US\$469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat

mencapai US\$1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

Gambar 2.20
10 Megatren Global



Sumber: RPJPN 2025-2045

2.3.2.2. Isu strategis nasional

Tekad dan semangat Indonesia menjadi negara maju jelas tertuang dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Permasalahan dan Isu strategis nasional dapat disimak pada gambar berikut ini:

Gambar 2.21
Isu Strategis Nasional



Sumber: Bappenas, RPJPN 2024-2045

2.3.2.3. Isu strategis wilayah Sulawesi

Isu strategis wilayah Sulawesi menurut RPJMN 2025-2029 dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.22
Isu Wilayah Sulawesi

Isu Wilayah	
	• Nilai tambah dari produktivitas sektor primer masih rendah seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang menghadapi daya saing rendah serta sektor pertambangan dan industri pengolahan tumbuh pesat belum dapat memberikan dampak yang optimal terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja.
	• Pusat-pusat pertumbuhan seperti Wilayah Metropolitan (WM), Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Destinasi Pariwisata (DPP) belum dapat memberikan dampak optimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan terjadi kesenjangan ekonomi antara wilayah kepulauan dengan daratan. • Masih kurang memadainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kawasan perkotaan dan belum meratanya konektivitas serta sarana dan prasarana antardaerah sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah sementara kawasan perdesaan dan afirmasi belum dapat dioptimalkan sebagai penyangga ekonomi.
	• Tingkat kemiskinan yang masih tinggi disebabkan oleh struktur tenaga kerja yang didominasi oleh sektor pertanian. • Masih rendahnya akses fasilitas dan mutu pendidikan menyebabkan belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja karena ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan lapangan kerja. Terdapat TPT yang masih rendah dari rata-rata nasional (Sulawesi Barat). • Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di Sulawesi menjadi salah satu penyebab tingkat kesehatan masyarakat masih di bawah rata-rata nasional yang ditandai dengan rendahnya usia harapan hidup (UHH). Selain itu, kasus <i>schistosomiasis</i> masih ditemukan di Sulawesi Tengah sedangkan prevalensi <i>stunting</i> tinggi (Sulawesi Barat) juga masih lebih tinggi dari rata-rata nasional.
	• Tingginya laju deforestasi yang berdampak pada meningkatnya ancaman kepunahan dan kehilangan jasa ekosistem esensial terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. • Masih adanya risiko bencana yang cukup tinggi terutama terkait bencana hidrometeorologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir, longsor, dan likuefaksi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan).

Sumber: Bappenas, RPJPN 2024-2045

2.3.2.4. Isu strategis Provinsi Sulawesi Utara

Isu strategis Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam infografis berikut ini:

Gambar 2.23 Isu Provinsi Sulawesi Utara



2.3.2.5. Isu strategis Kabupaten Minahasa

Analisis isu strategis daerah mengasumsikan identifikasi permasalahan, keselarasan isu strategis dan lingkungan dinamis (isu, global, dan regional), serta identifikasi potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan yang rakyat yang berkeadilan. Alur nalar pembentukan isu strategis Kabupaten Minahasa dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.71 Isu Strategis Daerah sesuai dengan Identifikasi

POTENSI DAERAH	RUMPUN MASALAH	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH
Potensi sumber daya alam dan energi (pasir besi, emas, belerang, kaolin, tras, obsidian, batu, pasir vulkanis, lempung, batu lapis, pasir, basah, batu apung, energi listrik tenaga panas bumi, energi listrik tenaga mikro), Potensi perkebunan, Potensi keanekaragaman hayati, Potensi SDM, Potensi BLUD dan BUMD, Potensi kebudayaan, Potensi pariwisata	Sumber Daya Manusia	(1) belum optimalnya kualitas pencapaian pendidikan, (2) belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, (3) masih ada masyarakat yang rendah kepeduliannya untuk menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (4) masih ada masyarakat yang belum memiliki akses yang baik terhadap pendidikan	- Integrasi pelayanan untuk pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. - Penguatan pendidikan menggunakan teknologi informasi dan pemerataan kesempatan pendidikan terjangkau - Penguatan ketahanan sosial - Penguatan jaminan sosial terintegrasi
		(1) Kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan belum merata dan (2) Belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat	
		(1) Masih tingginya pelanggaran Perda; dan (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masih rendah	
		(1) Rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; (2) Belum memadainya sarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; (3) Meningkatnya permasalahan sosial; (4) jumlah penduduk miskin masih tinggi	
		(1) Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, (2) tingkat pengangguran masih tinggi, (3) mutu atau kualitas tenaga kerja masih rendah	
		(1) Tingginya kasus KDRT dan human trafficking, (2) masih ada anak-anak terlantar	
		(1) Rendahnya kesadaran untuk tertib administrasi; dan (2) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
		(1) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan; (2) Belum optimalnya kemandirian desa	

POTENSI DAERAH	RUMPUN MASALAH	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH
		(1) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk berolahraga; dan (2) Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	
		(1) Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal	
	Pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan dan peningkatan kapasitas ekonomi	(1) Belum memasyarakatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang; (2) Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan	5. Penguatan digitalisasi disegala bidang menopang data terintegrasi. 6. Penguatan IDM dan lembaga desa 7. Penguatan kualitas, produktivitas dan perlindungan tenaga kerja 8. Pengarusutamaan industri pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah, peningkatan SDM pariwisata, dan investasi berkelanjutan. 9. Penguatan pertanian, perikanan dan industri pengolahan. 10. Peningkatan jaringan irigasi dan drainase. 11. Peningkatan pengelolaan penataan ruang daerah. 12. Pemberdayaan koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif 13. Peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi yang layak serta aman. 14. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan permukiman
		(1) Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	
		(1) Adanya degradasi lingkungan/penurunan kualitas lingkungan hidup karena belum optimalnya upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup; (2) Fenomena Perubahan Iklim; dan (3) Pengelolaan Sampah belum optimal	
		(1) Belum optimalnya peran koperasi sebagai lembaga ekonomi produktif; (2) Rendahnya kapasitas UKM sebagai penggerak ekonomi kemasyarakatan, (3) Belum maksimalnya digitalisasi usaha UMKM	
		(1) Belum optimalnya daya tarik investasi	
		(1) Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan belum optimal; dan (2) Nilai tambah produksi perikanan belum maksimal	
		(1) Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal; dan (2) Kualitas SDM di sektor pariwisata masih rendah	
		(1) Produktivitas pertanian masih rendah; (2) Masih rendahnya kualitas produksi pertanian; dan (3) Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian	
		(1) Adanya penurunan jumlah nilai ekspor barang dan jasa, (2) Rendahnya daya saing produk industri kecil dan mikro, (3) Rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap	

POTENSI DAERAH	RUMPUN MASALAH	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH
		PDRB, (4) Digitalisasi usaha	sehat.
		(1) Mahalnya investasi di sektor energi	15. Penataan kawasan kumuh 16. Peningkatan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman
	Tata kelola dan Pelayanan Publik	(1) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur termasuk infrastruktur pelayanan dasar; (2) Pembangunan yang tidak sesuai Tata Ruang	17. Penguatan digitalisasi perpustakaan dan kearsipan
		(1) Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja jaringan pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi. Permasalahan pokok lain: (1) Tingkat pelayanan jalan cukup rendah (LoS); (2) makin menurun penggunaan kendaraan umum; dan (3) Belum optimalnya sarpras lalu lintas dan kendaraan bermotor	18. Penguatan data based kependudukan dan kepegawaian 19. Peningkatan kualitas pelayanan publik
		(1) Belum optimalnya peran TIK dalam mendukung pelayanan publik; (2) Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi	20. Penguatan lembaga penanganan masalah perempuan dan anak
		(1) perencanaan di SKPD kurang maksimal sehingga berpengaruh pada perencanaan di Tingkat Badan Perencanaan	21. Penguatan tata kelola pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah
			22. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal

POTENSI DAERAH	RUMPUN MASALAH	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH
		(1) perencanaan di SKPD kurang maksimal sehingga berpengaruh pada perencanaan di Tingkat Badan Perencanaan	23.Regulasi yang fleksibel, produktif dan adaptif 24.Penguatan penetapan perda inisiatif 25.Penguatan sistem informasi keluarga dan institusi masyarakat di desa 26.Penguatan produktivitas kepemudaan dan daya saing keolahragaan 27.Optimalisasi pengelolaan kebudayaan dan kearifan lokal. 28.Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat 29.Penguatan fasilitas kebencanaan dan peran non pemerintah mengantisipasi kebencanaan. 30.Peningkatan kualitas lingkungan hidup 31.Ketahanan energi air, pangan dan energi terbarukan

Selanjutnya pengkategorisasian permasalahan daerah dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.72 Permasalahan dan TPB

NO	PERMASALAHAN	TPB
1.	Belum meratanya penanganan kesehatan dan belum memadainya sarana/ prasarana fasilitas kesehatan.	TPB 3
2.	Aksesibilitas ke sekolah, penguatan proses belajar dan akreditasi sekolah.	TPB 4
3.	Tingginya resiko bencana dan rendahnya fasilitas peringatan dini	TPB 13
4.	Belum optimalnya pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial	TPB 1
5.	Penguatan penyelesaian Perda keamanan dan ketertiban	TPB 16
6.	Kurangnya informasi TIK	TPB 9
7.	Kurangnya sosialisasi dan edukasi bagi PUS dan kelompok remaja	TPB 3
8.	Kurangnya fungsi perpustakaan dan kerarsipan daerah	TPB 16
9.	Kurangnya kesadaran masyarakat memiliki dokumen kependudukan	TPB 10
10.	Kurangnya informasi kualitas pegawai	TPB 16
11.	Terbatasnya infrastruktur kawasan perdesaan	TPB 9
12.	Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi	TPB 4 dan TPB 10
13	Lemahnya edukasi permasalahan perempuan dan anak	TPB 4 dan TPB 5
14.	Kurangnya kondusititas wilayah	TPB 11
15.	Kapasitas regulasi inisiatif masih perlu ditingkatkan serta mengintensifkan sistem kontrol pelaksanaan Perda	TPB 16
16.	Belum optimalnya pemberdayaan pemuda dan standarisasi atlit, pelatih dan sarpras.	TPB 4
17.	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup baik kualitas air, udara dan tutupan lahan	TPB 6 dan TPB 13
18.	Pengelolaan sampah dan limbah B3 belum optimal	TPB 6 dan TPB 15
19.	Berkurangnya lahan beririgasi akibat alih fungsi lahan	TPB 15
20.	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak serta aman	TPB 6
21.	Belum optimalnya infrastruktur dasar pendukung aksesibilitas masyarakat di permukiman perkotaan dan perdesaan	TPB 9 dan TPB 11
22.	Tingkat ketaatan terhadap rencana tata ruang masih rendah	TPB 11
22	Inventarisasi seni budaya dan pemanfaatan teknologi untuk promosi belum optimal	TPB 9
23	Belum adanya museum daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya	TPB 16
24	Kualitas pengembangan dan promosi destinasi pariwisata belum maksimal	TPB 8
25	Terbatasnya perumahan dan permukiman dilengkapi prasarana sarana dan utilitas umum	TPB 9 dan TPB 11
26	Masih luasnya kawasan kumuh kewenangan kabupaten	TPB 11
27	Masih rendahnya layanan transportasi publik	TPB 9
28	Belum optimalnya membangun kemitraan dengan para pihak terkait, baik internal maupun eksternal	TPB 17

Isu strategis Kabupaten Minahasa perlu dilihat relevansinya dengan Pilar-

Pilar TPB untuk menjawab pengarusutamaan TPB dalam RPJMN 2025-2029. Pengkategorisasian isu strategis daerah ke dalam pilar-pilar TPB dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.73 Isu strategis Kabupaten Minahasa dan TPB

NO	ISU STRATEGIS	PILAR TPB
I.	Aspek Transformasi Sosial	Pilar Sosial
	- Integrasi pelayanan untuk pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. - Penguatan pendidikan menggunakan teknologi informasi dan pemerataan kesempatan pendidikan terjangkau. - Penguatan ketahanan sosial - Penguatan jaminan sosial terintegrasi	
II.	Aspek Transformasi Ekonomi	Pilar Ekonomi & Pilar Lingkungan Hidup
	- Penguatan digitalisasi disegala bidang menopang data terintegrasi. - Penguatan IDM dan lembaga desa - Penguatan kualitas, produktivitas dan perlindungan tenaga kerja - Iklim investasi kondusif dan pariwisata berkelanjutan. - Penguatan pertanian, perikanan dan industri pengolahan. - Peningkatan jaringan irigasi dan drainase. - Peningkatan pengelolaan penataan ruang daerah. - Pemberdayaan koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif - Peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi yang layak serta aman. - Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan permukiman sehat. - Penataan kawasan kumuh - Peningkatan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman	
III	Aspek Transformasi Tata Kelola	Pilar Hukum & Tata Kelola
	- Penguatan digitalisasi perpustakaan dan kearsipan - Penguatan data based kependudukan dan kepegawaian - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Penguatan lembaga penanganan masalah perempuan dan anak - Penguatan tata kelola pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah - Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal	
IV	Aspek Supremasi Hukum & Stabilitas Daerah	Pilar Hukum & Tata Kelola
	- Regulasi yang fleksibel, produktif dan adaptif - Penguatan penetapan perda inisiatif	
V	Aspek Ketahanan Sosial Budaya & Ekologi	Pilar Sosial & Pilar Lingkungan Hidup
	Penguatan sistem informasi keluarga dan institusi	

NO	ISU STRATEGIS	PILAR TPB
	masyarakat di desa • Penguatan produktivitas kepemudaan dan daya saing keolahragaan • Optimalisasi pengelolaan kebudayaan dan kearifan lokal. • Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat • Penguatan fasilitas kebencanaan dan peran non pemerintah mengantisipasi kebencanaan. • Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Ketahanan energi air, pangan dan energi terbarukan	

2.3. Standard Pelayanan Minimal

1. Urusan Pendidikan

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Capaian 2024	Realisasi Capaian 2024	%
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	37.458	37.458	100%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dana atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3.954	3.954	100%
3.	Pendidikan usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	7.103	7.103	100%

2. Urusan Kesehatan

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Capaian 2024	Realisas i Capaian 2024	%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	4.800	4.800	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	4.080	4.080	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	4.068	4.068	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	17.100	13.525	79%

5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Layanan Kesehatan	25.048	21.087	84.19 %
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	106.000	78.387	73.93 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	64.560	51.987	80.5%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	34.000	34.000	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	6.000	6.000	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	500	500	100%
11.	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Warga Negara terduga Tuberculosis yg mendapatkan layanan Kesehatan	6.000	5.814	97%
12.	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	2.500	2.500	100%

3. Urusan Pekerjaan Umum

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Capaian 2024	Realisasi Capaian 2024	%
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	345.973 jiwa	295.806 jiwa	85.50 %
2.	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang layanan pengolahan air limbah domestik	345.973 jiwa	245.294 jiwa	70.90 %

4. Urusan Perumahan Rakyat

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Capaian 2024	Realisasi Capaian 2024	%
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	2	2	100
2.	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	0	0	0
3.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Jumlah rumah layak huni dan terjangkau yang dibangun	0	0	0
4.	Lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Jumlah lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	0	0	0

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Capaian 2024	Realisasi Capaian 2024	%
1.	Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	-	-	-
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	4500	60	0.013 %
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	660	660	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	700	700	100%
5.	Pelayanan dan Penyelamatan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan Evakuasi korban kebakaran	527	527	100%

6. Urusan Sosial

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	Target Capaian 2024	Realisasi Capaian 2024	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	78	78	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	66	66	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	450	436	96.88 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	2	2	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	225	225	100%

2.4. Kerjasama Daerah

a. Kerjasama Antar Daerah

Kerja sama antar daerah terwadahi melalui koordinasi antar Kabupaten/Kota se-Indonesia, dilakukan secara periodik melalui wadah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), yang secara rutin mengagendakan pembahasan terhadap sejumlah masalah aktual, seperti Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, kesatuan persepsi dalam menyikapi sejumlah perubahan yang terjadi. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (APKASI), maupun dengan sejumlah asosiasi lainnya diikuti dengan menyesuaikan agenda prioritas di daerah dan urgensi topik pembahasan. Kerja sama penyerapan dan penyebarluasan info organisasi kemasyarakatan masing-masing daerah melalui kunjungan kerja/studi banding.

Pemerintah Kabupaten Minahasa melakukan kerja sama dengan daerah lain, diantaranya:

- 1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Perdagangan Komoditas Unggulan Antar Daerah;
- 2) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pendayagunaan Potensi Daerah;
- 3) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa tentang Kerja Sama Bidang Perikanan.

b. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Kabupaten Minahasa melaksanakan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Perjanjian Kerja sama antara Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, dan kerja sama dengan PT. Bank Negara Indonesia, serta terdapat Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia.

Adapun Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana tentang Pelaksanaan Penyaluran Fasilitas Kredit dan Perbantuan Pemotongan Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di dalam dan luar Sulawesi Utara, diantaranya:

- 1) Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS. dr. Soepraoen Malang mengenai Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - a) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan Universitas Mega Buana Palopo mengenai Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan Nasional mengenai Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Kerja sama lain dengan beberapa perguruan tinggi dalam rangka praktek kerja mahasiswa, baik dalam Pemerintahan, BUMN dan BUMS.
- 2) Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan Universitas Sam Ratulangi Manado dan IDEA Consultants, Inc Tokyo Jepang terkait pengelolaan dan pemanfaatan Danau Tondano.

- 3) Kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Tondano mengenai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Kabupaten Minahasa dalam rangka Universal Health Coverage, juga mengadakan perjanjian kerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan bagi Hukum Tua dan Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa dan tentang kepesertaan perlindungan bagi pekerja informal di Kabupaten Minahasa.
- 4) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan PT. Intek Media Data dalam Penyediaan Layanan Server Cloud Aplikasi Sistem Keuangan Desa Online (Siskeudes Online).
- 5) Kesepakatan Bersama (MOU) antara Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dengan Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.
- 6) Pemerintah Kabupaten Minahasa juga bekerja sama dengan media-media tentang pelaksanaan Peliputan, Pemberitaan dan Sosialisasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Minahasa, media-media tersebut adalah sebagai berikut : Identitas news.id, Tribun Manado, Carita Sulut, Sulut Go News, Main Goros, PT. Lantura Media Berkat, PT. Media Detikgo Indonesia, Nusantara Terkini, Gosulut, Media Cyber.co.id, Manadozone.com, Bunaken.co.id, Komentar.co, Post Kota News.co.id, PT. Sulut Media Membangun, Maklumat Sulut, Editorial Sulut News, Kanal Metro, Manimpang.com, Jejak Perintis, Fokus Line New, Cipta News, Tabea News, Media Satu Online, Pilarportal, Inter Mitra.com, Manguni News, Jejak Sulut.com, Forum Media, PT. Media Citra Anugerah, Multi Verum, Terberita.com, Karya media.com, Media Sulut.co, Aktual News, Manado Live, Berita Satu, Trend Media Cyber, Suara Manado News, Manado Express, Suara Utara, PT. Visi Utama Sulut Hebat, Lacak Pos, Radius News, Topik Sulut, PT. Sulut Cyber Media, Jelajah Terkini, PT. Media Redaksi Sulut, Fajar Manado.co.id, Post.co.id, Target Indo, Manadosiana.NET, Palakat ID, Cahaya Manado, New Posko Manado, Cybernews, Kanal Sindo, Trend Sulut, Media Realita, Manado News, Trending Manado, Global Berita, ChannelIndo.com,

2.5 Rencana Pembangunan Infrastruktur Oleh APBN, APBD Provinsi

Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejumlah pencapaian penting telah diraih, seperti peningkatan akses terhadap air bersih, dan layanan sanitasi, serta pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan transportasi yang memperlancar

arus barang dan orang antar wilayah. Namun demikian, pencapaian tersebut belum dirasakan merata dan juga belum berada pada capaian yang sangat baik, tantangannya terutama terkait dengan pemerataan akses infrastruktur, serta pemanfaatan, pemeliharaan, dan keberlanjutan infrastruktur yang sudah dibangun. Oleh karena itu, perlu adanya fokus yang berkelanjutan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan perluasan aksesibilitas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Untuk mendukung Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa yang mendukung Pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Provinsi sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur terutama infrastruktur dasar, karena infrastruktur merupakan salah satu komponen yang menentukan capaian pembangunan di suatu daerah. Agar tercipta sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah, maka sangat perlu kolaborasi terutama dalam pembiayaan terutama dalam mendukung kawasan pengembangan tersebut.

Dalam konteks Kewilayahan, Minahasa termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional Konservasi dan Wisata Danau Tondano. Selanjutnya dalam RPJMN Tahun 2025-2029 menyebutkan, Kabupaten Minahasa merupakan bagian dari Pengembangan Kawasan Pertumbuhan yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas Manado Likupang, Wilayah Metropolitan Manado serta Kawasan Afirmasi yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Mapalus Langowan Barat. Dalam mendukung arahan pembangunan Kawasan tersebut serta program prioritas nasional dan provinsi, maka sangat diharapkan dukungan pembiayaan APBN maupun APBD Provinsi.

Terkait pengembangan kawasan pertumbuhan DPP Manado Likupang dan Wilayah Metropolitan Manado yang juga merupakan bagian dari KSN Konservasi dan wisata Danau dan DAS Tondano serta mendukung salah satu program prioritas Kabupaten Minahasa (RDVS Danau Tondano), pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan adalah :

- Pembangunan dan rehabilitasi jalan yang mendukung akses pariwisata dan pengembangan konektivitas, terutama jalan lingkar Danau Tondano, Jalan Lingkar Manado Outer Ring Road, Jalan Akses Airmadidi (Minut)-Tondano, Akses Jalan Manado Tomohon, Tondano, Akses ke Pantai Timur Minahasa, serta jalan Nasional maupun Jalan provinsi yang ada di Kabupaten Minahasa.
- Pembangunan dan Perbaikan Drainase sekitar Danau Tondano dan Jalan Nasional/Provinsi yang ada di Kabupaten Minahasa

- Pembangunan infrastruktur pengendali banjir di sekitar Danau dan DAS Tondano seperti Tanggul Revitalisasi, Bendungan, Kolam Detensi/Retensi, Bangunan Pengendali sedimen
- Pembangunan dan pengembangan transportasi/angkutan Sungai/Danau serta angkutan perkotaan terintegrasi yang mendukung pengembangan wisata termasuk pengembangan Desa Wisata
- Revitalisasi Danau Tondano
- Pengembangan dan Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik wisata di Kabupaten Minahasa
- Pembangunan, Peningkatan SPAM
- Pembangunan dan optimalisasi infrastruktur sanitasi seperti IPLT, SPALD, prasarana persampahan (TPA, TPST, TPS3R)
- Penyediaan hunian yang layak dan didukung PSU Permukiman (RTLH, Rumah Susun, Rumah Swadaya)
- Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan lokasi Borgo-Ranowangko-Tambala, Pineleng Satu-Pineleng Dua, Toulour-Kiniar, Tateli Weru, Papakelan dan Tateli Tiga dengan total luasan 96,13 ha
- Penyediaan PSU Permukiman
- Pengembangan aksesibilitas pariwisata
- Penataan Kawasan Tondano dan Sekitar Danau Tondano terutama Penataan Kawasan wisata Pulau Likri-Tandengan, Tasuka, Sumaru Endo dan Paleloan, Pantai Timur dan Barat Minahasa, serta destinasi wisata lainnya yang tersebar di kabupaten Minahasa.

Selanjutnya untuk mengembangkan Kawasan Perdesaan Prioritas Mapalus di Kabupaten Minahasa, juga sangat dibutuhkan dukungan penyediaan infrastruktur melalui pembiayaan APBN dan APBD Provinsi seperti :

- Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan dan peningkatan jalan di wilayah KPP terutama jalan akses pertanian dan wisata yang ada di wilayah KPP, peningkatan konektivitas transportasi desa/perdesaan
- Penyediaan infrastruktur pendukung pertanian seperti irigasi
- Pengembangan Objek wisata Loud sendow yang juga berfungsi sebagai Embung sumber air irigasi dan objek wisata lainnya di Wilayah KPP Mapalus
- Dukungan Pengembangan Desa Wisata
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik

- Penyediaan sarana dan Prasarana Persampahan termasuk sistem pengolahannya
- Penataan dan Penyediaan PSU Permukiman
- Penyediaan Rumah Layak Huni
- Pemenuhan akses layanan Kesehatan, Pendidikan
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Selain hal hal tersebut di atas, diharapkan juga pendanaan APBN lewat program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) yaitu pembangunan infrastruktur air limbah domestik-setempat (SPALD-S), jalan penghubung antara desa (PISEW), peningkatan sistem pengelolaan air minum dan jaringan distribusi air desa (PAMSIMAS), pembangunan infrstruktur tempat pengelolaan sampah terpadu (TPS 3R). Kemudian, APBN juga diharapkan berperan dalam pengembangan infrastruktur digital, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan terutama pengembangan Sekolah Unggulan dan Sekolah Rakyat, serta pengembangan infrastruktur pendukung ekosistem Makan Bergisi Gratis dan Peningkatan Ketahanan Pangan. Hal-hal tersebut diharapkan dilakukan di seluruh Kabupaten Minahasa, disamping pelaksanaan program sesuai kewenangan pusat dan provinsi yang ada di Kabupaten Minahasa.

Dengan adanya kolaborasi pendanaan diharapkan tujuan pembangunan Nasional dan daerah dapat dicapai bersama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.6 BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di Kabupaten Minahasa belum memiliki BUMD, diharapkan akan terbangun, untuk berkontribusi langsung terhadap pelayanan publik, peningkatan PAD, Penciptaan Lapangan Kerja: Memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal. Dengan dibangunnya BUMD akan menciptakan kemandirian Ekonomi Daerah, dengan demikian akan mengurangi ketergantungan terhadap pusat.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

Alur pikir dokumen perencanaan nasional menegaskan sinkronisasi RPJMN 2025-2029 sebagai wujud operasionalisasi RPJPN 2025-2029. *Mutatis mutandis*, RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045 diturunkan dalam RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029. Secara lebih teknis, baik RPJMN 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029 menjadi operasionalisasi periode pertama RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045. Demikian, demi mempertahankan keterkaitan alur nalar perencanaan nasional dan daerah, bab ini akan bermula dari RPJMN 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPN 2025-2045. Kemudian, bab ini menjabarkan bagaimana RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 menjadi Tahap Pertama Implementasi RPJPD 2025-2045. Dari penjelasan tersebut, definisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Minahasa kemudian dirumuskan secara koheren dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029.

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029

3.1.1. RPJMN 2025-2029: Tahap I Implementasi RPJPN 2025-2045

Mengabdikan pada satu visi Indonesia Emas 2045 adalah semangat dasar yang diangkat dalam proses penyusunan RPJPN 2025-2045. Arah seluruh Pembangunan daerah secara simultan dan integratif menatap Indonesia Emas 2045. Alasannya, membangun Indonesia Emas 2045 menjadi cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), Arah (Tujuan), dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama Pembangunan. Hal ini secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Dengan kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada perayaan 100 (seratus) tahun sebagai Bangsa Merdeka di tahun 2045. Alur nalar di atas dapat dilihat dalam infografis di bawah ini:

Gambar 3.1 Alur Nalar Pembangunan Indonesia Emas 2045



Proses penyusunan RPJPN 2005-2045 berangkat dari landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, yang menjadi acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi abadi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

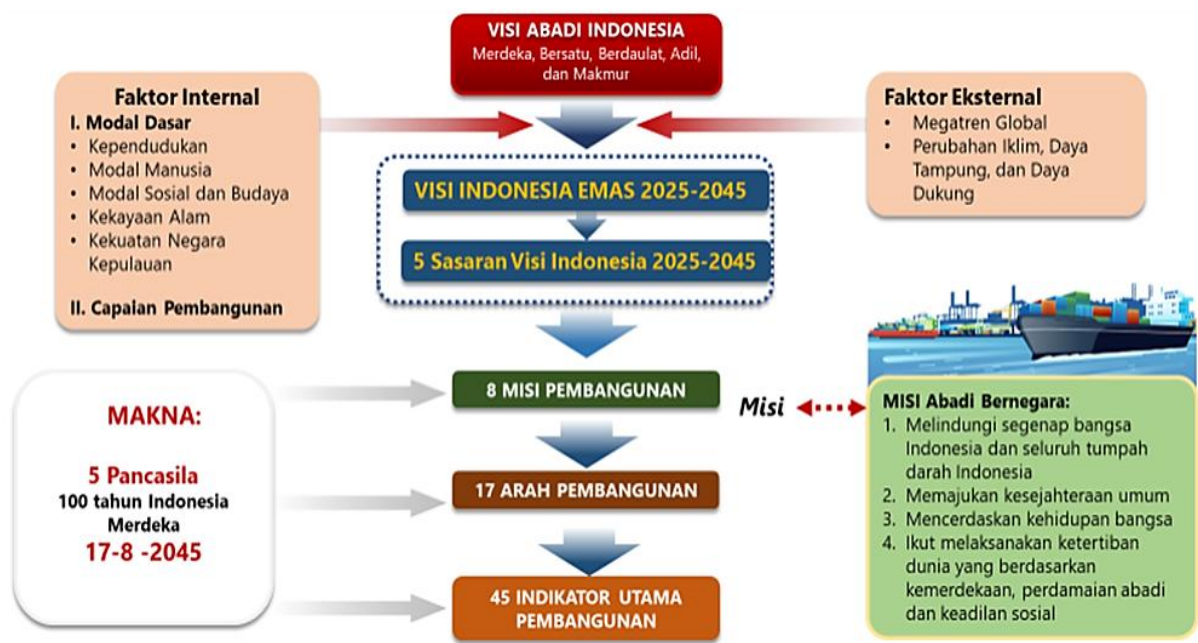
Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, operasionalisasi visi menitis dalam 8 misi (agenda) pembangunan. Fokus utama transformasi meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang merupakan 3 (tiga) misi (agenda) pembangunan yang tercakup dalam kelompok pertama, yaitu kelompok **transformasi Indonesia**. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan 2 (dua) misi (agenda) yang tercakup dalam kelompok kedua, yaitu **landasan transformasi**. Meningkatkan pembangunan wilayah, menyediakan sarana dan prasarana, serta

menjaga kesinambungan pembangunan merupakan 3 (tiga) misi (agenda) dalam kelompok ketiga, yaitu kelompok **kerangka implementasi transformasi**.

Delapan misi (agenda) pembangunan yang terdiri dari 3 (tiga) misi (agenda) transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi tersebut dijabarkan ke dalam 17 arah (tujuan) pembangunan sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Tujuh belas arah (tujuan) pembangunan tersebut diukur dengan 45 indikator utama keberhasilan pembangunan.

Arsitektur nalar RPJPN 2025-2045 dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.2 Alur nalar RPJPN 2025-2045



RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam *Asta Cita*.

Gambar 3.3 Visi dan Misi Presiden



Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Gambar 3.4 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Cepat Terbaik

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari *Asta Cita* yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Gambar 3.5 Asta Cita dan Prioritas Nasional



3.1.2. RPJMD 2025-2029: Tahap I Implementasi RPJPD 2025-2029

Visi RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045. Visi daerah disimpulkan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya **kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia** melalui **peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah** serta **kualitas lingkungan hidup** berdasarkan isu strategis yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Penyimpulan visi agar memperhatikan **Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**.

Visi Pembangunan Kabupaten Minahasa disusun dengan merujuk secara setia pada Visi Indonesia Emas 2045. Sisi imperatif dari pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 mewujudkan dalam keterkaitan erat antara Visi daerah dan Visi nasional. Sejalan dengan penyusunan Visi Indonesia Emas 2045, Visi Kabupaten Minahasa merujuk dan merefleksikan secara mendalam megatren global pencapaian Pembangunan Kabupaten Minahasa dan permasalahan yang masih membayangi prosesnya, serta daya tampung dan daya dukung. Tanpa meninggalkan karakteristik faktual daerah, Kabupaten Minahasa menjamin keselarasan variabel-variabel dasar pembentuk Visi Indonesia Emas 2045.

Arah Pembangunan jangka panjang Kabupaten Minahasa termaksud dalam **Visi Minahasa 2045 : Minahasa sebagai Daerah Pariwisata Integratif yang Maju dan Berkelanjutan.**

3.1.3. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029

RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 menjadi Tahap I Implementasi RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045. Dalam petahapan RPJPD 2025-2045, tahap pertama menjadi wujud dari kebijakan Periode I, yaitu Penguatan Landas Transformasi Daerah (2025-2029). Visi Kabupaten Minahasa 2025-2029 adalah **MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA**. Deskripsi singkat komponen-komponen dasar visi mencakup:

PARIWISATA : Minahasa kawasan pariwisata rumah bagi ragam pariwisata alam, termasuk pantai, danau, kawasan lindung dan wisata buatan, serta budaya.

MAJU : Mewujudkan Minahasa yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, berkompetisi di segala bidang dengan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.

SEJAHTERA : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang aman dan makmur serta mampu mengelola pariwisata untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Minahasa sebagai daerah Pariwisata, berangkat dari kondisi faktual Minahasa dengan ragam kekayaan alam yang sangat potensial bagi pengembangan pariwisata. Kondisi geografis Minahasa yang suportif terhadap visi ini mencakup mulai dari potensi pegunungan (*highlands*) sampai potensi bahari. Term “daerah” merujuk pada makna Minahasa sebagai daerah dengan ciri khas potensi pariwisata yang bervariasi. Di antaranya, Minahasa dianugerahi dengan kekayaan sosial kemasyarakatan dan budaya yang hangat dan khas.

Potensi alam, budaya, sosial dan masyarakat ini menjadi rahim bagi lahirnya diversifikasi pariwisata yang geliat potensinya demikian kentara.

Minahasa sebagai “Daerah pariwisata” menjadi tuan rumah bagi ragam wujud pariwisata yang membentang dari wisata alam (laut, pantai, gunung/berapi, danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam); wisata budaya (upacara budaya, tari-tari tradisional, musik tradisional, pakaian adat, perkawinan adat, upacara adat, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal), dan wisata buatan (sarana dan fasilitas olah raga, taman rekreasi).

Pendekatan di atas mengungkapkan pendekatan berdasar perspektif yang melandasi intervensi, pemberdayaan dan pengembangan seluruh keragaman potensi pariwisata Kabupaten Minahasa. Artinya, Minahasa menjadi satu daerah yang mengakomodasi dan menjadi tuan rumah bagi beragam ragam potensi baik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Pemberdayaan dan pengembangan semua potensi pariwisata ini dilaksanakan melalui intervensi kreatif, inovatif dan berkelanjutan dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan lestarnya alam.

Kekayaan ini secara strategis sejalan dengan proyek strategis nasional, yaitu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan penetapan Pariwisata Likupang. Dalam hubungan dengan proyek strategis nasional tersebut, Minahasa mengambil peran sebagai pendukung DPSP dan KEK Pariwisata dengan menawarkan ragam diversifikasi destinasi pariwisata. Demikian, Minahasa dengan segala kekayaannya menghadirkan potensi suportif dan pelengkap yang efektif. Pengembangan potensi ini tentunya sejalan dan didukung oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Rencana Tata Ruang Wilayah Minahasa, serta Rencana Induk Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Term “Maju” dalam definisi visi Kabupaten Minahasa merujuk langsung pada Visi Indonesia Emas 2045. Maju menggambarkan Visi Kabupaten Minahasa untuk menjadi daerah yang perekonomiannya mencapai posisi *upper middle income society*. Menurut ukuran World Bank Tahun Fiskal 2024, *upper middle income society* mencakup GNI per kapita antara \$4,466 dan \$13,845. Dalam perhitungan RPJPN 2025-2045 dengan memperhitungkan inflasi, *upper middle income society* pada tahun 2045 diperkirakan berada di bawah \$23,000 (GNI per kapita *high income society*, sebagai sasaran utama RPJPN 2025-2045, berada dalam rentang \$23,000-\$30,300). Kemajuan yang menjadi visi daerah ini

berlandaskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Daerah “Maju” mendefinisikan Kabupaten Minahasa sebagai daerah yang mengaktualisasikan potensi, daerah yang modern, sejahtera, dan inovatif sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan regional, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi masyarakat Kabupaten Minahasa. Peran Kabupaten Minahasa semakin penting dan senantiasa menjadi pendukung yang efektif bagi capaian-capaian nasional.

Juga memberikan gambaran bahwa Kabupaten Minahasa berkemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, berdaya saing yang tinggi di antara daerah-daerah di Indonesia, berketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan nasional, regional dan global, serta memiliki jaminan keadilan sosial yang mumpuni dan mencakup semua masyarakat. Di sisi lain Kabupaten Minahasa harus memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Minahasa, mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Mobilisasi masyarakat menjadi sangat cair karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman dan terjangkau. Infrastruktur modern ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan masyarakat Minahasa terhubung dengan daerah lain dan dunia. Kabupaten Minahasa yang bersumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Kabupaten Minahasa memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan nasional dan global yang kompleks di masa depan.

Kabupaten Minahasa menggagas term “sejahtera” dalam kaitan erat dan menjamin kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai konsekuensi yuridis tapi juga sebagai tanggung jawab moral sebagai warga dunia. Kualitas hidup masyarakat Minahasa ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan

nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut berserta isinya terjaga dengan baik.

Visi secara hakiki membutuhkan operasionalisasi demi perwujudannya. Misi dirumuskan sebagai upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2029. Perumusan misi harus memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Perumusan Misi Kabupaten Minahasa secara linier memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045, yaitu: 1) Transformasi Sosial; 2) Transformasi Ekonomi; 3) Transformasi Tata Kelola; 4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi, 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan 8) Kestinambungan Pembangunan. Dengan karakteristiknya yang berbeda, Kabupaten Minahasa mengedepankan terwujudnya kesejahteraan masyarakat berkeadilan dengan mengutamakan 7 (tujuh) fokus pembangunan sesuai dengan kewenangannya, yaitu: 1) Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan; 2) Peningkatan infrastruktur berkelanjutan; 3) Peningkatan produktivitas daerah; 4) Penguatan daya saing SDM berkelanjutan; 5) Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju; 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan 7) Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan mempertimbangkan agenda Pembangunan nasional dan tujuh fokus Pembangunan nasional, Kabupaten Minahasa menetapkan misi Pembangunan daerah dengan konstruksi yang selaras dengan agenda Pembangunan nasional, yaitu transformasi daerah (misi 1, 2, 3,); landasan transformasi daerah (misi 4 dan 5); dan implementasi transformasi daerah (misi 6, 7, dan 8).

Keselarasan Visi Nasional, Visi Provinsi Sulawesi Utara, dan Visi Kabupaten Minahasa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Minahasa

NASIONAL		PROVINSI		KABUPATEN/KOTA	
VISI	PENJELASAN VISI	VISI	PENJELASAN VISI	VISI	PENJELASAN VISI
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas	Bersama Prabowo dan Gibran mengajak Putra Putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama	Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Maju dalam konteks ini menggambarkan tekad untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pertumbuhan ekonomi yang merata,	Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera	Pariwisata : Minahasa Kawasan pariwisata rumah bagi ragam pariwisata alam Pantai, danau, Kawasan lindung dan wisata buatan serta budaya

			pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien		
	Indonesia Maju membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo		<u>Sejahtera</u> mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, kesejahteraan berarti terwujudnya ketahanan pangan, tercapainya tingkat pendapatan yang layak bagi seluruh penduduk, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas		Maju : Mewujudkan Minahasa yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, berkompetisi disegala bidang dengan SDM yang berdaya saing tinggi
	Menuju : Dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Emas : Negara yang setara dengan negara maju ditahun 2025 atau lebih cepat		<u>Berkelanjutan</u> , mengandung makna mendalam tentang keseimbangan antara kelestarian lingkungan, keberlanjutan investasi dan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial yang menyangkut pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, dan pelestarian budaya. Ini menegaskan bahwa pembangunan di Sulawesi Utara harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang		Sejahtera : Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang aman dan Makmur serta mampu mengelola pariwisata untuk generasi sekarang dan yang akan datang

Keselarasan dokumen perencanaan di atas semakin diperteguh dengan partisipasi strategis Sasaran Visi Kabupaten Minahasa terhadap Sasaran Visi Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara. Taksonomi dukungan dan keterkaitan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Keselarasan Sasaran Visi

Nomor	Sasaran Utama/ Sasaran Visi		
	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi SULUT 2025-2029	RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029
1	Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju	Peningkatan Pendapatan Perkapita	Peningkatan Pendapatan Perkapita
	GNI per Kapita = 7,400-8,240 USD	PDRB per kapita = 138,04-156,15 Juta Rupiah	PDRB per kapita = 138,04-156,15 Juta Rupiah
	Kontribusi PDB Maritim 9,1%	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) = 66,71	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) = 66,71
	Kontribusi PDB Manufaktur 21,9%	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 11,49-11,84%	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 11,49-11,84%
2	Kemiskinan menurun & Ketimpangan berkurang	Kemiskinan menurun & Ketimpangan berkurang	Kemiskinan menurun & Ketimpangan berkurang
	4,5-5,0% (tingkat kemiskinan ekstrem 0%* di tahun kedua)	Tingkat kemiskinan = 4,24-3,68	Tingkat kemiskinan = 4,24-3,68
	Rasio gini 0,372-0,275	Rasio gini = 0,335-0,348	Rasio gini = 0,335-0,348
	Kontribusi PDRB KTI 23,3%	Kontribusi PDRB Provinsi = 0,78%	Kontribusi PDRB Provinsi = 0,78%
3		Pertumbuhan ekonomi = 5.57-6,45%	Pertumbuhan ekonomi = 5.57-6,45%
	Kepemimpinan & pengaruh di dunia Internasional meningkat	Kepemimpinan Daerah dan Pengaruhnya di Asia Pasifik	Kepemimpinan Daerah dan Pengaruhnya di Asia Pasifik
	Global Power Indeks berada di ranking 29	Indeks Inovasi Daerah = 48	Indeks Inovasi Daerah = 48
		Indeks Daya Saing Daerah = 3,86	Indeks Daya Saing Daerah = 3,86
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan daya saing sumber daya manusia
	Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59	Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,55	Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,55
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>
	Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 62,37%	Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 65,05%	Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 65,05%
	Indeks Kualitas Lingkungan hidup menjadi 77,20	Indeks Kualitas Lingkungan hidup menjadi 80,29	Indeks Kualitas Lingkungan hidup menjadi 80,29

Deskripsi Misi Pembangunan Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

- 1. **Meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
- 2. **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh.**
- 3. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima.**

Sebagai usaha untuk mewujudkan Asta Cita Presiden dan Misi Gubernur, ketiga misi daerah ini mempunyai keterkaitan erat dan tak terbantahkan dengan Asta Cita dan Misi Provinsi. Keselarasan tersebut dapat tunjukan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Keselarasan Asta Cita Presiden, Misi Provinsi dan Misi Kabupaten Minahasa

	Misi Nasional (Asta Cita)	Misi Provinsi Sulawesi Utara	Misi Kabupaten Minahasa
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Mencegah dan Memberantas KKN serta Narkoba	Meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	
3	Meningkatnya Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Membangun Perekonomian Daerah	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	Memperkuat Daya Saing Daerah dan Internasional	
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan	
6	Membangun Dari Desa dan dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	Memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	
8	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam , dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	

Dalam tabel di atas, ragam pewarnaan menunjukkan bahwa setiap poin Asta Cita didukung oleh poin-poin Misi Provinsi Sulawesi Utara dan Misi Kabupaten Minahasa. Hal ini menunjukkan bahwa baik Provinsi Sulawesi Utara maupun Kabupaten Minahasa, tidak hanya menjadi *free riders* tapi secara proaktif mendukung dan memastikan pencapaian Asta Cita Presiden. Program Unggulan Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan visi Adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Pemberantasan KKN serta Narkoba;
2. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun dan Introduksi Makan Siang Bergizi Gratis;
3. Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Penguatan Pendudukan Vokasi, Sain, Teknologi, dan Digitalisasi;
4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Semua dan Jaring Pengaman Sosial;
5. Penguatan Jaringan Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Drainase;
6. Peningkatan Agro-Produksi, Agro-Industri, dan Agro-Marketing;
7. Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya;
8. Optimalisasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan UMKM;
9. Pengembangan Sentra Pelayanan Publik Prima;

10. Pengembangan Pariwisata Cerdas (Smart Tourism) Berbasis Pesona Alam, Aset Budaya dan Kearifan Lokal, Kesehatan dan Kebugaran, dan MICE;
11. Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pengembangan Sistem Meritokrasi, Penataan OPD, dan Ketatalaksanaan termasuk Pengelolaan Keuangan;
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman, dan Interaksi Sosial Kemasyarakatan;
13. Pengembangan Rencana Aksi Perubahan Iklim dan Sumberdaya Energi Terbarukan;
14. Pembinaan Olahraga, Pemuda, dan Generasi Milenial;
15. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peningkatan Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pengembangan Logistic Hub sebagai supporting unit untuk IKN;
17. Pembinaan Pertambangan Rakyat.

Visi dan Misi Kabupaten Minahasa tak lepas dari refleksi mendalam akan isu strategis Kabupaten Minahasa. Keselarasan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Keselarasan Visi Misi dan Isu Strategis

ISU STRATEGIS	VISI	MISI
1. Integrasi pelayanan untuk pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. 2. Penguatan pendidikan menggunakan teknologi informasi dan pemerataan kesempatan pendidikan terjangkau. 3. Penguatan ketahanan sosial 4. Penguatan jaminan sosial terintegrasi	MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA	Meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
1. Penguatan digitalisasi disegala bidang menopang data terintegrasi. 2. Penguatan IDM dan lembaga desa 3. Penguatan kualitas, produktivitas dan perlindungan tenaga kerja 4. Iklim investasi kondusif dan pariwisata berkelanjutan. 5. Penguatan pertanian, perikanan dan industri pengolahan. 6. Peningkatan jaringan irigasi dan drainase. 7. Peningkatan pengelolaan penataan ruang daerah. 8. Pemberdayaan koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif 9. Peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi yang layak serta aman. 10. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan permukiman sehat. 11. Penataan kawasan kumuh 12. Peningkatan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh
13. Regulasi yang fleksibel, produktif dan adaptif 14. Penguatan penetapan perda inisiatif 15. Penguatan digitalisasi perpustakaan dan kearsipan 16. Penguatan data based kependudukan dan kepegawaian 17. Peningkatan kualitas pelayanan publik 18. Penguatan lembaga penanganan masalah perempuan dan anak 19. Penguatan tata kelola pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah 20. Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal		Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima
21. Penguatan sistem informasi keluarga dan institusi masyarakat di desa 22. Penguatan produktivitas kepemudaan dan daya saing keolahragaan 23. Optimalisasi pengelolaan kebudayaan dan kearifan lokal. 24. Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat 25. Penguatan fasilitas kebencanaan dan peran non pemerintah mengantisipasi kebencanaan. 26. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 27. Ketahanan energi air, pangan dan energi terbarukan		

3.1.4. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Merujuk setia pada Visi dan Misi 2025-2029, Kabupaten Minahasa telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Visi, Misi Tujuan dan Sasaran

VISI/MISI		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju Dan Sejahtera	Meningkatk an kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing	Meningkat- kan Kualitas SDM		Indeks Pembangun an Manusia	79.50 - 80,00	80,00 - 80,50	80,50 - 81.00	81.25 - 81,60	82,00 - 82,30	82.60 - 83.00	
			Meningkatn ya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah;	10,5	10,75	10,85	11,00	11,25	11,5	
				Harapan Lama Sekolah	14,20	14,25	14,27	14,30	14,33	14,35	
			Meningkatn ya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,35	75,50	75,60	75,70	75,75	75,80	
			Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	Pendapatan per Kapita	71.78	76.35	80.79	85.97	91.74	98.08	
				Indeks Pembangun an Gender	97,00	97,15	97,30	97,45	97,60	97,75	
				Angka Kemiskinan	6,40 – 6,35	6,36-6,01	6,02 - 5,39	5,40 - 4,77	4,78 - 4,15	4,78 - 4,15	
				Tingkat Penganggur an	6,90-6,50	6.40 – 6.00	5.90 – 5.50	5.40 – 5.00	4.90 – 4.50	4.90 – 4.50	

VISI/MISI		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	5,60 – 6,00	6,20 - 7,30	6,70 - 7,00	7,30 - 7,50	7,60 - 8,00	7,80 - 8,20	
				Rasio Gini	0,30 - 0,34	0,28 - 0,32	0,26 - 0,30	0,25 - 0,28	0,23 - 0,26	0,22 - 0,25	
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Nilai PDRB	25.488,76	27.246,23	28.962,46	30.960,50	33.189,31	35.644,95	
				Indeks Daya Saing Daerah	3.95	4.1 0	4.25	4.40	4.55	4.70	
			Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata	PDRB Sektor Pariwisata	249.27	267.27	287.26	309.09	333.20	359.88	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	54,00	54,5	54,75	55,00	55,50	56,00	
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,00	67,50	68,00	68,50	69,00	70,00	

VISI/MISI		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima	Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	BB	A	
			Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan	Indeks Pencegahan Korupsi	80	81	85	87	88	89	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3	3,5	4	4,5	5	5,5	

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 menjadi implementasi Tahap I RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045. Karena itu, analisis keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 perlu ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 dan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045

RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029					RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045		
VISI	PENJABARAN VISI	SASARAN VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN	TUJUAN	SASARAN	IUP
Minahasa Daerah Pariwisata Yang Maju Dan Sejahtera	PARIWISATA: Minahasa kawasan pariwisata rumah bagi ragam pariwisata alam, termasuk pantai, danau, kawasan lindung dan wisata buatan, serta budaya. MAJU: Mewujudkan Minahasa yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, berkompetisi di segala bidang dengan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. SEJAHTERA: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang aman dan makmur serta mampu mengelola pariwisata untuk generasi sekarang dan yang akan datang.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	1.Meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing	1.1Meningkatkan Kualitas SDM 1.1.1Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat 1.1.2Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1.1.3Meningkatkan Kemandirian Masyarakat	IE1.Kesehatan untuk semua (Indikator: AHH/UHH)	Terwujudnya SDM yang sehat dan produktif	1. Usia harapan hidup 2. Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) (%) 3. Penanganan Tuberkulosis a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) 4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
					IE2 Pendidikan berkualitas yang merata (indikator: Indeks Modal Manusia)		5. Hasil Pembelajaran a. Persentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi

RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029					RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045		
VISI	PENJABARAN VISI	SASARAN VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN	TUJUAN	SASARAN	IUP
							minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: 1) Literasi Membaca (%) 2) Numerasi (%) b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: 1) Literasi Membaca (%) 2) Numerasi (%) c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) d. Harapan Lama Sekolah (Tahun) 6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%) 7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)

RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029					RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045		
VISI	PENJABARAN VISI	SASARAN VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN	TUJUAN	SASARAN	IUP
					IE3. Perlindungan sosial yang adaptif (Angka Kemiskinan)	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif terintegrasi	8. Tingkat kemiskinan (%) 9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%) 10. Persentase Penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)
		Peningkatan pendapatan per kapita Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh	2.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2.1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah 2.1.2 Meningkatkan Daya Saing Sektor Pariwisata 2.1.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur 2.1.4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	IE4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi (Indikator: Pertumbuhan Ekonomi)	Terwujudnya produktivitas ekonomi yang mengoptimalkan teknologi dan inovasi di berbagai bidang	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 12. Pengembangan Pariwisata a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) b. Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang) 13. Persentase Tingkat Hunian Hotel 14. Produktivitas UMKM, koperasi, BUMD a. Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi (%) b. Proporsi jumlah industri

RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029					RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045		
VISI	PENJABARAN VISI	SASARAN VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN	TUJUAN	SASARAN	IUP
							kecil dan menengah pada level provinsi (%) b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%) c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) d. Return on Aset (ROA) BUMD (%) 15. Penciptaan Lapangan Kerja Yang Baik a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) 16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 17. Indeks Inovasi Daerah
					IE5. Penerapan Ekonomi Hijau (Indeks Ekonomi Hijau Daerah)	Terwujudnya penerapan ekonomi hijau yang inklusif	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)
					IE6. Transformasi Digital (Indikator: SPBE)	Terwujudnya optimalisasi digital	19. Indeks pembangunan teknologi informasi dan

RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029					RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045		
VISI	PENJABARAN VISI	SASARAN VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN	TUJUAN	SASARAN	IUP
						sasi dalam tranformasi ekonomi	komunikasi
					IE7.Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (Indikator: PDRB ADHK dan ADHB)	Terwujudnya optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi domestik dan internasional yang inklusif	20. Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi 21. Pembentukan modal tetap bruto (%PDRB) 22. Ekspor barang dan jasa (% PDRB)
					IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (Persentase Desa Mandiri)	Terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan	23. Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) b. Persentase desa mandiri (%)
					IE9. Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif (Reformasi	Terwujudnya masyarakat sipil yang mandiri dan tata kelola	24. Indeks Reformasi Hukum 25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 26. Indeks Pelayanan

RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029					RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045		
VISI	PENJABARAN VISI	SASARAN VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN	TUJUAN	SASARAN	IUP
					Birokrasi)	yang berintegritas dan adaptif	27. Publik Indeks Integritas Nasional
					IE10. Hukum Berkeadilan (Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah)	Terwujudnya penegakan perda yang adil	28. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%) 29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) 30. Indeks Demokrasi Indonesia
					IE11. Stabilitas Ekonomi Makro (Tingkat inflasi)	Terwujudnya optimalisasi pembiayaan dengan stabilitas ekonomi makro	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 32. Tingkat Inflasi (%) 33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan a. Total Dana Pihak Ketiga.PDRB (%) b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%) c. Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan d. Total Kredit/PDRB (%) 34. Inklusi Keuangan (%)
					IE12.Stabilitas Keamanan Daerah (Persentase Kasus	Terwujudnya stabilitas keamanan	35. Persentase Kasus Trantibum yang tertangani (%)

RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029					RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045		
VISI	PENJABARAN VISI	SASARAN VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN	TUJUAN	SASARAN	IUP
					Trantibum yang tertangani)	daerah	36. Present ase Penanganan Tingkat Kejahatan (%)
			3.Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima	3.1.Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih 3.1.1. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan 3.1.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IE13.Beragama maslahat dan berkebudayaan maju (Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB))	Terwujudnya ketaatan beragama dan berbudaya maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
					IE14.Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif (IDG)	Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 40. Indeks Ketimpangan (IKG)
					IE15.Lingkungan hidup berkualitas (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah)	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah 42. Kualitas Lingkungan Hidup a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah b. Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%) c. Pengelolaa n Sampah 1) Timbul an sampah terolah di fasilitas pengelo laan sampah (%) 2) Propors i rumah tangga (RT) dengan

RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029					RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045		
VISI	PENJABARAN VISI	SASARAN VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN	TUJUAN	SASARAN	IUP
							layanan penuh pengumpulan sampah (%RT)
					IE16.Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan (Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%))	Terwujudnya kemandirian pangan , air dan energi	43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan a. Ketahanan Energi 1) Konsumsi listrik per Kapita (kWh) 2) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar) b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%) c. Ketahanan air 1) Kapasitas Air Baku (m2/detik) 2) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
					IE17.Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim (Indeks Risiko Bencana)	Terwujudnya ketangguhan dan daya resiliensi daerah	44. Indeks Risiko Bencana (IRB) 45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif b. Tahunan

3.2. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029

Strategi RPJMD 2025-2029 mengacu pada rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Sedangkan, Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 memerlukan program-program yang dipilih dan disusun secara strategis. Karena itu, Program Prioritas RPJMD 2025-2029 adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.

3.2.2. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2045 merujuk pada kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi perlimatahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Sambil merujuk pada Pasal 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Arah kebijakan Kabupaten Minahasa 2025-2045 berisi rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah (Kabupaten Minahasa).

Dalam konteks RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045 ini, arah kebijakan menjadi jembatan penghubung antara pentahapan Pembangunan setiap lima tahunan dan sasaran-sasaran pokok yang berisi kuantifikasi atau penargetan indikator kinerja visi dan misi Kabupaten Minahasa di akhir periode keempat/tahun ke-20. Demikian, secara materiel-substantif, isi dari arah kebijakan adalah empat tahapan pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045. Secara teknis, setiap misi RPJPD, khususnya tiga misi di bawah panumbra “Transformasi Manusia Daerah” dan dua misi di bawah tema “Landasan Transformasi Daerah” mempunyai pentahapannya masing-masing.

Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Minahasa ini secara tematik dibagi dalam empat tema pentahapan, yaitu Penguatan Landas Transformasi Daerah

Periode I (2025-2029), Akselerasi Transformasi Daerah Periode II (2030-2034), Ekspansi Regional Periode III (2035-2039), dan akhirnya Perwujudan Visi Kabupaten Minahasa Periode IV (2040-2045). Pada tahun terakhir RPJPD Kabupaten Minahasa (2045), visi yang diidamkan dan menjadi asa masyarakat Kabupaten Minahasa diharapkan meninggalkan status potensialitasnya dan, pada gilirannya, melihat aktualisasinya. Tentunya, tema-tema pentahapan ini tetap mempertahankan keterkaitan dan keselarasan dengan tema pentahapan RPJPN 2025-2045.

Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045 dapat dilihat secara terperinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045

VISI	8 MISI (AGENDA PEMBANGUNAN)	ARAH KEBIJAKAN			
		Penguatan Landas Transformasi Periode I (2025-2029)	Akselerasi Transformasi Periode II (2030-2034)	Ekspansi Regional Periode III (2035-2039)	Perwujudan visi Periode IV (2040-2045)
"MINAHASA SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA INTEGRATIF YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"	Transformasi daya saing sumber daya manusia	Penguatan cakupan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan jaminan sosial	Percepatan kualitas sistem dan kesehatan masyarakat, pendidikan berkualitas, jaminan universal	Sistem kesehatan, pendidikan, dan sosial berdaya saing regional	Sumber daya manusia sehat, cerdas, sejahtera
	Transformasi Ekonomi Inklusif dan Produktivitas Daerah	Produktivitas dan serapan tenaga kerja, serta budaya inovasi	Perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Pemantapan dan perluasan sektor unggulan dan potensial	Daerah berpendapatan <i>upper middle income</i>
	Transformasi tata kelola	Reformasi birokrasi, sistem pelayanan publik baik, akses partisipasi masyarakat sipil terbuka	Efisiensi birokrasi, pelayanan publik, dan partisipasi sipil berkualitas	Kemudahan pelayanan publik, profesionalisme birokrasi, partisipasi berkelanjutan	Birokrasi berintegritas, pelayanan publik prima, masyarakat mandiri
	Penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan stabilitas daerah	Peraturan daerah adaptif dan menciptakan rasa aman dan ketertiban	Penegakan peraturan daerah dan keluasan cakupan rasa aman	Internalisasi peraturan daerah dan rasa aman merata	Perda bermutu dan jaminan rasa aman semesta
	Lingkungan sosial, budaya, dan ekologi yang lestari	Penguatan institusi keluarga, gender, SDA, dan bencana	Percepatan kesehatan keluarga, kesetaraan gender, dan ketahanan SDA	Keluarga, gender, SDA, dan resiliensi terhadap bencana bertaraf regional	Budaya maju, SDA berketahanan, dan tangguh bencana
	Pembangunan kewilayahan yang berkeadilan				
	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan				
	Pembangunan berkelanjutan				

Demi memastikan keterkaitan di atas, di bawah ini ditampilkan tabel yang memuat keselarasan Visi, Misi, Arah Kebijakan Nasional dan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Minahasa.

Tabel 3.8 Keterkaitan Visi, Misi, Arah Kebijakan Nasional dan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Minahasa

VISI INDONESIA EMAS 2045	VISI DAERAH 2045	8 MISI (AGENDA PEMBANGUNAN)	ARAH KEBIJAKAN							
			Perkuatan Fondasi Transformasi Tahap I (2025-2029) NASIONAL	Penguatan Landas Transformasi Periode I (2025-2029) MINAHASA	Akselerasi Transformasi Tahap II (2030-2034) NASIONAL	Akselerasi Transformasi Periode II (2030-2034) MINAHASA	Ekspansi Global Tahap III (2035-2039) NASIONAL	Ekspansi Regional Periode III (2035-2039) MINAHASA	Perwujudan Indonesia Emas Tahap IV (2040-2045) NASIONAL	Perwujudan visi Periode IV (2040-2045) MINAHASA
NEGARA NUSANTARA, BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	MINAHASA SEBAGAI HUB PARIWISATA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	Transformasi daya saing sumber daya manusia	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Penguatan cakupan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan jaminan sosial	Percepatan Pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Percepatan kualitas sistem dan kesehatan masyarakat, pendidikan berkualitas, jaminan universal	Penguatan daya saing SDM dan berkelanjutan kesejahteraan	Sistem kesehatan, pendidikan, dan sosial berdaya saing regional	Manusia Indonesia yang unggul	Sumber daya manusia sehat, cerdas, Sejahtera
		Transformasi Ekonomi Inklusif dan Produktivitas Daerah	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Produktivitas dan serapan tenaga kerja, serta budaya inovasi	Penguatan produktivitas secara masif dan perkuasaan sumber pertumbuhan ekonomi	Perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	<i>Economic Power House</i> yang terintegrasi dengan rantai global dan domestik dan ekspor yang kokoh	Pemantapan dan perluasan sektor unggulan dan potensial	Negara berpendapatan tinggi	Daerah berpendapatan <i>upper middle income</i>
		Transformasi tata kelola	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi efektif, digitalisasi pelayanan publik, integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	Reformasi birokrasi, sistem pelayanan publik baik, akses partisipasi masyarakat sipil terbuka	Kelembagaan kolaboratif, ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi informasi, partai politik modern, regulasi adaptif, masyarakat sipil mandiri	Efisiensi birokrasi, pelayanan publik, dan partisipasi sipil berkualitas	Kelembagaan adaptif, ASN kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif, masyarakat sipil mandiri	Kemudahan pelayanan publik, profesionalisme birokrasi, partisipasi berkelanjutan	Regulasi adaptif dan taat asas dan tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif	Birokrasi berintegritas, pelayanan publik prima, masyarakat mandiri

VISI INDONESIA EMAS 2045	VISI DAERAH 2045	8 MISI (AGENDA PEMBANGUNAN)	ARAH KEBIJAKAN							
			Perkuatan Fondasi Transformasi Tahap I (2025-2029) NASIONAL	Penguatan Landas Transformasi Periode I (2025-2029) MINAHASA	Akselerasi Transformasi Tahap II (2030-2034) NASIONAL	Akselerasi Transformasi Periode II (2030-2034) MINAHASA	Ekspansi Global Tahap III (2035-2039) NASIONAL	Ekspansi Regional Periode III (2035-2039) MINAHASA	Perwujudan Indonesia Emas Tahap IV (2040-2045) NASIONAL	Perwujudan visi Periode IV (2040-2045) MINAHASA
		Penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan stabilitas daerah	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, membangun kekuatan, pertahanan berdaya, gentar Kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan	Peraturan daerah adaptif dan menciptakan rasa aman dan ketertiban	Memantapkan supremasi hukum, stabilitas serta kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketangguhan diplomasi untuk mewujudkan landasan kokoh bagi transformasi dan Pembangunan	Penegakan peraturan daerah dan keluasan cakupan rasa aman	Indonesia berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, demokrasi substansial, aman dan nyaman, serta berpengaruh dan memimpin kawasan	Internalisasi peraturan daerah dan rasa aman merata	Indonesia berdaulat, aman dan damai serta berpengaruh dan memimpin dalam tatanan dunia	Perda bermutu dan jaminan rasa aman semesta
		Lingkungan sosial yang sehat dan budaya yang maju	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Penguatan institusi keluarga, gender, SDA, dan bencana	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong Pembangunan sosial ekonomi setara dan inklusif	Percepatan kesehatan keluarga, kesetaraan gender, dan ketahanan SDA	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, serta alam lingkungan dalam menghadapi perubahan	Keluarga, gender, SDA, dan resiliensi terhadap bencana bertaraf regional	Mewujudkan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia yang berkelanjutan	Budaya maju, SDA berketahanan, dan tangguh bencana
		Pembangunan kewilayahan yang berkeadilan								
		Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan								
		Pembangunan berkelanjutan								

3.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029

Strategi RPJMD 2025-2029 mengacu pada rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Sedangkan, Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Dari penjelasan tentang Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045, Strategi RPJMD 2025-2029 diformulasi dan dilaksanakan demi pencapaian tujuan dan sasaran, serta pada saat yang sama menjawab isu strategis yang diidentifikasi di Bab II. Sedangkan, Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 berada dalam kerangka pencapaian Periode I RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045 dengan tema “Penguatan Landas Transformasi Daerah”. Detail deskripsi keselarasan isu strategis, misi, strategi dan arah kebijakan daerah 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI : MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA				
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MINAHASA YANG SEHAT, CERDAS, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING				
Tujuan 1.1	Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia		
	Sasaran 1.1.1	Indeks Pendidikan ; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah	Memantapkan landasan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan kualitas Infrastruktur Pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh rakyat Minahasa, terutama pendidikan karakter yang berwawasan kebangsaan, juga berupaya meningkatkan produktifitas pemuda dan olah raga
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat			
	Sasaran 1.1.2	Angka Harapan Hidup	Memantapkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat dan jaminan kesehatan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 1.1.3			
	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	Pendapatan per Kapita ; Indeks Pembangunan Gender ; Angka Kemiskinan ; Tingkat Pengangguran	Memantapkan dan Meningkatkan Keterjangkauan Jaminan Sosial	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat, peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup termasuk pemenuhan hak-hak anak ; Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal ; juga Meningkatkan peluang kerja usia produktif dan perluasan lapangan usaha di daerah, dan Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh berbasis database kemiskinan yang valid
MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN EKONOMI YANG TANGGUH				
Tujuan 2.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi ; Rasio Gini		

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 2.1.1	PDRB, Indeks Daya Saing Daerah	Memantapkan Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan daya saing investasi melalui promosi investasi secara berkelanjutan, menyediakan dan menyederhanakan pelayanan investasi serta pemberian insentif atau keringanan pajak bagi investor, dalam mencapai Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan industri, Koperasi dan UMKM, dan iklim investasi ramah lingkungan
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan dan Investasi terhadap Ekonomi Daerah			
	Sasaran 2.1.2	PDRB Sektor Pariwisata	Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata dalam Upaya Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata	Memperkuat daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kunjungan wisata, memperpanjang lama tinggal (<i>length of stay</i>) dan belanja wisatawan (<i>tourist expenditure</i>)
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata			
	Sasaran 2.1.3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur melalui pemantauan infrastruktur secara berkala, serta penanganan pemeliharaan yang responsive
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur			

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Sasaran 2.1.4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Memantapkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup melalui upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem, penguatan tata kelola dan penegakan hukum, partisipasi publik dan Edukasi lingkungan, juga membangun pengelolaan persampahan yang terpadu, berkelanjutan dan berbasis ekonomi sirkular
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
MISI 3 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL BERBASIS DIGITALISASI DAN INOVATIF UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA				
Tujuan 3.1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi		
	Sasaran 3.1.1	Indeks Pencegahan Korupsi	Menguatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan, penyusunan perencanaan dan
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan			

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				evaluasi berkualitas serta optimalisasi e-Gov dan pelayanan pangaduan
	Sasaran 3.1.2	Indeks Pelayanan Publik	Memastikan dasar Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Pelayanan Publik Prima berbasis teknologi informasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik, dan melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			

3.2.4. Program Strategis RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 memerlukan program-program yang dipilih dan disusun secara strategis. Karena itu, Program Prioritas RPJMD 2025-2029 adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Tabel-tabel program prioritas Kabupaten Minahasa dengan persandingan dengan program prioritas nasional dan program prioritas Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.10 Program Strategis Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa

MISI	PROGRAM PRIORITAS		
	NASIONAL	PROVINSI	MINAHASA
1. Meningkatkan kualitas SDM Minahasa yang sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing	PPN 5. Pemberantasan kemiskinan	PP 1. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun dan Introduksi Makan Siang Bergizi Gratis;	1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Meningkatkan Kapasitas Modal Sosial
	PPN 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	PP 2. Pengembangan Sumber daya Manusia Melalui Penguatan Pendidikan Vokasi, Sains, Teknologi, dan Digitalisasi	
	PPN 8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi	PP 3. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Semua dan Jaring Pengaman Sosial	
	PPN 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas	PPP 15. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	PPN 17. Pelestarian seni budaya, Peningkatan ekonomi Kreatif dan Peningkatan Prestasi Olahraga	PP 14. Pembinaan olah raga, Pemuda dan generasi Milenial	

MISI	PROGRAM PRIORITAS		
	NASIONAL	PROVINSI	MINAHASA
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ekonomi yang Tangguh	PPN 1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air	PPP 15. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 5. Mengembangkan Potensi Daerah sebagai Destinasi Pariwisata 6. Melakukan Pemerataan Pembangunan Antarwilayah yang Berkelanjutan
	PPN 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	PPP 5. Peningkatan Agro-Produksi, Agro-Industri, dan Agro-Marketing;	
	PPN 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya	PPP 7. Optimalisasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan UMKM;	
	PPN 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	PPP 16. Peningkatan kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pengembangan Logistik Hub sebagai supporting untuk IKN	
	PPN 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup	PPP 17. Pembinaan pertambangan rakyat	
		PPP 9. Pengembangan Pariwisata Cerdas (<i>Smart Tourism</i>) Berbasis Pesona Alam, Aset Budaya dan Keraifan Lokal, Kesehatan dan Kebugaran, dan MICE	
3. Memantapkan	PPN 2. Penyempurnaan sistem	PPP 8. Pengembangan Sentra	7. Meningkatkan Tata Kelola

MISI	PROGRAM PRIORITAS		
	NASIONAL	PROVINSI	MINAHASA
Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis digitalisasi dan inovatif untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima	penerimaan negara	Pelayanan Publik Prima;	Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel 8. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Yang Transparan, Cepat, Dan Mudah
	PPN 3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi	PPP 10. Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pengembangan Sistem Meritokrasi, Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan Ketatalaksanaan termasuk pengelolaan keuangan;	
	PPN 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	PPP 11. Pencegahan dan Pemberantasan KKN sela Narkoba;	
	PPN 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba		
	PPN 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif PPN 16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah		

3.2.5. Tema/Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa arah kebijakan harus dapat memecahkan masalah dari suatu masalah pokok, maka perlu disusun suatu tahapan pelaksanaan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Tahapan ini yang kemudian menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan. Untuk memberikan arah pembangunan yang jelas, maka perlu juga disusun fokus atau tema pembangunan tahunan sebagai dasar menentukan prioritas arah kebijakan tahunan.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029, sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, terdiri dari Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tak lain adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mengarahkan gerak pembangunan daerah setiap tahun, tema pembangunan/arah kebijakan tahunan RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Tema/Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Minahasa 2025-2029

	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Tema RKP	SDM dan Infrastruktur Berkualitas	Inovasi dan hilirisasi industri berkelanjutan	Percepatan peletakan fondasi transformasi	Pemantapan fondasi transformasi	Perwujudan fondasi transformasi
Tema Pembangunan/arrah kebijakan tahunan RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029	Pembangunan landasan infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan sumber daya berbasis inovasi dan penyelarasan regulasi	Penguatan landasan infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan sumber daya berbasis inovasi dan penyelarasan regulasi	Percepatan peletakan fondasi transformasi Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera	Pemantapan fondasi transformasi Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera	Perwujudan fondasi transformasi Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera

Tabel 3.12 Program Unggulan, Kegiatan Prioritas dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

PROGRAM UNGGULAN		KEGIATAN PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
1	Mewujudkan Minahasa sehat dan cerdas;	1	Peningkatan Status 13 Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat Inap ; dan Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang jauh dari pusat pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan
		2	Pemenuhan Sarana, Prasarana, Tenaga Medis dan Non Medis RSUD Dr. Sam Ratulangi ; termasuk Tenaga Medis Puskesmas	RSUD Dr. Sam Ratulangi ; Dinas Kesehatan
		3	Bantuan Pendidikan bagi Siswa kurang mampu yang berprestasi	Dinas Pendidikan ; Dinas Sosial
		4	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas	Dinas Pendidikan ; BKPSDM
		5	Penyiapan Fasilitas Internet Gratis di setiap Ibukota Kecamatan	Diskominfo
2	Melanjutkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan daerah	6	Pemberian Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi masyarakat kurang mampu dan Pekerja Rentan	Dinkes ; RSUD ; Dinsos Disnaker

PROGRAM UNGGULAN		KEGIATAN PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
			(Pembantu Rumah Tangga, Tukang Ojek, dll)	
3	Menurunkan kemiskinan dan prevalensi stunting	7	Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, dan Menambah jumlah kegiatan Padat Karya	Disnaker ; OPD yang terkait ; DPMD
		8	Intensifikasi Pelayanan Prenatal Care di Posyandu ; dan Pemberian makanan bergizi pada Ibu Hamil dan Balita, termasuk keluarga miskin	Dinkes / Puskesmas / Dinas Pangan / DPPKB / DPMD (DD)
4	Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	9	Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event-event budaya dan kesenian daerah ; serta mewajibkan budaya daerah sebagai muatan lokal utk kegiatan ekstra kurikuler	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata / Dinas Pendidikan / Dinas Kepemudaan OR
5	Pemberdayaan perempuan, pemuda dan lansia serta perlindungan anak dan kaum disabilitas	10	Pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Produktif, Bantuan Peralatan bagi perempuan dan Pemuda	Dinas Koperasi / Tenaga Kerja / DPPPA / Dinas Kepemudaan OR / Dinsos
		11	Pelaksanaan event-event Olah Raga	Dinas Kepemudaan OR / Dinas Pendidikan / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		12	Sosialisasi Hak-Hak Anak dan Sanksi Hukum atas kekerasan terhadap anak.	Dinas P3A / Setda (Bagian Hukum)
		13	Pemberian Bantuan bagi Kaum Disabilitas dan Lansia	Dinas Sosial
6	Rehabilitasi Danau Tondano sebagai objek Vital dan Strategis (RD-VS) melalui pengembangan kawasan danau Tondano sebagai destinasi wisata unggulan; dan Pengembangan Kawasan Pariwisata lainnya	14	Pembentukan Task Force Penyelamatan Danau mencakup wilayah Hulu, Tengah dan Hilir	Dinas Lingkungan Hidup / BPDAS / Setda (Bagian SDA)
		15	Pembangunan/perbaikan Jalan dan Drainase Ringroad (<i>Detention Canal</i>) dan <i>pathway</i>	Dinas PUPR / BPJN
		16	Pembangunan Infrastruktur <i>Retention Pond</i> dan <i>Detention Basin</i> , Pembuatan Tanggul Banjir dengan <i>Regulator Gate</i> dan Bangunan Pengendali Sedimen dan Pemasangan Trash Trap di mulut inlet sungai masuk ke Danau	DLH / Dinas PUPR / BWS
		17	Pengadaan Mesin Penyapu Eceng Gondok, dan Pembuatan Water Quality	Dinas Lingkungan Hidup/PUPR/BWS / BPDAS

PROGRAM UNGGULAN		KEGIATAN PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
			Control dan Instalasi Pembersihan Danau dan Pengelolaan Kualitas Air	
		18	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan pihak terkait untuk rehabilitasi dan pengembangan kawasan wisata Danau Tondano	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata / Dinas Lingkungan Hidup /Dinas PUPR / Dinas Perhubungan / Setda /BWS / BPPW
		19	Pembuatan Septic tank Komunal/ individual (SPALD) juga MCK Plus, dan SPAM di beberapa daerah sekitar danau.	Dinas PUPR / BPPW
		20	Pengendalian Eceng Gondok dan Gulma air lainnya secara padat karya dan juga pengangkatan secara mekanik (menggunakan eskavator).	Dinas Lingkungan Hidup / BWS / BPPW
7	Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Minahasa	21	Pemberian bantuan alsintan, benih/bibit, pupuk bagi petani dan alat tangkap ikan, bibit ikan bagi nelayan	Dinas Perdagangan / Dinas Pertanian / Dinas Kelautan dan Perikanan
		22	Pengelolaan Stok dan Ketersediaan Produksi Komoditas	Dinas Perdagangan / Dinas Pertanian / Dinas Kelautan dan Perikanan
		23	Pemanfaatan Lahan Tidur untuk menjaga Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian / Dinas Pangan
8	Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan investasi melalui pemberdayaan masyarakat desa, penguatan koperasi UMKM dan hilirisasi industri	24	Pembangunan Pasar Desa sebagai akses produk-produk UKM Desa	Dinas Perdagangan
		25	Pelatihan Kewirausahaan dan Pembinaan pengembangan usaha UMKM, dan Pelatihan pengolahan bahan baku menjadi produk turunan (<i>By Product</i>)	Dinas Koperasi / Dinas Pertanian / Dinas PMD / Dinas Perikanan dan Kelautan / Dinas Pangan / Dinas Tenaga Kerja
		26	Fasilitasi pembiayaan untuk UMKM dengan Program KUR (Perbankan) dan Ultra Mikro (Lembaga Keuangan Bukan Bank)	Dinas Koperasi ; Dinas Perdagangan ; BPKAD
9	Pengelolaan lingkungan hidup	27	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Dinas PUPR/ DLH / BPPW

PROGRAM UNGGULAN		KEGIATAN PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
	termasuk penanganan limbah yang baik		dan Pengoperasiannya	
		28	Pembangunan TPS3R (TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH <i>REUSE-REDUCE-RECYCLE</i>) di 22 Kecamatan	Dinas PUPR / Dinas LH / Kecamatan
		29	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai pedoman penyelenggaraan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
10	Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan kawasan permukiman yang tangguh terhadap bencana	30	Peningkatan konektivitas dan Perbaikan Ruas Jalan yang Rusak Ringan/Berat sepanjang 308 Km tersebar di 25 Kecamatan	Dinas PUPR / Dinas Perhubungan
		31	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di seluruh Kecamatan	Dinas PUPR
		32	Melengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman menjadi Kawasan Layak Huni, dan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, termasuk Pembangunan MCK Individual bagi keluarga tidak mampu	Dinas Perkim / DPMD (DD)
		33	Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa ; dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Pineleng, Tombulu, Mandolang, Pesisir Pantai Timur dan Langowan	Dinas PUPR
		34	Pengadaan 3 Unit Mobil Pemadam Kebakaran	Dinas Damkar
11	Mengembangkan Rencana Aksi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengembangan Sumber Daya Energi Baru Terbarukan	35	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ; Adaptasi Perubahan Iklim ; dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Dinas Lingkungan Hidup ; Dinas Perdagangan

PROGRAM UNGGULAN		KEGIATAN PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
12	Mengoptimalkan birokrasi yang profesional dan inovatif;	36	Penyusunan Rencana Aksi OPD, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Minahasa	Inspektorat / Setda (Bagian Ortal) / Seluruh OPD
		37	Penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pengaplikasian Basis Data Digital yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia	Diskominfo / BAPPELITBANGDA / BPS / Seluruh OPD
		38	Penyusunan dan implementasi inovasi Pelayanan Publik oleh Perangkat Daerah maupun ASN	BAPPELITBANGDA / Setda (Bagian Ortal) / Seluruh OPD
		39	Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Perangkat Daerah ; dan Pelaksanaan Diklat/Bimtek Fungsional bagi ASN	BKPSDM / Seluruh OPD
13	Mendorong pelayanan publik yang prima	40	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik ; dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis layanan publik, dan Pemberian Reward dan Punishment Perangkat Daerah Pelayanan Publik	OPD Pelayanan Publik
14	Mencegah dan memberantas KKN	41	Penguatan Pelaksanaan MCSP (Monitoring Controlling Surveillance for Prevention) ; dan Penguatan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah)	Inspektorat / OPD yang terkait
15	Peningkatan Ketahanan Sosial dan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan;	42	Pemberian Bantuan bagi Rumah Ibadah dan Insentif bagi Rohaniawan, termasuk Pemberian Bantuan Dana Duka bagi Keluarga Tidak Mampu	Badan Kesbang / Setda (Bagian Kesra) / BPKAD
16	Mempercepat transformasi digital yang inklusif	43	Penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Minahasa ; dan Penyiapan Arsitektur SPBE	Diskominfo / Seluruh OPD
17	Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban wilayah dan lingkungan	44	Mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan di Desa/Kelurahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memantau keamanan	Seluruh Kecamatan / Satpol PP

PROGRAM UNGGULAN		KEGIATAN PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
			dan ketertiban masyarakat	
		45	Mengintensifkan koordinasi Forkopimda dan FKUB	Badan Kesbang / Setda (Bagian Kesra)

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka menjawab Visi dan Misi dari Bupati Bapak Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Ibu Vanda Sarundajang Kabupaten Minahasa periode 2025-2030 terkait pembangunan lima tahun ke depan, dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2029 telah memuat tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya. Guna pencapaian Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Pencapaian atas rangkaian program dan kegiatan prioritas diukur berdasarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

4.1 Program Perangkat Daerah

Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode kepemimpinan, yaitu Tahun 2026 sampai 2029, dan tahun 2030 sebagai masa transisi (tahun pertama) kepemimpinan periode berikutnya. Program prioritas diikuti dengan pendanaan pada setiap tahunnya yang bersifat indikatif.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program- program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing Perangkat Daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal

bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai pembangunan dimulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 (Tabel 4.1). Tahun 2030 sebagai masa transisi (tahun pertama) kepemimpinan periode berikutnya yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah. Adapun rumusan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2030 sesuai urusan dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2030

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	DINAS PENDIDIKAN
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SAM RATULANGI TONDANO
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS PANGAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PANGAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN

2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	09	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINAS PERPUSTAKAAN
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	

3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	DINAS PERDAGANGAN
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINAS PERDAGANGAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERDAGANGAN
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINAS PERDAGANGAN
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERDAGANGAN
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERDAGANGAN
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERDAGANGAN
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DINAS PERDAGANGAN
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERDAGANGAN
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
4	02		SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5	01		PERENCANAAN	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	02		KEUANGAN	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	03		KEPEGAWAIAN	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	

5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT DAERAH
7			UNSUR KEWILAYAHAN	
7	01		KECAMATAN	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SEMUA KECAMATAN
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SEMUA KECAMATAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SEMUA KECAMATAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	SEMUA KECAMATAN
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	SEMUA KECAMATAN
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X			NON URUSAN	
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SEMUA PERANGKAT DAERAH DAN KECAMATAN

Tabel 4.2. Indikator program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah 2025-2030

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	80 %	80 %	77.920.007.194,00	85 %	81.816.007.554,00	85 %	85.906.807.931,00	86 %	90.202.148.328,00	86 %	94.712.255.744,00	87 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	78,63 %	78,63 %	33.600.000,00	78,63 %	35.280.000,00	80 %	37.044.000,00	80 %	38.896.200,00	82 %	40.841.010,00	82 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	86 %	86 %	6.437.963.031,00	87 %	6.759.861.183,00	87 %	7.097.854.242,00	88 %	7.452.746.954,00	88 %	7.825.348.302,00	90 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	100 %	100 %	35.565.000,00	100 %	37.343.250,00	100 %	39.210.413,00	100 %	41.170.934,00	100 %	43.229.480,00	100 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatny a kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,0 0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SAM RATULANGI TONDANO
1	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatny a kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	100 %	100 %	107.776.678.840,00	100 %	113.165.512.782,00	100 %	118.823.788.421,00	100 %	124.764.977.842,00	100 %	131.003.226.734,00	100 %	0,0 0	DINAS KESEHATAN
1	0	0	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatny a mutu dan distribusi tenaga kesehatan	100 %	100 %	1.312.500.000,00	100 %	1.378.125.000,00	100 %	1.447.031.250,00	100 %	1.519.382.813,00	100 %	1.595.351.953,00	100 %	0,0 0	DINAS KESEHATAN
1	0	0	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatny a kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	80 %	82 %	418.113.150,00	84 %	439.018.808,00	86 %	460.969.748,00	88 %	848.013.235,00	90 %	508.219.147,00	90 %	0,0 0	DINAS KESEHATAN
1	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatny a kualitas pemberdayaa n masyarakat bidang kesehatan	100 %	100 %	110.250.000,00	100 %	115.762.500,00	100 %	121.550.625,00	100 %	127.628.156,00	100 %	134.009.564,00	100 %	0,0 0	DINAS KESEHATAN
1	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas layanan irigasi Multikomodita s	51,14 %	53,47 %	8.400.000.000,00	55,80 %	8.500.000.000,00	58,13 %	8.600.000.000,00	60,46 %	8.700.000.000,00	62,79 %	8.800.000.000,00	62,79 %	0,0 0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir Rob	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	87 %	88 %	3.000.000.00 0,00	89 %	2.000.000.00 0,00	90 %	2.000.000.00 0,00	91 %	3.000.000.00 0,00	92 %	3.000.000.00 0,00	92 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah	86,41 %	87,28 %	15.642.311.000,00	88,15 %	17.206.542.000,00	89,03 %	18.927.196.000,00	89,92 %	20.819.914.760,00	90,82 %	22.901.906.235,00	90,82 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST	63,43 %	64,08 %	0,00	64,74 %	500.000.000,00	65,40 %	550.000.000,00	66,07 %	605.000.000,00	66,75 %	665.000.000,00	0 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	71,26 %	72,06 %	6.583.155.000,00	72,76 %	7.241.470.000,00	73,54 %	7.965.617.000,00	74,28 %	8.762.179.000,00	75,02 %	9.638.397.000,00	0 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	55,0 %	55,50 %	2.850.000.000,00	56,0 %	2.850.000.000,00	56,50 %	2.900.000.000,00	57,0 %	2.900.000.000,00	57,50 %	2.950.000.000,00	57,50 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	73,36 %	74,09 %	359.999.960,00	74,83 %	395.999.956,00	75,58 %	435.600.000,00	76,34 %	479.160.000,00	77,10 %	527.076.000,00	77,10 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	80,04 %	80,84 %	330.500.000,00	81,65 %	363.550.000,00	82,47 %	399.905.000,00	83 %	439.895.500,00	84,12 %	483.886.000,00	84 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	70 %	0,00 %	0,00	71,00 %	1.000.000.000,00	71,71 %	1.100.000.000,00	72,43 %	1.210.000.000,00	73,15 %	1.331.000.000,00	73,15 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan	62,61 %	62,76 %	34.136.773.000,00	62,99 %	37.550.451.000,00	63,21 %	41.305.496.000,00	63,51 %	45.436.045.000,00	64,01 %	49.979.650.000,00	64,01 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	41,61 %	42,03 %	22.393.599,00	42,45 %	124.633.000,00	42,87 %	137.097.000,00	43,30 %	150.806.000,00	43,73 %	165.887.000,00	43,73 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi	80 %	80 %	1.943.516.000,00	80 %	3.210.000.000,00	80 %	3.531.000.000,00	80 %	3.884.100.000,00	80 %	4.272.510.000,00	80 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	2 %	2 %	201.505.600,00	2 %	211.580.880,00	2 %	222.159.924,00	2 %	233.267.920,00	2 %	244.931.316,00	10 %	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	1,65 %	0 %	2.347.773.605,00	3,3 %	2.465.162.285,00	3,4 %	2.588.420.399,00	3,5 %	2.717.841.419,00	3,6 %	2.853.733.490,00	3,6 %	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	50 %	45 %	3.374.054.755,00	45 %	3.542.757.493,00	45 %	3.719.895.368,00	46 %	3.905.890.136,00	46 %	4.101.184.643,00	46 %	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	20 %	50 %	191.831.100,00	50 %	201.422.600,00	50 %	220.000.000,00	50 %	233.100.000,00	50 %	241.000.000,00	50 %	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	2.514.152.934,00	100 %	2.708.419.190,00	100 %	2.843.840.150,00	100 %	2.986.032.157,00	100 %	3.135.333.765,00	100 %	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	89.072.000	100 %	89.072.000	100 %	89.072.000	100 %	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	100 %	100 %	4.661.404.170	100 %	4.619.390.000	100 %	5.078.430.000	100 %	5.338.096.770	100 %	5.614.290.770	100 %	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	4.725.904.170	100 %	4.962.240.000	100 %	5.210.352.000	100 %	5.470.018.770	100 %	5.744.412.770	100 %	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	100%	100 %	64.600.000	100 %	42.650.000	100 %	42.650.000	100 %	42.650.000	100 %	42.650.000	100 %	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	100 %	100 %	1.629.564.410,00	100 %	1.711.042.631,00	100 %	1.796.594.762,00	100 %	1.886.424.500,00	100 %	1.980.745.725,00	100 %	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	258.319.089,00	100 %	271.235.043,00	100 %	284.796.796,00	100 %	299.036.635,00	100 %	313.988.467,00	100 %	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	100 %	100 %	278.893.855,00	100 %	292.838.547,00	100 %	307.480.475,00	100 %	322.854.499,00	100 %	338.997.224,00	100 %	0,00	DINAS SOSIAL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	063		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatny a layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	DINAS SOSIAL
1	064		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatny a rehabilitasi sosial	100 %	100 %	1.001.761.719,00	100 %	1.051.849.805,00	100 %	1.104.442.295,00	100 %	1.159.664.410,00	100 %	1.217.647.630,00	100 %	0,00	DINAS SOSIAL
1	065		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatny a perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	247.775.301,00	100 %	260.164.066,00	100 %	273.172.269,00	100 %	286.830.883,00	100 %	301.172.427,00	100 %	0,00	DINAS SOSIAL
1	066		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatny a perlindungan sosial korban bencana	100 %	100 %	624.325.590,00	100 %	655.541.870,00	100 %	688.318.963,00	100 %	722.734.911,00	100 %	759.871.657,00	100 %	0,00	DINAS SOSIAL
1	067		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatny a tata kelola Taman Makam Pahlawan	100 %	100 %	166.571.955,00	100 %	174.900.553,00	100 %	183.645.580,00	100 %	192.827.859,00	100 %	202.469.252,00	100 %	0,00	DINAS SOSIAL
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	072		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	94 %	94 %	15.500.000,00	94 %	17.000.000,00	94 %	17.850.000,00	94 %	18.742.500,00	94 %	19.679.625,00	94 %	0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	073		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatny a produktivitas tenaga kerja	81,5 %	81,5 %	558.271.468,00	81,5 %	3.225.000.000,00	81,5 %	3.386.250.000,00	81,5 %	3.555.562.500,00	81,5 %	3.733.340.625,00	81,5 %	0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	074		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatny a penempatan tenaga kerja	82 %	82 %	156.419.250,00	82 %	260.000.000,00	82 %	273.000.000,00	82 %	286.650.000,00	82 %	300.982.500,00	82 %	0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	075		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatny a pekerja	53 %	53 %	4.205.306.400,00	53 %	4.315.000.000,00	53 %	4.530.750.000,00	53 %	4.757.287.500,00	53 %	4.995.151.875,00	53 %	0,00	DINAS TENAGA KERJA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan Peran perempuan dalam pembangunan	25 %	27 %	80.000.000	29 %	150.000.000,00	33 %	157.500.000,00	35 %	165.375.000,00	35 %	165.375.000,00	38 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	0,30 %	0,36 %	460.660.000	0,40 %	562.000.000,00	0,41 %	590.100.000,00	0,43 %	619.605.000,00	0,45 %	650.585.250,00	0,45 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	3 Lembaga	3 Lembaga	40.000.000	5 Lembaga	107.000.000,00	6 Lembaga	112.350.000,00	6 Lembaga	117.967.500,00	8 Lembaga	123.865.875,00	3 Lembaga	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	2 Laporan	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	104.000.000,00	2 Laporan	109.200.000,00	2 Laporan	114.660.000,00	2 Laporan	120.393.000,00	2 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	14 Lembaga	16 Lembaga	80.000.000	16 Lembaga	125.000.000,00	18 Lembaga	131.250.000,00	18 Lembaga	137.812.500,00	20 Lembaga	144.703.125,00	20 Lembaga	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	100 %	100 %	35.000.000	100 %	104.000.000,00	100 %	109.200.000,00	100 %	114.660.000,00	100 %	120.393.000,00	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	100 %	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	0,00	DINAS PANGAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	92 Kg/Kalori	93 Kg/Kalori	2.247.050.000,00	94 Kg/Kalori	1.070.850.000,00	95 Kg/Kalori	1.120.850.000,00	96 Kg/Kalori	1.170.850.000,00	97 Kg/Kalori	1.895.850.000,00	97 Kg/Kalori	0,00	DINAS PANGAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	20 %	18 %	80.449.946,00	15 %	82.222.443,00	14 %	84.083.565,00	12 %	86.037.743,00	10 %	88.089.630,00	10 %	0,00	DINAS PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu	30 %	40 %	51.500.000,00	50 %	56.650.000,00	60 %	65.000.000,00	70 %	70.000.000,00	80 %	80.000.000,00	80 %	0,00	DINAS PANGAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				keamanan pangan														
2	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	1	0	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	0,00	100 %	250.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	400.000.000,00	100 %	400.000.000,00	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	57,06 Indeks	57,06 Indeks	1.759.014.000,00	0 Indeks	2.202.000.000,00	0 Indeks	2.650.000.000,00	0 Indeks	2.700.000.000,00	0 Indeks	3.100.000.000,00	0 Indeks	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Tutupan lahan	35,78 Indeks	35,82 Indeks	0,00	35,87 Indeks	0,00	35,91 Indeks	0,00	35,95 Indeks	0,00	35,99 Indeks	0,00	35,99 Indeks	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara	90,99 Indeks	91,06 Indeks	0,00	91,10 Indeks	0,00	91,13 Indeks	0,00	91,16 Indeks	0,00	91,19 Indeks	0,00	91,19 Indeks	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	50 %	50 %	0,00	52 %	400.000.000,00	53 %	400.000.000,00	53 %	450.000.000,00	53 %	760.000.000,00	53 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	51,5 %	52,0 %	9.850.000,00	53,0 %	20.000.000,00	54,0 %	30.000.000,00	54,5 %	45.000.000,00	55,0 %	45.000.000,00	55,0 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	70 %	72 %	9.900.000,00	73 %	20.000.000,00	74 %	30.000.000,00	75 %	50.000.000,00	76 %	50.000.000,00	76 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	0 %	100 %	0,00	100 %	5.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	0	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	0 %	0 %	0,00	53 %	40.000.000,00	60 %	60.000.000,00	61 %	65.000.000,00	62 %	30.000.000,00	62 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	1	0	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0 %	0 %	0,00	60 %	60.000.000,00	65 %	75.000.000,00	70 %	75.000.000,00	75 %	75.000.000,00	75 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	1	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	58 %	59 %	9.900.000,00	60 %	15.000.000,00	61 %	20.000.000,00	62 %	20.000.000,00	63 %	20.000.000,00	63 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45 Indeks	46 Indeks	6.843.309.000,00	46,50 Indeks	7.235.000.000,00	47 Indeks	8.000.000.000,00	47,50 Indeks	8.200.000.000,00	48 Indeks	8.300.000.000,00	48 Indeks	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	1	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	100 %	100 %	5.696.000.000	100 %	614.202.750,00	100 %	644.912.888,00	100 %	677.158.532,00	100 %	711.016.458,00	100 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	100 %	100 %	269.230.800	100 %	296.826.957,00	100 %	311.668.305,00	100 %	327.251.720,00	100 %	343.614.306,00	100 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	100 %	100 %	17.375.000	100 %	19.155.938,00	100 %	20.113.734,00	100 %	21.119.421,00	100 %	22.175.392,00	100 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	100 %	100 %	7.400.000,00	100 %	8.158.500,00	100 %	8.566.425,00	100 %	8.994.746,00	100 %	9.444.484,00	100 %	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1	0	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	61 %	66,51 %	120.000.000,00	72,02 %	152.500.000,00	77,53 %	175.000.000,00	83,03 %	200.000.000,00	88,54 %	225.000.000,00	88,54 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	1	0	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	33,48 %	34,36 %	129.600.000,00	35,24 %	187.500.000,00	36,12 %	200.000.000,00	37 %	225.000.000,00	37,88 %	250.000.000,00	37,88 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	1	0	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	544.682.600,00	100 %	577.500.000,00	100 %	600.000,00	100 %	625.000.000,00	100 %	650.000.000,00	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	1	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	270 LKD	270 LKD	1.207.719.362,00	270 LKD	1.902.000.000,00	270 LKD	1.997.100.000,00	270 LKD	2.096.955.000,00	270 LKD	2.201.802.750,00	270 LKD	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	65 %	65 %	564.474.750,00	70 %	592.698.488,00	70 %	622.333.412,00	80 %	653.450.082,00	80 %	686.122.587,00	100 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1	0	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	65 %	65 %	5.088.702.743,00	75 %	5.343.137.880,00	75 %	5.610.294.774,00	80 %	5.890.809.513,00	80 %	6.185.349.989,00	100 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	80 %	80 %	2.081.306.535,00	85 %	2.185.371.862,00	90 %	2.294.640.455,00	95 %	2.409.372.478,00	100 %	2.529.841.101,00	100 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas darat	0,29 Nilai	0,30 Nilai	3.432.779.000,00	0,31 Nilai	3.500.000.000,00	0,32 Nilai	3.550.000.000,00	0,33 Nilai	3.600.000.000,00	0,34 Nilai	3.650.000.000,00	0,35 Nilai	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	0 Nilai	0 Nilai	0,00	0 Nilai	0,00	0 Nilai	0,00	0 Nilai	0,00	0 Nilai	0,00	0 Nilai	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	75 %	80 %	3.973.013.384,00	85 %	4.171.664.053,00	90 %	4.380.247.255,00	95 %	4.599.259.618,00	100 %	4.829.222.599,00	100 %	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	50 %	60 %	768.809.129,00	70 %	807.249.585,00	80 %	847.612.064,00	90 %	889.992.667,00	100 %	934.492.301,00	100 %	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1	0	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	6.895.000,00	20 Koperasi	3.500.000,00	20 Koperasi	10.500.000,00	20 Koperasi	12.500.000,00	20 Koperasi	14.000.000,00	20 Koperasi	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	0	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5 %	5 %	5.375.000,00	5 %	7.450.000,00	5 %	12.500.000,00	5 %	15.500.000,00	5 %	16.000.000,00	5 %	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	0	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	5 %	5 %	4.033.200,00	5 %	4.000.000,00	5 %	7.000.000,00	5 %	10.000.000,00	5 %	11.000.000,00	5 %	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	0	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	5 %	5 %	288.234.150,00	5 %	160.000.000,00	5 %	200.000.000,00	5 %	250.000.000,00	5 %	260.000.000,00	5 %	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	5 %	5 %	25.061.000,00	5 %	52.100.000,00	5 %	65.100.000,00	5 %	70.100.000,00	5 %	74.100.000,00	5 %	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	200 UKM	200 UKM	368.118.200,00	200 UKM	195.750.000,00	200 UKM	245.500.000,00	300 UKM	285.500.000,00	300 UKM	300.000.000,00	300 UKM	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	1 %	1 %	410.363.768,00	1 %	115.921.458,00	1 %	215.000.000,00	1 %	225.000.000,00	1 %	250.000.000,00	1 %	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	0	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	5 %	0 %	0,00	0 %	0,00	5 %	25.000.000,00	5 %	25.000.000,00	5 %	25.000.000,00	5 %	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap target investasi	1200000 000 00 Rp	1300000 000000 Rp	4.883.050.20 0,00	1400000 000000 Rp	4.924.500.00 0,00	1500000 000000 Rp	5.383.562.84 6,00	1600000 000000 Rp	5.429.261.25 0,00	1700000 000000 Rp	5.935.378.03 8,00	1700000 000000 Rp	0,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	1	0	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	11.85 %	16 %	157.500.000, 00	19 %	162.000.000, 00	21 %	165.000.000, 00	21 %	167.000.000, 00	23 %	170.000.000, 00	23 %	0,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	1	0	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	0 %	0 %	287.000.000, 00	12.50 %	337.700.000, 00	14.29 %	371.470.000, 00	16.67 %	355.377.000, 00	20 %	478.760.700, 00	20 %	0,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	1	0	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100 %	100 %	55.000.000,0 0	100 %	55.000.000,0 0	100 %	55.000.000,0 0	100 %	55.000.000,0 0	100 %	55.000.000,0 0	100 %	0,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	35 %	38 %	883.899.975,00	40 %	928.094.974,00	45 %	974.499.722,00	48 %	1.023.224.709,00	50 %	1.074.385.944,00	50 %	0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	40 %	45 %	2.370.951.873,00	57 %	2.489.499.404,00	63 %	2.613.974.374,00	67 %	2.744.673.093,00	75 %	2.881.906.748,00	77 %	0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	25 %	30 %	210.000.000,00	35 %	220.500.000,00	40 %	231.525.000,00	45 %	243.101.250,00	50 %	255.256.313,00	55 %	0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	2	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	2	0	PROGRAM PENYELENGGAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	2	0	PROGRAM PENYELENGGAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	25 %	50 %	19.763.384,00	75 %	20.751.553,00	85 %	21.789.130,00	95 %	22.878.587,00	100 %	24.022.516,00	100 %	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	4 %	4 %	217.049.000,00	4 %	233.152.000,00	4 %	244.809.000,00	4 %	257.050.000,00	4 %	269.902.000,00	4 %	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	50,00 %	50,00 %	247.270.000,00	62,50 %	260.000.000,00	75,00 %	275.000.000,00	87,50 %	290.000.000,00	100,00 %	320.000.000,00	100,00 %	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	2	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	0 %	0,50 %	0,00	0,50 %	50.000.000,00	0,50 %	55.000.000,00	0,50 %	60.000.000,00	0,50 %	65.000.000,00	0,50 %	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	2	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	1,49 %	2,99 %	210.000.000,00	3,08 %	220.000.000,00	3,17 %	231.525.000,00	3,28 %	243.102.000,00	1,69 %	255.257.000,00	14,21 %	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	2	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	2	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	0 %	2 %	4.489.000.000,00	5 %	65.000.000,00	9 %	68.250.000,00	14 %	71.663.000,00	20 %	75.246.000,00	20 %	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	2	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	35 %	50 %	722.021.475,00	60 %	758.122.549,00	75 %	796.028.676,00	85 %	835.830.110,00	100 %	877.621.615,00	100 %	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN
2	2	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	85 %	85 %	18.900.000,00	90 %	19.845.000,00	95 %	20.837.250,00	95 %	21.879.113,00	100 %	22.973.068,00	100 %	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	2 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	2 4	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatny a tata kelola arsip dinamis dan statis	65 %	70 %	56.022.750,0 0	80 %	58.823.888,0 0	90 %	61.765.082,0 0	90 %	64.853.336,0 0	100 %	68.096.003,0 0	100 %	0,0 0	DINAS PERPUSTAKAA N
2	2 4	0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatny a perlindungan dan penyelamata n arsip sesuai NSPK	50 %	60 %	12.600.000,0 0	70 %	13.230.000,0 0	85 %	13.891.500,0 0	90 %	14.586.075,0 0	100 %	15.315.379,0 0	100 %	0,0 0	DINAS PERPUSTAKAA N
2	2 4	0 4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Meningkatny a akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	65 %	70 %	12.600.000,0 0	75 %	12.230.000,0 0	80 %	13.891.500,0 0	90 %	14.586.075,0 0	95 %	15.315.379,0 0	100 %	0,0 0	DINAS PERPUSTAKAA N
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	2 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	2 5	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.500 Ton	22.000 Ton	3.808.191.99 3,00	22.500 Ton	3.808.191.99 3,00	23.250 Ton	3.903.396.79 2,00	23.750 Ton	4.098.566.63 2,00	25.000 Ton	4.242.016.46 4,00	25.000 Ton	0,0 0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2 5	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	50.500 Ton	51.000 Ton	5.484.789.20 0,00	51.500 Ton	5.484.789.20 0,00	51.700 Ton	5.649.332.87 6,00	52.200 Ton	5.847.059.52 6,00	53.000 Ton	5.993.236.01 4,00	53.000 Ton	0,0 0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2 5	0 5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan kawasan konservasi (Persentase)	0,17 %	0,17 %	0,00	0,17 %	0,00	0,18 %	0,00	0,18 %	0,00	0,20 %	0,00	0,20 %	0,0 0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	2 5	0 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Tahun)	60 Kg/Tahun	61 Kg/Tahun	1.195.827.60 0,00	62 Kg/Tahun	1.195.827.60 0,00	63 Kg/Tahun	1.213.765.01 4,00	64 Kg/Tahun	1.244.109.13 9,00	65 Kg/Tahun	1.312.535.14 2,00	65 Kg/Tahun	0,0 0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			HASIL PERIKANAN															
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	4 %	5 %	3.655.366.00 0,00	5 %	3.838.114.00 0,00	5 %	4.030.041.00 0,00	5 %	4.231.543.00 0,00	5 %	4.443.120.00 0,00	5 %	0,0 0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	14,29 %	12,5 %	2.349.474.00 0,00	11,11 %	2.466.948.00 0,00	10,00 %	2.590.295.00 0,00	9,09 %	2.719.810.00 0,00	8,33 %	2.855.800.00 0,00	17,4 %	0,0 0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	0 %	20 %	3.499.000,00	20 %	28.715.000,0 0	20 %	30.150.000,0 0	20 %	31.658.000,0 0	20 %	33.241.000,0 0	100 %	0,0 0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	0,017 %	0,0267 %	348.667.000,00	0,035 %	366.100.000,00	0,044 %	384.405.000,00	0,053 %	403.625.000,00	0,062 %	423.806.000,00	0,221 %	0,0 0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi hortikultura	2 %	3 %	15.000.000,0 0	3 %	15.000.000,0 0	3 %	15.000.000,0 0	3 %	15.000.000,0 0	3 %	15.000.000,0 0	3 %	0,0 0	DINAS PERTANIAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi komoditas peternakan	1 %	1 %	15.000.000,00	1 %	15.000.000,00	1 %	15.000.000,00	1 %	15.000.000,00	1 %	15.000.000,00	1 %	0,00	DINAS PERTANIAN
3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi tanaman pangan	4 %	5 %	15.000.000,00	5 %	15.000.000,00	5 %	15.000.000,00	5 %	15.000.000,00	5 %	15.000.000,00	5 %	0,00	DINAS PERTANIAN
3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	DINAS PERTANIAN
3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	0 %	14.29 %	10.000.000,00	28.57 %	10.000.000,00	42.86 %	10.000.000,00	57.14 %	10.000.000,00	71.43 %	10.000.000,00	71.43 %	0,00	DINAS PERTANIAN
3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	50 %	50 %	142.855.216,00	50 %	142.855.216,00	50 %	142.855.216,00	50 %	142.855.216,00	50 %	142.855.216,00	50 %	0,00	DINAS PERTANIAN
3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan bencana pertanian	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	DINAS PERTANIAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	DINAS PERTANIAN
3	2	0	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	DINAS PERTANIAN
3	2	0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	60 %	61 %	584.550.000,00	67 %	10.000.000,00	75 %	10.000.000,00	90 %	10.000.000,00	96 %	10.000.000,00	96 %	0,00	DINAS PERTANIAN
3	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															
3	2	0	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah rumah tangga penerima listrik yang bersumber dari pembangkit EBT	0 KK	0 KK	40.035.000,00	0 KK	50.000.000,00	0 KK	60.000.000,00	0 KK	70.000.000,00	0 KK	80.000.000,00	0 KK	0,00	DINAS PERDAGANGAN
3	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	3	0	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	DINAS PERDAGANGAN
3	3	0	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	100 %	100 %	1.875.664.300,00	100 %	2.067.390.000,00	100 %	2.274.129.000,00	100 %	2.501.541.900,00	100 %	2.751.696.090,00	100 %	0,00	DINAS PERDAGANGAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	3	0	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	2,73 %	2,73 %	200.485.400,00	2,73 %	220.000.000,00	2,73 %	242.000.000,00	2,73 %	266.200.000,00	2,73 %	292.820.000,00	2,73 %	0,00	DINAS PERDAGANGAN
3	3	0	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	0 Angka	0 Angka	0,00	0 Angka	0,00	0 Angka	0,00	0 Angka	0,00	0 Angka	0,00	0 Angka	0,00	DINAS PERDAGANGAN
3	3	0	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen	5 %	5 %	13.316.350,00	6 %	13.316.350,00	7 %	15.000.000,00	8 %	17.500.000,00	9 %	19.000.000,00	9 %	0,00	DINAS PERDAGANGAN
3	3	0	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	DINAS PERDAGANGAN
3	3	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	3	0	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	3 %	3 %	599.003.892,00	4 %	700.000.000,00	5 %	800.000.000,00	6 %	900.000.000,00	7 %	950.000.000,00	7 %	0,00	DINAS PERDAGANGAN
3	3	0	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	0 %	0 %	0,00	5 %	20.000.000,00	6 %	30.000.000,00	7 %	40.000.000,00	8 %	50.000.000,00	8 %	0,00	DINAS PERDAGANGAN
3	3	0	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6.469.530,00	1 Kegiatan	90.000.000,00	1 Kegiatan	12.000.000,00	1 Kegiatan	15.000.000,00	1 Kegiatan	18.000.000,00	1 Kegiatan	0,00	DINAS PERDAGANGAN
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	0	1	SEKRETARIAT DAERAH															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	Meningkatny a kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	1.364.988.17 7,00	100 %	1.433.237.58 6,00	100 %	1.504.899.46 5,00	100 %	1.580.144.43 8,00	100 %	1.659.151.66 0,00	100 %	0,0 0	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatny a kualitas kebijakan pengelolaan perekonomia n dan pembanguna n	100 %	100 %	672.879.082, 00	100 %	706.523.036, 00	100 %	741.849.188, 00	100 %	778.941.647, 00	100 %	817.888.730, 00	100 %	0,0 0	SEKRETARIAT DAERAH	
4	02		SEKRETARIAT DPRD																
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatny a kualitas penganggara n dan pengawasan	100 %	100 %	179.785.044, 00	100 %	188.774.296, 00	100 %	198.213.011, 00	100 %	208.123.661, 00	100 %	218.529.844, 00	100 %	0,0 0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatny a kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	100 %	100 %	13.336.568.8 56,0 0	100 %	14.003.397.2 99,0 0	100 %	14.703.567.1 64,0 0	100 %	15.438.745.5 22,0 0	100 %	16.210.682.7 99,0 0	100 %	0,0 0	SEKRETARIAT DPRD	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	01		PERENCANAAN																
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatny a kualitas perencanaan pembanguna n daerah	100 %	100 %	650.680.328, 00	100 %	683.214.344, 00	100 %	717.375.061, 00	100 %	753.243.814, 00	100 %	790.906.005, 00	100 %	0,0 0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5	0103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	100 %	336.615.038,00	100 %	353.455.789,00	100 %	371.118.079,00	100 %	389.673.983,00	100 %	409.157.682,00	100 %	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	0103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	100 %	339.454.461,00	100 %	356.427.184,00	100 %	374.248.543,00	100 %	392.960.971,00	100 %	412.609.019,00	100 %	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	0103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	100 %	100 %	314.248.725,00	100 %	329.961.161,00	100 %	346.459.219,00	100 %	363.782.180,00	100 %	381.971.289,00	100 %	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	02		KEUANGAN															
5	0202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	27.32 %	27.32 %	315.238.707.000,00	30 %	331.000.643.000,00	30 %	347.550.676.000,00	30 %	364.928.210.000,00	30 %	383.174.621.000,00	30 %	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	0202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	35 %	35 %	491.378.295.000,00	35 %	501.205.861.000,00	35 %	511.229.979.000,00	35 %	521.454.579.000,00	35 %	531.883.671.000,00	35 %	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	0202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan keuangan tepat waktu	6.67 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penurunan SILPA	-36 %	-36 %	43.144.547.000,00	-25 %	19.179.148.000,00	-25 %	14.384.361.000,00	-25 %	10.788.271.000,00	-25 %	8.091.203.000,00	-25 %	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	51.73 %	52 %	726.287.917.000,00	50 %	737.182.236.000,00	50 %	751.925.881.000,00	50 %	766.964.399.000,00	50 %	782.303.687.000,00	50 %	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penambahan nilai aset tetap	3.60 %	3.75 %	114.935.000.000,00	3.75 %	117.667.000.000,00	3.75 %	122.079.000.000,00	3.75 %	126.657.000.000,00	3.75 %	131.407.000.000,00	3.75 %	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	12 Laporan	12 Laporan	1.295.676.220,00	12 Laporan	1.295.676.220,00	12 Laporan	1.425.243.842,00	12 Laporan	1.567.768.226,00	12 Laporan	1.724.545.048,00	12 Laporan	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	50 %	350.000.000,00	65 %	450.000.000,00	85 %	600.000.000,00	85 %	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	0		KEPEGAWAIAN															
5	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	89 %	89 %	522.374.300,00	89 %	547.374.300,00	90 %	577.374.300,00	90 %	675.000.000,00	90 %	675.000.000,00	90 %	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	100 %	100 %	94.919.849,00	100 %	127.660.531,00	100 %	160.788.248,00	100 %	181.946.650,00	100 %	244.189.458,00	100 %	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	75 %	75 %	100.000.000,00	75 %	150.000.000,00	75 %	200.000.000,00	75 %	200.000.000,00	75 %	200.000.000,00	75 %	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola pengembangan karis ASN	80 %	80 %	1.437.519.500,00	80 %	1.437.519.500,00	80 %	1.437.519.500,00	80 %	1.437.519.500,00	80 %	1.500.000.000,00	80 %	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, pengembangan dan evaluasi	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	65 %	66 %	1.966.544.738,00	67 %	2.064.871.974,00	68 %	2.168.115.573,00	69 %	2.276.521.352,00	70 %	2.390.347.419,00	70 %	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	80 %	80 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	80 %	80 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya kajian yang termanfaatkannya sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	100 %	100 %	32.508.000,00	100 %	34.133.400,00	100 %	35.840.070,00	100 %	37.632.074,00	100 %	39.513.677,00	100 %	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	100 %	100 %	257.640.075,00	100 %	270.522.079,00	100 %	284.048.183,00	100 %	298.250.592,00	100 %	313.163.121,00	100 %	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya kajian yang termanfaatkannya sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembang	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				an potensi unggulan														
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya kajian yang termanfaatkann sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01		INSPEKTORAT DAERAH															
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	79,84 %	82 %	3.067.350.000	83 %	3.220.000.000	84 %	3.388.000.000	85 %	3.550.000.000	85 %	3.728.000.000	85 %	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	2 level	3 level	316.878.350	3 level	328.000.000	3 level	338.750.000	3 level	350.000.000	3 level	381.750.000	3 level	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publiik	100 %	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAWANGKOAN	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LEMBEAN TIMUR	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publiik	100 %	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN PINELENG	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	53.000.000,00	100 %	53.000.000,00	100 %	53.000.000,00	100 %	53.000.000,00	100 %	53.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN MANDOLANG	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAKAS BARAT	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publiik	100 %	100 %	77.942.950,0	100 %	77.942.950,0	100 %	77.942.950,0	100 %	77.942.950,0	100 %	77.942.950,0	100 %	0,0	KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	19.000.000,0	100 %	19.000.000,0	100 %	19.000.000,0	100 %	19.000.000,0	100 %	19.000.000,0	100 %	0,0	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publiik	100 %	100 %	27.500.000,0	100 %	27.500.000,0	100 %	27.500.000,0	100 %	27.500.000,0	100 %	27.500.000,0	100 %	0,0	KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	17.500.000,0	100 %	17.500.000,0	100 %	17.500.000,0	100 %	17.500.000,0	100 %	17.500.000,0	100 %	0,0	KECAMATAN TOMBULU
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	22.000.000,0	100 %	22.000.000,0	100 %	22.000.000,0	100 %	22.000.000,0	100 %	22.000.000,0	100 %	0,0	KECAMATAN TONDANO SELATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	24.000.000,0	100 %	24.000.000,0	100 %	24.000.000,0	100 %	24.000.000,0	100 %	24.000.000,0	100 %	0,0	KECAMATAN TONDANO BARAT
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	15.000.000,0	100 %	15.000.000,0	100 %	15.000.000,0	100 %	15.000.000,0	100 %	15.000.000,0	100 %	0,0	KECAMATAN TONDANO UTARA
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	48.652.950,0	100 %	48.652.950,0	100 %	48.652.950,0	100 %	48.652.950,0	100 %	48.652.950,0	100 %	0,0	KECAMATAN TOMPASO
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	77.942.950,0	100 %	77.942.950,0	100 %	77.942.950,0	100 %	77.942.950,0	100 %	77.942.950,0	100 %	0,0	KECAMATAN TOMBARIRI
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	20.000.000,0	100 %	20.000.000,0	100 %	20.000.000,0	100 %	20.000.000,0	100 %	20.000.000,0	100 %	0,0	KECAMATAN KAKAS

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publiik	100 %	100 %	20.000.000,0	100 %	20.000.000,0	100 %	20.000.000,0	100 %	20.000.000,0	100 %	20.000.000,0	100 %	0,0	KECAMATAN ERIS
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	11.500.000,0	100 %	11.500.000,0	100 %	11.500.000,0	100 %	11.500.000,0	100 %	11.500.000,0	100 %	0,0	KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publiik	100 %	100 %	17.500.000,0	100 %	17.500.000,0	100 %	17.500.000,0	100 %	17.500.000,0	100 %	17.500.000,0	100 %	0,0	KECAMATAN TOMPASO BARAT
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	15.000.000,0	100 %	15.000.000,0	100 %	15.000.000,0	100 %	15.000.000,0	100 %	15.000.000,0	100 %	0,0	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	14.000.000,0	100 %	14.000.000,0	100 %	14.000.000,0	100 %	14.000.000,0	100 %	14.000.000,0	100 %	0,0	KECAMATAN LANGOWAN UTARA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	19.000.000,00	100 %	19.000.000,00	100 %	19.000.000,00	100 %	19.000.000,00	100 %	19.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN REMBOKEN
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	32.500.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KOMBI
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	17.000.000,00	100 %	17.000.000,00	100 %	17.000.000,00	100 %	17.000.000,00	100 %	17.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN SONDER
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	23.500.000,00	100 %	23.500.000,00	100 %	23.500.000,00	100 %	23.500.000,00	100 %	23.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO TIMUR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	8.500.000,00	100 %	8.500.000,00	100 %	8.500.000,00	100 %	8.500.000,00	100 %	8.500.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR	
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN KAKAS BARAT	
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN ERIS	
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR	
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	14.000.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN LEMBEAN TIMUR	
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN TOMBARIRI	
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMPASO
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	265.000.000,00	100 %	265.000.000,00	100 %	265.000.000,00	100 %	265.000.000,00	100 %	265.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO UTARA
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	17.500.000,00	100 %	17.500.000,00	100 %	17.500.000,00	100 %	17.500.000,00	100 %	17.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMPASO BARAT
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	199.050.000,00	100 %	199.050.000,00	100 %	199.050.000,00	100 %	199.050.000,00	100 %	199.050.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO TIMUR
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	1.200.000.000,00	100 %	1.200.000.000,00	100 %	1.200.000.000,00	100 %	1.200.000.000,00	100 %	1.200.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	2.176.000.000,00	100 %	2.176.000.000,00	100 %	2.176.000.000,00	100 %	2.176.000.000,00	100 %	2.176.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO SELATAN
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	1.778.140.600,00	100 %	1.778.140.600,00	100 %	1.778.140.600,00	100 %	1.778.140.600,00	100 %	1.778.140.600,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO BARAT

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	53.000.000,00	100 %	53.000.000,00	100 %	53.000.000,00	100 %	53.000.000,00	100 %	53.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN MANDOLANG
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	15.600.000,00	100 %	15.600.000,00	100 %	15.600.000,00	100 %	15.600.000,00	100 %	15.600.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN PINELENG
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	22.500.000,00	100 %	22.500.000,00	100 %	22.500.000,00	100 %	22.500.000,00	100 %	22.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KOMBI
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMBULU
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN REMBOKEN
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	850.500.000,00	100 %	850.500.000,00	100 %	850.500.000,00	100 %	850.500.000,00	100 %	850.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA
7	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN SONDER

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN UTARA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 100	100 100	15.000.000,00	100 100	15.000.000,00	100 100	15.000.000,00	100 100	15.000.000,00	100 100	15.000.000,00	100 100	0,00	KECAMATAN KAKAS
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	9.500.000,00	100 %	9.500.000,00	100 %	9.500.000,00	100 %	9.500.000,00	100 %	9.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas perkembangan desa dan kelurahan	100 %	100 %	11.500.000,00	100 %	11.500.000,00	100 %	11.500.000,00	100 %	11.500.000,00	100 %	11.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN ERIS
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	19.000.000,00	100 %	19.000.000,00	100 %	19.000.000,00	100 %	19.000.000,00	100 %	19.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN SONDER
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO TIMUR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	22.450.000,00	100 %	22.450.000,00	100 %	22.450.000,00	100 %	22.450.000,00	100 %	22.450.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN MANDOLANG
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	32.500.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMBARIRI
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	9.500.000,00	100 %	9.500.000,00	100 %	9.500.000,00	100 %	9.500.000,00	100 %	9.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO BARAT
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAKAS
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	14.000.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LEMBEAN TIMUR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMPASO BARAT
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO UTARA
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	32.500.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMPASO

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN PINELENG
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	12.500.000,00	100 %	12.500.000,00	100 %	12.500.000,00	100 %	12.500.000,00	100 %	12.500.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN TONDANO SELATAN
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN KAKAS BARAT
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	13.000.000,00	100 %	13.000.000,00	100 %	13.000.000,00	100 %	13.000.000,00	100 %	13.000.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN TONDANO TIMUR
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	10 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN REMBOKEN
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN TOMBULU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.500.000,00	100 %	4.500.000,00	100 %	4.500.000,00	100 %	4.500.000,00	100 %	4.500.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN LANGOWAN UTARA
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN KOMBI
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	11.500.000,00	100 %	11.500.000,00	100 %	11.500.000,00	100 %	1.150.000.01500.000,00	100 %	11.500.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	12.500.000,00	100 %	12.500.000,00	100 %	12.500.000,00	100 %	12.500.000,00	100 %	12.500.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	500.000,00	100 %	500.000,00	100 %	500.000,00	100 %	500.000,00	100 %	500.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN KAWANGKOAN
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,0	KECAMATAN TONDANO UTARA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	0105	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	2.000.000,00	100 %	2.000.000,00	100 %	2.000.000,00	100 %	2.000.000,00	100 %	2.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAKAS BARAT	
7	0105	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN UTARA	
7	0105	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.500.000,00	100 %	5.500.000,00	100 %	5.500.000,00	100 %	5.500.000,00	100 %	5.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO TIMUR	
7	0105	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMPASO BARAT	
7	0105	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO UTARA	
7	0105	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN REMBOKEN	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	16.600.000,00	100 %	16.600.000,00	100 %	16.600.000,00	100 %	16.600.000,00	100 %	16.600.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN MANDOLANG
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	12.500.000,00	100 %	12.500.000,00	100 %	12.500.000,00	100 %	12.500.000,00	100 %	12.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN ERIS
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	250.000,00	100 %	250.000,00	100 %	250.000,00	100 %	250.000,00	100 %	250.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	0105		PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KOMBI	
7	0105		PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN	
7	0105		PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAWANGKOAN	
7	0105		PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	2.500.000,00	100 %	2.500.000,00	100 %	2.500.000,00	100 %	2.500.000,00	100 %	2.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO SELATAN	
7	0105		PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO BARAT	
7	0105		PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMBULU	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMPASO
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	3.500.000,00	100 %	3.500.000,00	100 %	3.500.000,00	100 %	3.500.000,00	100 %	3.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN SONDER
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	6.000.000,00	100 %	6.000.000,00	100 %	6.000.000,00	100 %	6.000.000,00	100 %	6.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LEMBEAN TIMUR
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	2.000.000,00	100 %	2.000.000,00	100 %	2.000.000,00	100 %	2.000.000,00	100 %	2.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAKAS
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggar aan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMBARIRI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	12.572.724,00	100 %	12.572.724,00	100 %	12.572.724,00	100 %	12.572.724,00	100 %	12.572.724,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMPASO BARAT
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMBULU
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.000.000,00	100 %	4.000.000,00	100 %	4.000.000,00	100 %	4.000.000,00	100 %	4.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN BARAT
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LEMBEAN TIMUR
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN ERIS

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO UTARA
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO TIMUR
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAKAS
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAKAS BARAT
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMBARIRI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.500.000,00	100 %	5.500.000,00	100 %	5.500.000,00	100 %	5.500.000,00	100 %	5.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.498.350,00	100 %	5.498.350,00	100 %	5.498.350,00	100 %	5.498.350,00	100 %	5.498.350,00	100 %	0,00	KECAMATAN MANDOLANG	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN REMBOKEN	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN PINELENG	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN SONDER	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO UTARA
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TONDANO TIMUR
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KAWANGKOAN
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN TOMPASO
7	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	7.500.000,00	100 %	7.500.000,00	100 %	7.500.000,00	100 %	7.500.000,00	100 %	7.500.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN KOMBI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	3.000.000,00	100 %	0,00	KECAMATAN LANGOWAN UTARA	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	98 %	98 %	709.322.639,00	98 %	744.788.770,00	99 %	782.028.209,00	99 %	821.129.619,00	99 %	862.186.100,00	99 %	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	96 %	96 %	1.504.001.919,00	97 %	1.579.202.015,00	97 %	1.658.162.116,00	98 %	1.741.070.221,00	98 %	1.828.123.733,00	98 %	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	97 %	97 %	529.404.136,00	97 %	555.874.343,00	98 %	583.668.060,00	98 %	612.851.463,00	98 %	643.494.036,00	98 %	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Menigkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	97 %	97 %	6.159.428.646,00	97 %	6.467.400.078,00	98 %	6.790.770.082,00	98 %	7.130.308.586,00	98 %	7.486.824.016,00	98 %	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	97 %	97 % 3.582.092.010,00	97 % 3.761.196.611,00	98 % 3.949.256.441,00	99 % 4.146.719.263,00	99 % 4.354.055.226,00	99 % 0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
X			NON URUSAN															
X	XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	B Predikat	B Predikat 0,00	B Predikat 0,00	B Predikat 0,00	B Predikat 0,00	B Predikat 0,00	B Predikat 0,00	B Predikat 0,00	B Predikat 0,00	B Predikat 0,00	B Predikat 0,00	B Predikat 0,00	KECAMATAN TONDANO UTARA	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	c PREDIKAT	cc PREDIKAT 2.809.238.095,00	cc PREDIKAT 2.809.238.095,00	cc PREDIKAT 2.809.238.095,00	cc PREDIKAT 2.809.238.095,00	cc PREDIKAT 2.809.238.095,00	cc PREDIKAT 2.809.238.095,00	cc PREDIKAT 2.809.238.095,00	cc PREDIKAT 2.809.238.095,00	cc PREDIKAT 2.809.238.095,00	cc PREDIKAT 2.809.238.095,00	cc PREDIKAT 0,00	KECAMATAN KAWANGKOAN	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	c PREDIKAT	cc PREDIKAT 3.559.727.118,00	cc PREDIKAT 3.559.727.118,00	cc PREDIKAT 3.559.727.118,00	cc PREDIKAT 3.559.727.118,00	cc PREDIKAT 3.559.727.118,00	cc PREDIKAT 3.559.727.118,00	cc PREDIKAT 3.559.727.118,00	cc PREDIKAT 3.559.727.118,00	cc PREDIKAT 3.559.727.118,00	cc PREDIKAT 3.559.727.118,00	cc PREDIKAT 0,00	KECAMATAN TONDANO SELATAN	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	c PREDIKAT	CC PREDIKAT 1.766.947.555,00	CC PREDIKAT 1.766.947.555,00	CC PREDIKAT 1.766.947.555,00	CC PREDIKAT 1.766.947.555,00	CC PREDIKAT 1.766.947.555,00	cc PREDIKAT 1.766.947.555,00	CC PREDIKAT 1.766.947.555,00	CC PREDIKAT 1.766.947.555,00	CC PREDIKAT 1.766.947.555,00	CC PREDIKAT 1.766.947.555,00	CC PREDIKAT 0,00	KECAMATAN LANGOWAN SELATAN	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	SAKIP	B Predikat	B Predikat 3.866.062.580,00	B Predikat 3.866.062.580,00	B Predikat 3.866.062.580,00	B Predikat 3.866.062.580,00	B Predikat 3.866.062.580,00	B Predikat 3.866.062.580,00	B Predikat 3.866.062.580,00	B Predikat 3.866.062.580,00	B Predikat 3.866.062.580,00	B Predikat 3.866.062.580,00	B Predikat 0,00	KECAMATAN TONDANO UTARA	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			DAERAH KABUPATEN/KOT A															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	SAKIP	C PREDIKAT	CC PRE DIKAT	1.717.964.73 0,00	CC PRE DIKAT	1.717.964.73 0,00	CC PRE DIKAT	1.717.964.73 0,00	CC PRE DIKAT	1.717.964.73 0,00	CC PRE DIKAT	1.717.964.73 0,00	CC PRE DIKAT	0,0 0	KECAMATAN LEMBEAN TIMUR
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	SAK IP	C Predikat	CC Predika t	1.789.412.20 8,00	CC Predika t	1.789.412.20 8,00	CC Predika t	1.789.412.20 8,00	CC Predikat	1.789.412.20 8,00	B Predika t	1.789.412.20 8,00	B Predikat	0,0 0	KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	SAK IP	D PREDIKAT	C PREDIKAT	1.604.429.70 5,00	C PREDIKAT	1.604.429.70 5,00	C PREDIKAT	1.604.429.70 5,00	C PREDIKAT	1.604.429.70 5,00	C PREDIKAT	1.604.429.70 5,00	C PREDIKAT	0,0 0	KECAMATAN KAKAS BARAT
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	SAK IP	C PREDIKAT	CC PRE DIKAT	1.503.037.86 0,00	CC PRE DIKAT	1.503.037.86 0,00	CC PRE DIKAT	1.503.037.86 0,00	CC PRE DIKAT	1.503.037.86 0,00	CC PRE DIKAT	1.503.037.86 0,00	CC PRE DIKAT	0,0 0	KECAMATAN PINELENG
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	SAK IP	C PREDIKAT	CC PRE DIKAT	1.435.960.99 4,00	CC PRE DIKAT	1.435.960.99 4,00	CC PRE DIKAT	1.435.960.99 4,00	CC PRE DIKAT	1.435.960.99 4,00	CC PRE DIKAT	1.435.960.99 4,00	CC PRE DIKAT	0,0 0	KECAMATAN ERIS
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SAK IP	CC Predikat	B Predika t	4.421.357.70 9,00	B Predika t	4.421.357.70 9,00	B Predika t	4.421.357.70 9,00	B Predikat	4.421.357.70 9,00	B Predika t	4.421.357.70 9,00	B Predikat	0,0 0	KECAMATAN TONDANO TIMUR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			KABUPATEN/KOT A															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	SAK IP	C PREDIKA T	CC PRE DIKAT	2.022.497.65 0,00	CC PRE DIKAT	2.022.497.65 0,00	CC PRE DIKAT	2.022.497.65 0,00	CC PRE DIKAT	2.022.497.65 0,00	CC PRE DIKAT	2.022.497.65 0,00	CC PRE DIKAT	0,0 0	KECAMATAN REMBOKEN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	SAK IP	C Predikat	CC Predika t	1.348.527.40 0,00	cc Predika t	1.348.527.40 0,00	cc Predika t	1.348.527.40 0,00	CC Predikat	1.348.527.40 0,00	B Predika t	1.348.527.40 0,00	B Predikat	0,0 0	KECAMATAN TOMPASO BARAT
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	SAKIP	C PREDIKA T	CC PRE DIKAT	1.322.939.40 0,00	CC PRE DIKAT	1.322.939.40 0,00	CC PRE DIKAT	1.322.939.40 0,00	CC PRE DIKAT	1.322.939.40 0,00	CC PRE DIKAT	1.322.939.40 0,00	CC PRE DIKAT	0,0 0	KECAMATAN MANDOLANG
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	BB Predikat	BB Predika t	3.108.618.80 0,00	BB Predika t	3.188.200.00 0,00	BB Predika t	3.347.610.00 0,00	B Predikat	3.514.990.50 0,00	B Predika t	3.690.740.02 5,00	B Predikat	0,0 0	DINAS TENAGA KERJA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	6.271.830.49 4,00	B Predika t	6.585.422.01 9,00	B Predika t	6.914.693.12 0,00	BB Predikat	7.260.427.77 6,00	BB Predika t	7.623.449.16 4,00	BB Predikat	0,0 0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	50.378.601.4 10,0 0	B Predika t	52.897.531.4 80,0 0	B Predika t	55.542.408.0 54,0 0	BB Predikat	58.319.528.4 57,0 0	BB Predika t	61.235.504.8 80,0 0	BB Predikat	0,0 0	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			KABUPATEN/KOT A															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	36.488.103.6 67,0 0	B Predika t	38.312.508.8 50,0 0	B Predika t	40.228.134.2 93,0 0	BB Predikat	42.239.541.0 08,0 0	BB Predika t	44.351.518.0 58,0 0	BB Predikat	0,0 0	SEKRETARIAT DPRD
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	BB Predikat	BB Predika t	13.332.727.4 10	BB Predika t	13.999.463.5 53	BB Predika t	14.696.720.0 00	BB Predikat	15.434.090.0 00	BB Predika t	16.205.090.0 00	BB Predikat	0,0 0	INSPEKTORAT DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	5.196.184.59 3	B Predika t	4.153.023.05 8	B Predika t	4.360.674.21 1,00	BB Predikat	4.578.707.92 1,00	BB Predika t	4.807.643.31 7,00	BB Predikat	0,0 0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	4.255.232.27 6,00	B Predika t	4.306.951.97 9,00	B Predika t	4.522.299.57 8,00	BB Predikat	4.748.414.55 7,00	BB Predika t	4.985.835.28 5,00	BB Predikat	0,0 0	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	5.793.556.25 0,00	B Predika t	6.083.234.06 2,00	B Predika t	6.387.395.76 6,00	BB Predikat	6.706.765.55 4,00	BB Predika t	7.042.103.83 2,00	BB Predikat	0,0 0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	3.471.617.20 8	B Predika t	3.645.191.38 3	B Predika t	3.827.457.98 3	BB Predikat	4.018.830.95 4	BB Predika t	4.219.772.67 8	BB Predikat	0,0 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			KABUPATEN/KOT A															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	3.228.405.47 9,00	B Predika t	3.389.825.75 3,00	B Predika t	3.559.317.04 1,00	BB Predikat	3.737.282.89 3,00	BB Predika t	3.924.147.03 8,00	BB Predikat	0,0 0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	3.771.350.09 7,00	B Predika t	3.959.917.60 2,00	B Predika t	4.157.913.48 2,00	BB Predikat	4.365.809.15 6,00	BB Predika t	4.584.099.61 4,00	BB Predikat	0,0 0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	BB Predikat	BB Predika t	4.205.555.47 1,00	BB Predika t	4.415.833.24 5,00	BB Predika t	4.636.624.90 7,00	BB Predikat	4.868.456.15 2,00	BB Predika t	5.111.878.96 0,00	BB Predikat	0,0 0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	325.308.805. 059, 00	B Predika t	341.574.245. 312, 00	B Predika t	358.652.957. 578, 00	BB Predikat	376.585.605. 456, 00	BB Predika t	395.414.885. 729, 00	BB Predikat	0,0 0	DINAS PENDIDIKAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	82.052.574.4 92,0 0	B Predika t	86.155.203.2 17,0 0	B Predika t	90.462.963.3 77,0 0	BB Predikat	94.986.111.5 46,0 0	BB Predika t	99.735.417.1 24,0 0	BB Predikat	0,0 0	DINAS KESEHATAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	2.140.143.81 1,00	B Predika t	2.247.151.00 2,00	B Predika t	2.359.508.55 2,00	BB Predikat	2.477.483.97 9,00	BB Predika t	2.601.358.17 8,00	BB Predikat	0,0 0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			KABUPATEN/KOT A															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	3.506.313.08 8,00	B Predika t	3.681.628.74 2,00	B Predika t	3.865.710.17 9,00	BB Predikat	4.058.995.68 8,00	BB Predika t	4.261.945.47 3,00	BB Predikat	0,0 0	DINAS PERPUSTAKAA N
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	3.013.792.42 5,00	B Predika t	3.164.482.04 6,00	B Predika t	3.322.706.14 9,00	BB Predikat	3.488.841.45 6,00	BB Predika t	3.663.283.52 9,00	BB Predikat	0,0 0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	3.983.917.52 5	B Predika t	3.113.727.05 2,00	B Predika t	3.269.413.40 5,00	BB Predikat	3.432.884.07 5,00	BB Predika t	3.604.528.27 9,00	BB Predikat	0,0 0	DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	4.156.789.57 6,00	B Predika t	3.892.523.32 0,00	B Predika t	4.087.149.48 6,00	BB Predikat	4.291.506.96 0,00	BB Predika t	4.506.082.30 8,00	BB Predikat	0,0 0	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	4.234.707.19 8,00	B Predika t	4.446.442.55 8,00	B Predika t	4.374.367.80 5,00	BB Predikat	4.607.806.04 0,00	BB Predika t	4.852.916.18 6,00	BB Predikat	0,0 0	DINAS SOSIAL
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	2.976.222.08 9,00	B Predika t	2.976.222.08 9,00	B Predika t	2.976.222.08 9,00	BB Predikat	2.976.222.08 9,00	BB Predika t	2.976.222.08 9,00	BB Predikat	0,0 0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			KABUPATEN/KOT A															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	3.076.591.14 0,00	B Predika t	3.655.950.00 0,00	B Predika t	3.755.950.00 0,00	B Predikat	3.825.958.00 0,00	BB Predika t	3.925.975.00 0,00	BB Predikat	0,0 0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	3.064.798.69 9,00	B Predika t	3.371.278.56 8,00	B Predika t	3.708.406.42 4,00	B Predikat	4.079.247.06 6,00	BB Predika t	4.487.177.77 2,00	BB Predikat	0,0 0	DINAS PANGAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predika t	15.357.044.6 44,0 0	B Predika t	15.357.044.6 44,0 0	B Predika t	15.357.044.6 44,0 0	B Predikat	15.357.044.6 44,0 0	B Predika t	15.357.044.6 44,0 0	B Predikat	0,0 0	DINAS PERTANIAN
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	BB Predika t	19.762.695.0 05,0 0	BB Predika t	19.762.695.0 05,0 0	BB Predika t	19.762.695.0 05,0 0	BB Predikat	19.762.695.0 05,0 0	BB Predika t	19.762.695.0 05,0 0	BB Predikat	0,0 0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	B Predikat	BB Predika t	15.621.547.3 74,0 0	BB Predika t	15.621.547.3 74,0 0	BB Predika t	17.183.702.1 11,0 0	BB Predikat	18.902.072.3 22,0 0	BB Predika t	20.792.279.5 54,0 0	BB Predikat	0,0 0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	B Predikat	BB Predika t	3.826.640.37 8,00	BB Predika t	3.922.306.38 7,00	BB Predika t	4.020.364.04 7,00	BB Predikat	4.120.873.14 8,00	BB Predika t	4.223.894.97 6,00	BB Predikat	0,0 0	DINAS PERDAGANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			KABUPATEN/KOTA															
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	CC Predikat	B Predikat	5.390.700.000,00	B Predikat	8.006.599.760.000,00	B Predikat	8.332.546.273.000,00	A Predikat	8.749.660.611.650,00	A Predikat	6.750.604.733,00	A Predikat	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	3.000.000.000,00	B+ Nilai	3.400.000.000,00	B+ Nilai	3.800.000.000,00	A Nilai	4.000.000.000,00	A Nilai	4.500.000.000,00	A Nilai	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C+ Nilai	B Nilai	3.002.891.031,00	B Nilai	3.002.891.031,00	B+ Nilai	3.002.891.031,00	B+ Nilai	3.002.891.031,00	A Nilai	3.002.891.031,00	A Nilai	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C Nilai	C+ Nilai	6.192.363.536,00	C+ Nilai	6.192.363.536,00	B Nilai	6.192.363.536,00	B Nilai	6.192.363.536,00	B+ Nilai	6.192.363.536,00	B+ Nilai	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B+ Nilai	B+ Nilai	3.666.612.151,00	A Nilai	3.666.612.151,00	A Nilai	3.666.612.151,00	A+ Nilai	3.666.612.151,00	A+ Nilai	3.666.612.151,00	A+ Nilai	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	B+ Nilai	3.576.284.000,00	B+ Nilai	3.647.810.000,00	A Nilai	3.720.000.000,00	A Nilai	3.800.000.000,00	A+ Nilai	3.882.000.000,00	A+ Nilai	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			KABUPATEN/KOTA															
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	C PREDIKAT	CC PRE DIKAT	3.871.718.550,00	CC PRE DIKAT	3.871.718.550,00	CC PRE DIKAT	3.871.718.550,00	CC PRE DIKAT	3.871.718.550,00	CC PRE DIKAT	3.871.718.550,00	CC PRE DIKAT	0,00	KECAMATAN TONDANO BARAT
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	CC Predikat	C Predikat	1.273.094.400,00	C Predikat	1.273.094.400,00	C Predikat	1.273.094.400,00	C Predikat	1.273.094.400,00	B Predikat	1.273.094.400,00	B Predikat	0,00	KECAMATAN TOMPASO
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	C Predikat	CC Predikat	1.900.687.445,00	CC Predikat	1.900.687.445,00	CC Predikat	1.900.687.445,00	CC Predikat	1.900.687.445,00	B Predikat	1.900.687.445,00	B Predikat	0,00	KECAMATAN KAKAS
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	C Predikat	CC Predikat	1.061.806.400,00	CC Predikat	1.061.806.400,00	CC Predikat	1.061.806.400,00	CC Predikat	1.061.806.400,00	CC Predikat	1.061.806.400,00	CC Predikat	0,00	KECAMATAN TOMBARIRI
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	C PREDIKAT	CC PRE DIKAT	1.061.806.400,00	CC PRE DIKAT	1.061.806.400,00	CC PRE DIKAT	1.061.806.400,00	CC PRE DIKAT	1.061.806.400,00	CC PRE DIKAT	1.061.806.400,00	CC PRE DIKAT	0,00	KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR
X	X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SAKIP	C Predikat	CC Predikat	1.817.970.900,00	CC Predikat	1.817.970.900,00	CC Predikat	1.817.970.900,00	CC Predikat	1.817.970.900,00	B Predikat	1.817.970.900,00	B Predikat	0,00	KECAMATAN KOMBI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			KABUPATEN/KOT A															
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	SAKIP	C Predikat	CC Predika t	1.445.340.42 6,00	CC Predika t	1.445.340.42 6,00	CC Predika t	1.445.340.42 6,00	CC Predikat	1.445.340.42 6,00	B Predika t	1.445.340.42 6,00	B Predikat	0,0 0	KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	SAKIP	c Predikat	CC Predika t	1.603.508.60 0,00	CC Predika t	1.603.508.60 0,00	CC Predika t	1.603.508.60 0,00	CC Predikat	1.603.508.60 0,00	B Predika t	1.603.508.60 0,00	B Predikat	0,0 0	KECAMATAN TOMBULU
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	SAKIP	C Predikat	CC Predika t	2.282.055.01 1,00	CC Predika t	2.282.055.01 1,00	CC Predika t	2.282.055.01 1,00	CC Predikat	2.282.055.01 1,00	B Predika t	2.282.055.01 1,00	B Predikat	0,0 0	KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	SAKIP	C Predikat	CC Predika t	0,00	C Predika t	0,00	C Predika t	0,00	C Predikat	0,00	B Predika t	0,00	B Predikat	0,0 0	KECAMATAN TONDANO TIMUR
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	SAKIP	C Predikat	CC Predika t	1.690.882.39 0,00	CC Predika t	1.690.882.39 0,00	CC Predika t	1.690.882.39 0,00	CC Predikat	1.690.882.39 0,00	B Predika t	1.690.882.39 0,00	B Predikat	0,0 0	KECAMATAN SONDER
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SAKIP	C Predikat	CC Predika t	1.412.253.38 0,00	CC Predika t	1.412.253.38 0,00	CC Predika t	1.412.253.38 0,00	CC Predikat	1.412.253.38 0,00	B Predika t	1.412.253.38 0,00	B Predikat	0,0 0	KECAMATAN LANGOWAN UTARA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Untuk mendukung sejumlah program prioritas sebagai unggulan pemerintah (program unggulan nasional) melalui program pembangunan Daerah sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel diatas, maka dukungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Program Unggulan Nasional

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
Dukungan Swasembada Pangan	Program Makanan Bergizi Gratis (Mbg)	Program 3 Juta Rumah	Koperasi Desa/Keluraan Merah Putih	Program Sekolah Rakyat	Pengendalian Inflasi Di Daerah	Pencegahan Stunsting Dan Kemiskinan Ekstream	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)		Dpupr

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
					Program Penyelenggaraan Jalan		Dpupr
		Program Pengembangan Perumahan					Dprkp
		Program Kawasan Permukiman					Dprkp
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dpupr
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dpupr
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaaj)		Dishub

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Perdagangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan							Dinas Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan						Dinas Pangan

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Pertanian
Program Pengendalian Keswan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					Program Pengendalian Keswan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian				Program Penyuluhan Pertanian		Pertanian
Program Perikanan Budidaya	Program Perikanan Budidaya		Program Perikanan Budidaya		Program Perikanan Budidaya	Program Perikanan Budidaya	Dkp
Program Perikanan Tangkap	Program Perikanan Tangkap		Program Perikanan Tangkap		Program Perikanan Tangkap	Program Perikanan Tangkap	Dkp
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dkp
						Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Program Peningkatan Sumberdaya Manusia	Dinas Kesehatan
						Program Sediaan Farmasi , Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pupr
						Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pupr

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
						Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perkim
						Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
						Program Penanggulangan Bencana	Bpbd
						Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
						Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
						Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pppa
						Program Pemenuhan Hak Anak (Pha	Dinas Pppa
						Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan
						Program Pengelolaan Persampahan	Dlh
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dpmd
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dpmd
						Program Pengendalian Penduduk	Dppkb
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dppkb

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
						Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dppkb
						Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
						Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi Umkm
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi Umkm
						Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi Umkm

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dpmst
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dpmst
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kepemudaan Or
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dkp
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dkp

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan
						Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
						Progran Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
						Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
						Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
						Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
						Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
						Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
						Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
						Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
						Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
						Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
						Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
						Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program Unggulan Nasional							Instansi Pelaksana
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan Dan Perikanan
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diukur melalui indikator kinerja daerah sesuai sasaran yang ditetapkan. Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lebih tepatnya sebagai target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja daerah inilah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2025 sampai pada tahun 2030 yang adalah akhir periode masa jabatan.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama sebagai indikator yang terseleksi dari tujuan dan sasaran RPJMD, atau menjadi kinerja Bupati dan Wakil Bupati karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD yaitu tahun 2025-2029.

Penetapan Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan pencapaian sasaran strategis pembangunan jangka menengah sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati disajikan sebagaimana Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Minahasa
Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79.50 - 80,00	80,00 - 80,50	80,50 - 81.00	81.25 - 81,60	82,00-82,30	82.60 - 83.00
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,60 – 6,00	6,20 - 7,30	6,70 - 7,00	7,30 - 7,50	7,60 - 8,00	7,80 - 8,20
3	Pendapatan Per Kapita	Rp Juta	71.78	76.35	80.79	85.97	91.74	98.08
4	Rasio Gini	Angka	0,30 - 0,34	0,28 - 0,32	0,26 - 0,30	0,25 - 0,28	0,23 - 0,26	0,22 - 0,25
5	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.95	4.1 0	4.25	4.40	4.55	4.70
6	Angka Kemiskinan	Persen	6,40 – 6,35	6,36-6,01	6,02 - 5,39	5,40 - 4,77	4,78 - 4,15	4,78 - 4,15
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,90-6,50	6.40 – 6.00	5.90 – 5.50	5.40 – 5.00	4.90 – 4.50	4.90 – 4.50
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	67,00	67,50	68,00	68,50	69,00	70,00
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	B	B	BB	BB	BB	A

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	PDRB Sektor Pariwisata	Milyar RP	249.27	267.27	287.26	309.09	333.20	359.88
11	Nilai PDRB	Milyar Rp	25.488,76	27.246,23	28.962,46	30.960,50	33.189,31	35.644,95
12	Indeks Pencegahan Korupsi	Indeks	80	81	85	87	88	89
13	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3	3,5	4	4,5	5	5,5

Tabel 4.5 Indikator Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025 s.d 2030

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79.50 - 80,00	80,00 - 80,50	80,50 - 81.00	81.25 - 81,60	82,00-82,30	82.60 - 83.00
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,60 – 6,00	6,20 - 7,30	6,70 - 7,00	7,30 - 7,50	7,60 - 8,00	7,80 - 8,20
3	Pendapatan Per Kapita	Rp Juta	71.78	76.35	80.79	85.97	91.74	98.08
4	Rasio Gini	Angka	0,30 - 0,34	0,28 - 0,32	0,26 - 0,30	0,25 - 0,28	0,23 - 0,26	0,22 - 0,25
5	Angka Kemiskinan	Persen	6,40 – 6,35	6,36-6,01	6,02 - 5,39	5,40 - 4,77	4,78 - 4,15	4,78 - 4,15
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,90-6,50	6.40 – 6.00	5.90 – 5.50	5.40 – 5.00	4.90 – 4.50	4.90 – 4.50
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	67,00	67,50	68,00	68,50	69,00	70,00
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	54,9	58,34	61,78	65,21	68,65	65,05
	a. Kumulatif	Persen	14,66	15,4	16,13	16,86	17,6	18,33
	b. Tahunan	Persen	24,59	26,33	28,07	29,82	31,56	33,3
9	Kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	12,9	13	13,15	13,2	13,25	13,25

4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan sebagai alat mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator per aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, serta urusan yang diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja.

Target capaian indikator kinerja yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagai mana Tabel 4.6

Tabel 4.6 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025 s.d 2030

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	79,61	79,62	79,63	79,64	79,65	79,66	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	5.59	6,03	6,12	6,21	6,28	6,34	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	51.958.078,00	51.009.836,00	50.234.180,00	51.987.600,00	50.372.634,00	52.036.273,00	
4	Akses Rumah Tangga terhadap konsumsi air Minum	%	91,5	92	92,5	93	93,5	94	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	67,00	67,50	68,00	68,50	69,00	70,00	
6	Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0	0	5	8	12	15	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton/Tahun	46,500,00	50.000	54.000	59.000	63.000	66.500	
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan	%							

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Penuh pengumpulan Sampah								
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	54,9	58,34	61,78	65,21	68,65	65,05	
	Kumulatif	Persen	14,66	15,4	16,13	16,86	17,6	18,33	
	Tahunan	Persen	24,59	26,33	28,07	29,82	31,56	33,3	
10	Indeks Resiko Bencana	Angka	193,85	192	191	190	188	186	
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	31	33	35	37	39	41	
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,2	1,2	1,1	1	1	1	
13	Rasio Penduduk	%	103,31	103,06	102,80	102,56	102,30	102,04	
14	Kepadatan Penduduk	Orang/km	311,06	312,38	313,65	314,85	315,97	317,03	
15	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persen	89.40%	89.50%	89.60 %	89.70 %	89.80 %	89.90 %	
II ASPEK KESEJAKTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60 – 6,00	6,20 - 7,30	6,70 - 7,00	7,30 - 7,50	7,60 - 8,00	7,80 - 8,20	
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,40 – 6,35	6,36- 6,01	6,02 - 5,39	5,40 - 4,77	4,78 - 4,15	4,78 - 4,15	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	71.78	76.35	80.79	85.97	91.74	98.08	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,90- 6,50	6,40 – 6,00	5,90 – 5,50	5,40 – 5,00	4,90 – 4,50	4,90 – 4,50	
5	Indeks Gini	Angka	0,30 - 0,34	0,28 - 0,32	0,26 - 0,30	0,25 - 0,28	0,23 - 0,26	0,22 - 0,25	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79.50 - 80,00	80,00 - 80,50	80,50 - 81.00	81.25 - 81,60	82,00 - 82,30	82.60 - 83.00	Indeks Pembangunan Manusia Untuk Kab/Kota
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,35	75,5	75,6	75,7	75,75	75,8	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,4	0,5	0,7	0,75	0,79	0,8	
9	Prevalensi Stunting	%	19,20	19	18,20	17,5	16,70	15,2	Data SSGI/SKI (%)
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	14,2	14,25	14,27	14,3	14,33	14,35	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,5	10,75	10,85	11	11,25	11,5	
12	Angka Literasi/Numerasi	%	58,53	61,03	63,53	66,03	68,53	71,03	
	Persentase peserta didik SD yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi membaca	%	58,53	61,03	63,53	66,03	68,53	71,03	
	Persentase peserta didik SD yang mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi	%	52,77	55,67	58,57	61,47	64,37	67,27	
	Persentase peserta didik SMP yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi membaca	%	65,47	66,57	67,67	68,77	69,87	70,97	
	Persentase peserta didik SMP yang mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi	%	60,70	62,20	63,70	65,20	66,70	68,20	
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	66,8	67,8	68,8	69,8	70,8	71,8	
14	Indeks Literasi Digital	Angka	66,25	67,25	68,25	69,25	70,25	71,25	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	26.339	49.592	49.688	50.997	51.140	52.471	
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	8	8	9	9	9	9	
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	10,14	13,86	17,61	21,39	25,22	29,09	
18	Indeks Perlindungan Anak	Angka	65,06	65,64	67,77	68,66	68,87	69,34	
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	79,37	79,48	79,56	79,71	79,87	80	
20	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,357	0,355	0,353	0,351	0,349	0,345	
21	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,9	96,92	96,93	96,95	96,97	97	
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	35	38	40	45	48	50	
23	Persentase balita gizi buruk		8	7,5	7	6,5	5	4	
24	Angka partisipasi Angkatan Kerja	Orang	182.750	183.000	183.100	183.150	183.200	183.300	
25	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Orang	118.787	120.780	122.677	123.626	124.576	125.560	
26	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	65	66	67	67.5	68	68,5	

III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
1	Angka Ketergantungan	%	48,26	48,64	48,97	49,31	49,65	50,03	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	7.51	7.75	8	8.25	8.5	8.72	

3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0.96	0.98	1	1.25	1.5	1.74	
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%							
5	Rasio Kewirausahaan	%	45.85	46	47	48	49	50	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49,54	50,55	51	51,5	52	52,5	
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	> 40	> 55	> 60	> 65	> 65	> 65	
8	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	36	36	37	38	39	40	
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka							
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	4	4.5	5	5.5	5.75	6	
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	6,05	6,1	6,15	2,2	2,25	2,3	
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp.	41.31	41.40	41.45	41.50	41.65	41.75	
13	Ekspor Barang dan Jasa	Rp.	29.36	29.38	29.40	29.45	29.50	29.54	
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	65	67	70	73	75	77	
15	Rumah Tangga dengan Layanan Akses Hunian Layak	%	91	91	92	92	92	93	
16	Indeks Desa	Angka	188	190	192	194	196	198	
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.23	0.28	0.35	0.40	0.50	0.57	
18	Tingkat Inflasi	%	2.87	2.75	2.5	2.25	2	2	

IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	55,1	60	65	70	75	77	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,65	2,76	2,87	2,9	3	3,5	
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3	3,5	4	4,5	5	5,5	
4	Indeks Integrasi Nasional	Angka	70,25	72,45	75,63	80,05	82,5	85	
5	Presentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	
6	Presentase Capaian Aksi HAM	%							
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	7	7	8	8	9	9	
8	Indeks Rasa Aman	Angka	82	84	86	88	90	92	
9	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	82	84	86	88	90	92	
10	Indeks Daya Saing	Angka	3.95	4.1 0	4.25	4.40	4.55	4.70	

INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
1. Urusan Pendidikan								
Skor Literasi/Numerasi	%	58,53	61,03	63,53	66,03	68,53	71,03	
Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,5	10,75	10,85	11,00	11,25	11,5	
Rata- Rata Lama Sekolah	Tahun	14,20	14,25	14,27	14,30	14,33	14,35	
Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	82,44	85,41	88,38	91,35	93,9	96,44	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Persentase anak usia 4-15 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persen	99,58	99,84	100	100	100	100	
Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	100	100	100	100	100	100	
Indeks Pemerataan Guru	Angka	0,61	1,51	2,65	3,6	4,61	5,67	
Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	43,66	44,56	45,64	46,52	47,66	48,78	
Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	Persen	100	100	100	100	100	100	
Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Disesuaikan dengan konteks daerah	Persen	72	73	74	75	76	77	
2. Urusan Kesehatan								
Umur Harapan Hidup	Tahun	75,35	75,5	75,6	75,7	75,75	75,8	
Angka Kematian Ibu (AKI)	100.000/KH	123/100.000 KH	109/100.000 KH	97/100.000 KH	86/100.000 KH	77/100.000 KH	70/100.000 KH	
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	19,40	19	18,20	17,5	16,70	15,2	
Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	95	96	97	98	99	100	
Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	80	80	84	86	88	90	
Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	13	15	20	25	30	35	
Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Angka	0,0076	0,0077	0,0078	0,0079	0,008	0,0081	
Rasio Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	Angka	0,00181	0,00182	0,00183	0,00184	0,00185	0,00186	
Menurunkan insidensi TB per 100.000 penduduk	Persen	334,4	333	332	331	330	329	
Menurunkan insidensi HIV	Persen	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	75	80	85	90	93	95	
Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
Persentase FKTP sesuai standar	Persen	80	85	90	93	95	95	
Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	34.78	44	56	68	80	92	
Persentase ketersediaan obat esensial dan obat kebutuhan lainnya	Persen	80	82	84	86	88	90	
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	65	67	70	73	75	77	Ind. Tujuan
Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	63,24	58,47	64,57	65,26	65,97	66,69	Ind. Sasaran
Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persen	51,14 %	53,47 %	55,80 %	58,13 %	60,46 %	62,79 %	
Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen	39.35%	41.27%	46.31%	52.49%	59.24%	66.36 %	
Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah	Persen	86,41 %	87,28 %	88,15 %	89,03 %	89,92 %	90,82 %	
Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	63,43 %	63.43%	64.09%	64.75%	65.42%	66,10 %	
Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	71.26%	72.76%	72,76 %	73,54 %	74,28 %	75,02 %	
Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	55,0 %	55,50 %	56,0 %	56,50 %	57,0 %	57,50 %	
Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persen	73,36 %	74,09 %	74,83 %	75,58 %	76,34 %	77,10 %	
Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	80,04 %	80,84 %	81,65 %	82,47 %	83 %	84,12 %	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	70 %	70 %	71,00 %	71,71 %	72,43 %	73,15 %	
Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	62.43%	62.70%	62,99 %	63,31 %	63,67 %	64,06 %	
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	41,61 %	42,03 %	42,45 %	42,87 %	43,30 %	43,73 %	
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Provinsi	Persen	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	18%	24%	25%	25%	25%	26%	Ind. Tujuan
1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	
2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persen	1,65 %	0 %	3,3 %	3,4 %	3,5 %	3,6 %	
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	50 %	45 %	45 %	45 %	46 %	46 %	
Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persen	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	82	84	86	88	90	92	
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	
Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	100	100	100	100	
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	
Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100	100	100	100	100	100	
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Desa	60	116	167	205	237	270	
Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	
Urusan Sosial								
Indeks Kesejahteraan Sosial								
1. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	persen	100	100	100	100	100	100	
2. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	persen	100	100	100	100	100	100	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
3. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	persen	100	100	100	100	100	100	
4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	persen	10	30	50	70	90	100	27 Org
5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	persen	30	50	60	70	80	100	40 LKS
1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	orang	4	4	4	4	4	4	
2. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	persen	100	100	100	100	100	100	
1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	100	100	100	
2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	100	100	100	
3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	65	70	75	80	85	85	
4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	65	70	75	80	85	85	
5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi	persen	70	75	75	80	85	85	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Kebutuhan Dasarnya								
6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas								
7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia								
8. Indeks Peranan Sosia								
1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	persen	100	100	100	100	100	100	
2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	persen	10	20	20	25	30	30	
3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	persen	70	75	80	85	90	95	
Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	persen	100	100	100	100	100	100	
Urusan Tenaga Kerja								
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	131, 2	132, 2	133, 2	135, 2	137, 2	139, 2	
Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	%	90	90	90	90	90	90	
Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	75	75	75	75	75	75	
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	70	70	70	70	70	70	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	5.573	5.635	5.851	6.131	6.251	6.335	
Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	4.821	4.951	5.321	5.533	5.723	5.931	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Ratio	96,90.	96,92.	96,93.	96,95.	96,97.	97	
2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,357	0,355	0,353	0,351	0,349,	0,3455	
3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,06	65,64	67,77	68,66	68,87	69,34	
1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	15, 61 Persen	20 Persen	25 Persen	30 Persen	36 Persen	40 Persen	
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		49,54	50,55	51	51.5	52	52.5	
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	0,04 Persen	0,05 Persen	0,07 Persen	0,07 Persen	0,04 Persen	0,04 Persen	
Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	10 Persen	15 Persen	17 Persen	20 Persen	22 Persen	25 Persen	
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	60	63	67	69	72	75	
1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	75 Persen	76 Persen	78 Persen	80 Persen	82 Persen	85 Persen	
2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persen	70 Persen	72 Persen	72 Persen	73 Persen	75 Persen	77 Persen	
Urusan Pangan								

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		79,61	79,62	79,63	79,64	79,65	79,66	
Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	10 Persen	50 Persen	65 Persen	75 Persen	90 Persen	100 Persen	
Skor Pola Pangan Harapan	Angka	93	94	95	96	97	100	
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	18 Persen	15 Persen	14 Persen	12 Persen	10 Persen	10 Persen	
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	40 Persen	50 Persen	60 Persen	70 Persen	80 Persen	100 Persen	
urusan lingkungan hidup								
Indeks kualitas Lingkunagn Hidup (IKLH)	Indeks	66,16	66,16	66,2	66,24	66,28	66,32	Ind. Tujua n
Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1. Indeks Kualitas Air	Indeks	57,16 Indeks	57,26 Indeks	57,36 Indeks	57,46 Indeks	57,56 ndeks	57,66 Indeks	
2. Indeks Kualitas Tutupan lahan	Indeks	35,88 Indeks	35,98 Indeks	36,08 Indeks	36,18 Indeks	36,28 Indeks	36,28 Indeks	
3. Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,13 Indeks	91,23 Indeks	91,33 Indeks	91,43 Indeks	91,53 Indeks	91,63 Indeks	
Persentase RTH	Persen	50 %	52 %	53 %	0 %	0 %	0 %	
Persentase limbah B3 yang terkelola	Persen	52 %	53 %	54 %	53 %	54 %	54 %	
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Perse n	0 %	0 %	53 %	60 %	61 %	62 %	
Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan	Persen	0 %	59 %	60 %	61 %	62 %	62 %	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
pengelolaan lingkungan hidup								
Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	46 Indeks	46.50 Indeks	47 Indeks	47.50 Indeks	48 Indeks	48.50 Indeks	
urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil								
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Nilai /Angka	A 91	A 92,02	A 92,50	A 92,99	A 93,00	A 93,50	A 93,99
1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	3,21	30	40	50	60	70	
2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	39,95	62	70	75	80	85	
1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	
2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	96,2	99,5	100	100	100	100	
3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	66,92	100	100	100	100	100	
4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	83,65	100	100	100	100	100	
Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	60	65	70	75	80	85	
Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	
Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Jumlah	100	100	100	100	100	100	
urusan pemberdayaan masyarakat dan desa								
Indeks desa	Desa	188	190	192	194	196	198	Berdasarkan

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
								Indeks Desa (Indeks Desa Membangun telah diubah menjadi Indeks Desa mulai Tahun 2025); Base data IDM 2024 , Desa Mandiri 187
Persentase fasilitas penataan desa	%	61	66,51	72,02	77,53	83,03	88,54	
Persentase fasilitas kerjasama desa	%	33,48	34,36	35,24	36,12	37	37,88	
1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	73,45	74,48	75,52	76,55	77,58	78,62	Aparatur Desa = 3556 BPD = 1285 Seluruhnya = 4841
2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100	100	100	100	100	100	
1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	100	100	100	100	100	Fasilitasi LKD (PKK) 270 Desa/ Kelurahan
2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	Fasilitasi Kader Pembangunan Manusia (KPM) 227

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
								Desa/ 1 Kader
urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana								
Indeks pembangunan keluarga (iBangga)		79,37	79,48	79,56	79,71	79,87	80,00	
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)		1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		24,1	24	23	22	20	19	
1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)		61,1	61,7	61,9	62,3	62,7	63	
2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)		18,5	16	14	10	8	7,4	
Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga		62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	
urusan perhubungan								
Rasio Konektivitas	Rasio	0,3	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	Ind. Tujua n
Konektivitas darat		0,29 Nilai	0,30 Nilai	0,31 Nilai	0,32 Nilai	0,33 Nilai	0,34 Nilai	
Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	0.024 %	0.026 %	0.028 %	0.030 %	0.032 %	0.034 %	
Konektivitas Laut		0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	0 Nilai	
urusan komunikasi dan informatika								
Nilai indeks transformasi digital pilar pemerintah		6,05	6,10	6,15	6,20	6,25	6,30	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	70%	78%	83%	88%	92%	95%	
indeks SPBE	Nilai	2,65	2,76	2,87	2,9	3	3,5	
Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah								
Kontribusi UMKM terhadap PDRB								
Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	12	15	18	21	23	25	
Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	10	12	15	17	20	25	
Persentase koperasi aktif	Persen	36,2	40,2	44,2	48,3	52,3	56,3	
Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Persen	15	18	22	25	30	35	
Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	7	9	11	14	18	22	
1. Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	5	7	9	11	13	15	
2. Pertumbuhan wirausaha	Unit Usaha	125	125	125	125	125	125	
Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	UKM	5	5	5	5	5	5	
Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Persen	15	15	15	20	20	20	
urusan penanaman modal								
Persentase peningkatan investasi	%	76,47	82,35	88,23	94,12	100,00	100,00	
Realisasi total terhadap target investasi	Rp	130.000.000.	140.000.000.	150.000.000.	160.000.000.	170.000.000.	#####	
Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	%	16	18	20	22	24	24	100

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	16,36	18,00	19,80	21,78	24,05	24,05	99,99
Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	0,00%	12,50 %	14,29 %	16,67 %	20,00 %	0,00%	
Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	20	20	20	20	20	20	100
Persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti	%	20	20	20	20	20	20	100
urusan kepemudaan dan olahraga								
1. Indeks pembangunan pemuda (IPP)	%	35	38	40	45	48	50	
2. Indeks partisipasi olahraga	%	40	45	55	63	70	75	
rasio wirausaha pemuda	%	30	35	38	40	45	50	
Persentase atlet yang masuk pelatnas	%	10	20	23	26	38	40	
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	30	35	40	45	48	50	
urusan statistik								
Indeks pembangunan statistik (IPS)		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Indeks pembangunan ststistik (IPS)		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
urusan persandian								
Indeks SPBE (terkait keamanan)		2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2	
Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah		60	60	60	65	65	70	
urusan kebudayaan								
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	10,14	13,88	17,61	21,39	25,22	29,09	Ind. Tujuan
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	Pers en	0.539 %	0.547 %	0.556 %	0.564 %	0.573 %	0.581 %	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Pengembangan Kebudayaan								
Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	50,00 %	62,50 %	75 %	87,5 %	100 %	100 %	
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	0 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %	
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan	Persen	3.64 %	7.27 %	10.91 %	12.73 %	14.55 %	18.18 %	
Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	5.20 %	8.86 %	12.52 %	8.91 %	16.21 %	19.88 %	
Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persen	0 %	2 %	5 %	9 %	14 %	20 %	
urusan perpustakaan								
Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM)	Angka	66,80	67,80	68,80	69,80	70,80	71,80	
Indeks Literasi Digital	Angka	66,25	67,25	68,25	69,25	70,25	71,25	
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	68.2	70.2	72.2	74.2	76.2	78.2	
Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki		-	-	-	-	-	-	
Persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang perpustakaan		50.25	52.25	56.25	58.25	60.25	63.25	
urusan kearsipan								
Indeks hasil pengawasan kearsipan pada ruang lingkup pemerintahan daerah	Persen	30	40	45	50	55	60	
Tingkat ketersediaan arsip	Persen	25	40	45	45	70	75	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Persen	30	35	40	50	70	75	
Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persen	10	10	10	10	10	10	
Persentase SDM bidang kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	50	50	75	75	90	100	
urusan kelautan dan perikanan								
1. Nilai tukar nelayan (NTN)	NTP	106	107	108	109	110	111	
2. Nilai tukar pembudidayaan perikanan (NTPi)	NTPi	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,55	
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	12,76	12,95	13,13	14,37	14,51	14,85	
Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	21000	21500	22000	22500	23000	24000	
Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	50500	51000	51500	52000	52500	53000	
Luasan kawasan konservasi	Ha	15	15	15,5	15,5	15,8	16	
Angka konsumsi ikan	Kg/Perkapita	59	60	61	62	63	64	
urusan pariwisata								
Rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan, minum	Rasio	0,9801	0,99869	1,01726	1,03582	1,05439	1,05439	Ind. Tujua n
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	8,97	9,29	9,65	10,04	10,47	10,94	
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	4 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	
Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	Persen	5.5 %	6 %	6.5 %	7 %	7.5 %	8 %	
Tingkat hunian Akomodasi	Persen	32.79 %	33.61 %	34.45 %	35.31 %	36.19 %	37.10 %	
Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	61.54 %	69.23 %	76.92 %	85 %	92.31 %	100,00 %	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Pers en	0 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Pers en	26.017%	26.28 %	26.41 %	26.54 %	26.67 %	26.80 %	
urusan pertanian								
Nilai tukar petani (NTP)	%	116	117	118	119	120	122	
1. Peningkatan produksi tanaman pangan	%	5	5	5	5	5	5	
2. Peningkatan produksi hortikultura	%	3	3	3	3	3	3	
3. Peningkatan produksi komoditas perternakan	%	1	1	1	1	1	1	
Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	0	0	5173	0	0	0	
1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	50	50	50	50	50	50	
2. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Verteriner)	%	28,57	42,86	57,14	71,43	78,57	85,71	
1. Persentase penanganan bencana pertanian		0	0	0	0	0	0	
2. Persentase penangan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		0	0	0	0	0	0	
Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan		0	0	0	0	0	0	
1. Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	67	75	90	96	96	96	
1. Peningkatan produksi tanaman pangan	%	5	5	5	5	5	5	
2. Peningkatan produksi hortikultura	%	3	3	3	3	3	3	
3. Peningkatan produksi komoditas perternakan	%	1	1	1	1	1	1	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	0	0	5173	0	0	0	
1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	50	50	50	50	50	50	
2. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Verteriner)	%	28,57	42,86	57,14	71,43	78,57	85,71	
1. Persentase penanganan bencana pertanian		0	0	0	0	0	0	
2. Persentase penangan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		0	0	0	0	0	0	
Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan		0	0	0	0	0	0	
1. Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	67	75	90	96	96	96	
2. Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi		0	0	0	0	0	0	
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
1. Porsi EBT dalam Bauran Energi								
2. Rasio Elektrifikasi								
1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota								
2. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota								
1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah								
2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR								

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT								
2. Porsi EBT dalam Bauran Energi								
Rasio Elektrifikasi								
Urusan Perdagangan								
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	6,53	6,54	6,55	6,56	6,57	6,57	
Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	
Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya								
Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	80	80	80	80	80	80	
Urusan Perindustrian								
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	4,27	4,28	4,29	4,30	4,31	4,31	
Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	5	6	7	8	10	10	
Unsur Sekretariat Daerah								
Indeks Reformasi Birokrasi		B	B	BB	BB	BB	A	
Indeks Kematangan Organisasi								
1. Efektivitas Kerja Sama Daerah								
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan								

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	
Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	%	75	80	85	90	95	100	
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	95	95	95	95	95	95	
Tingkat Kematangan UKPBJ	%	67	70	73	75	78	80	
Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan								
Disesuaikan dengan konteks daerah								
Disesuaikan dengan konteks daerah								
Disesuaikan dengan konteks daerah								
Disesuaikan dengan konteks daerah								
Unsur Sekretariat DPRD								
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekertariat DPRD	Presentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Presentase	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
2.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Presentase	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan	Presentase	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Unsur Perencanaan								
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	70	70	75	80	80	85	
1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	
2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	&	85%	85%	85%	90%	90%	90%	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	
Unsur Keuangan								
Opini BPK Atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD		≥35	≥35	≥35	≥35	≥35	≥35	
2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		27.32	≥30	≥30	≥30	≥30	≥30	
1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		52	50	50	50	50	50	
2. Persentase Penurunan SILPA		-36	-36	-25	-25	-25	-25	
Persentase laporan keuangan tepat waktu		100	100	100	100	100	100	
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9,04%	10,06 %	11,08 %	12,09 %	14,01 %	15,03 %	
Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Kali	4	4	4	4	4	4	
Unsur Kepegawaian								
Indeks Profesionalitas ASN	Angka	82.80	82.85	82.90	82.95	83.00	83.55	
Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	89	89	89	90	90	90	
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	75	75	75	75	75	75	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persen	80	80	80	80	80	80	
Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	
Unsur Pendidikan dan Pelatihan								
Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Angka	32.60	32.62	32.64	32.66	32.68	33.00	
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persen	65	66	67	68	69	70	
Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	80	80	80	80	80	80	
Unsur Penelitian dan Pengembangan								
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		≥30	≥30	≥35	≥30	≥35	≥35	
Persentase rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan		75%	75%	75%	75%	75%	75%	
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam pengembangan Potensi Unggulan yang termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		75%	75%	75%	75%	75%	75%	
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah		75%	75%	75%	75%	75%	75%	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Persentase Fasilitas Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah		75%	75%	75%	75%	75%	75%	
Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan		75%	75%	75%	75%	75%	75%	
Persentase Kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah		75%	75%	75%	75%	75%	75%	
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah		75%	75%	75%	75%	75%	75%	
Persentase fasilitas , pembinaan , bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		75%	75%	75%	75%	75%	75%	
Unsur Pengawasan								
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	LEVEL	2	3	3	3	3	3	
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	79,84	81	82	83	84	85	
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	LEVEL	2	3	3	3	3	3	
Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	LEVEL	2	3	3	3	3	3	
Unsur Pemerintahan Umum		98	98	99	99	99	99	
Indeks Demokrasi Indonesia		7	7	8	8	9	9	
Indeks Harmonisasi Indonesia								
Indeks Reformasi Hukum	Angka	55,1	60	65	70	75	77	80
Indeks Pelayanan Publik	Angka	3	3,5	4	4,5	5	5,5	

Indikator	Satuan	TARGET						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		98	98	98	99	99	99	
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		96	96	97	97	98	98	
Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif		97	97	97	98	98	98	
Persentase kebijakan di bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan.		97	97	97	98	98	98	
Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan		97	97	97	98	99	99	

BAB V

PENUTUP

Setiap jenis pembangunan tunduk pada prinsip keberlanjutan. Karena itu, dokumen perencanaannya perlu menjamin pengejawantahan prinsip keberlanjutan tersebut. Tak terkecuali dokumen jangka menengah ini, RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029. Namun, keberlanjutan pembangunan Kabupaten Minahasa tidak bisa diasumsikan akan terlaksana secara alamiah. Eksistensi RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 menjadi tanda maujud kehendak pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di kabupaten ini. Dokumen perencanaan ini tidak lepas dari hulunya, yaitu RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2029. Perencanaan ini tak lain adalah rencana pencapaian Tahap I RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045.

Bagian penutup ini hendak mendeskripsikan tiga pilar strategis yang akan menjamin keberlanjutan putaran gerigi roda dokumen perencanaan ini. tiga pilar tersebut adalah kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Subbagian ini mengakomodasi *highlights*/garis-garis besar substansial yang menentukan dan menjadi struktur dasar dari maksud dan tujuan dokumen perencanaan ini.

1. Dokumen ini adalah tanda maujud dan strategis dari upaya pemerintah daerah untuk mencapai target perencanaan Tahap I RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2045.
2. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas, strategi dan arah kebijakan, serta penahapan tahunan untuk mencapai target tahun akhir (2029) dan tahun peralihan/*bridging year* (2030).
3. Visi Kabupaten Minahasa 2025-2029, yakni “MINAHASA DAERAH PARIWISATA YANG MAJU DAN SEJAHTERA”, teroperasionalisasi dalam 3 (tiga) Misi, 3 (tiga) Tujuan dengan 4 (empat) indikator tujuan, 9 (sembilan) Sasaran dengan 14 (empat belas) indikator sasaran, 9 (sembilan) strategi, dan 9 (sembilan) Arah Kebijakan, dan 8 (delapan) Program Prioritas dan 17 (tujuh belas) Program Unggulan Pemerintah Daerah serta 45 Kegiatan Prioritas.
4. Bab IV kemudian memberi gambaran tentang keseluruhan program perangkat daerah tahun 2025-2029 yang didukung dengan total pagu indikatif, bab ini juga mengakumulasi total Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Minahasa yang berjumlah 13 indikator; total Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berjumlah 68 indikator; dan Indikator Kinerja Kunci yang berjumlah 296 indikator.

5.2. Kaidah Pelaksanaan RPJMD

Posisi RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 ini secara strategis mengejawantahkan Tahap I RPJPD Kabupaten Minahasa 2025-2029. Selaras dengan semangat transformasi dalam dokumen RPJPD, dokumen ini seyogianya menjadi strategi transformatif menciptakan landas transformasi yang kokoh bagi implementasi Tahap II (2030-2034).

Pilar kedua yang mengawal perwujudan keberlanjutan pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa tak lain adalah kaidah pelaksanaan.

5.2.1 Sintesis Perencanaan dan Pendanaan

Berbasis alur logis pembangunan, Kerangka Kerja Logis (KKL) sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan diimplementasi secara *mutatis mutandis* ke dalam RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif. Pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan;
- b. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah;
- c. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital tujuan pembangunan berkelanjutan serta kebencanaan;
- d. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Keterukuran alur logis ini menemukan bentuknya dalam indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Indikator-indikator tersebut pada gilirannya dikarakterisasi oleh kriteria: *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant dan Time-Bound* (SMART). Tujuan karakterisasi ini tak lain adalah untuk memastikan kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen-dokumen lainnya di level nasional dan level daerah. Namun, karakteristik ini tidak menampik dan

memarginalisasi karakteristik internal/bawaan kewilayahan masing-masing daerah.

Mengikuti skema nasional dan provinsi, pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 mengasumsikan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Inovasi cakupan dan sumber pendanaan pembangunan daerah perlu melebarkan bentangan sayapnya hingga menjadi penumbra bagi jenis-jenis pendanaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah. Identifikasi, inisiasi dan tata kelola pendanaan pembangunan daerah ini perlu dilaksanakan secara lebih inovatif, integratif, tepat sasaran, dan memenuhi asas-asas yuridis.

Di sisi lain, peningkatan jangkauan bentangan cakupan sumber pendanaan perlu diimbangi secara serius dengan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan di Kabupaten Minahasa. Hal ini tunduk pada semangat efisiensi demi efektivitas yang mumpuni. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, segala instrumen yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia menjadi alternatif yang sah sebagai sumber pendanaan.

5.2.2. Kampanye Publik

Sosialisasi dan komunikasi publik tentang semangat pembangunan berkelanjutan, derap transformasi, sasaran prioritas dan target-targetnya mengabdikan pada perwujudan prinsip-prinsip pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Namun, pemilihan term “kampanye” memberikan daya dorong yang lebih gigih. Ranah pertama yang dapat disentuh dengan komunikasi dan sosialisasi publik yang baik adalah pemahaman masyarakat dan semua lapisan birokrasi. Namun, dua ranah krusial, kehendak untuk berpartisipasi aktif dan aktualisasi tindakan partisipasi, hanya bisa disentuh oleh strategi kampanye. Strategi kampanye diharapkan menggerakkan partisipasi berkualitas dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Minahasa.

Prinsip dasar komunikasi publik, dalam wujud kampanye, terdiri tiga hal pokok, yaitu: (1) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (2) penyediaan informasi yang akurat transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah serta (3) keterlibatan semua kelompok

masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Mengikuti gema yang bergaung dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, kampanye publik RPJMD Kabupaten Minahasa 2025-2029 mengusung prinsip “tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*)”. Di sisi lain, demi identifikasi dan aktualisasi pemaknaan setiap jenis partisipasi dalam pembangunan daerah ini, prinsip dasar lain yang dirujuk adalah partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Kampanye publik ini menyasar seluruh pemangku kepentingan, secara khusus masyarakat Kabupaten Minahasa. Strategi kampanye ini bersifat berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan sampai musyawarah di tingkat kabupaten untuk membangun keluasan dan kedalaman pemahaman dan partisipasi. Secara pragmatis, titik sasar kampanye ini juga meliputi masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia di lingkungan Kabupaten Minahasa.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Berdasarkan tata cara di atas, subbab pengendalian dan evaluasi ini menjelaskan aturan mulai dari proses perumusan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah ini.

5.3.1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan RPJMD

1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) mencakup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
2. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
3. Pengendalian tersebut di atas dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan: visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah; visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah; kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota lainnya; program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah kabupaten/kota lainnya; strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah; dan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
5. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW daerah, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.
6. Kepala BAPPELITBANGDA melakukan dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan dalam hal evaluasi dari hasil

pemantauan dan supervisi, kepala BAPPELITBANGDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

7. Kepala BAPPELITBANGDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.
8. Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

5.3.2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD

1. Pengendalian pembangunan dan evaluasi pelaksanaan rencana Daerah meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
3. Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
4. Pengendalian pelaksanaan tersebut di atas dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
5. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD harus dapat menjamin: program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
6. Hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.
7. Kepala BAPPELITBANGDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi, kepala BAPPELITBANGDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
8. Kepala BAPPELITBANGDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.

5.3.3. Evaluasi terhadap Hasil RPJMD

1. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.
2. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah juga meliputi Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah.
4. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
5. Penilaian hasil RPJMD digunakan untuk mengetahui: realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah Daerah provinsi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
6. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten.
7. Kepala BAPPELITBANGDA melaksanakan evaluasi hasil RPJMD. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan dalam hal evaluasi, Kepala BAPPELITBANGDA melakukan perbaikan/penyempurnaan.
8. Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
9. Kepala BAPPELITBANGDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
10. Bupati menyampaikan laporan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA Provinsi.

Demikian, perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa 2025-2029 diharapkan mencipta nexus positif dan progresif bagi pencapaian visi dan misi Provinsi Sulawesi Utara 2025-2029 dan tentunya aktualisasi visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia 2025-2029. Kabupaten Minahasa dengan segala potensinya berusaha untuk menjadi bandul pengungkit capaian sasaran visi dan indikator makro Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional.

Dengan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa berkehendak menjadi aktor bukan spektator demi penjaminan kesejahteraan semesta masyarakat Kabupaten Minahasa.

BUPATI MINAHASA,

ROBBY DONDOKAMBEY